

JALAN TERJAL MENUJU PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS & BERKEADILAN

BUNGA RAMPAI
BERITA PENDIDIKAN

2019-2023





Jalan Terjal Menuju Pendidikan yang Berkualitas & Berkeadilan

Bunga Rampai Berita Pendidikan
2019-2023

Hak Cipta**Dilindungi Undang-undang**

Penafian: Buku ini dipersiapkan oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah dan merata sesuai dengan amanat UU. No. 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini ke depan.

**JALAN TERJAL MENUJU PENDIDIKAN
YANG BERKUALITAS & BERKEADILAN
BUNGA RAMPAI BERITA PENDIDIKAN
2019-2023**

Penyusun :

Abdullah Ubaid

Ari Hardianto

Layout dan Cover:

Potti

Penerbit

JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA (JPPI)

Cetakan pertama, 2024

Isi buku ini menggunakan huruf Georgia, Caveat Brush,
dan Noto Sans Symbols 11-14pt

Halaman romawi dan halaman latin xiv, 467 hlm Ukuran buku 17,6 x 25 cm

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami, Tim Penyusun, mempersembahkan buku “Jalan Terjal Menuju Pendidikan yang Berkualitas & Berkeadilan: Bunga Rampai Berita Pendidikan 2019-2023”. Buku ini hadir sebagai upaya untuk mendokumentasikan jejak perjuangan panjang dan penuh tantangan yang dilalui oleh Sekretariat Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Seknas JPPI) dalam mengadvokasi pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

Buku ini merangkum berbagai pemberitaan yang telah dipublikasikan di media selama periode 2019 hingga 2023. Melalui kumpulan berita ini, kami berharap pembaca dapat merasakan dinamika dan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam upaya memperjuangkan hak pendidikan bagi semua kalangan, terutama kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Setiap artikel yang dipilih menggambarkan berbagai sisi dari perjuangan advokasi, mulai dari tantangan kebijakan, kondisi lapangan, hingga respons masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Advokasi dan kampanye yang dilakukan Seknas JPPI bertujuan untuk mendorong perubahan kebijakan yang berorientasi pada keadilan pendidikan, meningkatkan kesadaran publik, serta menguatkan kerja sama antara berbagai pihak. Kami meyakini bahwa pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan merupakan hak fundamental yang harus diperoleh setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Perjuangan ini, meskipun terjal dan penuh liku, adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan makmur.

Kami menyadari bahwa langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Seknas JPPI dan mitranya bukanlah tanpa tantangan. Hambatan struktural, minimnya dukungan, serta kompleksitas masalah pendidikan di negeri ini sering kali menguji tekad dan komitmen. Namun, semangat untuk memperjuangkan pendidikan yang lebih baik terus menggelora, memberikan inspirasi dan harapan bagi semua pihak yang peduli terhadap masa depan bangsa.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat menjadi sumber refleksi, inspirasi, dan motivasi bagi pembaca. Semoga karya ini dapat menambah pemahaman tentang pentingnya advokasi pendidikan yang inklusif dan keadilan sebagai pilar penting dalam pembangunan nasional. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam terwujudnya buku ini.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Iii
Daftar Isi	V

TAHUN 2019 1

JPPI Nilai Razia Buku Bertema Kiri oleh Militer Terlalu Berlebihan	2
JPPI Dukung Kebijakan Kemendikbud Hapus SKTM Tahun Ajaran 2019/2020	3
JPPI : Sekolah Ramah Anak Bisa Jadi Solusi Kekerasan Anak Sekolah.....	5
Jelang Debat Cawapres, JPPI: Ada Lima Poin yang Mesti Dikupas	7
Mutu Pendidikan Harus Menjadi Fokus	9
Utamakan Pendidikan Karakter, Jangan Terlalu Bebani Siswa dengan Tugas Sekolah	11
Pendidikan Digelar Online, JPPI Sarankan Kemampuan Guru Ditingkatkan Rakhmatulloh ..	13
JPPI Minta Aturan Dana Bos	14
untuk Layanan Berbayar Dievaluasi	14
Minat Siswa Jadi Guru Minin, JPPI Khawatirkan Rendahnya Mutu Guru	16
Rencana Menko PMK Guru Asing, JPPI:	17
Sistem Zonasi Hanya Cocok di DKI Jakarta.....	21
Nadiem Duduki Mendikbud, JPPI: Pendidikan Karakter Harus Jadi Perhatian.....	35
JPPI Sorot Rencana Kebijakan Sertifikasi Perkawinan oleh Pemerintah.....	40
6 Hal yang jadi Sorotan do Pendidikan Indonesia Selama 6 Tahun.....	42
Enam Masalah Pendidikan Selama 2019.....	44
Pengamat Pendidikan soal Literasi Indonesia Disebut Buruk.....	46
JPPI Kritik Langkah Pemenintah Hapus Ditjen PAUD Dikmas di Kemendikbud	48
Peneliti soal Linterasi Indonesia Buruk: Perpustakaan Banyak yang Buluk.....	49
JPPI : Penghapusan Paud Dikmas Matikan Pembelajaran Sepanjang Hayat.....	51
Masih Tingginya Penyebaran Paham Radikal Melalui Sekolah.....	52
Tingkat Literasi Masyarakat Terus Menurun Dalam Tujuh Tahun Terakhir.....	53

JPPI Ungkap Peningkatan Korupsi Dana BOS di Sekolah.....	55
JPPI Anggap Konsep “Merdeka Belajar” Mendikbud Masih Setengah Hati	57
JPPI: kekisruhan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi di 2020	58

TAHUN 2020 60

Intoleransi Membayangi Dunia Pendidikan.....	61
JPPI Dorong Kemendikbud Cepat Atasi Sekolah Terdampak Banjir	63
Waduh!! Gara-Gara Banjir Mas Menteri Nadiem Kena Semprot	65
Kemendikbud Salurkan Bantuan kepada Sekolah yang Terkena Banjir	67
290 Sekolah di Jakarta Kebanjiran.....	68
Banyak Sekolah Rusak Terdampak Banjir, Di Mana Mendikbud Nadiem?	70
Banyak Sekolah Rusak, Di Mana Nadiem?.....	72
Liburkan Sekolah hingga Beri Tunjangan Guru,	
Nadiem Makarim Tanggapi Dampak Banjir di Sektor Pendidikan	74
JPPI : Kampus Merdeka kurang berpihak pada kebutuhan masyarakat	76
Kemudahan Kampus Jadi PTNBH Bentuk Komersialisasi Pendidikan	78
Membangun Kesadaran Siswa Tentang Bahaya Perundungan.....	80
JPPI: DANA BOS BUKAN SOLUSI KESEJAHTERAAN GURU HONORER.....	82
Perbesar Akses Publik Awasi BOS	83
Menimbang Positif dan Negatif Perubahan Skema Dana BOS.....	85
Tanpa Partisipasi Publik, Dana BOS Rawan Diselewengkan.....	87
JPPI: Dana BOS Bukan Solusi Kesejahteraan Guru Honorer.....	89
JPPI : GAJI GURU HONORER SEHARUSNYA BUKAN DARI DANA BOS	90
Nadiem Makarim Bolehkan Sebagian Dana BOS untuk Gaji Guru,	
JPPI: Gaji Honorer Harusnya Bukan dari Dana BOS	92
Ubaid Sebut 50% Dana BOS Boleh untuk Gaji Guru Honorer, Hanya Pengalihan Masalah.....	94
JPPI: GAJI GURU HONORER	96
SEHARUSNYA BUKAN DARI BOS.....	96
Kemendikbud Ungkap Tiga Penyebab Guru di RI Masih Gaptek.....	97
Guru Gaptek, LPTK Gagal Cetak Lulusan Berkualitas	99
Nyaris Separuh Guru Honorer Tak Punya NPUTK, Kebijakan Nadiem Makarim	
Bukan Solusi	100
Merdeka Belajar dan Timbulnya Kekhawatiran Baru	101
Dana BOS	105
Tahap I Rp 9,8 Triliun, Cair	105
Masih Perlukah Sekolah Islam Terpadu di Indonesia?	107
Kemendikbud Harus	109

Buka Profil Organisasi Penggerak ke Publik	
Publik harus dilibatkan secara transparan dan akuntabel.....	109
Belajar di Rumah Harus Dibarengi Bekerja Dari Rumah	111
JPPI Nilai Penghapusan UN Seharusnya Tidak Tunggu Corona	112
Peringati Hardiknas, JPPI: Pendidikan Indonesia Masih Gagap Hadapi Bencana	113
Pemerintah Dinilai Masih Abaikan Sektor Pendidikan.....	115
Sekitar 56% sekolah swasta di Indonesia mengalami kesulitan biaya operasional selama pandemi covid-19	115
Pengamat: Ancaman Sektor Pendidikan Kian Nyata	118
Pemerintah Dinilai Gagap Selamatkan Sektor Pendidikan Saat Pandemi	120
Gawat! Ubaid Sebut Indonesia Menghadapi Tiga Ancaman Besar Termasuk Depresi Massal	122
JPPI: Pendidikan Indonesia Masih Gagap Hadapi Bencana	124
Jppi minta pemerintah selamatkan sector pendidikan.....	126
Abaikan Pendidikan di Masa Pandemi Akan Mengundang Bencana Berikutnya Rakhmatulloh	128
Imbas Covid-19, sekolah terancam gulung tikar	130
Mendikbud Diminta Waspada Ancaman Putus Sekolah Semasa Covid.....	132
Kemendikbud Serahkan Cara Belajar di Rumah Era Corona ke Guru	135
Keberlangsungan Pendidikan	137
Terancam Pandemi.....	137
DISKON Hardiknas di Masa Pandemi : Berbagai Masalah Kebijakan Kampus Terhadap Mahasiswa.....	139
Sentil Ambisi Ibu Kota Negara, Pengamat: Bakal Terjadi Kebodohan Massal	141
Pengamat: Sekolah Tak Bisa Langsung Normal	143
jika Dibuka Juli.....	143
Juli Kembali Sekolah, JPPI: Harus Ada Capacity Building untuk Para Guru Rakhmatulloh....	145
Belajar dari Rumah: Masih Ada Kesenjangan Pendidikan di Indonesia?	146
Sekolah di tengah pandemi Covid-19: Para siswa ‘tertinggal’ secara akademik, orang tua: ‘Saya pilih anak selamat’.....	148
Ubaid: Banyak Orang Tua Murid Alami Kesulitan Ekonomi, PPDB Ditunda Saja	150
Pemerintah Diminta Gratiskan Biaya Pendidikan Siswa Terdampak Covid-19.....	151
PPDB Tetap Digelar di Masa Pandemi, Pemantau: Tak Manusiawi.....	153
JPPI Usul Tahun Ajaran Baru 2020 Diundur	55
Kemendikbud: Tak Ada Pengunduran Jadwal Tahun Ajaran Baru, Tetap Pada 13 Juli 2020 ..	157
Pengamat: Buat Target Kurikulum Selama Pandemi.....	159
Kemendikbud Harus Hentikan Kerjasama dengan Netflix, Alihkan ke Lokal	160
Faktor SDM dan Teknologi Belum	162

Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia.....	162
Pengamat: PPDB Langganan Ribut	164
Polemik batasan usia dalam PPDB 2020.....	165
Siswa di Tangsel Belajar Online Tanpa Fasilitas, JPPI: Kualitas Turun Jauh.....	167
Sistem PJJ Dinilai Masih Memiliki Banyak Masalah	169
Marah Saat Siswa Titipannya Ditolak, Lurah Benda Baru Dicurigai Sudah Terima Uang	171
JPPI: Kemendikbud di Bawah Nadiem Tidak Ada Progres	173
Ngamuk & Titip Siswa, JPPI : Lurah Benda Baru Harus Disanksi Tegas.....	174
Kiprah Tanoto-Sampoerna Jika Disandingkan dengan NU-Muhammadiyah	176
Pengamat Pendidikan: Kisruh Program Organisasi Penggerak, Nadiem Tidak Mengerti Sejarah Pendidikan	178
Pemerintah Berencana Buka Sekolah di Luar Zona Hijau, Pengamat: Kebijakan Fatal	180
Kritik Cara Nadiem Makarim Minta Maaf, Pengamat: Harusnya Diskusi Langsung, Bukan Lewat Online	182
Sekolah anak: Rencana pemerintah buka sekolah di zona kuning saat pandemi Covid-19, dilema ‘desakan orang tua’ dan tuduhan ‘bermain api’	184
Sekolah Tanpa Internet Tak Masuk	185
Program Laptop Rp17 T Nadiem	186
Dari Program Organisasi Penggerak Kini Merdeka Belajar Andalan Nadiem Makarim dan Kemendikbud Disoal	188
Polemik Nama Merdeka Belajar, Nadiem Dinilai Dapat Promosikan Merek Swasta	190
Nadiem Hanya Cerdas Di Gojek, ‘Tak Becus’ Urus Kemendikbud	192
Pemerintah Harus Pastikan Kurikulum Darurat Bisa Dijalankan di Sekolah.....	193
Kisah Anak Sekolah di Dusun Terpencil NTB Belajar Lewat HT.....	194
Kemendikbud Diminta Tidak Tindaklanjuti Usulan Pendidikan Militer untuk Mahasiswa	196
Orangtua Murid Gugat Gubernur DKI ke PTUN Terkait PPDB	198
Anies Digugat ke PTUN soal PPDB DKI 2020, Begini Sikap Pemprov	200
Silang Pendapat Risma-Khofifah, Pengamat: Jangan Buat Bingung Rakyat	202
Pemerintah Provinsi-Kabupaten/Kota Harusnya Satu Suara Soal Kebijakan	204
Cerdas Bernalar, tetapi Tidak Cerdas Berpikir	206
Mahasiswa Butuh Demokratisasi Kampus Bukan Komcad, Pak Prabowo.....	207
Kemendikbud Diminta Sinergi dengan Berbagai Sektor Terkait Pembelajaran Jarak Jauh	210
JPPI: Program Komcad Mahasiswa Bentuk Kemunduran Reformasi	211
Harus Ada Kolaborasi Semua Pihak untuk Atasi Permasalahan PJJ	212
JPPI Cium Indikasi Pungutan Liar di PPDB DKI.....	213
PPDB Ricuh, Pemprov DKI Jakarta Diminta Fasilitasi Murid yang Tak Lolos Seleksi	215
Pengamat Sebut Pendidikan Militer ke Kampus Macam Orde Baru	218

Pemangkasan Tunjangan Guru,	220
Apa Dampak pada Dunia Pendidikan?	220
JPPI: PPDB DKI Cacat Hukum.....	221
JPPI: Ada Konflik Kepentingan di Merek Dagang Merdeka Belajar	222
JPPI: Program Komponen Cadangan Tak Relevan Diterapkan di Kampus.....	224
Banyak Guru Terpapar Covid-19, JPPI: Jangan Buru-buru Buka Sekolah	226
Penyaluran Subsidi Kuota Harus Berkaca	227
dari Bansos Sebelumnya	227
Berikan Kuota Gratis untuk Guru Honorer Saja	229
Data Siswa Penerima Bantuan Kuota Internet 35 GB Harus Ditampilkan oleh Kepsek.....	230
Penyaluran Kuota Gratis Harus Dipublikasikan Pihak Sekolah	232
JPPI Kritisi Langkah Kemenag Potong Dana BOS.....	233
Potong BOS Madrasah dan Pesantren,	235
Sikap Kemenag Disesalkan, JPPI : Harusnya Ditambah Bukan Disunat.....	235
Kemenag Potong BOS Madrasah-Pesantren, JPPI: Harusnya Ditambah bukan Disunat	236
Bantuan kuota internet gratis Kemendikbud bakal cair pekan ini	238
Bakal cair pekan ini, bantuan kuota internet gratis dari Kemendikbud.....	240
Karpet Merah Terbentang Untuk Kampus Asing	242
Subsidi Kuota.....	244
JPPI Katakan Pandemi Harusnya Jadi Momentum Peningkatan Pendidikan	245
JPPI Sebut Penghapusan Mapel Bukti Nadiem Tidak Paham Sejarah.....	247
Penggunaan Subsidi Kuota Internet Dibatasi, Pengamat: Kebijakannya Tidak Tepat Guna	248
Pembatasan Bantuan Kuota Dinilai Tak Tepat Guna.....	249
Angka Putus Kuliah Capai 50 Persen.....	251
JPPI Dorong Pemerintah Pusat dan Daerah Duduk Bersama Atasi Problem Mutu Guru	253
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Zona Merah Diminta Tak Paksakan Sekolah Tatap Muka .	254
Tangkal Penyebaran Covid-19, JPPI.....	256
Dukung Rapid Antigen	256

TAHUN 2021..... 258

JPPI Kritik Program Kampus Mengajar Kemendikbud,	
Dinilai Berpotensi Buang-buang Anggaran	259
Mas Menteri Nadiem dan Sederet	261
Tudingan Program Copy-Paste	261
Mirip KKN, Kampus Mengajar Dinilai Berpotensi Jadi Pemborosan	264
UN Ditiadakan, JPPI: Penentuan Kelulusan Siswa	266
Bisa Bersifat Partisipatif.....	266

KPAI Usul Kemendikbud Bagikan Gawai untuk Mendukung PJJJ	268
SKB 3 Menteri Soal Larangan Seragam Agama di Sekolah Bakal Efektif?	269
PESIMISTIS	271
SKB Tiga Menteri	272
Ortu Siswa Protes Zonasi PPDB DKI 2021 Utamakan Jarak RT Rumah-Sekolah	274
Ubaid Rindu Mudik, Namun Bisa Disiasati	276
dengan Video Call	276
Jaringan Internet di Papua Putus,	278
Kebebasan Pers dan Akses Informasi Terhambat	278
Sistem Penerimaan Siswa Baru di Jakarta Disebut Memberatkan, Terkait Seleksi Umur dan Jarak RT	282
Anggota DPR berharap anggaran Kemendikbudristek 2022 tak dipangkas, ini alasannya	284
Komisi X DPR Pertanyakan Pemangkasan Anggaran Kemendikbudristek dalam RAPBN 2022	286
14 Rekomendasi KPAI Jelang Sekolah Tatap Muka Terbatas Dibuka Juli	288
WIB JPPI Usul Tahun Ajaran Baru 2020	291
Diundur Januari 2021	291
Pemerintah Diminta Gratiskan Biaya Pendidikan Siswa Terdampak Covid-19	293
Pemantau Kritisi Analisis Pemerintah soal Belajar di Sekolah	295
Pro-Kontra Gelar Profesor Kehormatan untuk Megawati	297
RUU KUP Sekolah Kena PPN Dinilai akan Mengarah ke Komersialisasi Pendidikan	299
Pemantau Kritisi Analisis Pemerintah soal Belajar di Sekolah	301
Ada Wacana Jasa Pendidikan Kena Pajak,	303
JPPI: Ini Pelanggaran HAM	303
Menelisik Kebijakan Jalur Zonasi pada	305
Penerimaan Peserta Didik Baru	305
Rektorat UI Panggil Pengurus BEM, JPPI: Katanya Kampus Merdeka, Masa Dibungkam	308
BEM UI Dipanggil Rektorat,	309
Diretas: Sinyal Bahaya Demokrasi	309
Rangkap Jabatan Sarat Konflik Kepentingan,	314
Ari Kuncoro Didesak Mundur dari Rektor UI	314
Coreng Institusi Kampus, JPPI Minta OJK Tegas Soal Rektor Rangkap Jabatan	316
PDIP Nilai Kritik BEM Unnes Fitnah, JPPI: Kemunduran Berdemokrasi!	318
JPPI minta rektor rangkap jabatan mengundurkan diri	320

Rektor Ari Kuncoro Rangkap Jabatan, JPPI Bakal Surati Jokowi soal Statuta UI	322
JPPI Bakal Surati Jokowi Soal Aturan Rangkap Jabatan Dalam Statuta UI.....	324
Soal Bsu Rp 1,8 Juta Guru Honorer dan Non Pns Belum Jelas, Jppi:	
Kemendikbud Ristek Jangan Zolimi Mereka	326
Jokowi Bolehkan Rektor UI Rangkap Jabatan, JPPI: Arogansi yang Memalukan!.....	328
Jokowi Bolehkan Rektor UI Rangkap Jabatan.....	329
Rektor Bungkam Kritik, Menteri Membiarkan,	
JPPI: Slogan Kampus Merdeka Hanya Omong Kosong.....	330
Deretan Tanggapan Terkait Perubahan Statuta UI Rangkap Jabatan.....	332
Rangkap Jabatan Rektor UIII dan Komisaris BUMN,	336
Komaruddin Pilih Salah Satu di 2024	336
Rektor yang Rangkap Jabatan Didesak untuk Mengundurkan Diri.....	338
COVID-19 Meledak, Sekolah Tatap Muka di Luar Jawa-Bali Terus Jalan?	340
Pakar: Pendidikan Tak Dianggap Sektor Terdampak Pandemi.....	344
HUT BPPI ke 17	346
Barata Indonesia Jalin Kerja Sama Dengan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia JPPI.....	348
Manajemen IPC Cabang Tanjung Priok Terus Berbenah Menata Pelabuhan Tanjung Priok....	349
JPPI Kecam Kekerasan di Sekolah SPN Batam, Minta Pelaku Diusut	351
JPPI Desak Kasus Kekerasan di Sekolah Penerbangan Dirgantara Batam Diinvestigasi	353
Ternyata Peran Orang Tua Penting dalam Proses Pembelajaran	355
Ada Kekerasan di SPN Dirgantara Batam, JPPI Minta Kasusnya Diusut Tuntas	357
JPPI: Laporan Kekerasan di SMK Penerbangan SPN Dirgantara Harus Diinvestigasi	359
Kekerasan di Sekolah Terus Berulang, JPPI: Penanganan dari Pemerintah Lamban	361
MK Putuskan UU Cipta Kerja Cacat Formil dan Inkonstitusional	363

TAHUN 2022 366

Mencegah Tawuran Pelajar Tak Bisa Dibebankan kepada Sekolah.....	367
Marak Tawuran Pelajar di Jaksel,	369
Sudin Pendidikan Dianggap Tidak Antisipatif	369
Ini penegasan JPPI terkait peran wali murid antisipasi tawuran pelajar.....	371
RUU Sisdiknas Dinilai sebagai Upaya Negara Dorong Privatisasi dan Komersialisasi Pendidikan.....	373
Pengamat: Sekolah Ramah Anak Masih Sebatas Retorika Kebijakan Saja	375
JPPI dorong PPDB harus lindungi hak anak.....	377
JPPI Dorong Pemprov DKI Tanggung Biaya Pendidikan Siswa yang Tak Bisa Masuk Sekolah Negeri.....	379
170 Ribu Siswa Berpotensi Tak Dapat Sekolah dalam PPDB DKI Jakarta Setiap Tahun	381

5 Fakta Siswa MTs di Kotamobagu Tewas Setelah Di-bully Temannya	382
Kemendikbudristek: PPDB zonasi tingkatkan akses layanan berkeadilan.....	384
Jangan Terlewat, Lapor Diri PPDB DKI Mulai Hari Ini.....	386
Perlunya Belajar Saat Libur Sekolah	388
1 dari 3 Anak Disebut Jadi Korban Kekerasan di Sekolah	393
Kasus Pemerkosaan pada Murid, Psikolog Nilai Pelaku Tak Mampu Kelola Perilaku Seksual	394
33 Ribu Jemaah Haji Telah Pulang ke Tanah Air, 21 Ribu Bertolak ke Madinah	396
JPPI: Jalur Mandiri Kerap Jadi Pintu	398
Masuk Praktik Jual Beli Kursi di PTN	398
Oknum Guru Cukur Rambut Anak Kelas 1 SD Acak-acakan, Membuat Geram Sang Ibu	400
Pemaksaan Jilbab di Sekolah Negeri, JPPI: Kelalaian Monitoring	402
Jalur Mandiri Jangan Dipukul Rata sebagai Ladang Korupsi	404
Lagi, Pemaksaan Jilbab di Sekolah Negeri, JPPI: Harus Diimbangi dengan Monitoring	406
Nadiem Miliki Tim Bayangan, JPPI: Bahaya Pengelolaan Kementerian Secara Sembunyi-semunyi.....	408
JPPI: Tim Bayangan Nadiem Turunkan Kapabilitas SDM Kemendikbud Syifa Arrahmah	410
Ketua JPPI: PTN Badan Hukum Menentang Amanah UUD 45	412
SMAN 2 Depok Diskriminasi Siswa Kristen, Pengamat: Kemendikbudristek Tahu Dosa Tapi Belum Tobat	414
Koalisi Pendidikan Nasional: “Menolak RUU Sisdiknas Yang Tidak Partisipatif”	415
JPPI Apresiasi Program Pendidikan MIND ID	419
Seribuan Anak Solo Disebut Putus Sekolah, Disdik: Kami Verifikasi Dulu Datanya	422
Kacau, JPPI: Kasus Korupsi di Sekolah Meningkat 100% pada 2022	424
Guru Jadi Mayoritas Pelaku Kekerasan di Sekolah Sepanjang 2022	425
JPPI: 194 Kasus Kekerasan di Sekolah pada 2022 Didominasi Kekerasan Seksual	427
Korupsi di Sekolah Sepanjang 2022, JPPI: ‘Rekornya’ Dipegang Dana BOS.....	428
Pemerintah Mesti Tambah Kuota Siswa untuk PPDB 2023	429
Terbanyak di Tahun 2022, Guru Jadi Pelaku Kekerasan di Sekolah.....	430

TAHUN 2023 432

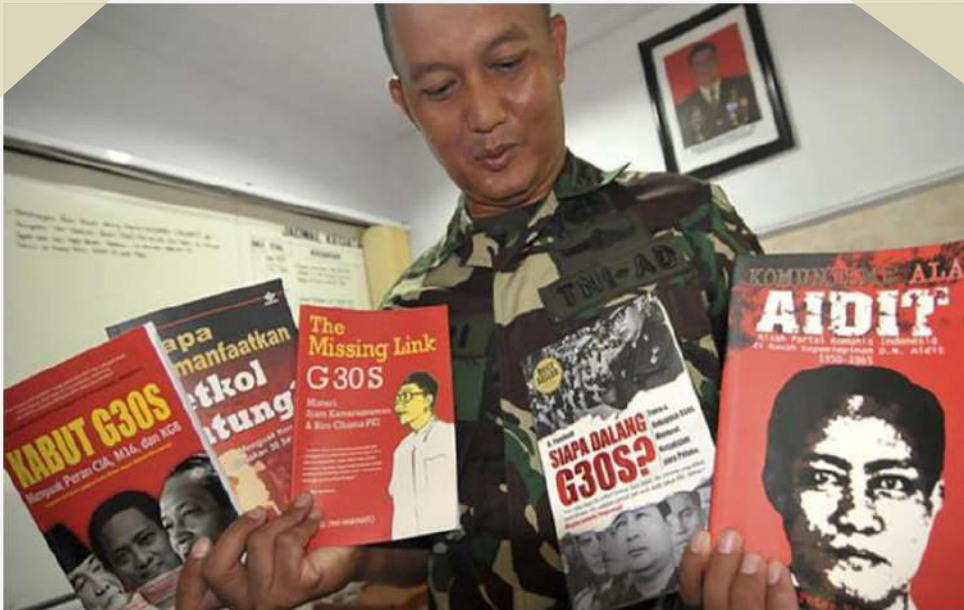
Implementasi Kurikulum Merdeka Dikhawatirkan Terganggu	433
Sepanjang 2022, Pelaku Kekerasan Seksual di Sekolah Didominasi oleh Guru	435
Polisi Cirebon tangkap enam pelaku tawuran memanfaatkan medsos	437
JPPI: Rapor Pendidikan Indonesia 2022 Mendapat Skor 1,6.....	439
Gaet ASPBAE, JPPI Adakan Capacity Building and Learning Collaborative	

Bersama Jaringan.....	440
JPPI : Selama Tahun 2022, Guru Menjadi Pelaku Kekerasan Terbanyak di Sekolah.....	441
Perppu Cipta Kerja Kembali Digugat	443
di Mahkamah Konstitusi	443
Mantan Pengurus JPPI Nailul Faruq	445
Masuk Politik Praktis	445
Gen Z Tak Terkendali, Kekerasan Semakin Sadis	447
Pelindo Regional 2 Jambi Beri Himbauan tumbuhkan Kesadaran akan Pentingnya K3\.....	448
Kekerasan di Sekolah, JPPI Sebut Rendahnya Keteladanan Guru Ikut Memperparah.....	450
Masuk Sekolah Jam 5 Pagi Seperti Kebijakan	452
Wangsit dari Langit	452
JPPI Dorong Kejaksanaan Usut Tuntas Korupsi di Unud	453
Dugaan korupsi Rektor Unud: Sistem seleksi jalur mandiri 'belum cukup dibenahi', uang pangkal 'rawan dikorupsi'	455
Sekolah Jam 5 Pagi Disebut Bikin SDM Unggul, Pengamat: Malah Penurunan	457
JPPI Berikan Komentar Tajam Terkait Kebijakan Sekolah Pukul 5 Pagi di NTT	458
Ubaid Matraji: Masuk Sekolah Jam 5 Pagi Seperti Kebijakan Wangsit dari Langit	459
JPPI Dukung Usut Tuntas Kasus SPI Unud	460
JPPI: <i>Study Tour</i> Sekolah Pemborosan dan Beratkan Orang Tua Siswa	462
Hardiknas 2023, JPPI: Jadi Momentum Refleksi Arah Pendidikan di Indonesia.....	464
JPPI: Marketplace Guru Justru Bakal Memicu Masalah Baru	466

Jalan Terjal Menuju
Pendidikan
yang Berkualitas
& Berkeadilan

**TAHUN
2019**

JPPI Nilai Razia Buku Bertema Kiri oleh Militer Terlalu Berlebihan



tirto.id - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai razia buku yang terjadi di Padang, Sumatera Barat dan Kediri, Jawa Timur beberapa waktu lalu oleh pihak militer lantaran bertemakan ideologi kiri terlalu berlebihan. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menganggap hal tersebut sebagai wujud menciderai kebebasan dan pengekangan akses masyarakat terhadap pengetahuan.

Ubaid menilai, langkah itu juga keliru, melihat tingkat literasi di Indonesia yang terbilang rendah. “Indonesia ini negara dengan tingkat literasi yang sangat rendah nomor dua dari belakang. Harusnya pemerintah menggalakkan gerakan literasi, bukan malah memberangus perbukuan dan membungkam kebebasan,” ujarnya kepada Tirto, Jumat (11/1/2019).

Ubaid juga menyayangkan sekaligus heran, mengenai razia buku bertema kiri yang selalu muncul pada musim-musim politik. Ia menduga, kalau razia tersebut hanya akal-akalan dengan tujuan yang politis. “Janganlah. Jangan dibodohi rakyat dengan tontonan politik menebar ketakutan. Beri rakyat harapan dan optimisme,” ujarnya.

Menurutnya, seharusnya masyarakat diberi kebebasan dalam mengakses sumber pengetahuan selama dalam konteks untuk pembelajaran. Bukannya malah diseragamkan, dengan merazia sebagian buku. “Belajar itu harus dari berbagai sumber. Jika ada pembatasan buku, itu bagian dari politik penyeragaman seperti yang terjadi di era Orde Baru. Jangan lah kita bergerak ke belakang. Harusnya maju ke depan dengan belajar dari sejarah masa lampau,” tandasnya.

Sumber: <https://amp.tirto.id/jppi-nilai-razia-buku-bertema-kiri-oleh-militer-terlalu-berlebihan-dd7t>

JPPI Dukung Kebijakan Kemendikbud Hapus SKTM Tahun Ajaran 2019/2020



AKURAT.CO, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mendukung rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020. Pasalnya, SKTM tersebut mudah dipalsukan.

“SKTM mudah dipalsukan, seperti yang terjadi pada PPDB tahun 2018. Saya setuju SKTM dihapus,” kata Ubaid saat diminta tanggapannya terkait penghapusan SKTM tersebut, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Meski sepakat dengan penghapusan SKTM itu, Ubaid meminta Kemendikbud melakukan pendataan keluarga miskin. Dan data tersebut harus diperbaharui setiap saat serta dipermudah bagi siswa.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, data siswa yang tergolong miskin itu juga harus terintegrasi dengan yang lain, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kemendikbud hapusan SKTM lantaran jalur tersebut mudah dipalsukan. Tapi harus ada pendataan keluarga miskin yang terintegrasi juga updating datanya harus dipermudah,” jelasnya.

Ia menambahkan, penghapusan SKTM itu perlu memberikan kemudahan kepada siswa untuk mendapatkan KIP. Selama ini, pengurusan untuk mendapatkan KIP sangat susah.

“Sebab banyak anak miskin yang belum dapat KIP, supaya dapat maka proses mendapatkan KIP harus dipermudah,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak akan berlaku pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020.

“Surat keterangan SKTM tahun ini kita hapus, nggak ada lagi SKTM,” kata Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).

Ia menjelaskan, jika ada masyarakat yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH), tapi dalam daftar sekolah sudah ada daftar nama siswa miskin, maka kartu tersebut bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya oleh siswa miskin yang ada dalam daftar sekolah itu.

“Dari sekolah kan ada, daftar list sekolah miskin dari tiap-tiap sekolah. Nanti dia akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, bisa dideteksi dari situ,” ujarnya.

Sumber: <https://akurat.co/jppi-dukung-kebijakan-kemendikbud-hapus-sktm-tahun-ajaran-20192020>

JPPI : Sekolah Ramah Anak Bisa Jadi Solusi Kekerasan Anak Sekolah



tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji merespons kejadian dugaan pelecehan seksual yang terjadi di SDN Kauman 3 Malang dengan mendorong pemerintah untuk fokus dalam penerapan Sekolah Ramah Anak. Hal tersebut ia sampaikan mengingat kasus kekerasan seksual yang terus mewarnai dunia pendidikan Indonesia. “Sekolah Ramah Anak harus diterapkan di seluruh sekolah. Kejadian ini [kekerasan seksual] terus terulang dan terjadi di mana-mana,” ujarnya kepada Tirto, Rabu (13/2/2019).

Indikator Sekolah Ramah Anak tersebut, Ubaid menjelaskan, yang pertama tidak boleh ada kekerasan di sekolah, baik fisik maupun non fisik. Kedua, sarana dan prasarana di sekolah harus mendukung anak. “Misalnya, jalan di sekolah, menuju sekolah dan sekitar sekolah harus aman. Tidak membahayakan anak,” ujarnya. Lalu ia melanjutkan, proses belajar mengajar harus menerapkan pola disiplin positif dan terbangunnya komunikasi efektif antar anak, orang tua, dan sekolah. Yang tak kalah penting, menurutnya, ketersediaan tenaga ajar yang berkompeten dalam memahami anak. “Yang mampu memahami dan menerapkan hak-hak anak di sekolah,” ujarnya.

Sayangnya, konsep Sekolah Ramah Anak ini di Indonesia, menurutnya, belum ditanggapi serius oleh pemerintah. Konsep ini masih sebatas imbauan saja dan tak efektif.

“Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap penerapan ini. Lalu perlu untuk diperbaiki dan diperluas ke sekolah-sekolah lain,” tandasnya. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti pada akhir Desember 2018 lalu merilis temuannya terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah. Retno menyebutkan angka kekerasan seksual pada tahun 2018, yaitu mencapai

177 korban terdiri dari 135 korban murid laki-laki dan 42 korban murid perempuan. Sebelumnya, guru olahraga SDN Kauman 3 berinsial IS diduga melakukan tindak pelecehan seksual ke sejumlah siswinya. Atas temuan tersebut, sejumlah wali murid yang gelisah melaporkan kasus itu ke Polres Malang Kota pada Senin (11/2/2019) kemarin.

Reporter: Alfian Putra Abdi,

tirto.id

13 Feb 2019 10:18 WIB

Sumber: <https://tirto.id/jppi-sekolah-ramah-anak-bisa-jadi-solusi-kekerasan-anak-di-sekolah-dgME>

Jelang Debat Cawapres, JPPI: Ada Lima Poin yang Mesti Dikupas



KONTENISLAM.COM - Jelang debat Pilpres 2019 putaran ketiga 17 Maret 2019 mendatang, Calon Wakil Presiden (Cawapres) paslon nomor urut 01, Ma'ruf Amin akan head to head dengan paslon nomor urut 02 Sandiaga Uno.

Dalam debat ini kedua Cawapres akan mengupas tema tentang Pendidikan, Kesehatan dan juga Sumber Daya Manusia (SDM).

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyebut, ada empat poin penting yang mesti disorot oleh kedua Cawapres tersebut.

Pertama, perihal kualitas pendidikan yang masih rendah. Kedua, tingkat literasi yang masih rendah. Ketiga, kualitas dan kuantitas guru yang masih bermasalah.

Selanjutnya, keempat, alokasi anggaran pendidikan yang masih berorientasi pada gaji guru dan belum pada peningkatan kualitas. Kelima, akses pendidikan bagi kelompok-kelompok yang teresklusi. Misalnya, anak-anak difable, kelompok minoritas, korban konflik, perempuan yang terdiskriminasi.

"Kelima point itu penting untuk dibahas, karena selama empat tahun ini, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Masih gitu-gitu aja," kata Ubaid, kepada Teropong Senayan, pada Senin (11/3/2019). Selain itu, terang Ubaid, selama empat tahun terakhir memang perkembangan di bidang pendidikan masih stagnan, alokasi anggaran pendidikan juga tidak ada perubahan yang berarti,

lantaran semestinya gaji guru itu diluar 20 persen anggaran pendidikan.

“Alokasi anggaran yang 20 persen itu gak ada perubahan, dari dulu 70-80 persen kesedot belanja pegawai, bukan pada peningkatan kualitas, yang banyak perubahan di era Jokowi adalah soal akses pendidikan, ini dirasa ada perubahan. Misalnya soal Kartu Indonesia Pintar (KIP), ini sangat membantu. Sementara untuk kuantitas guru, mulai ditambah tapi persebarannya masih bermasalah,” pungkasnya.

Sumber: <https://www.kontenislam.com/2019/03/jelang-debat-cawapres-jppi-ada-lima.html>

Mutu Pendidikan Harus Menjadi Fokus



JAKARTA, KOMPAS — Menjelang debat calon presiden pada Minggu (17/3/2019) dengan topik pembangunan sumber daya manusia, masalah ketidakmerataan akses dan bantuan pendidikan menjadi perhatian utama masyarakat. Mutu pendidikan rupanya belum menjadi fokus permasalahan.

“Masyarakat memang sangat membutuhkan bantuan, setidaknya menurut persepsi mereka,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji di Jakarta, Jumat (15/3/2019). Hal ini alasan kebijakan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) sangat ditunggu oleh masyarakat.

Direktur Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Najeela Shihab tidak bisa menyalahkan masyarakat yang pikirannya baru seputar bantuan. Pengamatan PSPK menunjukkan bahwa sejak pasca kemerdekaan, kebijakan pendidikan mayoritas fokus kepada akses dan pemberian bantuan. Praktis, hal ini membuat pandangan masyarakat terhadap peran pemerintah hanya sebatas pada aspek memberi bantuan.

Menurut dia, untuk segi akses pendidikan sudah banyak unit kerja pemerintah yang terlibat. Permasalahannya adalah memastikan kinerja setiap unit itu sesuai dengan prosedur dan target.

“Hendaknya kita mulai membicarakan mutu pendidikan. Sudahkah sekolah mengajarkan hal-hal yang memang sesuai dengan tumbuh kembang anak dan bisa memberi mereka kemampuan mengikuti perkembangan zaman?” katanya.

Hendaknya kita mulai membicarakan mutu pendidikan. Sudahkah sekolah mengajarkan hal-hal sesuai tumbuh kembang anak dan bisa memberi mereka kemampuan mengikuti perkembangan

zaman?

Pemenuhan mutu tidak bisa mengandalkan pemerintah saja. Harus ada keterlibatan masyarakat dalam memastikan berjalannya proses pembelajaran yang mengembangkan karakter sekaligus kompetensi. Kondisi ini hanya bisa dicapai oleh masyarakat yang sudah memiliki kesadaran pendidikan baik secara konsep maupun praktis.

Politisi bereaksi kepada kepedulian masyarakat. Selama masyarakat belum menganggap mutu pendidikan itu penting, kebijakan-kebijakan politik yang dihasilkan tidak akan berpihak. Termasuk di dalam penyusunan visi dan misi para calon presiden dan wakil presiden.

Belum tepat sasaran

Ubaid mengatakan, masyarakat membutuhkan bantuan pendidikan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan PIP belum tepat sasaran. Berdasarkan laporan yang diterima oleh JPPI, ada penerima PIP yang sebenarnya masuk ke kategori tidak layak. Misalnya, anak kepala desa dari keluarga relatif mampu ternyata mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP), sementara ada anak warga miskin tidak memperolehnya.

Masyarakat, katanya, kebingungan mencari tempat mengadu terkait pembuktian bahwa mereka berhak mendapat KIP. Informasi yang mereka terima sering kali tidak lengkap atau pun menyesatkan. Ada laporan yang mengatakan bahwa warga ditakut-takuti harus menghadapi birokrasi yang berbelit-belit jika hendak mengadu.

“Bahkan, tidak ada transparansi alasan seseorang bisa memperoleh KIP,” tutur Ubaid. Ia mengungkapkan salah satu kasus yang diterima JPPI berdasarkan laporan seorang kepala sekolah yang mengaku sudah menyerahkan daftar nama siswa miskin di sekolahnya kepada dinas pendidikan. Oleh dinas pendidikan hanya diloloskan beberapa nama tanpa keterangan yang jelas, sehingga masyarakat protes.

Menurut dia, cara seperti ini yang membuat masyarakat berkurang kepercayaannya kepada KIP. Prinsip KIP untuk semua siswa miskin ternyata pada praktiknya hanya dinikmati oleh segelintir orang.

“Ada data Program Keluarga Harapan dan Kartu Indonesia Sehat yang juga bisa menjadi bukti pendukung seseorang layak dapat KIP. Jika memang diterapkan, transparansi pemberian bantuan kepada penerima yang layak bisa dipastikan,” ucapnya.

Sumber: <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/03/16/mutu-pendidikan-harus-menjadi-fokus>

Utamakan Pendidikan Karakter, Jangan Terlalu Bebani Siswa dengan Tugas Sekolah



Kamis, 02 April 2020 - 08:51 WIB

JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) erat kaitan dengan perilaku warga. Menurut Ubaid, setidaknya kebijakan ini diharapkan dapat mengubah perilaku siswa dan orang tua siswa dalam menghadapi pandemi wabah virus corona di Indonesia.

“Kalau social distancing kemarin dapat berjalan efektif tentu tidak perlu ada karantina. Tapi kan problemnya lain,” kata Ubaid saat dihubungi SINDOnews, Kamis (2/4/2020).

Ubaid menyatakan, meski telah diterapkan berbagai skema pembatasan, ia melihat masih banyak siswa yang menganggap anjuran ‘belajar di rumah’ sebagai liburan. Sehingga, masih tampak siswa yang bermain dengan teman-teman mereka di luar, dan mengabaikan imbauan social distancing maupun physical distancing.

“Inilah tantangan di dunia pendidikan kita. Bagaimana anak-anak sejak dini harus diajarkan dan dibiasakan pendidikan karakter, misalnya soal ketertiban dan kedisiplinan yang relevan dengan situasi kala pandemi saat ini,” ujarnya.

Dengan demikian, Ubaid menyarankan agar peran orang tua lebih ditingkatkan lagi saat siswa berada di rumah. Menurutnya, untuk belajar di rumah seharusnya guru dan orang tua mendorong

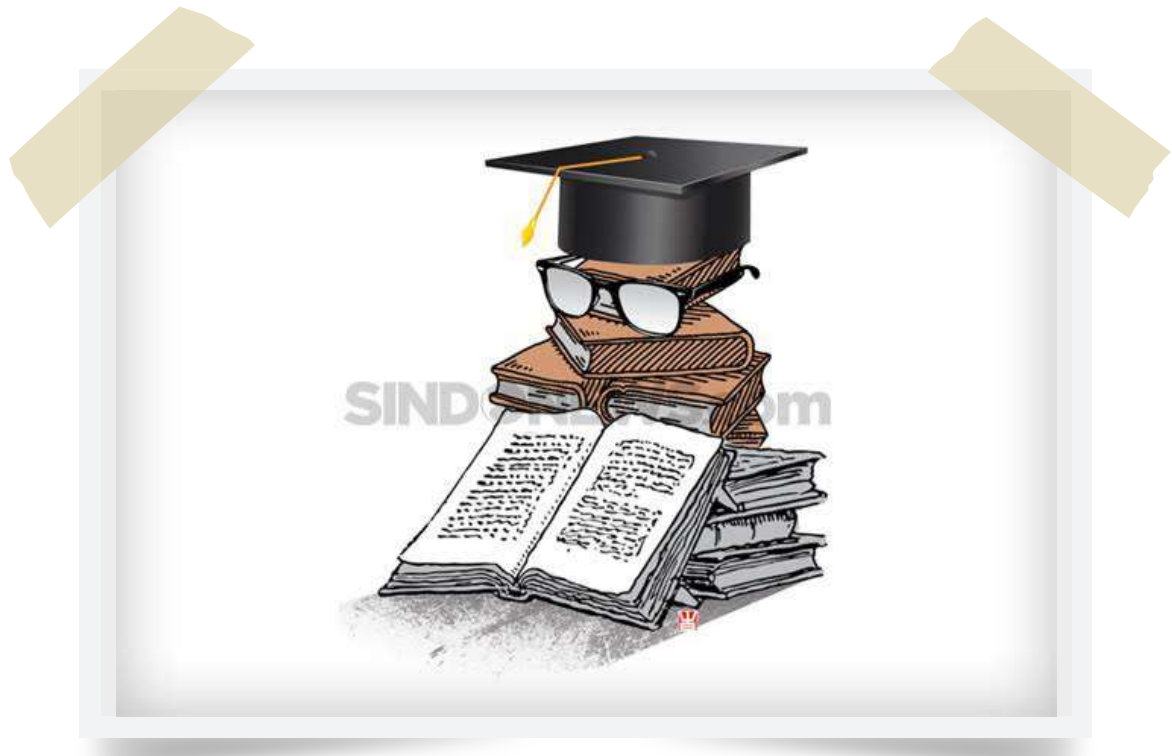
sistem pembelajaran siswa dengan model pembelajaran karakter, bukan dibebani dengan tugas-tugas sekolah seperti dalam kondisi normal.

Akibatnya, kata Ubaid, para siswa menjadi kelelahan, tidak konsentrasi, dan ini malah berakibat pada penurunan imun anak dan malah dikhawatirkan anak-anak memilih bermain di luar rumah bersama teman-temannya.

“Karena tidak patuh, banyak orang-orang tetap berdekatan di kerumunan, bahkan anak-anak main bersama dan tempat-tempat game ramai dengan anak-usia usia pelajar,” tandasnya.

Sumber: <https://edukasi.sindonews.com/berita/1576018/144/utamakan-pendidikan-karakter-jangan-terlalu-bebani-siswa-dengan-tugas-sekolah>

Pendidikan Digelar Online, JPPI Sarankan Kemampuan Guru Ditingkatkan Rakhmatulloh



JPPI menyarankan kemampuan guru ditingkatkan untuk mendukung proses belajar mengajar secara online. Foto/SINDOnews

Kamis, 16 April 2020 - 08:19 WIB

JAKARTA - Di tengah merebaknya wabah virus Corona (COVID-19) yang kian massif, berbagai pelayanan publik banyak mengandalkan media daring atau melalui internet (online). Tak terkecuali di dunia pendidikan yang menuntut guru dan murid melakukan proses belajar mengajar dari rumah.

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyatakan, dalam situasi wabah Corona ini para guru perlu ditingkatkan kemampuannya, terutama dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran.

“Fakta membuktikan banyak anak yang ngeluh dengan (belajar) online. Banyak tugas dan model penugasannya kurang mendidik dan tidak kreatif,” ujar Ubaid saat dihubungi SINDOnews, Kamis (16/4/2020).

Dari pencermatan lembaganya, kata dia, banyak murid yang diminta menyalin teks buku dan soal-soal latihan dengan tulisan tangan, lalu teks tersebut di foto. Menurut dia, cara ini tak ada bedanya dengan belajar manual. “Di samping itu, banyak guru yang hanya memberikan tugas tapi tidak memberikan input dan penjelasan,” kata Ubaid

Sumber: <https://edukasi.sindonews.com/read/2263/144/pendidikan-digelar-online-jppi-sarankan-kemampuan-guru-ditingkatkan-1586999058>

Jppi Minta Aturan Dana Bos untuk Layanan Berbayar Dievaluasi



Senin, 20 April 2020 13:09 WIB

Ilustrasi - Seorang siswi sedang belajar via daring di rumah selama masa pandemi COVID19. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi/am.

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta agar Permendikbud yang memperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk layanan pendidikan berbayar dievaluasi.

“Kalau dana BOS untuk membayar layanan daring berbayar, terus fungsi guru apa? Ini kebijakan yang aneh karena melimpahkan tanggung jawab guru ke layanan pembelajaran daring berbayar,” ujar Ubaid di Jakarta, Senin.

Untuk itu, dia meminta agar Permendikbud tersebut dievaluasi. Ia juga meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut mengawasi.

“Ini seperti kejadian dulu waktu diperbolehkannya guru memakai Lembar Kerja Siswa (LKS). Akibatnya, semuanya mengandalkan LKS dan guru tidak banyak berperan,” kata dia.

Kemudian, kebijakan penggunaan LKS tersebut dilarang dan dikembalikan pembelajaran sepenuhnya kepada guru. Ubaid menjelaskan jika menggunakan layanan pendidikan berbayar, maka akan menunjukkan kelemahan kompetensi guru dalam membuat pembelajaran berbasis teknologi. “Kebijakan ini harus dihentikan, karena tidak berorientasi pada kualitas,” cetus dia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 19/2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud no 8/2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler pasal 9A ayat 1 poin A, disebutkan dana BOS diperbolehkan untuk layanan pendidikan daring berbayar. Sebelumnya, Ikatan Guru Indonesia (IGI) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Inspektorat maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penerapan Permendikbud tersebut. Terutama terkait untuk pembayaran layanan pendidikan daring. Ketua IGI Muhammad Ramli Rahim menyebut yang terpenting dalam pembelajaran daring adalah jalinan komunikasi pengajaran dan pendidikan tetap bisa dilakukan di dunia maya, dengan bantuan internet dan ketersediaan kuota data bukan layanan pendidikan berbayar.*

Pewarta: Indriani

Editor: Erafzon Saptiyulda AS

Sumber: <https://www.antaranews.com/berita/1431784/jppi-minta-aturan-dana-bos-untuk-layanan-berbayar-dievaluasi>

Minat Siswa Jadi Guru Minin, JPPI Khawatirkan Rendahnya Mutu Guru



tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji memaklumi apabila banyak generasi muda saat ini tidak mau bercita-cita menjadi guru. Sebab, menurutnya, banyak faktor yang mengkondisikan demikian, tak terkecuali perihal kesejahteraan. “Pertama, profesi guru di Indonesia tidak menjanjikan secara ekonomi. Kedua, beban akademik yang begitu berat. Ketiga, penghargaan terhadap profesi sangat kurang. Keempat, tidak ada kepastian perlindungan hukum bagi profesi guru,” ujarnya kepada Tirto, Rabu (8/5/2019).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru pada tahun 2019, menyertakan tes angket kepada peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA dengan tujuan mengkaji informasi non-kognitif siswa. Terdapat satu angket yang diperuntukkan untuk mengetahui cita-cita peserta didik yang disebar kepada 512.500 siswa di 8.549 SMA/MA.

Masing-masing sekolah, menyertakan maksimal 60 siswa untuk menjawab. Hasilnya mencatat 89 persen siswa bercita-cita sebagai pengusaha segala bidang dan presiden. Sekitar 11 persen yang bercita-cita menjadi guru dengan mayoritas perempuan. Namun, dari data angket tersebut, 11 persen siswa yang bercita-cita menjadi guru adalah mereka yang berada dalam kelompok nilai tidak maksimal.

Berkenaan hal tersebut, menurut Ubaid, perlu diselesaikan dan ditingkatkan. Sebab, jika peminat profesi guru masih minim akan memberikan dampak pada ketersediaan guru dan mutu pendidikan di Indonesia. “Ini merupakan faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya mutu guru di Indonesia, sebab input LPTK adalah calon-calon guru dengan nilai rendah. Selain itu, ini tugas besar yang harus diemban LPTK untuk menggenjot mutu calon-calon guru,” pungkasnya.

Sumber: <https://tirto.id/minat-siswa-jadi-guru-minim-jppi-khawatirkan-rendahnya-mutu-guru-dti5>

Rencana Menko PMK Guru Asing, JPPI: Harus Jelas Tujuannya



tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan wacana Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani untuk mendatangkan guru asing ke Indonesia, sebagai suatu upaya yang tidak perlu.

“Harus dijelaskan dulu, landasan pemikiran, output dan outcome-nya, supaya tidak memantik kegaduhan yang justru kontra produktif,” ujar Ubaid kepada Tirto, Sabtu (11/5/2019).

Sebab, kata dia, hal tersebut akan menjadi bencana jika tidak dipikirkan matang dan dijelaskan secara transparansi ke masyarakat. Belum lagi berbagai persoalan di dunia pendidikan, seperti isu kesejahteraan guru honorer yang menurutnya belum juga tuntas.

“Pemerintah terkesan tidak mau usaha memperbaiki keadaan, justru lepas tangan dan menyerahkan pada orang asing,” ujarnya. Ia mengatakan, apabila guru asing tersebut memang dibutuhkan, setidaknya kriteria kompetensi dan wilayah kerja mereka harus jelas dulu. Agar tidak menimbulkan gesekan dengan guru-guru lokal.

“Bahkan calon-calon guru lulusan LPTK juga masih banyak yang menganggur,” pungkasnya. Menko PMK Puan Maharani mengutarakan wacananya untuk mendatangkan guru asing ketika menghadiri agenda Musrenbangnas di Jakarta pada Kamis (9/5/2019) kemarin.

“Kita ajak guru dari luar negeri untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia,” ujar Puan. Politikus PDIP ini mengatakan, apabila nantinya ditemukan adanya kendala bahasa, maka bisa menyiapkan banyak penerjemah dan alih bahasa.

Untuk itu, Puan menegaskan, dirinya akan meminta pihak sekolah menyampaikan kriteria pengajar yang dibutuhkan beserta jumlahnya. Dan usulan ini, kata dia, akan dikoordinasikan lagi.

Sumber: <https://tirto.id/rencana-menko-pmk-import-guru-asing-jppi-harus-jelas-tujuannya-dAbg>

Peringatan Hardiknas 2019

JPPI Usul Kemendikbud Utamakan Tangkal Intoleransi & Radikalisme



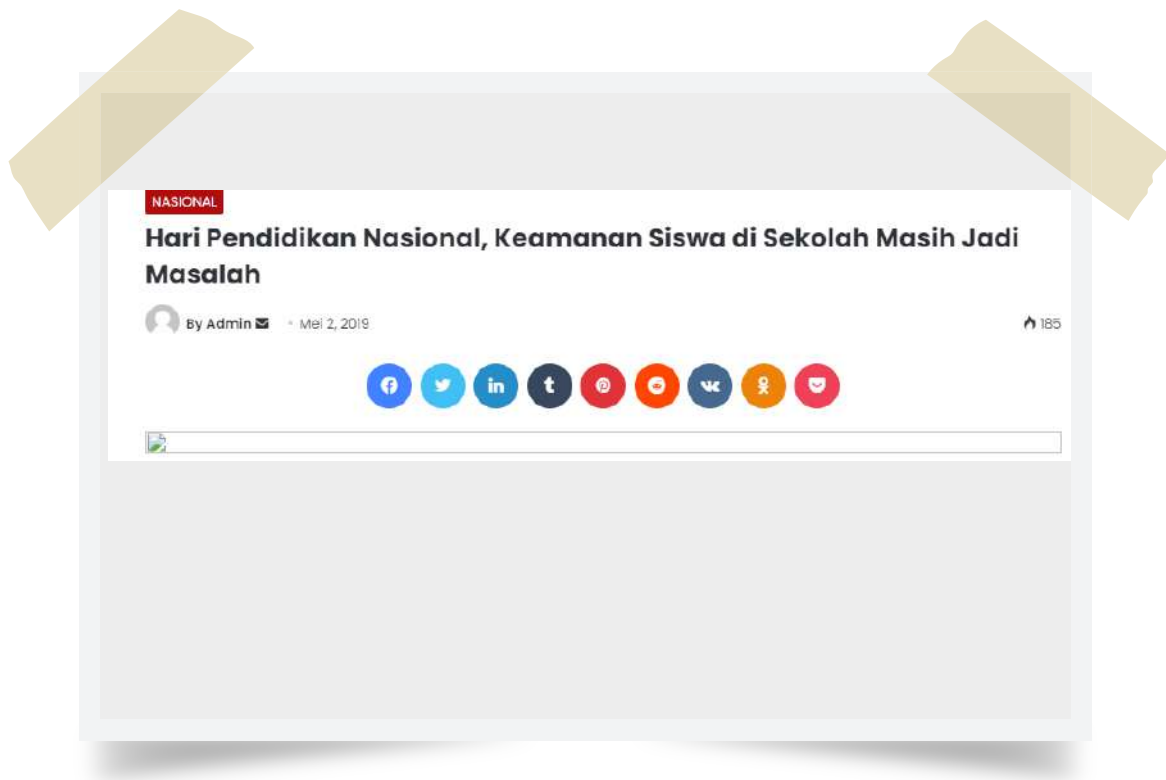
tirto.id - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merayakan Hari Pendidikan Nasional 2019 dengan menyoroti geliat intoleransi dan paham radikalisme pada satuan pendidikan, baik di tingkat dasar maupun tingkat atas. Menurut JPPI, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia masih belum optimal mengurus persoalan tersebut.

“Di tahun ini, konten intoleransi ini juga masuk dalam soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di sekolah. Mengerikan sekali, nama ujiannya saja berstandar nasional, tapi soalnya tidak mendidik dan sungguh tidak sesuai standar,” ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji melalui pesan singkat, Kamis (2/5/2019).

Berkenaan dengan kasus tersebut, ia menyayangkan sikap Kemendikbud yang tidak mendalami temuan-temuan semacam itu. Ia juga menjabarkan, pemerintah tidak memiliki langkah konkret terhadap penanganan enam dari sepuluh guru muslim yang memiliki perspektif intoleran terhadap pemeluk agama lain.

“Begitu hasil survei PPIM tahun 2018 terhadap 2.237 guru Muslim di 34 provinsi. Selain intoleransi, survei itu juga menilik tendensi radikalisme, dan mendapati bahwa hampir setengah guru Muslim memiliki opini radikal,” ujarnya. Sebab itu, ia tekankan perlunya pemerintah untuk mengutamakan moderatisme beragama dan nilai-nilai multikulturalisme ke dalam pembelajaran di sekolah. Hal tersebut sebagai upaya penangkal sikap dan pola pikir intoleran dan radikalisme dalam satuan pendidikan. “Harus ada evaluasi dan langkah intervensi yang sistematis terhadap guru-guru yang terpapar pemikiran dan sikap intoleran dan radikal,” pungkasnya.

Sumber: <https://tirto.id/jppi-usul-kemendikbud-utamakan-tangkal-intoleransi-radikalisme-dnuY>



SIBERNAS.com – Peringatan Hari Pendidikan Nasional kali ini pun (2 mei 2019), harus menjadi momentum otokritik terhadap pelaksanaan pendidikan agar semakin mengedepankan nalar dan akal sehat, disiplin, budaya kejar prestasi, dan semangat cinta pada Tanah Air.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai keamanan siswa di sekolah masih menjadi masalah dalam pendidikan Indonesia. Berdasarkan penelitian Right to Education Index (RTEI) pada Desember 2018, indikator kualitas pendidikan Indonesia yang paling rendah adalah soal *safety learning environment*, artinya sekolah masih menjadi tempat yang tidak aman bagi anak.

Masalah pertama adalah sekolah rawan dengan sikap intoleransi dan radikalisme. Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji kasus beredarnya buku ajar di sekolah yang bermuatan konten intoleransi beberapa kali terjadi dan terus terulang.

“Di tahun ini konten intoleransi ini juga masuk dalam soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di sekolah. Mengerikan sekali, nama ujiannya saja berstandar nasional, tapi soalnya tidak mendidikan dan sungguh tidak sesuai standar,” kata Ubaid, Rabu (2/5).

Ubaid menyayangkan pemerintah tidak menelusuri hal ini dan terkesan membiarkannya. Ubaid juga menilai pemerintah tidak memiliki langkah konkret terkait penelitian PPIM tahun 2018 terhadap 2.237 guru muslim di 34 provinsi yang hasilnya hampir setengah dari mereka memiliki opini radikal.

Ia melanjutkan, masalah lainnya adalah kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah. Ubaid mencontohkan kasus Baiq Nuril yang menurutnya sangat mencoreng muka pendidikan Indonesia. “Korban pelecehan seksual di sekolah ternyata tidak hanya anak, tapi juga guru. Kalau guru saja

tidak berdaya di sekolah, apalagi anak-anak peserta didik,” kata dia.

Hingga kini, kasus kekerasan di sekolah masih terus bermunculan dan merata terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Kasus terakhir yang diributkan publik adalah penganiayaan Audrey. Bahkan hingga hari ini, kekerasan di sekolah masih menghiasi berita-berita di media massa.

Ubaid juga menyinggung soal politisasi sekolah dan penyebaran hoaks khususnya pada saat menjelang Pemilu 2019 lalu. Selain itu, masalah narkoba juga perlu mendapatkan perhatian agar dapat diselesaikan. Menurut Ubaid, peredaran narkoba ini sangat mengancam anak-anak di sekolah.

“Bahkan, di awal 2019, kita dikejutkan dengan salah satu sekolah di Jakarta Barat yang dijadikan gudang penyimpanan narkoba,” kata Ubaid. Dikutip dari republika.co.id (2/5)

Terkait hal ini, JPPI merekomendasikan agar pemerintah bukan hanya membuat peraturan soal sekolah ramah anak tapi menekankan tentang bagaimana sekolah ramah anak bisa diwujudkan. Selain itu, pemerintah juga harus memprioritaskan nilai-nilai multikulturalisme dalam pembelajaran di sekolah.

Sistem Zonasi Hanya Cocok di DKI Jakarta



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Memasuki hari pertama sekolah, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 hanya cocok diberlakukan di [DKI Jakarta](#).

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, menuturkan, sementara untuk daerah-daerah sistem tersebut dipaksakan, mengingat belum meratanya mutu pendidikan di Indonesia.

“Jadi stop zonasi ya, jadi zonasi jangan diberlakukan secara nasional, jangan dipaksakan, daerah-daerah belum siap ya,” ujar Ubaid yang ditemui usai konferensi pers di kantor [ICW](#), Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Ia menambahkan, ke depan diharapkan pemerintah tak hanya mengevaluasi, tetapi perlu memorandum sistem zonasi.

Sistem zonasi tahun ini dianggap sebagai yang terburuk selama 3 tahun penerapannya.

Ubaid menegaskan, pemerintah pusat dan daerah harus lebih dahulu fokus pada pemerataan kualitas sekolah.

“Jangan paksakan daerah menggunakan zonasi dulu. Tapi kalau daerah-daerah seperti di Jakarta yang siap dengan kesenjangan mutunya nggak terlalu tinggi ya silahkan lakukan sistem zonasi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan, sistem

zonasi akan terus dievaluasi.

Kemendikbud mengakui, kurangnya sosialisasi sampai ke masyarakat merupakan pangkal gaduhnya PPDB tahun ini.

Diketahui, sistem penerapan zonasi sendiri diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan zonasi menjadi berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya.

Koalisi Masyarakat Sipil ini menyoroti Visi Indonesia yang disampaikan Presiden Jokowi pada Minggu malam kemarin (14/7/2019).

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menuturkan, Presiden terpilih 2019-2024 itu harus tegas menangani sejumlah masalah di dunia pendidikan di Indonesia.

Diantaranya korupsi dana pendidikan, pungli, maupun jual beli kursi sekolah.

Hal itu disampaikan Ubaid yang ditemui usai konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

“Korupsi pendidikan, pungli, jual beli kursi, selalu mewarnai dunia pendidikan kita di Indonesia, karena itu sesuai visi presiden yang tadi malam disampaikan, presiden harus tegas,» ungkap dia.

Menurut Ubaid, kasus-kasus dunia pendidikan perlu diinvestigasi lengkap dan menindak adil oknumnya, agar visi membangun Sumber Daya Manusia (SDM) dalam revolusi mental tercapai.

“Oknum-oknum itu menjadi racun di dunia pendidikan dan sekolah adalah tempat di mana penunjukan karakter revolusi mental,» kata Ubaid.

Sebelumnya, pendamping Maaruf Amin dalam pilpres 2019 itu menyampaikan sejumlah poin dalam pidato visi Indonesia di SICC, Sentul, Jawa Barat, tadi malam.

Dalam poin kedua pidato mantan gubernur DKI Jakarta itu, disampaikan, visi agar kualitas pendidikan ditingkatkan, di mana Pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi, serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia.

Joko Widodo (Jokowi) melakukan pidato sebagai presiden terpilih di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) malam ini. (tangkap layar KompasTV)

Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai seharusnya upaya pemberantasan korupsi disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan Pidato Kebangsaan sebagai presiden terpilih dalam acara Visi Indonesia pada Minggu (14/7/2019) malam.

Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo menuturkan, Presiden Jokowi semestinya menyebut pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda yang diutamakan dalam pemerintahannya bersama Maaruf Amin.

Sebab, hal itu menjadi bagian dari komitmen mendukung kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dalam menempatkan KPK sebagai lembaga yang memimpin pemberantasan korupsi, seharusnya Presiden Jokowi menegaskan ulang sebagai komitmen mendukung kerja-kerja KPK,” papar Adnan saat dihubungi via telepon, Senin (15/7/2019).

Menurutnya, dukungan dari Presiden dalam pemberantasan korupsi sangatlah penting.

Jika pidatonya menyebut isu pemberantasan korupsi secara khusus, itu menjadi simbol bahwa Kepala Negara akan selalu ada di belakang KPK.

Apalagi, lanjutnya, saat ini KPK dihadapkan pada sejumlah persoalan, yaitu dari seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023, kemudian Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan, dan RUU KUHP.

“Itu konteks politik yang perlu dipastikan supaya pemerintah tidak dianggap sedang bermain di belakang permainan oknum tertentu yang ingin mengurangi, mempersempit, dan melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Sebelumnya, Dalam acara Visi Indonesia, Joko Widodo berpidato untuk pertama kalinya sebagai presiden Indonesia terpilih 2019-2024.

Tak hanya Jokowi, Ma’ruf Amin juga turut berpidato di acara tersebut.

Dalam pidatonya, Jokowi menyebut lima tahapan besar yang akan dilakukannya bersama wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin untuk membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan global.

Saat menyampaikan pidato Visi Indonesia, sejumlah isu yang ditonjolkan Jokowi antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi.

Namun, isu penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi tidak disampaikan eksplisit oleh Jokowi.

Reformasi Birokrasi Masuk

Reformasi birokrasi menjadi satu dari lima visi yang dibacakan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk kepemimpinannya pada lima tahun mendatang.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Visi Indonesia yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) malam.

Ia mengatakan, dirinya bersama Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin akan melakukan reformasi birokrasi, terutama untuk struktural.

Nantinya, akan ada pemangkasan terhadap lembaga pemerintahan yang masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya.

“Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita, reformasi struktural, agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah.

Hati-hati, kalau pola pikir, mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas,” ujar Jokowi, dalam pidatonya tersebut.

Birokrasi harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal agar program yang dijalankan bisa benar-benar efektif.

Ia mengaku akan melakukan pengecekan sendiri terkait kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sistem yang diterapkan pada masing-masing lembaga pemerintah.

Jika dirinya menemukan lembaga yang tidak menerapkan sistem secara efisien dan efektif, maka ia tidak segan untuk ‘mencopot’ pejabat lembaga tersebut.

“Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi, akan saya cek sendiri, Akan saya kontrol sendiri, begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas, copot pejabatnya,” jelas Jokowi.

Tidak hanya itu, Jokowi bahkan akan membubarkan lembaga pemerintah yang tidak menghasilkan output atau prestasi yang signifikan.

“Kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, akan saya bubarkan,” tegas Jokowi.

Oleh karena itu ia meminta agar perubahan segera dilakukan mulai dari sekarang, semua lembaga pemerintah harus meningkatkan kinerja demi terwujudnya lembaga yang cekatan dan mengikuti perkembangan zaman.

“Tidak ada lagi pola pikir lama, tidak ada lagi kerja linier, tidak ada lagi kerja rutinitas, tidak ada lagi kerja monoton, tidak ada lagi kerja di zona nyaman, harus berubah.

Sekali lagi, kita harus berubah.

Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman,” kata Jokowi.

Jokowi menekankan, bersama Ma'ruf Amin, dirinya ingin mewujudkan negara yang adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif.

JPPI Minta Satgas PPDB Libatkan Semua Komponen Pemerintah



tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta Satuan Petugas (Satgas) Sistem Zonasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melibatkan semua komponen pemerintah. Pemerintah yang dimaksud di antaranya Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Dinas Pendidikan Daerah, komite sekolah dan masyarakat sipil secara luas. Selain itu, menurutnya, juga penting melibatkan pihak-pihak yang profesional seperti dari kalangan akademisi. “Sehingga Satgas bisa menampung suara dan mengevaluasi apa pun yang terjadi dari berbagai angle dan perspektif,” kata Ubaid saat di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019). Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan (KMSPP) ini juga meminta agar Satgas yang nanti dibentuk oleh pemerintah, jangan menggunakan “kacamata kuda”. Contohnya, kata dia, Satgas tersebut hanya berkordinasi dengan Dinas Pendidikan saja, sehingga hanya mendapat satu perspektif. Menurutnya, sangat penting jika satgas tersebut juga mendengarkan aspirasi dari para orang tua murid tentang apa saja yang terjadi selama sistem PPDB berlangsung. “Kita sudah buktikan bahwa tahun ini adalah tahun terkisruh dan tahun tergaduh sampai di mana-mana demo menolak. Dan sampai hari ini, pertama masuk ada sekolah di Jawa Timur yang menyebarkan angket ke seluruh anak yang masuk mengatakan tidak ingin sistem zonasi diberlakukan tahun depan,” ucapnya “Angkanya sampai 84 persen yang menolak zonasi ini, karena banyak anak yang enggak rela bisa masuk sekolah dekat rumahnya, yang ternyata sarana prasarana dan kualitas gurunya masih sangat rendah,” tambahnya.



TRIBUNJAKARTA.COM PAMULANG- Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, heran dengan peringkat jeblok Tangerang Selatan (Tangsel) dalam hal keterbukaan informasi publik di antara kota dan kabupaten lain se-Banten versi Komisi Informasi Banten pada tahun 2018.

Ubaid heran karena banyaknya kampus yang notabene menghasilkan orang-orang pintar, tidak berbanding lurus dengan sikap terhadap informasi.

“Ini kan aneh, kampus-kampus ada di Tangsel, orang-orang pintar ada di Tangsel,” ujar Ubaid di Pamulang, Selasa (20/8/2019).

Lebih jauh, Ubaid mengatakan, secara umum, informasi yang tertutup membuat perilaku koruptif mudah berkembang.

“Artinya keterbukaan informasi publik itu kan bagian dari upaya untuk menutup celah tindakan koruptif. Ketika informasi publik ini ditutup berarti ada banyak permainan di belakang layar itu bisa kita indikasikan tindakan korupsi bahkan tindakan koruptif,” jelasnya.

Berkaitan dengan dunia pendidikan, Ubaid menghubungkan keterbukaan informasi publik dengan partisipasi masyarakat dalam mengawasi praktik rasuah.

Ia memberi contoh jika seorang wali murid meminta laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) kepada pihak sekolah.

Namun karena indeks keterbukaan informasi yang rendah sehingga membuat si wali mirid tidak mendapatkan laporan dana BOS itu.

“Kalau dia indeksnya rendah dia tidak ada keterbukaan di level sekolah di level dinas di level kabupaten kota, artinya celah untuk menutup kasus korupsi itu menjadi terbuka lebar, karena informasinya tertutup,” jelasnya.

Informasi yang terbuka membuat masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mengawasi praktik rasuah di dunia pendidikan.

“Kalau informasi itu dibuka maka memperkecil kemungkinan orang melakukan korupsi. Tapi ketika informasi publik ditutup maka tindakan korupsi potensial dilakukan oleh pejabat terkait,” jelasnya.



Diketahui, praktik pungli pendidikan di Tangerang Selatan kronis atau pungli pendidikan di Tangerang Selatan stadium 4.

Hasil peliputan WartaKotaLive, Truth dan Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) beberkan temuan terkait praktik pungli pendidikan di wilayah Tangerang Selatan.

Bahkan, penemuan lainnya yakni pemantauan pelaksanaan PPDB 2019 di Tangerang Selatan.

Menurut Fitra dari Sekolah Anti Korupsi Tangerang (Sakti) Pelaksanaan PPDB di Tangerang Selatan masih dinilai buruk. Sebab, masih banyaknya masalah hingga pemuatan dugaan praktik jual beli bangku.

Pelaksanaan PPDB di Tangerang Selatan yang katanya online justru faktanya offline.

Wali murid harus mengantre dari jam 3 pagi. Belum lagi dugaan-dugaan jual beli bangku dan pungli buku, seragam yang beratkan masyarakat di tiap sekolah.

Fitra juga menjelaskan terkait berbagai jenis pungli yang nilai dan bentuknya beragam dari Rp 1 juta sampai Rp 2 juta untuk seragam. Lalu Rp 1 juta hingga Rp 8 juta untuk jual beli bangku.

Berbagai macam punglinya seperti buku, uang kas dan qurban. Praktik pungli seperti ini terjadi dari SD Sampai SMA.

Menurut Aco selaku Koodinator Truth permasalahan pungli dan jual beli bangku sudah menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Karena, tidak ada kemauan dari kepala daerah membrantas masalah pungli pendidikan di Tangerang Selatan.

"kami sudah mengawal PPDB sejak tahun 2015, permasalahnya tetap sama pungli dan jual beli

bangku. Kasus-kasus pungli sudah kami laporkan ke Polres Tangerang Selatan”

“Namun setiap laporan kita selalu menguap, bahkan sampai sekarang SP2HP-nya belum ada yang diberikan, sudah masuk stadium 4 sangat kronis dan berbahaya,” ujar Aco kepada Warta Kota, Kamis (22/8/2019).

Suhendar Akademisi dari Universitas Pamulang, sangat menyayangkan peran Polres Tangsel yang buruk dalam penanganan pungli.

Ia menyebut pungli itu dalam bahasa hukum bisa termasuk korupsi, pemerasan atau suap tergantung konteksnya. “Pungli juga termasuk tindak pidana biasa yang artinya tanpa ada laporan dari masyarakat Polres bisa berantas pungli”

“Kali ini lebih aneh lagi jika sudah bertahun-tahun dilaporkan masyarakat, justru tidak ada tindakan dari Polres Tangerang Selatan,” ucap Suhendar.

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid mengaku tidak kaget dengan temuan KMPP di Tangerang Selatan.

“Pungli memang sering terjadi di Indonesia, laporan yang kami terima mencapai 600-an laporan. Dan untuk di Tangsel pungli cukup masif”

“bahkan guru yang mencoba membongkar pungli dipecat dan penegak hukumnya malah diam hal ini perlu langkah aktif dari pemangku kebijakan,” katanya.

Saat ditanya apa yang akan dilakukan dari temuan selama memantau PPDB 2019 serta Praktik Pungli, Aco menjelaskan meskipun setiap laporan diabaikan, pihaknya tidak akan berhenti melapor.

“Bukan hanya lapor ke Polres, kami juga mengadu ke Kompolnas, Ombudsman dan institusi terkait juga” “Namun kami akan tetap mengedukasi masyarakat agar berani mengungkap dugaan pungli yang terjadi,” papar Aco.

Terbukti Pungli

Inspektorat Tangerang Selatan akhirnya merampungkan penyelidikan investigasi perkara Rumini.

Seperti diketahui Rumini merupakan mantan guru honorer SDN Pondok Pucung 2 Tangsel yang membeberkan bahwa di sekolahnya terjadi pungutan liar atau pungli.

Kepala Inspektorat Tangerang Selatan, Uus Kusnadi menyatakan bahwa pihak sekolah terbukti bersalah dalam kasus ini.

Kepala SDN Pondok Pucung 2 menurutnya telah melakukan pelanggaran.

“Kepsek berinovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran siswa. Tapi metode pendanaan tidak sesuai dengan Permendikbud,” ujar Uus kepada Wartakotalive.com, Kamis (15/8/2019).

Uus menjelaskan hasil investigasi tersebut di antaranya yakni adanya mekanisme yang keliru

terhadap pungutan yang dinamakan iuran atau les komputer.

Berdasarkan pengakuan Rumini, iuran les komputer tersebut telah terjadi dari tahun 2012 dan jumlahnya sebesar Rp. 20.000.

“Tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Berdasarkan data Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan dari tahun 2015 hingga 2018 jumlah murid sebanyak 2.296 murid.

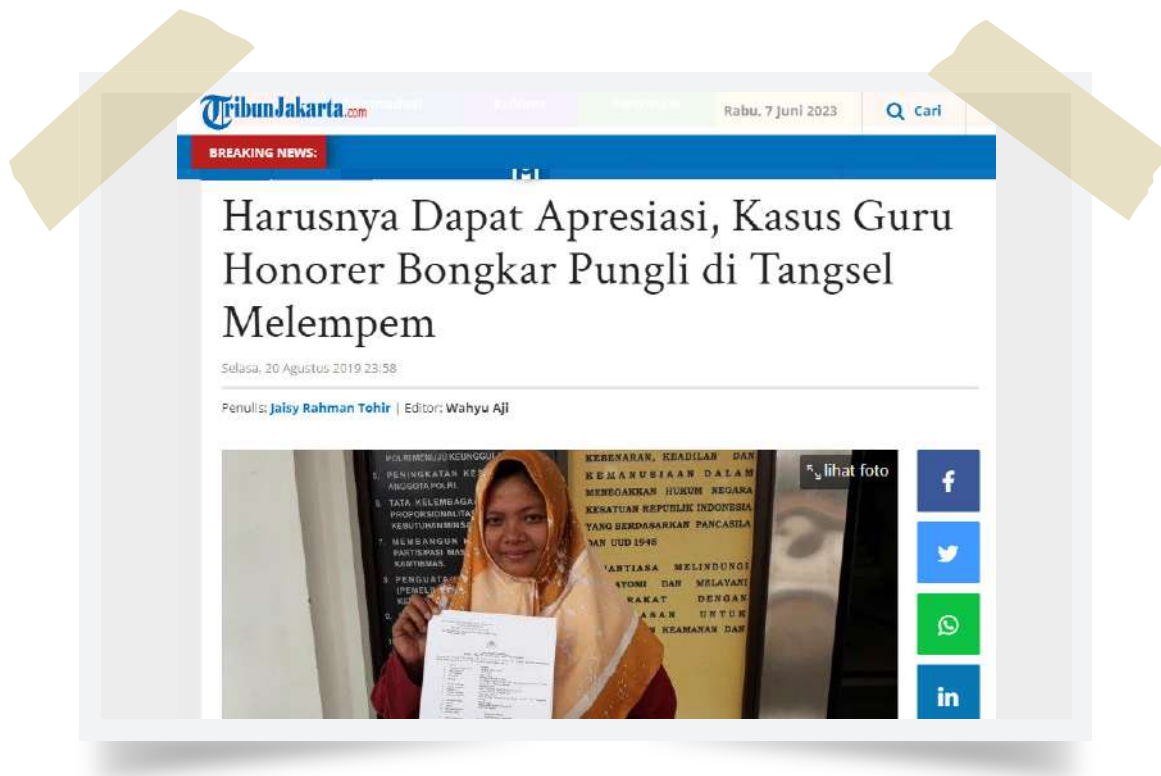
Jika setiap bulan 2.296 siswa mengumpulkan uang kurang lebih Rp. 49,2 juta maka jika pungli tersebut dilakukan selama 4 tahun.

Dapat diasumsikan uang yang harus dikembalikan pihak SDN Pondok Pucung 02 lebih dari Rp. 2,2 miliar ke orangtua murid. “Kalau angkanya itu tidak saya sebutkan. Apalagi sampai Rp. 2,2 miliar,” kata Uus.

Uus pun enggan banyak komentar terkait masalah pungli yang membelenggu Pemerintahan Kota Tangerang Selatan ini.

Hasil investigasi tersebut akan dilaporkan ke Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany pada Jumat (16/8/2019) esok.

“Mohon maaf saya tidak bisa komentar lagi. Intinya sanksi yang diberikan terkait masalah ini yaitu PP Nomor 53 administratif,” paparnya.



TRIBUNJAKARTA.COM, PAMULANG - Kasus dugaan pungli di SDN Pondok Pucung 2, Tangerang Selatan (Tangsel), yang diungkap mantan guru honorernya, Rumini, belum terlihat titik terang.

Seperti diketahui, Rumini menyuarakan praktik dugaan pungli di SDN yang berlokasi di kecamatan Pondok Aren itu terkait uang komputer, instalasi proyektor, uang kegiatan tahunan dan pembelian buku secara mandiri.

Kasus itu sudah dilaporkan ke Polres Tangsel demi menguak aktor praktik yang diduga sudah berlangsung selama bertahun-tahun itu secara jalur hukum.

Sementara, Pemkot Tangsel menurunkan Inspektorat untuk melakukan investigasi atau pemeriksaan khusus mengkonfirmasi aduan Rumini yang kadung ramai di media massa hingga elektronik.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyayangkan pihak Pemkot dan Kepolisian yang belum memberikan hasil yang jelas dari investigasi atau penyelidikannya.

“Kita menyimpulkan bahwa pemerintah kota Tangerang Selatan dan penegak hukumnya ya melempem gitu ya,” jelas Ubaid di Pamulang, Selasa (20/8/2019).

Terlebih, Ubaid juga menyayangkan Pemkot Tangsel yang tidak mengapresiasi Rumini dengan aksinya yang berusaha menguak praktik rasuah di dunia pendidikan itu.

“Kasus Rumini ini seharusnya pemerintah memberikan apresiasi kepada Rumini, karena dia guru honorer, kemudian membuka kepada masyarakat apa yang terjadi di sekolah.”

“Bukan malah sebaliknya malah dipecat dan kasusnya enggak jelas. Tidak ada tanggapan dari dinas, dari wali kota, ya kita menyayangkan,” ujarnya.

JPPI imbau pelajar dan mahasiswa hentikan demonstrasi

© Rabu, 25 September 2019 21:56 WIB



Jakarta (ANTARA) - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengimbau para pelajar dan mahasiswa kembali ke sekolah dan kampus masing-masing serta meninggalkan aksi demonstrasi.

“Saya mengimbau kepada para pelajar dan juga mahasiswa untuk kembali ke sekolah dan kampus, karena tuntutan sudah dipenuhi DPR,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan unjuk rasa adalah hak konstitusi bagi warga negara, akan tetapi harus dilakukan secara tertib dan tidak melanggar kepentingan umum.

Menurut Ubaid, aksi demonstrasi itu dapat ditumpangi penumpang gelap yang anarkis dan kontra demokrasi dengan maksud, tujuan, dan kepentingan sendiri.

Pengamat pendidikan Andreas Tambah menuturkan tidak semua demo mahasiswa adalah mahasiswa.

“Peserta demo sore ini adalah anak-anak SMA/SMK yang digiring oleh orang yang lebih dewasa, tiap rombongan yang datang dari beberapa penjuru paling tidak 2-3 orang dewasa, seperti mahasiswa,” ujarnya.

Dia berharap, situasi di sejumlah daerah yang terjadi demonstrasi kembali kondusif dan tidak ada demonstrasi yang anarkis.

Demonstrasi terjadi di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia dalam tiga hari terakhir, yakni Senin (23/9), Selasa (24/9), dan Rabu ini di gedung-gedung legislatif untuk menuntut pembatalan RUU KUHP dan UU KPK.

Akibat demonstrasi di Jakarta pada Rabu siang hingga malam yang berujung ricuh, ruas jalan Gatot Soebroto, jalan tol Dalam Kota, beberapa ruas jalan lainnya dan operasional di stasiun terdekat, yakni Palmerah, terganggu.

WUJUDKAN SEKOLAH AMAN TANGSEL TUAN RUMAH PELATIHAN DISIPLIN POSITIF



Banten – Baru-baru ini, sedikitnya 40 peserta yang terdiri dari guru dan komite sekolah dari 15 sekolah di kota Tangerang Selatan Banten mengikuti WORKSHOP PEMAHAMAN DISIPLIN POSITIF KEPADA PEMANGKU PENDIDIKAN dengan tema kunci, “Mewujudkan Sekolah Ramah Anak melalui Penerapan Metode Disiplin Positif”. Workshop menghadirkan sejumlah praktisi pendidikan dan instruktur terkemuka, workshop diikuti cukup antusias para pemangku pendidikan Kota Tangsel, Banten.

Workshop diinisiasi Seknas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI/NEW Indonesia (*Network for Education Watch*) bersama Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Banten. Pelatihan berlangsung di Kota Tangsel, 11-12 September 2019.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan pelatihan perdana ini digelar dengan peserta terbatas dan berharap semua sesi pelatihan dapat diserap maksimal oleh peserta.

“Pelatihan serupa secara berkelanjutan rencananya digelar lebih masif dan diharap akan ada perubahan berarti dengan penerapan metode disiplin positif guna mencegah praktik penghukuman siswa.

Sehingga Indonesia dinilai mampu mewujudkan sekolah aman ramah anak secara lebih menyeluruh, tentu dengan dukungan pemangku pendidikan dan masyarakat yang lebih partisipatif,” imbuh Ubaid.

Menurut para trainer, sedikitnya ada empat prinsip utama mencegah praktik penghukuman pada anak yang selaras semangat disiplin positif, ke empat hal tersebut adalah , Berhubungan (*Related*), Menghormati Anak (*Respectful*), Logis (*Reasonable*) dan lebih dialogis.

Beberapa peserta pelatihan mengaku menemukan hal baru terkait tema pelatihan , sementara sebagian peserta lainnya makin optimis mampu menerapkan metode disiplin positif secara bertahap di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Data Right to Education Index (RTEI) 2018 menunjukkan, bahwa sekolah di Indonesia bukan tempat yang aman bagi anak-anak di luar rumah. Ini dikarenakan tingginya angka kekerasan yang terjadi di sekolah.

Salah satu hal yang kerap terjadi adalah modus mendisiplinkan siswa. Satu contoh, guru bisa bahkan diperbolehkan menggunakan cara-cara kekerasan untuk tujuan mendisiplinkan anak. Akibatnya, anak tidak menjadi disiplin tapi malah terjadi masalah berkepanjangan dan konflik kekerasan di sekolah.

Nadiem Duduki Mendikbud, JPPI: Pendidikan Karakter Harus Jadi Perhatian



MONITOR, Jakarta – Penunjukan Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi sorotan berbagai pihak. Tak terkecuali Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji.

Ubaid berpandangan dengan latar belakang Nadiem yang seorang pengusaha. Mendikbud baru tersebut akan lama untuk bisa menyesuaikan atau memahami persoalan-persoalan pendidikan saat ini.

“Pak Nadiem ini kan baru memegang jabatan penting di dunia pendidikan, maka beliau akan sangat lama sekali untuk memahami atau tahu terhadap persoalan-persoalan di dunia pendidikan,” ujar Kornas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji dalam diskusi Publik Masa Depan Pendidikan di Era Jokowi Jilid II, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).

Menurut Ubaid bicara dunia pendidikan tidak hanya bicara soal ngajar mengajar saja. Melainkan ada juga persoalan kebijakan dan infrastruktur.

“Pemetaan dan pemahaman guru wajib benar-benar dipahami oleh seorang menteri pendidikan. Sehingga tidak ada lagi nanti kualitas guru yang baik hanya dimiliki oleh sekolah tertentu saja,”terangnya.

“Manajemen tata kelola sekolah pun harus diperhatikan dan diberi pendampingan. Jadi bukan sekolah yang berprestasi dibantu jangan begitu nanti kalau nggak merata paradigma sekarang adalah sekolah semua harus merata harus pakai zonasi,”sambungannya.

Ubaid pun mengatakan kalau pendidikan karakter di sekolah saat ini tidak jalan. Sebagai contoh kasus korupsi BOS yang masih marak.

“Banyaknya kasus BOS membuktikan tidak adanya transparansi keterlibatan publik untuk bisa ikut dalam manajemen pengelolaan BOS. Ini yang juga harus menjadi perhatian Nadiem,” tegasnya.

Ubaid pun mengatakan, dalam lima tahun ke belakang proses pengelolaan pendidikan tidak berjalan dengan baik. Sebagai bukti banyak anak didik yang melakukan tindakan yang melenceng dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap gurun dan hal lainnya.

“Pendidikan karakter inilah yang memang harus menjadi perhatian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru,” pungkasnya.



BANJARMASINPOST.CO.ID - Apapun kurikulumnya, guru yang jadi poros utama. Itu yang seharusnya menjadi perhatian. Guru menjadi sosok yang paling penting perannya dalam pendidikan. Bisa dikatakan, kualitas guru berbanding lurus dengan keberhasilan guru.

Namun, dewasa ini kita melihat banyak hal yang menurun dalam pendidikan di Indonesia. Berdasar data UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) Report 2016, pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang dan kualitas guru menempati ukuran ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. Memprihatinkan sekali.

Belum lagi, data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) saat melakukan penelitian Right to Education Index (RTEI) guna mengukur pemenuhan hak atas pendidikan di berbagai negara. Hasil penelitian menyatakan kualitas pendidikan di Indonesia masih di bawah Ehtiopia dan Filipina.

Hal ini menjadi ironi, sebab pemerintah telah menggelontorkan APBN untuk alokasi pendidikan ini sangat besar. Sejak 2016 mencapai Rp 370,4 T hingga 2019 menyentuh angka Rp 492,5 T.

Padahal, pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia ini, mulai dari kehadiran kurikulum 2013, peningkatan efektivitas BOS, program Indonesia Pintar, dan sebagainya. Akan tetapi, masih saja ada persoalan kompleks dalam pendidikan kita.

Penyebab Terbesar

Dari berbagai sumber dan juga pengamatan penulis sebagai tenaga pendidik, ditemui banyak faktor rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Pertama, rendahnya kualitas tenaga pendidik. Faktanya, pada 2015, hasil Uji Komptensi Guru (UKG) rata-rata nasional hanya 44,5, jauh di bawah nilai standar 75. Bahkan kalau ditanya kepada sebagian guru tentang soal UKG, mereka

banyak mengeluh susahny soal tersebut. Sebenarnya bukan soalnya susah, tapi sebagian guru tidak mau naik level dalam belajar. Selalu saja bertahan di zona nyaman alias tidak mau belajar lagi. Inilah menjadi faktor terbesar.

Kedua, guru tidak mau memperbaiki pola pengajaran. Di sana ada saja guru yang hanya menggunakan metode ceramah. Guru hanya membaca buku lalu anak-anak menulis. Artinya proses belajar mengajar hanya satu arah. Akhirnya, siswa bosan karena monoton.

Ketiga, guru tidak melek teknologi. Di era 4.0 ini harusnya memicu guru untuk lebih memperluas wawasannya tentang teknologi. Siswa rata-rata telah memiliki smartphone. Dia bisa mengakses apa saja dari alat komunikasi tersebut. Oleh karena itu, guru juga harus tahu tentang teknologi guna memperbarui informasi bagaimana kemajuan pembelajaran era sekarang. Sungguh miris jika siswa lebih tahu mengoperasikan smart phone dibandingkan guru sendiri. Siswa tahu bagaimana cara mendownload modul, tapi guru sendiri tidak mengerti. Hal itu yang terjadi saat ini.

Meningkatkan Kualitas

Dari pengalaman dan pengamatan penulis yang juga sebagai guru, setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan guna meningkatkan kualitas pengajaran guru di Indonesia.

Pertama, guru harus kuat berliterasi. Guru harus banyak membaca dan menulis. Di tengah ramainya informasi lewat media sosial, menjamurnya sarana belajar via online, guru harus makin cerdas. Bayangkan saja, sekarang pemerintah sudah merilis akses belajar online bernama Rumah Belajar. Di sana guru bisa belajar bersama siswa. Ini tiada lain untuk meningkatkan kualitas guru. Selain itu, guru juga bisa membentuk atau bergabung dalam komunitas guru di aplikasi pesan whatsapp guna membahas dunia pendidikan dan saling berbagi ilmu dan pengalaman.

Kedua, guru serius merancang model pembelajarannya. Di lingkungan sekolah, masih banyak guru yang hanya datang ke sekolah tanpa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Kebiasaan ini harus ditinggalkan. Guru harus tahu model pembelajaran apa yang dia pakai, bagaimana pendekatannya, metode apa, dan teknik seperti apa. Di sini lah dibutuhkan keseriusan guru dalam memaknai sendiri profesinya. Dia punya tanggung jawab dalam memenuhi tugasnya sendiri.

Variasi Media Pengajaran

Hal yang paling dekat dengan siswa adalah media pengajaran itu sendiri. Pendidik mestinya menyiasati media apa yang cocok dengan materinya. Sehingga belajar lebih bermakna. Media adalah sarana yang berfungsi untuk menyampaikan informasi. Guru bisa menggunakan ragam variasi media.

Pertama, menggunakan gambar, foto, sketsa dalam mengajar. Tujuannya agar konten materi lebih nyata dan tervisualisasikan ke siswa. Contoh, saat guru IPS mau memperkenalkan tentang ragam rumah adat di Indonesia, guru bisa menyajikan di depan siswa beberapa foto rumah adat yang telah tercetak.

Kedua, peta atau globe, atau era sekarang populer penggunaan google maps untuk menyajikan data-data lokasi. Seperti tempat dan jarak suatu tempat. Contoh, ketika guru matematika ingin

mengukur berapa jarak dari kota A ke kota B, guru bisa menggunakan google maps untuk mengukurnya.

Ketiga, mengajak siswa ke laboratorium. Guru materi sains seperti IPA, Fisika, Kimia, Biologi, sangat diharapkan membuat praktikum, karena tingkat pemahaman siswa lewat praktikum lebih cepat daripada auditori/mendengar. Berdasarkan pengalaman penulis yang juga guru IPA, ternyata siswa sangat senang dengan praktikum. Contoh, saat penulis mau menyampaikan materi IPA kelas VII tema Mencair dan Memadat, siswa berpraktikum terlebih dahulu. Dengan memanaskan lilin menggunakan spiritus sebagai proses mencair, selanjutnya setelah mencair lilinnya, dimasukkan lagi ke dalam wadah yang berisi air es. Hasilnya lilin tadi kembalili memadat. Ini membuat siswa lebih mengerti pelajaran.

Keempat, menggunakan laptop atau perangkat komputer. Ini termasuk media yang banyak disukai oleh siswa. Dengan adanya laptop, guru bisa memberikan juga tambahan wawasan dari internet.

Guru bisa mengakses laman Portal Rumah Belajar <https://belajar.kemdikbud.go.id> dari Kementerian Pendidikan. Di sana banyak sekali menu pelajaran buat guru maupun siswa, mulai dari tingkat SD sampai SMA.

Kelima, study tour. Pengalaman siswa ke museum, panti asuhan, masjid, kebun binatang, taman bunga, adalah hal yang tak terlupakan oleh siswa jika memang ada pelajaran terkait materi pelajaran di sana. Di setiap daerah, pasti ada saja lokasi-lokasi yang menyimpan banyak sejarah dengan segala nilai-nilainya. Hal ini tentu sangat patut dimanfaatkan oleh tenaga pendidik. Masih banyak lagi variasi media pengajaran jika guru benar-benar terus belajar dan meng-upgrade dirinya.

Bagaimana pun, guru harus meningkatkan kualitasnya, baik dari sisi mindset, pengajaran, dan media pembelajaran. Guru harus berubah dari konvensional ke modern. Guru harus familiar dengan teknologi dan terus meningkatkan literasinya (digitally literated). Semua ini untuk kebaikan diri masing-masing, generasi masa depan, dan untuk kemajuan Indonesia. (*)

JPPI Sorot Rencana Kebijakan Sertifikasi Perkawinan oleh Pemerintah



Rencana sertifikasi perkawinan oleh pemerintah ditanggapi pro dan kontra oleh beberapa kalangan. Kebanyakan masyarakat belum menyetujui wacana yang digulirkan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy tersebut. Karena urusan pernikahan adalah urusan pribadi yang tidak boleh diintervensi secara penuh oleh siapapun. Kebijakan ini juga dinilai hanya akan mempersulit masyarakat karena secara tidak langsung masyarakat harus mendapat restu pemerintah jika ingin melangsungkan pernikahan.

Koodinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid ikut memberikan tanggapan atas polemik ini. Ia menuturkan lahirnya kebijakan sertifikasi perkawinan menunjukan tidak berhasilnya pendidikan yang dirumuskan oleh pemerintah. Padahal kata dia, jika materi-materi pernikahan seperti materi mengenal reproduksi dan pendidikan kedewasaan diajarkan di perguruan tinggi atau di sekolah akan lebih baik dan efektif. “Harusnya sudah ada di bangku sekolah, di bangku kuliah, lalu kenapa orang harus belajar lagi tentang itu? Satu contoh misalnya kalau materi perkawinan masuk di lembaga pendidikan, di sana akan diuraikan bahwa laki-laki itu harus paham soal kesehatan reproduksi, bagaimana perempuan punya fungsi hamil, melahirkan, siswa juga diberikan pemahaman bahwa pernikahan bukan hanya hubungan biologis tapi ada pengetahuan kesehatan reproduksi, ada keadilan gender di situ, bagaimana membangun rumah tangga yang baik,” kata Ubaid di Bogor Jawa Barat, Selasa (19/11) sore.

Abdullah menilai lahirnya kebijakan tersebut menandakan tidak berfungsinya lembaga pendidikan. Di sisi lain, kegiatan penataran oleh pemerintah juga tidak menjamin kehidupan rumah tangga seseorang menjadi sakinah mawaddah warahmah seperti yang diharapkan kebanyakan orang.

Selain itu, pendidikan terkait dengan hal itu kata Abdullah Ubaid dapat diperoleh dari banyak hal tidak dengan pelatihan atau bimbingan pra nikah yang diwajibkan pemerintah saja. Apalagi sertifikat perkawinan oleh pemerintah rawan dipalsukan, dengan begitu kegiatan hanya akan memperbesar masalah-masalah di masyarakat.

“Tahulah kualitasnya pelatihan-pelatihan yang diadakan kualitasnya kayak gimana, kemampuan trainernya juga seperti apa, itu masih bermasalah, apalagi mau dibuat seperti ini,” ujarnya menambahkan. Ia mempertanyakan, apa yang melatarbelakangi mengapa pemerintah mau mewajibkan bimbingan pra nikah. Menurutnya, jika masalahnya adalah angka perceraian yang tinggi, maka harus ditinjau secara mendalam apa penyebab dari perceraian oleh pasangan suami istri tersebut. “Apakah karena tidak pernah diceramahin, bukannya orang setiap minggu diceramahin tentang iman dan taqwa? Apa hubungannya tidak memahami agama dengan perceraian, mungkin caranya yang berbeda,” tuturnya. Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu, Kemenko PMK mencanangkan program sertifikasi perkawinan.

Program sertifikasi perkawinan tersebut nantinya akan menjadi salah satu syarat pernikahan bagi para pasangan yang akan menikah. Adapun cara untuk mendapatkan sertifikasi tersebut adalah dengan mengikuti bimbingan pranikah. Bagi yang lulus bimbingan, maka ia berhak mendapatkannya dan bisa menikah. Hal sebaliknya, berlaku bagi yang tidak lulus.

6 Hal yang jadi Sorotan di Pendidikan Indonesia Selama 6 Tahun



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti enam hal terkait **pendidikan Indonesia** selama 2019. Pertama, terkait rencana dihapusnya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan Dikmas). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82/2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, hal itu tersebut merupakan bencana bagi pendidikan kelompok marginal. Menurut mereka, itu merupakan tanda bahwa pemerintah hanya mementingkan pendidikan formal.

“Pemerintah tampaknya hanya mementingkan pendidikan formal di bangku sekolah. Sementara Pendidikan untuk kelompok rentan (*excluded groups*) kian dipinggirkan,” ujar Ubaid di kawasan Cikini, Jakarta, Senin (30/12).

Kedua, adalah kualitas pendidikan Indonesia yang masih berada di papan bawah berdasarkan Programme for International Students Assessment (PISA). Kemerosotan yang paling tajam terjadi pada kemampuan membaca.

Untuk kategori membaca, Indonesia berada di peringkat 75 dari 80 negara. Indonesia hanya di atas Kosovo, Filipina, Maroko, dan Lebanon.

“Kita bahkan masih di bawah Macedonia Utara dan Georgia. Jika dibandingkan dengan sesama Asia Tenggara, Indonesia ada di bawah Thailand dan Singapura,” ujar Ubaid.

Ketiga, Ubaid menyoroti isu radikalisme yang berada di sekolah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan JPPI, belum ada bukti nyata dan keseriusan pemerintah dalam menghalau paham tersebut.

Hal itu terlihat, dari adanya virus intoleransi dan radikalisme yang mewabah di institusi pendidikan. Tak jarang, paham tersebut justru sudah memasuki homeschooling dan PAUD.

“Kita dikejutkan dengan penelitian dari UIN Jakarta tahun 2019, yang menyebutkan bahwa 59 persen guru Muslim dukung negara Islam. Maka tak heran jika seringkali ditemukan buku-buku ajar, naskah soal ujian yang menjurus pada paham intoleran,” ujar Ubaid.

Keempat, adalah sistem **zonasi** yang masih menjadi polemik pada 2019. JPPI menilai, hulu dari masalah zonasi yang bikin kisruh adalah nihilnya kebijakan pemerataan pendidikan.

Namun, tampaknya pemerintah menggunakan jalan pintas dengan memaksakan dengan membuat kebijakan pemerataan di level hilir dengan sistem zonasi saat PPDB. Itu dinilainya salah alamat.

“Harusnya problem hulu yang didahulukan untuk diatasi, bukan lari dari masalah lalu ambil yang gampang saja dengan mengatur siswa saat PPDB dengan cara zonasi,” ujar Ubaid.

Selanjutnya, JPPI menyoroti masalah kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan. Berdasarkan catatan JPPI, ada 253 kasus selama 2019 ini.

“Jika dulu kekerasan banyak dilakukan oleh guru, kini trennya banyak juga dilakukan oleh peserta didik,” ujar Ubaid.

Terakhir, JPPI menyoroti persoalan program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Menurut Ubaid, ini adalah program andalan pemerintah, tetapi banyak yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan pantauan **JPPI** selama 2019, ada 303 pengaduan masyarakat terkait program KIP. Kasus yang paling banyak diadukan adalah ketidaktahuan cara mendapatkan KIP (79), distribusi yang tidak merata (61), dan data KIP yang tidak transparan dan mudah diakses (55).

Serta, keterlambatan pencairan (43), KIP tidak tepat sasaran (30), pengusulan data siswa miskin tidak terbuka (20), dan tidak ada keterlibatan publik (16). “Harusnya pemerintah belajar dari tahun-tahun sebelumnya untuk mempermudah akses dan transparansi pengelolaan KIP ini. Supaya masyarakat bisa terlibat, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Ubaid.

Enam Masalah Pendidikan Selama 2019



Jakarta: Jaringan Pengamat Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat ada enam permasalahan pendidikan yang menjadi sorotan pada 2019. Paling mencolok adalah soal kemampuan literasi Indonesia yang jeblok.

1. Kemampuan literasi

Mengutip hasil Program Penilaian Pelajar Internasional atau Programme for International Student Assessment (PISA) yang dirilis oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan kemampuan literasi Indonesia terus merosot. Bahkan, PISA yang dirilis 2019 tidak lebih baik dari 2015. “Sejak 2012 skor kita merosot terus. Pada 2019 paling parah merosotnya,” kata Ubaid dalam Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun Pendidikan 2019 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 30 Desember 2019.

Secara peringkat, untuk kemampuan membaca, siswa Indonesia berada di peringkat 75 dari 80 negara atau urutan keenam dari bawah. Indonesia hanya berada di atas Kosovo, Filipina, Lebanon, dan Maroko.

“Kita bahkan masih di bawah Macedonia Utara (baru ganti nama dari Macedonia di tahun ini dan baru merdeka pada 1991) dan Georgia. Jika dibandingkan dengan sesama Asia Tenggara, Indonesia ada di bawah Thailand dan Singapura,” jelasnya.

2. Terpapar radikalisme

Permasalahan kedua, berdasarkan catatan JPPI, adalah adanya bahan ajar ataupun soal yang diduga terpapar radikalisme. Bahkan, mengutip dari penelitian Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta pada 2019, sebanyak 59 persen guru muslim mendukung negara Islam.

Menurut JPPI, ini indikasi bahwa pemerintah belum sekuat tenaga mencegah radikalisme.

“Belum tampak keseriusan pemerintah untuk menghadang radikalisme dan mengarusutamakan moderasi di sekolah. Pelan tapi pasti, virus intoleransi dan radikalisme mewabah di institusi pendidikan,” ungkapnya.

3. Kekerasan masih terus terjadi

Permasalahan selanjutnya adalah kekerasan di dunia pendidikan yang masih terus terjadi. Berdasarkan catatan JPPI ada 253 kasus selama 2019. Dari catatan ini, kekerasan justru banyak dilakukan oleh peserta didik.

“Ini bagian dari potret gagalnya pendidikan karakter di sekolah,” jelasnya.

4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga menjadi sorotan JPPI. JPPI memandang kekisruhan PPDB di tahun-tahun mendatang berpotensi berulang. Ini karena belum adanya kebijakan di hulu yaitu pemerataan pendidikan.

“Masalah harus diselesaikan, janganlah lari dari masalah. Belum lagi pemerintah daerah yang tak paham apa itu zonasi. Misalnya, pemerintah pusat mengharuskan sistem zonasi, tapi pemerintah daerah membuat program sekolah-sekolah favorit dengan berbagai nama, antara lain sekolah unggulan, sekolah model, sekolah percontohan, dan lain-lain,” jelasnya.

5. Menghapus Dirjen PAUD

JPPI juga mengkritik kebijakan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menghapus Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat. Ini, kata Ubaid, bukti bahwa pemerintah hanya mengutamakan pendidikan formal dan menganaktirikan pendidikan nonformal.

Ubaid menjelaskan selama ini banyak kaum rentan dan marginal yang mengakses pendidikan nonformal. Maka, dengan dihapuskannya Dirjen PAUD Dikmas ini, keberlangsungan pendidikan rakyat kecil atau kelompok marginal terancam.

“Dan jauh dari cita-cita *lifelong learning* yang menjadi arus utama dalam target-target SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), khususnya tujuan keempat tentang kualitas pendidikan,” tegasnya.

6. KIP tak tepat sasaran

Terakhir, Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjadi program unggulan Presiden Joko Widodo. JPPI menilai KIP ini bagus dan dibutuhkan masyarakat. Sayangnya, banyak kejadian KIP tidak tepat sasaran.

Berdasarkan catatan JPPI selama 2019 ada 303 pengaduan masyarakat terkait program KIP. Tercatat kasus yang paling banyak diadukan adalah ketidaktahuan cara mendapatkan KIP sebanyak 79 aduan. Disusul distribusi yang tidak merata sebanyak 61, data KIP tidak transparan dan mudah diakses 55 aduan, keterlambatan pencairan 43 aduan, KIP tidak tepat sasaran sebanyak 30, pengusulan data siswa miskin tidak terbuka 20 aduan, dan tidak ada keterlibatan publik 16 aduan. “Harusnya pemerintah belajar dari tahun-tahun sebelumnya untuk mempermudah akses dan transparansi pengelolaan KIP ini, supaya masyarakat bisa terlibat, transparan, dan tepat sasaran,” kata Ubaid.

Pengamat Pendidikan soal Literasi Indonesia Disebut Buruk



Hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 menyebut kemampuan pelajar Indonesia dalam hal membaca, matematika, dan sains mendapat nilai jeblok. Soal tingkat literasi yang disebut buruk ini bukan hal mengejutkan, menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji.

“Belakangan, kita resah dengan banyaknya masyarakat yang termakan kabar-kabar hoax. Mereka enggak bisa verifikasi mana berita yang akurat, mana berita yang hoax. Itu menunjukkan tingkat literasi masyarakat kita yang masih rendah,” katanya saat dihubungi **kumparanSAINS**, Kamis (5/12).

Dua hari setelah hasil survei PISA 2018 dirilis pada 3 Desember 2019 lalu, publik ramai menanggapi literasi masyarakat Indonesia yang dinilai sangat rendah. Kalah jauh dibanding negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Matraji menjelaskan, jauh sebelum hasil survei PISA itu keluar, secara nasional indikasi rendahnya tingkat literasi di Tanah Air sebenarnya sudah terbaca sejak lama. Hal itu tak mengejutkan baginya mengingat komponen pendukung literasi di sekolah seperti perpustakaan yang masih terbengkalai pengelolaannya.

Yang disoroti Matraji adalah soal rendahnya kualitas buku yang ada di perpustakaan sekolah, begitu pula dengan penampilannya yang tak menarik sehingga para siswa enggan untuk berkunjung. Bahkan, ada beberapa sekolah yang menurutnya tak memiliki fasilitas perpustakaan.

“Dari situ kita berasumsi, kalau seperti itu kondisinya, ya, tingkat literasi sudah pasti rendah.

Dugaan itu kemudian diafirmasi oleh hasil-hasil penelitian,” paparnya.

Menelaah Akar Masalah Rendahnya Tingkat Literasi di Indonesia

Jika menelaah akar masalahnya, kata Matraji, ini karena pemerintah terlambat menyadari adanya persoalan budaya literasi yang rendah di Indonesia. Pihak pemerintah disebutnya beralibi bahwa riset yang menyebut rendahnya budaya literasi dalam [pendidikan](#) Indonesia itu keliru, ada kesalahan pada metode dan pengambilan sampelnya. Padahal, Matraji menilai memang seperti itulah faktanya.

“Seharusnya, tahap pertama itu diterima dulu. Artinya bahwa itu adalah fakta dan kita harus berbenah. Kalau ada kesadaran yang berangkat dari situ, maka kita butuh langkah-langkah berikutnya,” kata dia.

Matraji kemudian merujuk pada langkah-langkah strategis serta perbaikan yang komprehensif. Mengurai benang kusut persoalan literasi di Indonesia butuh uluran tangan, bukan hanya dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga disebut harus serius menuntaskan persoalan ini.

Dari hal-hal sederhana saja, misalnya, Matraji mengkritisi soal program pengadaan buku yang tak disertai dengan program evaluasi untuk menyeleksi pilihan buku yang tepat dan menarik untuk dibaca. Hal ini membuat gerakan revitalisasi perpustakaan pada akhirnya tidak efektif.

Selain itu, perpustakaan selama ini hanya didominasi buku-buku ajar yang juga dipelajari oleh para siswa di kelasnya. “Kalau buku ajar semua, anak kan sudah belajar di rumah pakai buku ajar, di sekolah pakai buku ajar, terus di perpustakaan kenapa dia harus baca itu lagi?” kritiknya.

Pengadaan buku dari pemerintah pusat saja tidak cukup. Program penunjang untuk memastikan buku itu terbaca dan bisa bermanfaat bagi para siswa juga dibutuhkan.

Akar masalah yang juga disoroti oleh Matraji adalah sumber daya manusia (SDM) di industri pendidikan yang tidak cukup memadai. “Banyak juga sarjana perpustakaan, tapi dia enggak punya pemikiran bagaimana mengelola perpustakaan yang baik. Tenaganya saja kita belum ada. Apalagi tenaga yang berkualitas. Sudah ada aja Alhamdulillah,” bebernya.

Literasi seharusnya dibudayakan. Hal ini berkaitan dengan mencari cara bagaimana peserta didik memiliki kebiasaan membaca sejak dini hingga nanti mereka dewasa.

“Kalau di sekolah itu tidak ada budaya literasi, maka si anak itu enggak mungkin terpengaruh,” katanya.

Untuk itulah, Matraji menekankan soal bagaimana budaya literasi di level guru juga harus digalakkan. Ditambah, ekosistem sekolah yang juga diharapkan mampu mendukung terwujudnya budaya tersebut. Sebab, ini bukanlah persoalan sederhana sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara komprehensif.

JPPI Kritik Langkah Pemerintah Hapus Ditjen PAUD Dikmas di Kemendikbud



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengkritik langkah pemerintah yang menghapus Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut Ubaid, seharusnya pemerintah memberikan ruang kepada pendidikan nonformal. Dirinya menilai pembubaran Ditjen PAUD Dikmas bukti tidak berpihaknya pemerintah terhadap model pendidikan ini.

“Harusnya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada jenis pendidikan ini, bukan malah menganaktirikan. Dengan dihapusnya Ditjen PAUD Dikmas di struktur Kemendikbud, maka ini akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan pendidikan rakyat kecil, kelompok marjinal,” ujar Ubaid pada acara Catatan Akhir Tahun JPPI di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2019).

Padahal menurut Ubaid, pendidikan tidak hanya di bangku formal saja. Namun selama ini, pemerintah hanya fokus kepada pendidikan formal.

“Pemerintah itu hanya fokus kepada pendidikan formal, sekolah dan pendidikan tinggi. Sementara untuk pendidikan non formal anggaran di level daerah enggak sampai 1 persen. Artinya keberpihakan kebijakan dan anggaran tidak ada sama sekali. Apalagi hari ini dihapus,” tutur Ubaid.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak struktur Kemendikbud yang dipimpin oleh Menteri Nadiem Makariem.

Perombakan struktur Kemendikbud itu ditetapkan dengan dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 82 Tahun 2019 yang dikeluarkan pada 16 Desember 2019.

Perpres ini menggantikan Perpres sebelumnya yakni Perpres No 72 Tahun 2019 yang dikeluarkan sekira dua bulan lalu yakni 24 Oktober 2019. Dalam Perpres No 82 Tahun 2019 itu, Jokowi merampingkan struktur Kemendikbud dari semula 16 pos disederhanakan menjadi 10 pos. Ditjen PAUD dan Dikmas termasuk dalam direktorat yang dihapus.

Peneliti soal Linterasi Indonesia Buruk: Perpustakaan Banyak yang Buluk



Hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 yang dilakukan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) menunjukkan kemampuan pelajar Indonesia dalam hal membaca, matematika, dan sains masih tergolong buruk.

Indonesia masuk posisi 10 besar terbawah dari 79 negara yang berpartisipasi dalam survei PISA, dengan raihan skor membaca 371, matematika 379, dan sains 396. Angka itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai rata-rata OECD yang ada di atas 487.

Ironisnya, skor membaca pelajar Indonesia menjadi yang terkecil ketimbang kategori lainnya, dan bahkan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini artinya, literasi pelajar Indonesia memburuk.

Rak buku di Perpustakaan Nasional Foto: Rina Nurjanah/kumparan

Berdasarkan hasil tes PISA yang diberikan kepada 12.098 peserta didik yang tersebar di 399 sekolah di Indonesia, hanya 30 persen siswa yang memenuhi kompetensi membaca minimal. Adapun tes membaca meliputi rangkaian uji kompetensi mulai dari memahami teks, mengidentifikasi, mengembangkan, hingga mengimplementasikannya.

Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, untuk meningkatkan minat baca dibutuhkan peran dari banyak pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat.

Kendati begitu, ia berpendapat rendahnya literasi pelajar Indonesia sebagian besar berawal

karena ketidakseriusan pemerintah dan lembaga pendidikan dalam menanggapi masalah ini.

“Bisa dipastikan semua perpustakaan di sekolah-sekolah mayoritas pasti buluk, bukunya jelek-jelek, tidak ada yang jaga, ditempatkan di pojok dan tidak menarik, sehingga anak-anak tidak tertarik menggunakan perpustakaan. Bahkan ada juga sekolah-sekolah yang tidak punya perpustakaan,” ujar Ubaid, saat dihubungi **kumparanSAINS**, Kamis (5/12).

Ilustrasi membaca buku. Foto: Unsplash

Oleh sebab itu, negara mesti hadir dan tidak lagi menganggap persoalan literasi di Indonesia hanya asumsi belaka. Menurut Ubaid, pemerintah harus mulai menggerakkan dan membuat kebijakan atau program untuk meningkatkan literasi, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, maupun lingkup terkecil seperti sekolah.

Lebih dari itu, intervensi kebijakan saja tidak cukup karena harus ada komitmen alokasi anggaran khusus untuk meningkatkan minat baca di kalangan pelajar. Saat ini, menurutnya APBD banyak difokuskan pada hal-hal yang tidak berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.

“Masih banyak terserap untuk belanja pegawai, gaji guru, dan segala macam. Lalu, mana ada keberpihakan pemerintah terhadap kebijakan literasi. Kalau misalnya udah ada kebijakan literasi, mana keberpihakannya. Mana alokasi anggaran untuk *support* pada literasi?,” ujar Ubaid.

Ketika negara sudah ikut andil dan benar-benar menjalankan perannya, dibutuhkan kerja sama dari seluruh *stakeholders* untuk benar-benar meningkatkan minat baca tersebut. Ini bisa dilakukan dengan cara merubah kebiasaan atau budaya membaca di masyarakat, salah satunya mulai membuka ruang-ruang baca publik.

Selain itu, Ubaid juga mengatakan tradisi nalar kritis orang-orang harus mulai ditingkatkan. Ini bisa dilakukan dengan cara melakukan debat publik baik itu dalam isu sosial, ekonomi, dan politik.

“Tapi dengan satu syarat, bukan pada fanatisme yang memupuk pada egosentris, yang memunculkan kemarahan. Tetapi wacana-wacana di publik adalah wacana dialogis yang kritis dan konstruktif, bukan pada kemarahan dan aksi kekerasan,” kata Ubaid.

Menurut Ubaid, masyarakat harus mulai belajar memahami teks dengan konteks. Sebab, ia menilai selama ini banyak orang hanya membaca teks tanpa memahami isi konteks tulisan yang dibacanya.

“Bagaimana masyarakat bisa memahami antara teks dengan konteks, lalu di situlah masyarakat bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar,” ucapnya.

JPPI : Penghapusan Paud Dikmas Matikan Pembelajaran Sepanjang Hayat

Schoolmedia News .Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan perubahan nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menghapus Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat mematikan pembelajaran sepanjang hayat.

“Perpres No 82/2019 yang menghapus Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat merupakan bencana bagi pendidikan kelompok marginal, karena mematikan pembelajaran sepanjang hayat,” ujar Ubaid dalam konferensi pers di Jakarta, Senin(30/12/2019).

Dia menambahkan selama ini, kelompok rentan dan marginal banyak mengakses pendidikan nonformal. Mereka itu adalah anak-anak korban konflik, kaum difabel, kaum perempuan di daerah terpencil, hingga komunitas adat terpencil.

Menurut dia, seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih pada jenis pendidikan nonformal, bukan malah menganaktirikan.

“Dengan dihapuskannya Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat di struktur Kemendikbud, maka ini menjadi ancaman keberlangsungan pendidikan rakyat kecil, kelompok marginal, dan jauh dari cita-cita pembelajaran sepanjang hayat yang menjadi arus utama dalam target-target SDGs, khususnya tujuan keempat tentang kualitas pendidikan.”

Dia menambahkan pada saat ada Ditjen PAUD dan Dikmas pun, pendidikan nonformal kurang diperhatikan. Ia khawatir, pendidikan nonformal semakin terpinggirkan. Begitu juga dengan komitmen pemerintah daerah yang masih berorientasi pada pendidikan formal. Padahal pendidikan nonformal, lanjut dia, banyak membantu anak-anak putus sekolah untuk kembali mendapatkan pendidikan.

Sebelumnya, Perpres No 82/2019 tentang Kemendikbud menggantikan Perpres sebelumnya yakni Perpres 72/2019 tentang Kemendikbud. Dalam Perpres baru tersebut, struktur organisasi Kemendikbud lebih ramping dari sebelumnya 16 pos menjadi 10 pos yakni Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian, Pengembangan dan Perbukuan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.

Masih Tingginya Penyebaran Paham Radikal Melalui Sekolah



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyoroti masih tingginya penyebaran paham radikal melalui sekolah.

Ubaid mengatakan pada 2019 masih ditemukan buku ajar yang berisi konten radikal. Menurutnya kejadian ini berulang tiap tahun. "Pada 2019 masih banyak kasus ditemukan buku ajar yang terpapar radikal. Soal ujian yang bernuansa intoleransi. Dan ini berulang terus, dari 2019 hingga 2017 ada," ujar Ubaid pada acara Catatan Akhir Tahun JPPI di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2019).

Ubaid mengungkapkan para guru juga ikut terpapar paham radikalisme. Dirinya menyebut hasil riset PPIM UIN Jakarta pada 2019, menguatkan dugaan penyebaran paham radikal di level guru.

Dalam riset PPIM, menyebutkan 59 persen guru mendukung negara Islam.

"Pada 2019 bukti bukti hasil riset semakin menguat, ternyata tidak hanya di level pelajar, guru-gurunya juga terpapar," tutur Ubaid.

Ubaid meminta pemerintah melakukan langkah tegas kepada guru yang memiliki paham radikal ini. Baginya, pemerintah harus memprioritaskan moderatisme agama dan nilai nilai multikulturalisme dalam pembelajaran di sekolah. "Harus ada evaluasi dan langkah intervensi sistematis terhadap guru guru yang terpapar pemikiran dan sikap radikal," pungkas Ubaid.

Tingkat Literasi Masyarakat Terus Menurun Dalam Tujuh Tahun Terakhir



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai tingkat literasi masyarakat terus menurun dalam tujuh tahun terakhir ini.

Ubaid mengutip hasil Program Penilaian Pelajar Internasional atau Programme for International Student Assessment (PISA) yang dirilis oleh OECD. Menurut Ubaid, tingkat literasi siswa di Indonesia terus menurun dalam tiga kali penilaian PISA.

“Kualitas pendidikan merosot, sehingga kalau dibandingkan hasil Pisa yang dirilis tahun 2019, kemudian sebelumnya tahun 2015, dan tahun 2012. Skor kita merosot terus, yang terakhir yang paling parah merosotnya adalah masalah literasi atau membaca,” ujar Ubaid pada acara Catatan Akhir Tahun JPPI di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2019).

Rendahnya tingkat literasi membuat masyarakat tidak bisa membedakan fakta dengan hoaks. Dirinya menyebut hal ini dapat mendorong masyarakat mudah tersulut oleh berita bohong.

“Minat baca yang minim membuat masyarakat tidak dapat membedakan mana berita fakta dan mana berita bohong. Sehingga banyak masyarakat yang salah menerima informasi lalu memicu emosi kemarahan publik,” ucap Ubaid.

Sejauh ini menurut Ubaid, belum ada gerakan literasi yang sifatnya komprehensif. Dirinya menyoroti gerakan literasi nasional (GLM) yang digagas Kemendikbud.

Ubaid menilai sejauh ini gerakan tersebut belum diimplementasikan secara komprehensif untuk

siswa. “Ini memang belum ada gerakan literasi yang komprehensif, yang di sekolah dengan lingkungan keluarga dan masyarakat,” ujar Ubaid.

Dirinya juga menilai masih terbatasnya fasilitas dan buku-buku pada perpustakaan yang dapat memacu tingkat literasi siswa. Seperti diketahui, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang berpusat di Paris, Perancis, merilis Program Penilaian Pelajar Internasional atau Programme for International Student Assessment (PISA) 2018.

Dalam penilaiannya, Indonesia termasuk dalam negara yang dinilai melalui PISA. Berdasarkan hasil PISA 2018 menunjukkan kemampuan siswa Indonesia dalam membaca, meraih rata-rata skor 371.

Sementara untuk sains rata-rata skor siswa Indonesia yakni 396, dan matematika yakni 379.

Penilaian ini membuat Indonesia berada di peringkat 72 dari 77 negara. Indonesia hanya memiliki skor yang lebih baik dibandingkan Maroko, Lebanon, Kosovo, Republik Dominika, dan Filipina.

China, Singapura, Hongkong, Macao, dan Estonia menjadi lima negara tertinggi dalam peringkat PISA.

Jakarta, **NU Online** - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia

JPPI Ungkap Peningkatan Korupsi Dana BOS di Sekolah



(JPPI) Ubaid Matraji mengungkapkan bahwa sebagian besar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disalahgunakan oleh oknum pengelola anggaran sekolah. Menurutnya, tidak berlebihan jika sekolah seringkali dijadikan tempat praktik korupsi.

“Masalah ini bermuara pada pendidikannya. Bukan karakter peserta didik yang perlu dibenahi, tapi gurunya yang bermasalah,” ucap Ubaid saat mengisi acara Refleksi Akhir Tahun dan Outlook Pendidikan 2023 yang diselenggarakan JPPI di Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Ia lantas menyuguhkan data tren jumlah kasus korupsi dana BOS yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Kasus tersebut meningkat pesat di 2022 dengan persentase 93 persen bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang bahkan kurang dari 50 persen.

“Kita lihat dari 2019 hingga 2022, grafik jumlah kasus korupsi di sekolah terus meningkat: 2019 (23 persen), 2020 (29 persen), 2021 (44 persen), dan kini meningkat menjadi 93 persen,” terangnya.

Data tersebut ia himpun dari berbagai macam riset yang dilakukan dan dari laporan-laporan yang diterima. Hal itu menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana BOS menjadi sesuatu yang seolah-olah dinormalisasi dalam lingkup pengelola anggaran sekolah.

“Kasus ini kebanyakan dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara, yang seharusnya menjadi figur dan teladan bagi para siswanya, dalam konteks lingkungan sekolah. Ironis sekali,” ujar Ubaid. Jika yang demikian terus terjadi, baginya, lingkungan sekolah bukan lagi tempat untuk membangun karakter anak, akan tetapi malah menciptakan iklim pendidikan yang kotor dan tak

bermoral.

“Ini fakta bahwa oknum-oknum tersebut justru menumbuhkan iklim atau suasana yang tidak baik dalam pendidikan,” kata Wakil Ketua PCNU Tangerang Selatan ini.

Akar korupsi dana BOS

Kasus korupsi dana bos yang selama ini banyak ditemukan di lembaga pendidikan menurut Ubaid adalah akibat tertutupnya sistem manajerial sekolah.

“Biang keroknya adalah manajemen sekolah yang tertutup,” tegasnya.

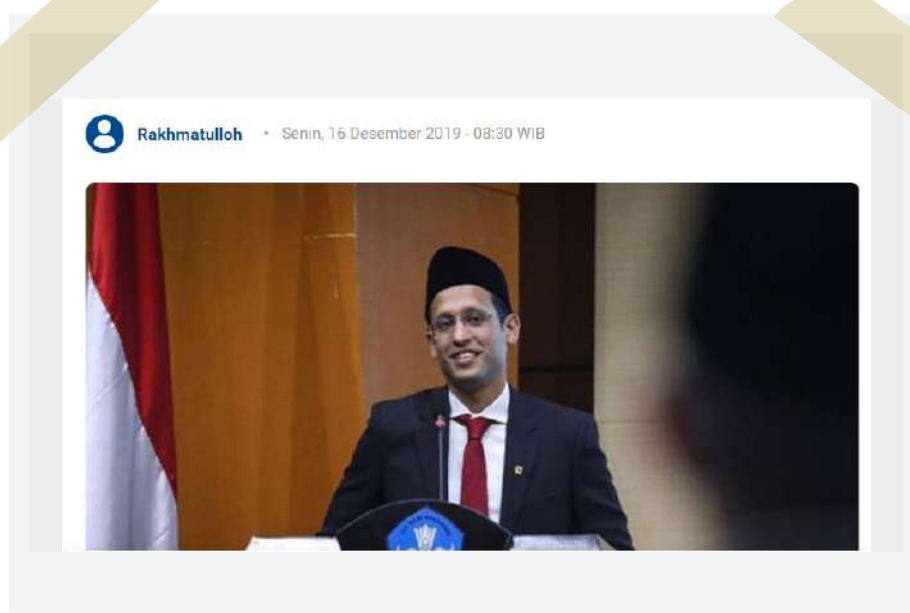
Contoh kasus penyelewengan dana BOS baru-baru ini terjadi di SMK di Sleman, Pelakunya adalah kepala sekolah dan bendahara. Mereka diduga mengorupsi dana BOS selama empat tahun dengan nominal mencapai Rp299,9 juta.

“Jadi, setiap ada transferan dana BOS dari pemerintah pusat, kepala sekolah dan bendahara BOS itu selalu mengambilnya langsung dari bank. Setelah semua dana diambil, keduanya menyisihkan sebagian dana untuk keperluan pribadi. Sisa dari dana BOS itu kemudian diserahkan kepada bendahara sekolah,” bebernya menceritakan.

Ia mengingatkan, jika hal itu dibiarkan dan tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah lama-lama akan mengakar dan menjadi karakter yang sulit untuk diubah.

Sebagai informasi, refleksi ini diselenggarakan untuk mengurai masalah yang tak kunjung usai, yang justru menjadi benalu di dunia pendidikan selama tahun 2022. Mulai dari soal kurikulum, kekerasan seksual, *learning loss*, korupsi di sekolah, hingga kebijakan pendidikan yang mengarah pada privatisasi dan komersialisasi.

JPPI Anggap Konsep “Merdeka Belajar” Mendikbud Masih Setengah Hati



JAKARTA - Mendikbud Nadiem Makarim akan mengubah format Ujian Nasional (UN) yang berlaku sekarang menjadi ujian assasmen dan survei karakter atau Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang dicangkan dalam program ‘Merdeka Belajar’ mulai tahun 2021.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubeid Matraji menyebut, konsep dan program merdeka belajar yang diusulkan Mendikbud masih setengah hati. “Karena masih ada UN dan USBN di situ, ada RPP yang masih wajib, dan ada pula zonasi. Mana merdekanya,” kata Ubeid saat dihubungi Sindonews, Senin (16/12/2019).

Kata Ubeid, sebagai contoh adalah USBN. Menurutnya, jika memakai konsep merdeka, kenapa masih ada tes yang berstandar nasional, sehingga titik kemerdekaan lokalitas sekolahnya masih dipertanyakan. Menurut dia, hal ini masih ditambah pula dengan sistem zonasi.

Sedangkan, setiap tahun kebijakan ini kerap dikeluhkan oleh wali murid dan sekolah, namun sekarang masih diberlakukan saja. “Merdekanya di mana? Siswa harus sekolah diharuskan memilih sekolah di dekat rumah berdasarkan zona, tapi kualitasnya buruk.

Lalu merdekanya di mana,” tanya dia. Ubeid mengaku masih teringat dengan pernyataan Mendikbud Nadiem saat konferensi pers yang menyinggung ‘merdeka belajar’ ala tokoh Pendidikan, Ki Hajar Dewantoro. Namum Nadiem tidak menjelaskan secara detil seperti apa merdeka belajar Ki Hajar Dewantoro. “Kalo merdeka belajar ala Ki Hajar lalu diterjemahkan menjadi USBN, RPP, dan Zonasi, maka itu salah alamat,” pungkasnya. **Kekisruhan PPDB Berpotensi Masih Berlanjut di 2020**

Muhammad Syahrul Ramadhan · 01 Januari 2020 20:13

JPPI: kekisruhan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi di 2020 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.



Suasana PPDB di Malang. Foto: Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq

Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai kekisruhan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi di 2020 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kekisruhan diprediksi masih terjadi, karena permasalahan di hulu yakni pemerataan kualitas sekolah belum tuntas.

“Penyesuaian kebijakan tentan PPDB Zonasi masuk dalam program Merdeka Belajar. JPPI menilai kekisruhan zonasi kemungkinan berlanjut di 2020. Karena zonasi itu sesuatu yang ada di hilir. Kenapa pemerintah tidak selesaikan yang di hulu dulu. Zonasi itu hilir, kalau anggapan sekolah di daerah itu kualitasnya merata,” ungkap Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji dalam Catatan Akhir Tahun Pendidikan 2019 di Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 30 Desember 2019.

Lebih lanjut, niat apik pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud dengan Zonasinya yang sudah bergulir sejak 2017 yang ingin memeratakan pendidikan dan tidak ada lagi label sekolah favorit ini justru kontradiktif dengan kenyataan di daerah. Di daerah kata Ubaid, sekolah-sekolah justru berlomba melabeli sekolahnya, mulai dari sekolah unggulan sampai *pilot project*.

“Jadi di daerah itu menciptakan sekolah unggulan yang membedakan dengan sekolah lain. Di pusat mungkin sekolah sudah merata, tapi di daerah kontradiktif, justru beramai-ramai bikin sekolah unggulan,” ungkapnya.

Karena itu, kata Ubaid, bukan salah orang tua jika masih berorientasi memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah yang berlabel tersebut, ketimbang memilih sekolah yang jaraknya dekat dengan rumah namun kualitasnya kurang baik.

“Kalau masyarakat daerah memilih sekolah yang baik dan *enggak* mau deket rumah, itu bukan salah orang tua atau masyarakat. Tapi karena pemerintah (daerah) sendiri yang menciptakan kelas-kelas di sekolah. Jadi *enggak* sinkron saat ini,” terang Ubaid.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim memutuskan untuk mengubah komposisi kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis Zonasi. Jika sebelumnya jalur prestasi hanya 15 persen, maka mulai tahun depan kuotanya ditambah menjadi maksimal 30 persen. Sedangkan untuk jalur zonasi murni menjadi minimum 50 persen.

Sumber : <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/wkB7ezaK-kekisruhan-ppdb-berpotensi-masih-berlanjut-di-2020>

TAHUN 2020

Intoleransi Membayangi Dunia Pendidikan



Oleh

LARASWATI ARIADNE ANWAR

2 Januari 2020 05:44 WIB

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR- Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menyampaikan catatan akhir tahun pendidikan di Jakarta, Senin (30/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS—Kasus intoleransi masih terjadi di sejumlah sekolah di Indonesia. Padahal, sekolah seharusnya merupakan tempat pemahaman dan pemaknaan kemajemukan bangsa sebagai identitas dan kekayaan. Ruang-ruang pertemuan untuk memfasilitasi keragaman belum menjadi kebiasaan di akar rumput.

Hal ini menjadi salah satu temuan dalam catatan akhir tahun Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) baru-baru ini di Jakarta. Pihak JPPI menemukan banyak guru belum memahami hubungan antara berbangsa, bernegara, dan beragama.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, Rabu (1/1/2020), menjelaskan, pengetahuan bahwa tiga hal itu saling terkait ternyata tidak mendasar dalam pemikiran para guru. Dikotomi pandangan justru terjadi ketika menjalankan hal-hal seperti bernegara dan hidup dalam keragaman tidak bisa dilakukan bersama-sama.

“Hal ini mengakibatkan guru malah memberikan indoktrinasi kepada siswa bahwa ada agama ataupun suku bangsa yang dinilai lebih baik daripada yang lain sehingga seolah berhak berbuat

semaunya. Jadi, bukan memahami Bhinneka Tunggal Ika dan membuka ruang-ruang pertemuan dan diskusi,” papar Ubaid.

Pihak JPPI merupakan gabungan dari 34 organisasi yang berkiprah di bidang pengawasan pendidikan se-Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima dari lapangan, kasus intoleransi di sekolah antara lain berupa diskriminasi siswa dari kalangan minoritas seperti perundungan verbal dan sosial.

Ada pula guru yang tidak memberikan siswa dari agama atau kepercayaan minoritas sarana pendidikan keagamaan, serta ada guru yang justru mengutarakan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu saat mengajar di kelas.

Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat Profesional Nahdlatul Ulama (NU Circle) Ahmad Rizali pada kesempatan berbeda juga mengutarakan pendapat serupa. Pelajaran sejarah terbentuknya bangsa Indonesia harus diberikan kepada guru.

“Penting bagi guru untuk mengerti makna konsensus pembentukan Indonesia sebagai negara demokratis dan berlandaskan Pancasila, bukan agama. Kajian beragama dan bernegara seyogiaya juga dibahas untuk memberi wawasan luas tentang nasionalisme dan kemajemukan,” ungkapnya.

Dalam kebijakan terbaru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditegaskan, per tahun 2021 Ujian Nasional diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Demikian pula Ujian Sekolah Berbasis Nasional yang beralih jadi portofolio siswa untuk kelulusan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan, survei karakter dan portofolio siswa itu melihat pemahaman dan pengamalan siswa akan nilai-nilai Pancasila. Artinya, guru harus bisa menerapkannya sehari-hari sebagai teladan.

Salah satu pembina Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Qudrat Nugraha mengakui hal itu. Bahkan, di PGRI topik tentang toleransi belum dijadikan pembahasan mendalam, baru jadi bagian pembekalan keorganisasian. Itu menjadi pekerjaan rumah organisasinya untuk memperkuat wawasan kebangsaan guru.

Rasa curiga

Bagi para guru, ruang pertemuan ini penting untuk diadakan karena tidak semua guru otomatis memiliki pandangan toleran terhadap perbedaan. Dian Misastra, guru dari SDN 1 Cisarua, Purwakarta, Jawa Barat, misalnya, meski ia belajar mengenai nilai-nilai Pancasila, hidup di lingkungan homogen membuat dia memiliki rasa curiga terhadap orang dengan agama lain ataupun suku bangsa berbeda dari dirinya.

“Baru ketika mengikuti pelatihan atas inisiatif sendiri melalui Sekolah Guru Kebinekaan, saya bertemu rekan-rekan berbeda. Baru di situ saya menyadari bahwa kita semua bersaudara. Sayangnya, tidak semua rekan guru berkesempatan ikut pelatihan mandiri. Harus ada inisiatif pemerintah daerah merutinkan pertemuan-pertemuan ini,” ujarnya. (Kompas, 21 Desember 2019)

Berada di kota besar pun tidak menjamin pemikiran toleransi akan tumbuh dengan sendirinya. Guru SDN 06 Rawajati, Jakarta Selatan, Uswatun Hasanah mengungkapkan, pemikirannya terbuka ketika mengikuti pelatihan mandiri. Meski tinggal di ibu kota dengan kemajemukan tinggi, ia menemukan lingkaran pergaulannya amat sempit sehingga memendam prasangka kepada orang lain hingga ia berdialog dengan guru-guru berbeda agama dan suku bangsa.

Sumber : <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/01/02/intoleransi-membayangi-dunia-pendidikan>

JPPI Dorong Kemendikbud Cepat Atasi Sekolah Terdampak Banjir



Rep: Inas Widyauratikah/ Red: [Dwi Murdaningsih](#)

Foto: Thoudy Badai_Republika

Belum ada data mengenai jumlah sekolah yang terdampak banjir. Foto: Petugas Puskesmas Jati Asih mengecek data korban banjir di posko Gudang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jalan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (3/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkesan lamban dalam mengatasi banjir di sekolah. Padahal, ia mengatakan banyak sekolah yang terdampak banjir yang mendadak terjadi di awal tahun 2020 ini.

“Mendikbud terkesan lamban. Padahal banyak sekolah yang terdampak, akses ke sekolah juga terganggu. Bahkan fasilitas sekolah juga rusak,” kata Ubaid kepada awak media, Jumat (3/1).

Ia juga mengkritisi, sampai hari ini tidak ada data berapa jumlah sekolah yang terdampak banjir. Ubaid berharap Kemendikbud segera mengambil tindakan dalam mengatasi permasalahan ini mengingat sebentar lagi kegiatan belajar mengajar akan dimulai setelah libur Semester I.

Hujan deras mengguyur Jakarta dan sekitarnya pada Selasa (31/12) sore hingga Rabu (1/1) siang. Hujan yang terjadi pada malam tahun baru ini langsung menyebabkan sejumlah daerah banjir dan menghambat masyarakat yang akan beraktivitas.

Selain banyak rumah warga terendam banjir, jalanan utama juga terdampak sehingga menutup akses kendaraan. Tidak sedikit pula arus banjir deras yang menyebabkan kendaraan hanyut dan

rumah warga rusak cukup parah.

Intensitas hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya ini cukup tinggi ditambah kiriman air dari wilayah Bogor. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan curah hujan akan terus meningkat hingga Januari dan berlangsung sampai Maret 2020.

Sumber : <https://monitorday.com/kemendikbud-salurkan-bantuan-kepada-sekolah-yang-terkena-banjir>

Waduh!! Gara-Gara Banjir Mas Menteri Nadiem Kena Semprot



Jum'at, 03 Januari 2020, 16:44 WIB

Editor: Vicky Fadil

Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Warta Ekonomi, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim ikut menanggung salah saat banjir Jakarta. Sebab lamban dalam menangani banjir.

Ia menyatakan banyak sekolah yang terkena dampak banjir. Sampai saat ini belum ada respon dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Padahal banjir sudah terjadi sejak tiga hari yang lalu.

“Mendikbud terkesan lamban, padahal banyak sekolah yang terkena dampak, akses ke sekolah terganggu bahkan fasilitas sekolah juga rusak,” ujar Ubaid dalam pernyataan persnya, Jumat (3/1/2020).

Lanjutnya, ia mengemukakan sampai saat ini belum ada juga data berapa sekolah yang terkena dampak banjir.

“Mungkin Pak Menteri belum sadar, kalau sekolah juga bagian dari korban banjir,” lanjut dia.

Sementara itu, Pelaksana tugas Dirjen Dikdasmen dan PAUD Kemendikbud, Harris Iskandar, mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan seragam sekolah pada korban banjir. Namun pihaknya belum merinci bagaimana teknis pendistribusian seragam tersebut.

Sementara itu, Mendikbud Nadiem Makarim belum muncul ke publik sejak pergantian tahun. Padahal sejumlah kementerian telah melakukan kunjungan ke sejumlah tempat pengungsian.

Saat dikonfirmasi dengan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Mardiasna, juga belum berkomentar banyak mengenai langkah yang akan dilakukan Kemendikbud terkait sekolah yang terendam banjir. (Antara)

Sumber : <https://wartaekonomi.co.id/amp/read264733/waduh-gara-gara-banjir-mas-menteri-nadiem-kena-semprot>

Kemendikbud Salurkan Bantuan kepada Sekolah yang Terkena Banjir



04 Januari 2022

MONITORDAY.COM - Bencana banjir yang melanda di sejumlah wilayah di Indonesia sejak awal tahun 2020 berdampak pada terhambatnya sejumlah aktivitas warga. Salah satunya aktivitas dan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Kendati demikian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak tinggal diam. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ainun Naim, kepada wartawan, pada Jumat (3/1/20) mengatakan, pihaknya sudah ikut menangani dan berkoordinasi dengan dinas terkait sejak awal tahun ketika banjir mulai terjadi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah. Lebih lanjut ia juga mengaku, tim dari Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Paudasmen) sudah berangkat sejak banjir melanda untuk menyalurkan paket bantuan.

“Khususnya bantuan yang bisa mendukung proses pembelajaran termasuk juga ke sekolah-sekolah di Lebak, Banten,” ujarnya. “Perguruan tinggi juga sudah bergerak membantu masyarakat,” kata Ainun menambahkan.

Apa yang sudah dilakukan Kemendikbud ini menjadi bukti bahwa pernyataan Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji yang menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) lamban dalam mengatasi banjir di sekolah sebagai pernyataan sesat dan keliru.

“Mendikbud terkesan lamban. Padahal banyak sekolah yang terdampak, akses ke sekolah juga terganggu. Bahkan fasilitas sekolah juga rusak,” kata Ubaid kepada awak media beberapa waktu lalu.

Sumber: <https://monitorday.com/kemendikbud-salurkan-bantuan-kepada-sekolah-yang-terkena-banjir>

290 Sekolah di Jakarta Kebanjiran

Sabtu, 04 Januari 2020 16:55 WIB



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai melakukan peninjauan dan pendataan sekolah yang terkena dampak banjir.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terdampak banjir dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pendataan sekolah terdampak banjir.

“Selain sekolah, tim juga melakukan pendataan siswa, guru, dan tenaga kependidikan terdampak bencana banjir,” kata Nadiem di Jakarta, Sabtu 4 Januari 2020.

Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) Kemendikbud mencatat per 3 Januari 2020, terdapat 290 sekolah terdampak banjir di wilayah DKI Jakarta. Rinciannya adalah 201 terendam banjir, sedangkan 89 sekolah mengalami gangguan pada akses menuju sekolah.

Selanjutnya, Seknas SPAB juga melaporkan 8.420 siswa di DKI Jakarta terdampak banjir.

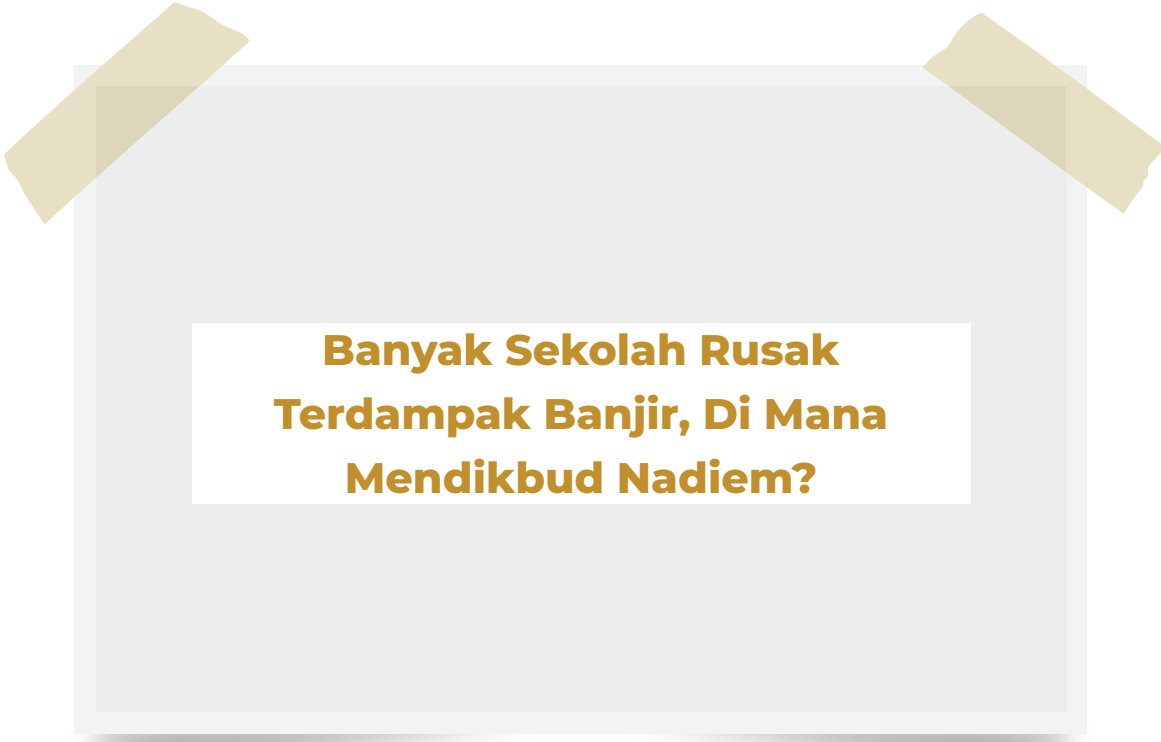
Sementara itu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dilaporkan 12 sekolah mengalami kerusakan akibat banjir. Dua puluh orang guru dan tenaga kependidikan terdampak banjir bandang yang merendam rumah mereka.

“Tim dari Direktorat Pembinaan SMP dan LPMP Banten sudah turun ke lapangan memberikan bantuan awal,” ujar Nadiem Makarim.

Koodinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim lamban dalam menangani banjir padahal banyak sekolah yang terkena dampak banjir.

“Mendikbud terkesan lamban, padahal banyak sekolah yang terkena dampak, akses ke sekolah terganggu bahkan fasilitas sekolah juga rusak,” ujar Ubaid di Jakarta, Jumat 3 Januari 2020.

Sumber: <https://www.ngopibareng.id/read/mendikbud-turun-di-jakarta-290-sekolah-kebanjiran-2628800>



Banyak Sekolah Rusak Terdampak Banjir, Di Mana Mendikbud Nadiem?

SABTU, 4 JANUARI 2020 | 22:16

Editor :RMOLNETWORK

RMOL LAMPUNG

Bencana banjir yang melanda daerah DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Banten, menimbulkan kerugian harta benda bahkan sampai merenggut korban jiwa.

Bencana alam, termasuk banjir, selalu mendatangkan kerugian secara materi. Dampak karena banjir adalah kerugian yang menimpa masyarakat akibat kerusakan rumah, mobil maupun kehilangan barang berharga. Kerugian tersebut masih ditambah dengan aktivitas ekonomi yang lumpuh akibat banjir.

Begitu pula dengan gedung-gedung sekolah yang rusak akibat bencana banjir ini.

Terkait hal ini, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengaku belum melihat respon dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Ia pun menilai Nadiem sangat lamban.

Ubaid menyatakan banyak sekolah yang terkena dampak banjir. Namun, sampai saat ini sosok Nadiem belum terdengar aksinya.

“Belum ada respon dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Padahal banjir sudah terjadi sejak tiga hari yang lalu,” ujar Ubaid dalam pernyataan persnya.

“Mendikbud terkesan lamban, padahal banyak sekolah yang terkena dampak, akses ke sekolah terganggu bahkan fasilitas sekolah juga rusak,” ujar Ubaid dalam pernyataan persnya, Jumat (3/1).

Ubaid juga mengemukakan sampai saat ini belum ada juga data berapa sekolah yang terkena dampak banjir.

“Mungkin Pak Menteri belum sadar, kalau sekolah juga bagian dari korban banjir,” lanjut dia.

Pelaksana tugas Dirjen Dikdasmen dan PAUD Kemendikbud, Harris Iskandar, mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan seragam sekolah pada korban banjir. Namun pihaknya belum merinci bagaimana teknis pendistribusian seragam tersebut.

Sementara itu, Mendikbud Nadiem Makarim belum muncul ke publik sejak pergantian tahun. Padahal sejumlah kementerian telah melakukan kunjungan ke sejumlah tempat pengungsian.

Saat dikonfirmasi dengan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Mardiasna, juga belum berkomentar banyak mengenai langkah yang akan dilakukan Kemendikbud terkait sekolah yang terendam banjir.

Sumber: <https://www.rmollampung.id/banyak-sekolah-rusak-terdampak-banjir-di-mana-mendikbud-nadiem/>



Banyak Sekolah Rusak, Di Mana Nadiem?

SABTU, 4 JANUARI 2020 | 13:45

Editor : RMOLNETWORK

RMOLJATIM Bencana banjir yang melanda daerah DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Banten, menimbulkan kerugian harta benda bahkan sampai merenggut korban jiwa.

Begitu pula dengan gedung-gedung sekolah yang rusak akibat bencana banjir ini.

Terkait hal ini, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengaku belum melihat respon dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Ia pun menilai Nadiem sangat lamban.

Ubaid menyatakan banyak sekolah yang terkena dampak banjir. Namun, sampai saat ini sosok Nadiem belum terdengar aksinya.

“Belum ada respon dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Padahal banjir sudah terjadi sejak tiga hari yang lalu,” ujar Ubaid dalam pernyataan persnya.

“Mendikbud terkesan lamban, padahal banyak sekolah yang terkena dampak, akses ke sekolah terganggu bahkan fasilitas sekolah juga rusak,” ujar Ubaid dalam pernyataan persnya, Jumat (3/1).

Ubaid juga mengemukakan sampai saat ini belum ada juga data berapa sekolah yang terkena dampak banjir.

“Mungkin Pak Menteri belum sadar, kalau sekolah juga bagian dari korban banjir,” lanjut dia, seperti dimuat *Kantor Berita Politik RMOL*.

Pelaksana tugas Dirjen Dikdasmen dan PAUD Kemendikbud, Harris Iskandar, mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan seragam sekolah pada korban banjir. Namun pihaknya belum merinci bagaimana teknis pendistribusian seragam tersebut.

Sementara itu, Mendikbud Nadiem Makarim belum muncul ke publik sejak pergantian tahun. Padahal sejumlah kementerian telah melakukan kunjungan ke sejumlah tempat pengungsian.

Saat dikonfirmasi dengan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Mardiasna, juga belum berkomentar banyak mengenai langkah yang akan dilakukan Kemendikbud terkait sekolah yang terendam banjir.

Sumber : <https://www.rmoltatim.id/2020/01/04/banyak-sekolah-rusak-di-mana-nadiem->

Liburkan Sekolah hingga Beri Tunjangan Guru, Nadiem Makarim Tanggapi Dampak Banjir di Sektor Pendidikan



6 Januari 2020, 17:43 WIB

Editor: Rahmi Nurlatifah

Sumber: Pikiran Rakyat

MENDIKBUD Nadiem Makarim. Nadiem liburkan sekolah dan beri tunjangan guru khusus yang terkena dampak banjir.* /PUSPA PERWITASARI/ANTARA/ANTARAFOTO

PIKIRAN RAKYAT - Seperti Diberitakan sebelumnya, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengatakan bahwa Nadiem tidak responsif dalam menanggapi banjir di sektor pendidikan.

Mengenai hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Budaya, Nadiem Makarim seakan menjawab tanggapan tersebut.

Ia kini meliburkan pelajar yang sekolahnya memang terdampak banjir. Namun hal tersebut tidak diberlakukan untuk sekolah yang tidak terendam banjir. Mereka harus tetap melakukan aktivitas bersekolah yang dimulai pada Senin, 6 Januari 2020.

Ia menyatakan, kebijakan tersebut dikeluarkan karena banyaknya kerusakan khususnya fasilitas sekolah yang diakibatkan oleh banjir awal tahun.

Selain itu, hal ini tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.

“Saya meminta Pemda memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, dan tenaga kependidikan dalam situasi darurat bencana. Meliburkan kegiatan pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan apabila kegiatan belajar mengajar masih belum bisa dilaksanakan seperti semula,” ujarnya pada Sabtu, 4 Januari 2020.

Namun meski diliburkan, guru tetap dapat memberikan tugas kepada murid sesuai dengan kondisi lapangan. Ia juga menyatakan bahwa saat ini direktorat teknis terkait sedang menyiapkan bantuan berupa tenda darurat hingga perlengkapan sekolah lainnya.

Pemda juga bertugas untuk mengaktifkan pos pendidikan sebagai alternatif sekretariat penanganan darurat bidang pendidikan di daerah. Sampai tanggal 3 Januari 2020, telah didapatkan data sebanyak 290 sekolah yang terdampak banjir di wilayah DKI Jakarta.

Diantaranya 8.420 siswa yang terdampak banjir di wilayah tersebut. Sementara dilaporkan sebanyak 12 sekolah mengalami kerusakan akibat banjir.

Dengan sebanyak 20 Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya yang rumahnya ikut terendam banjir. Sejauh ini, Kemendikbud terus berkoordinasi dengan Pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Banjir (BNPB) untuk melakukan pendataan sekolah yang terendam banjir.

Sumber: <https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-06330372/liburkan-sekolah-hingga-beri-tunjangan-guru-nadiem-makarim-tanggapi-dampak-banjir-di-sektor-pendidikan>

JPPI : Kampus Merdeka kurang berpihak pada kebutuhan masyarakat



Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)
Ubaid Matraji (tengah). (Dok pri)

Senin, 27 Januari 2020 15:59 WIB

Pewarta : Indriani

Editor : Erafzon Septiyulda AS

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan kebijakan Kampus Merdeka yang diusung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kurang berpihak pada kebutuhan.

“Kebijakan ini belum berpihak sama sekali dengan kebutuhan masyarakat yang masih berkatut pada masalah akses pendidikan tinggi,” ujar Ubaid di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi masih rendah, yakni sekitar 31 persen. Namun, masyarakat malah disuguhkan kebijakan Merdeka Belajar yang tidak membahas mengenai upaya peningkatan partisipasi kasar masyarakat pada pendidikan tinggi.

Ubaid menilai kebijakan tersebut lebih tepat jika disebut dengan kampus bebas yang berarti memberikan kampus kewenangan untuk melakukan apapun. Termasuk tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Apalagi dengan mempermudah jalannya Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), yang berujung pada komersialisasi pendidikan,” kata dia.

Selain itu, kebijakan tersebut juga tidak menyinggung mengapa Lembaga Pendidikan Tenaga

Kependidikan (LPTK) gagal dalam mencetak guru yang berkualitas.

“Hal lain terkait kebutuhan industri itu memang penting, tapi Tridharma perguruan tinggi juga harus tetap didahulukan. Jika, melulu tunduk pada industri maka kampus menjadi agen-agen kapitalis yang jauh dari misi kemanusiaan,” kata dia.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan tersebut merupakan lanjutan dari Merdeka Belajar.

Terdapat empat poin kebijakan tersebut yakni otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru.

Kemudian program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama lima tahun, namun akan diperbaharui secara otomatis.

Selanjutnya, kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH), dan magang sukarela bagi mahasiswa hingga tiga semester.*

Sumber: <https://www.antaranews.com/berita/1267423/jppi-kampus-merdeka-kurang-berpihak-pada-kebutuhan-masyarakat>

Kemudahan Kampus Jadi PTNBH Bentuk Komersialisasi Pendidikan



Ilustrasi wisuda mahasiswa. Validnews/Arizar Ghiffari

29 Januari 2020

15:04 WIB

Editor: Agung Muhammad Fatwa

JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memudahkan kampus menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) merupakan langkah komersialisasi pendidikan.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, dalam sepuluh tahun terakhir banyak masyarakat yang keberatan dengan perubahan kampus menjadi PTNBH. Kebijakan ini dianggap tidak berpihak kepada masyarakat dan justru cenderung berpihak kepada pasar industri.

“Dengan adanya kemudahan menjadi PTNBH itu kian arahnya kepada komersialisasi dan industrialisasi dunia pendidikan,” kata Ubaid kepada *Validnews*, Rabu (29/1).

Dia bahkan menyebut kebijakan ini bakal semakin menjauhkan masyarakat dari akses pendidikan tinggi yang saat ini masih di bawah 50% dari penduduk Indonesia. Sebab, dikhawatirkan biaya pendidikan di kampus dengan status PTNBH akan lebih tinggi.

Sementara, Ubaid berpandangan selama ini tidak ada *output* yang berbeda antara pendidikan berbiaya mahal dengan yang berbiaya terjangkau. Kesan kalau pendidikan yang lebih mahal maka pasti lebih baik semata pencitraan belaka.

“Artinya komersialisasi itu tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas, *output*, dari kampus sendiri. Hari ini yang digelisahkan banyak orang itu kan banyak kampus yang menjadi menara gading,” ujarnya.

Ubaid berpendapat, seharusnya Mendikbud Nadiem Makarim memperhatikan konsep Tridarma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kebijakan kemudahan menjadi PTNBH akan semakin mengokohkan posisi yang selama ini dinilai sudah berjarak dengan masyarakat.

Kampus dengan status PTNBH nantinya seolah diarahkan hanya melahirkan manusia-manusia yang kompatibel dengan industri, tetapi bukan melahirkan manusia merdeka. Ubaid tak memungkiri bahwa kecocokan lulusan kampus memang perlu, tetapi yang lebih penting adalah membuat mereka memahami hak-haknya.

“Bukan manusia robot-robot yang dipasang untuk melengkapi kebutuhan industri. Tetapi dari situ dia juga mengerti tentang hak-hak sipil, hak-hak sebagai tenaga kerja, atau harus mengerti tentang misalnya hak-hak reproduksi perempuan dan segala macam,” tegasnya.

Dia mempertanyakan peran kampus untuk turut menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat jika kampus hanya menjadi bagian dari industri. Bagaimana dengan problem masyarakat di sekitar kampus, masyarakat kecil yang masih berkutut dengan kemiskinan, akses ke sekolah saja mereka susah, gizi buruk di mana-mana, apa kontribusi kampus terhadap itu semua?” imbuhnya.

Nadiem juga dianggap telah menutup mata terhadap masalah yang dihadapi kampus-kampus pencetak guru atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Tidak satu pun dari paket kebijakan Kampus Merdeka yang memperhatikan masalah lulusan LPTK yang menjadi guru dengan kualitas yang masih rendah.

“Apa yang salah dengan output guru-guru yang kualitasnya rendah di sekolah itu? Itu sama sekali tidak disinggung dalam kebijakan ini. Jadi seakan-akan kebijakan ini sangat pro pasar. Mungkin Pak Menteri background-nya memang orang bisnis, jadi lebih diarahkan ke industri segala macam,” pungkasnya. (Winda Nur Hidayat)

Sumber: <https://validnews.id/nasional/Kemudahan-Kampus-Jadi-PTNBH-Mengarah-ke-Komersialisasi-Pendidikan-QgJ>

Membangun Kesadaran Siswa Tentang Bahaya Perundungan



Ilustrasi perundungan (RRI)

Oleh: Onaria Fransisca

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo

Rabu, 05 Februari 2020 | 17:55

ASKARA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan perlu adanya aturan sekolah untuk mencegah dan menangani perundungan atau bullying.

Selama ini sekolah kurang serius mengatasi perundungan yang dialami siswa.

Perundungan di sekolah sudah sering terjadi. Barubaru ini seorang siswa SMPN di Kota Malang mengalami kejadian serupa yang berakibat korban harus menjalani perawatan medis.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, selama ini pihak luar tidak dilibatkan dalam kebijakan sekolah. Harusnya semua pihak terlibat, baik di dalam maupun luar sekolah.

“Selama ini mereka cenderung dibiarkan karena tanpa ada keterlibatan semua stakeholder sekolah,” ujar Ubaid kepada redaksi, Rabu (5/2).

Meski sudah pasal 54 Undang-Undang 35/2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan sekolah melakukan perlindungan terhadap peserta didik dari kekerasan, serta Permendikbud Nomor 82/2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah justru timbul pertanyaan apakah aturan tersebut sudah dijalankan pihak sekolah.

“Ya itu kan aturan. Apa sudah dijalankan, lain lagi ceritanya,” Ubaid.

Seharusnya, dengan jalur komunikasi yang sudah canggih bisa menggunakan media sosial dan internet. Termasuk juga bisa jadi sarana edukasi terhadap siswa.

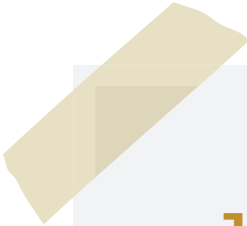
“Tapi mereka tidak menggunakan itu bagian dari tindakan preventif,” kata Ubaid.

Selain itu, pihak sekolah juga wajib membangun pemikiran kritis dan kesadaran terhadap peserta didik mengenai bahaya dari perundungan. Jadi, pendekatan dialogis kritis bisa dibilang efektif membangun kesadaran siswa tentang perundungan.

“Harusnya dibangun kesadaran kritis dialogis, mengapa bully dan apa akibatnya. Berdasarkan pemahaman yang dialogis dan nalar kritis dari situlah muncul kesadaran,” terang Ubaid.

Polresta Malang sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus perundungan yang dialami salah satu siswa SMP di kota itu. Adapun, laporan masyarakat yang diterima Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga segera ditindaklanjuti.

Sumber: <https://www.askara.co/read/2020/02/05/845/membangun-kesadaran-siswa-tentang-bahaya-perundungan>



JPPI: DANA BOS BUKAN SOLUSI KESEJAHTERAAN GURU HONORER

yenny hardiyanti

Kamis, 13 Februari 2020 | 15:15

Schoolmedia News, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bukan solusi untuk menyejahterakan guru honorer.

“BOS itu bukan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, tapi pengalihan masalah sementara dan tidak strategis untuk guru honorer,” kata Ubaid di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

Alasannya, kata dia, tidak semua guru memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Prasyarat utama agar guru honorer bisa mendapatkan honor dari dana BOS yakni harus memiliki NUPTK per 31 Desember 2019.

Dalam kebijakan Merdeka Belajar episode III, Ubaid menjelaskan, disebutkan tentang perubahan dana BOS yang diperkenankan digunakan untuk gaji guru honorer, yakni maksimum 50 persen dari dana BOS.

Persentase itu meningkat dari tahun sebelumnya, dan hanya diperbolehkan 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta.

“Kasihan guru yang tidak punya NUPTK, dia tidak diakui statusnya. Padahal guru honorer memerlukan kejelasan status,” katanya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan jumlah guru honorer yang sudah memiliki NUPTK hingga 18 Desember 2019, sebanyak 708.963 guru atau 47 persen dari total guru honorer yang memiliki jumlah 1.498.344 guru.

Ia mengusulkan agar gaji guru honorer diberikan dari pos anggaran lainnya. Hal itu dikarenakan dana BOS sangat mepet untuk operasional sekolah.

“Gaji guru honorer harus dari pos yang lebih strategis, karena yang dialami guru honorer adalah statusnya yang tidak jelas,” ujarnya.

Sumber: <https://news.schoolmedia.id/berita/Perkuat-Talenta-Digital-Indonesia-Kominfo-Se-diakan-200-Beasiswa-S2-Dalam-dan-Luar-Negeri-1660>

Perbesar Akses Publik Awasi BOS



Kamis 06 Februari 2020, 04:30 WIB

Indriyani Astuti

KEMENTERIAN Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama segera melakukan rapat bersama untuk membahas rencana transfer dana bantuan operasional sekolah (BOS) langsung ke sekolah. “Opsi tersebut dilakukan untuk mencegah keterlambatan pencairan dana BOS dari kabupaten/kota,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian se usai bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, kemarin. Mendagri bilang, Wapres Ma’ruf Amin setuju penyaluran dana BOS langsung ke sekolah dianggap dapat memotong regulasi. Namun, Wapres sangat mewanti-wanti agar pengelolaan dan pengawasan dana BOS bisa transparan dan akuntabel. “Jangan sampai mengabaikan tugas lain, substansi masalah pendidikan menjadi nomor dua,” sebut Tito, menirukan pesan Wapres. Dana BOS dalam RAPBN 2020 dianggarkan sebesar Rp54,31 triliun, atau meningkat 9% jika dibandingkan dengan outlook APBN 2019. Adapun satuan biaya dana bos yang diterima setiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik. Untuk siswa SD sebesar Rp800 ribu per satu peserta didik per tahun. Pada SMP sebesar Rp1 juta per satu peserta didik per satu tahun. Pada SMA dan SMK sebesar Rp1,4 juta per satu peserta didik per satu tahun. Untuk SDLB/SMPLB/SMALB/SLB sebesar Rp2 juta per satu peserta didik per tahun. Celah yang dibiarkan Potensi penyelewengan dan penyalahgunaan dana BOS yang ditransfer langsung ke sekolah cukup besar. Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta pemerintah

untuk menyiapkan strategi pencegahannya. Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, pemerintah harus memberikan edukasi ke komunitas sekolah tentang apa itu BOS serta pengelolaannya. Kedua, semua stakeholders sekolah harus mengetahui pengelolaan BOS, jangan hanya menyerahkan urusan BOS pada kepala sekolah dan bendahara sekolah. “Ini celah yang selama ini dibiarkan sehingga penyelewengan dan korupsi dana BOS jalan terus,” tegasnya saat dihubungi Media Indonesia. Lalu, ketiga, Ubaid meminta agar pelaporan dana BOS bisa diakses publik. Publik bisa memberikan catatan atas dugaan penyelewengan. Kalau ini dilakukan, imbuhnya, akan ada check and ba-lance yang kuat di sekolah se-hingga dapat meminimalkan korupsi dana BOS. “Jika penye-lewengannya masuk ke ranah kasus korupsi, sebaiknya menggunakan UU Tipikor dan sejenisnya. Tegakkan sanksi,” pungkasnya. Selama ini dana BOS mampir dulu ke rekening pemerintah daerah sebelum diberikan ke sekolah. Mekanisme yang sama telah diterapkan pada penyaluran dana desa. Dalam realisasinya, jelas Menteri Tito, banyak sekolah yang mengeluhkan belum ca-irnya dana BOS hingga 3 bulan lamanya dan mengganggu operasional sekolah. Banyak sekolah yang akhirnya terpaksa berutang ke pihak ketiga atau menggunakan dana sendiri untuk membiayai operasional sekolah.

Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/288077/perbesar-akses-publik-awasi-bos>

Menimbang Positif dan Negatif Perubahan Skema Dana BOS



Ilustrasi dana BOS (Aksesjambi/Siedoo)

Oleh: Onaria Fransisca

Rabu, 12 Februari 2020 | 17:05

ASKARA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengubah skema penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Awalnya lewat perantara pemerintah daerah tapi sekarang bantuan ditransfer langsung ke pihak sekolah.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai, perubahan skema penyaluran dana BOS tidak bakal menimbulkan banyak perubahan. Justru masih berpotensi terjadinya praktik korupsi.

“Potensi penyelewengannya sama saja, masih sangat rawan. Itu kan penyalurannya, pendataannya kan masih melibatkan dinas,” ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji saat dihubungi, Rabu (12/2).

Terlebih, penggunaan dana BOS selama ini belum transparan. Publik kesulitan mengakses informasi karena pengelolaannya didominasi oleh kepala sekolah.

Padahal pengelolaan dana BOS harus melibatkan semua pihak, termasuk komite sekolah dan masyarakat dari perencanaan hingga evaluasi.

“Belum transparan, masih susah diakses. Dianggapnya secret file, padahal itu adalah data publik yang siapapun bisa akses,” jelas Ubaid.

Pemerintah mengalokasikan dana BOS sebesar Rp 54,32 triliun atau naik 6,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencairan akan dilakukan tiga tahap, di mana tahap pertama sebesar Rp 9,8 triliun untuk 136.579 sekolah di 34 provinsi.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menyatakan, transfer langsung dari pusat ke sekolah menjadi hal positif karena daerah terkadang menahan dana BOS dengan berbagai alasan. Untuk penyaluran tahap pertama dinilai cukup baik.

“Tujuh puluh persen pada semester pertama adalah hal positif karena banyak kepek atau guru ngutang untuk menalangi kebutuhan operasional. Dan sudah menjadi rahasia umum,” katanya.

Namun, sisi negatifnya, penambahan 50 persen untuk tenaga honorer sesungguhnya kontraproduktif dengan keputusan DPR RI dan BKN menghapuskan sistem honorer. Seharusnya bukan jadi 50 persen tetapi menjadi nol persen.

“Biarkan pemerintah daerah memikirkan caranya menanggulangi kekurangan guru ini,” ujar Ramli.

Di sisi lain, penambahan porsi honorer otomatis mengurangi pembiayaan untuk kebutuhan lain yang juga mendesak di sekolah.

Selain itu, porsi dana BOS belum adil bagi sekolah dengan jumlah siswa sedikit dan kondisi geografis yang berat. Karena bilangan pembagi di sekolah berjumlah siswa banyak lebih kecil dibanding sekolah dengan jumlah siswa sedikit yang hampir pasti untuk berbagai kebutuhan.

“Kemungkinan makin banyak kepala sekolah berurusan dengan hukum karena mereka akan diancam untuk membiayai sesuatu meski tak ada posnya dalam dana BOS,” beber Ramli.

“Pemda masih punya kekuatan mengangkat dan memberhentikan kepek dan dapat memerintahkan sesuatu ke kepek,” tambahnya.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo

Sumber: <https://www.askara.co/read/2020/02/12/1039/menimbang-positif-dan-negatif-perubahan-ske-ma-dana-bos>

Tanpa Partisipasi Publik, Dana BOS Rawan Diselewengkan



By : Ucha

12 Februari 2020

Koordinator Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji (Gatra/Ucha Julistian)

Jakarta, Gatra.com - Pengamat Pendidikan, Ubaid Matraji menilai perubahan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih sangat rawan penyelewengan.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim resmi mengubah skema penyaluran dimana dana BOS disalurkan langsung ke rekening sekolah dari rekening Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pria yang juga Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) tersebut potensi penyelewengan masih sangat rawan karena pendataannya masih melibatkan dinas terkait.

“Kemungkinan masih bisalah main-main di situ. Makanya, ini potensial diselewengkan karena dana BOS ini masih menjadi *secret file* di sekolah dan susah diakses oleh publik. Apalagi, pengelolaannya juga dikelola oleh sekolah, tanpa melibatkan partisipasi publik,” ujar Ubaid saat dihubungi **Gatra.com**, Rabu (12/2).

Untuk itu, sebagai pengawasan Ubaid menyarankan, adanya akses yang luas untuk publik bisa ikut mengawasi dan memantau dana BOS tersebut. Jika dana ini dikelola bersama dan semua pihak bisa mengawasi, maka penyelewengan itu dapat ditekan dan diminimalisir.

“Yang lebih penting dari itu adalah melibatkan publik dalam pengelolaan dana BOS. Jadi, dana

BOS itu bukan hanya urusan kepala sekolah dan bendahara saja, tapi urusan bersama-sama masyarakat sekolah. Mulai dari perencanaan sampai dengan *movev*,” jelas Ubaid.

Selain itu, Ubaid juga mendorong agar kapabilitas kepala sekolah dan SDM sekolah yang akan mengemban tanggung jawab pengelolaan dana BOS bisa di tingkatkan. Peningkatan diharapkan bisa menyasar ke masyarakat sekolah, sehingga pengelolaan dan BOS bisa transparan dan akuntabel.

“SDM masih perlu ditingkatkan kemampuannya. Tidak hanya kepek dan bendahara saja, tapi masyarakat sekolah juga penting diberikan *capacity building* soal apa itu BOS, bagaimana pengelolaannya, bagaimana supaya bisa transparan dan akuntabel. Juga bagaimana model partisipasi masyarakat yang bisa dilakukan. Semua pihak harus paham mekanisme ini supaya mereka bisa saling kontrol dan menguatkan,” pungkash Ubaid.

Reporter: Ucha Julistian
Editor: Andik Sismanto

Sumber: <https://www.gatra.com/news-468868-Info%20GTK-tanpa-partisipasi-publik-da-na-bos-rawan-diselewengkan.html>



JPPI: Dana BOS Bukan Solusi Kesejahteraan Guru Honorer

yenny hardiyanti Kamis, 13 Februari 2020 | 15:15 WIB

Schoolmedia News, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bukan solusi untuk menyejahterakan guru honorer.

“BOS itu bukan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, tapi pengalihan masalah sementara dan tidak strategis untuk guru honorer,” kata Ubaid di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

Alasannya, kata dia, tidak semua guru memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Prasyarat utama agar guru honorer bisa mendapatkan honor dari dana BOS yakni harus memiliki NUPTK per 31 Desember 2019.

Dalam kebijakan Merdeka Belajar episode III, Ubaid menjelaskan, disebutkan tentang perubahan dana BOS yang diperkenankan digunakan untuk gaji guru honorer, yakni maksimum 50 persen dari dana BOS.

Persentase itu meningkat dari tahun sebelumnya, dan hanya diperbolehkan 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta.

“Kasihan guru yang tidak punya NUPTK, dia tidak diakui statusnya. Padahal guru honorer memerlukan kejelasan status,” katanya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan jumlah guru honorer yang sudah memiliki NUPTK hingga 18 Desember 2019, sebanyak 708.963 guru atau 47 persen dari total guru honorer yang memiliki jumlah 1.498.344 guru.

Ia mengusulkan agar gaji guru honorer diberikan dari pos anggaran lainnya. Hal itu dikarenakan dana BOS sangat mepet untuk operasional sekolah.

“Gaji guru honorer harus dari pos yang lebih strategis, karena yang dialami guru honorer adalah statusnya yang tidak jelas,” ujarnya.

Sumber: <https://news.schoolmedia.id/berita/JPPI-Dana-BOS-Bukan-Solusi-Kesejahteraan-Guru-Honorer-1660>

JPPI : GAJI GURU HONORER SEHARUSNYA BUKAN DARI DANA BOS



Senin, 10 Februari 2020 20:14 WIB

Dokumentasi - Guru honorer dan guru tidak tetap melakukan aksi tutup mulut saat menggelar aksi di halaman kantor Bupati Blitar, Jawa Timur, Senin (29/10/2018). ANTARA FOTO/Irfan Anshori/kye.

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan gaji guru honorer seharusnya bukan berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melainkan dari pos anggaran lainnya.

“Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim ini serba kontradiktif. Sebelumnya pemerintah mengatakan akan mengangkat guru honorer menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tapi sekarang malah digaji dari dana BOS,” ujar Ubaid di Jakarta, Senin.

Selain itu, lanjut dia, dana BOS sangat mepet untuk operasional sekolah. Menurut dia, seharusnya guru honorer digaji dari dana yang berasal dari pos lainnya.

“Gaji guru honorer harus dari pos yang lebih strategis, karena yang dialami guru honorer adalah statusnya yang tidak jelas,” kata dia lagi.

Baca juga: Nadiem perbolehkan separuh dana BOS digunakan untuk gaji guru

Baca juga: Penyaluran dana BOS lebih cepat, kata Mendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim memperbolehkan

separuh atau 50 persen dari dana BOS digunakan untuk membayar gaji guru honorer.

“Mulai tahun ini, ada kewenangan khusus yang diberikan kepada kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS,” kata Nadiem dalam peluncuran kebijakan Merdeka Belajar episode III tentang perubahan mekanisme dana BOS pada hari yang sama.

Baca juga: Nadiem luncurkan Merdeka Belajar terkait mekanisme dana BOS

Baca juga: Menkeu: Dana BOS langsung ditransfer ke rekening sekolah

Pada tahun sebelumnya, dana BOS hanya boleh digunakan maksimum 15 persen (untuk sekolah negeri) dan maksimum 30 persen (untuk sekolah swasta) untuk gaji guru honorer.

“Apabila guru honorer di suatu sekolah yang sangat dibutuhkan di sekolah itu sedangkan kesejahteraannya kurang, biaya transportasinya kurang. Kepala sekolah boleh mengambil dana BOS hingga 50 persen untuk menunjang kesejahteraan para guru honorernya ,karena hanya kepala sekolah yang tahu tentang kebutuhan guru di sekolahnya,” terang Nadiem.

Pewartanya: Indriani

Editor: Budhi Santoso

Sumber: <https://www.antaranews.com/berita/1288326/jppi-gaji-guru-honorers-harusnya-bukan-dari-dana-bos>

Nadiem Makarim Bolehkan Sebagian Dana BOS untuk Gaji Guru, JPPI: Gaji Honorer Harusnya Bukan dari Dana BOS



Puji Fauziah

11 Februari 2020, 15:24 WIB

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.* /ANTARA/

Dengan peningkatan alokasi anggaran tersebut, maka saruan BOS per satuan peserta didik untuk jenjang sekolah SD, SMP, dan SMA mengalami peningkatan sebesar RP 100.000 per peserta didik.

Nadiem juga memperbolehkan separuh atau 50 persen dari dana BOS digunakan untuk membayar gaji guru honorer.

“Mulai tahun ini, ada kewenangan khusus yang diberikan kepada kepala sekolah dalam pengelolaan dan BOS,” kata Nadiem.

“Apabila guru honorer di suatu sekolah yang sangat dibutuhkan sekolah itu sedangkan kesejahteraannya kurang, biaya transportasinya kurang, kepala sekolah boleh mengambil dana BOS hingga 50 persen untuk menunjang kesejahteraan para guru honorernya, karena hanya kepala sekolah yang tahu tentang kebutuhan gurunya,” katanya menjelaskan.

Namun keputusan yang dibuat Nadiem tersebut tidak disetujui oleh Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, ia mengatakan gaji guru honorer seharusnya bukan berasal dari dana BOS, melainkan dari pos anggaran lainnya.

“Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim ini serba kontradiktif. Sebelumnya pemerintah mengatakan akan mengangkat guru honorer menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tapi sekarang malah digaji dari dana BOS,” ujar Ubaid.

Selain itu, lanjut dia, dana BOS sangat mepet untuk operasional sekolah. Menurut dia, seharusnya guru honorer digaji dari dana yang berasal dari pos lainnya.

“Gaji guru honorer harus dari pos yang lain yang lebih strategis, karena yang dialami guru honorer adalah statusnya yang tidak jelas,” katanya.

Sumber: <https://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-12339174/semarangku?page=3>

Ubaid Sebut 50% Dana BOS Boleh untuk Gaji Guru Honorer, Hanya Pengalihan Masalah



Jumat, 14 Februari 2020 – 06:57 WIB

Guru dan siswa. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Alokasi hingga 50 persen dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) boleh membayar gaji guru honorer dianggap bukan solusi untuk menyejahterakan guru honorer.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebut kebijakan tersebut hanya untuk pengalihan masalah.

“BOS itu bukan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, tetapi pengalihan masalah sementara dan tidak strategis untuk guru honorer,” kata Ubaid di Jakarta, Kamis (13/2).

Alasannya, kata dia, tidak semua guru memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Padahal, syarat utama agar guru honorer bisa mendapatkan honor dari dana BOS yakni harus memiliki NUPTK sebelum 31 Desember 2019.

“Kasihan guru yang tidak punya NUPTK, dia tidak diakui statusnya. Padahal guru honorer memerlukan kejelasan status,” katanya.

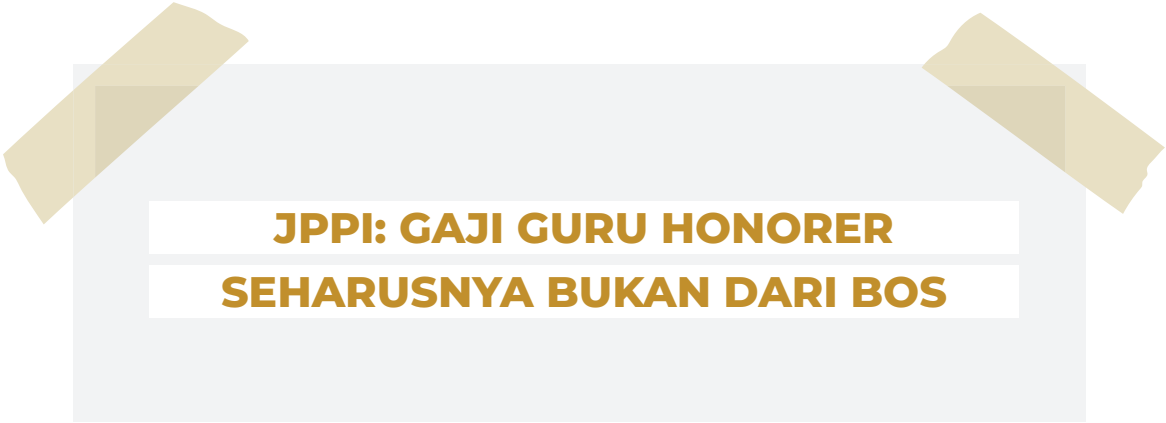
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan jumlah guru honorer

yang sudah memiliki NUPTK hingga 18 Desember 2019, sebanyak 708.963 guru atau 47 persen dari total guru honorer yang jumlahnya 1.498.344 guru.

Ia mengusulkan agar gaji guru honorer diberikan dari pos anggaran lainnya. Hal itu dikarenakan dana BOS sangat mepet untuk operasional sekolah.

“Gaji guru honorer harus dari pos yang lebih strategis, karena yang dialami guru honorer adalah statusnya yang tidak jelas,” ujar Ubaid Matraji. **(antara/jpnn)**

Sumber : <https://m.jpnn.com/news/ubaid-sebut-50-dana-bos-boleh-untuk-gaji-guru-honorer-hanya-pengalihan-masalah>



JPPI: GAJI GURU HONORER SEHARUSNYA BUKAN DARI BOS

Senin 10 Feb 2020 22:55 WIB

Red: Ratna Puspita

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan gaji guru honorer seharusnya bukan berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Gaji guru honorer dari pos anggaran lainnya.

“Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim ini serba kontradiktif. Sebelumnya pemerintah mengatakan akan mengangkat guru honorer menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tapi sekarang malah digaji dari dana BOS,” ujar Ubaid di Jakarta, Senin (10/2).

Selain itu, lanjut dia, dana BOS sangat mepet untuk operasional sekolah. Menurut dia, seharusnya guru honorer digaji dari dana yang berasal dari pos lainnya.

“Gaji guru honorer harus dari pos yang lebih strategis, karena yang dialami guru honorer adalah statusnya yang tidak jelas,” kata dia lagi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim memperbolehkan separuh atau 50 persen dari dana BOS digunakan untuk membayar gaji guru honorer. “Mulai tahun ini, ada kewenangan khusus yang diberikan kepada kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS,” kata Nadiem dalam peluncuran kebijakan Merdeka Belajar episode III tentang perubahan mekanisme dana BOS pada hari yang sama.

Pada tahun sebelumnya, dana BOS hanya boleh digunakan maksimum 15 persen (untuk sekolah negeri) dan maksimum 30 persen (untuk sekolah swasta) untuk gaji guru honorer. “Apabila guru honorer di suatu sekolah yang sangat dibutuhkan di sekolah itu sedangkan kesejahteraannya kurang, biaya transportasinya kurang. Kepala sekolah boleh mengambil dana BOS hingga 50 persen untuk menunjang kesejahteraan para guru honorernya, karena hanya kepala sekolah yang tahu tentang kebutuhan guru di sekolahnya,” terang Nadiem.

sumber : Antara

Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/q5htl3428/jppi-gaji-guru-honorer-seharusnya-bukan-dari-bos>



Kemendikbud Ungkap Tiga Penyebab Guru di RI Masih Gaptek

12 February 2020

rubrik: Digita

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) jumlah guru yang akrab dengan teknologi tak sampai 50 persen dari 28 ribu guru yang dipetakan. Kondisi ini menjadi ironi, terlebih ketika semua bidang dituntut untuk beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 dan disrupsi teknologi.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Martaji menyebutkan ada tiga hal yang membuat guru masih gagap teknologi atau ‘Gaptek’. Pertama adalah absennya peran pemerintah dalam menjalankan tugasnya meningkatkan kompetensi guru, termasuk dalam bidang TIK.

Berikutnya adalah, peran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menurutnya telah gagal mencetak jebolan calon guru yang berkualitas. “Gagalnya LPTK dalam mencetak lulusan-lulusan yang kompeten dalam bidangnya dan penguasaan TIK dalam pembelajaran,” kata Ubaid di Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020.

Kemudian yang ketiga adalah Pemerintah Daerah yang tidak serius menangani dunia pendidikan. Ditambah lagi kompetensi guru yang juga tidak menjadi perhatian.

“Pemda masih menganggap bahwa persoalan pendidikan dan juga kompetensi guru bukanlah hal prioritas. Dampaknya, kualitas pendidikan kita sangat rendah, begitu pula dengan kemampuan literasi kita,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kemendikbud melakukan pemetaan kompetensi guru terhadap pemanfaatan teknologi kepada 28 ribu guru. Pemetaan ini dilakukan dengan menggunakan sistem yang diterapkan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Ada empat level pemetaan yang digunakan untuk mengukur kompetensi guru tersebut. Level satu ICT literasi, atau literasi Teknologi, Informasi, Komunikasi.

Kedua, level ketika guru sudah mampu mengoperasikan dan mengaplikasikannya dengan mudah. Level ketiga adalah level ketika guru sudah bisa membuat konten sendiri. Level keempat, guru sudah mampu menjaditrainer.

Tercatat dari pemetaan pada 28 ribu guru tersebut, hanya 46 persen di antaranya yang lulus level satu. Itu artinya yang menguasai teknologi level dasar masih di bawah 50 persen, dan itu diakui oleh Plt. Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gogot Suharwoto

“Hasil pemetaan kami dari 28 ribu (guru) ternyata yang menguasai level 1 baru 46%. jadi memang kendala utama pada kompetensi menguasai, masih di bawah 50 persen,” kata Gogot.

Sumber: <https://www.itworks.id/25150/25150.html>

Guru Gaptek, LPTK Gagal Cetak Lulusan Berkualitas



Ilham Pratama Putra · 07 Februari 2020 17:51

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menyebut rendahnya kompetensi guru dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau gagap teknologi (gaptek) salah satunya disebabkan karena kegagalan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam mencetak lulusan yang berkualitas. Terutama dalam kemampuan mengadaptasi teknologi pendidikan dalam pembelajaran.

“Gagalnya LPTK dalam mencetak lulusan yang kompeten dalam bidangnya dan penguasaan TIK dalam pembelajaran,” ungkap Ubaid kepada Medcom.id, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020.

Untuk itu, kata Ubaid, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim harus memberi perhatian kepada LPTK. Ubaid juga meminta Nadiem mengevaluasi proses belajar hingga kurikulum yang ada di LPTK, sebab menurutnya hal ini tidak tampak dilakukan.

Ubaid juga menyayangkan, dalam gagasan ‘Kampus Merdeka’ sama sekali tidak mengusung perbaikan LPTK. Padahal kualitas pendidikan sangat bertumpu pada kualitas guru, sehingga evaluasi LPTK sangat penting untuk dilakukan.

“Itulah kita semua bertanya, tidak pernah ada yang mengevaluasi bagaimana kinerja LPTK itu? Bahkan, kita semua kecewa, kebijakan ‘Kampus Merdeka’ yang dirilis Pak Menteri kemarin tidak menyinggung sama sekali soal LPTK yang bermasalah ini,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan Kampus Merdeka sama sekali tidak memberi perhatian pada persoalan rendahnya kualitas guru. “Jadi kebijakan itu harus mempertimbangkan siapa yang akan melaksanakan, bagaimana kompetensinya, mampu apa tidak kira-kira, strategi intervensi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas guru,” ungkapnya.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/VNx4GZxN-guru-gaptek-lptk-gagal-cetak-lulusan-berkualitas>

Nyaris Separuh Guru Honorer Tak Punya NPUTK, Kebijakan Nadiem Makarim Bukan Solusi

Hamsah umar - Nasional

Jumat, 14 Februari 2020 08:12 AM

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Alokasi hingga 50 persen dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), boleh membayar gaji guru honorer dianggap bukan solusi untuk menyejahterakan guru honorer.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebut, kebijakan tersebut hanya untuk pengalihan masalah.

“BOS itu bukan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, tetapi pengalihan masalah sementara dan tidak strategis untuk guru honorer,” kata Ubaid di Jakarta, Kamis (13/2).

Alasannya, kata dia, tidak semua guru memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Padahal, syarat utama agar guru honorer bisa mendapatkan honor dari dana BOS yakni harus memiliki NUPTK sebelum 31 Desember 2019.

“Kasihan guru yang tidak punya NUPTK, dia tidak diakui statusnya. Padahal guru honorer memerlukan kejelasan status,” katanya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan jumlah guru honorer yang sudah memiliki NUPTK hingga 18 Desember 2019, sebanyak 708.963 guru atau 47 persen dari total guru honorer yang jumlahnya 1.498.344 guru.

Ia mengusulkan agar gaji guru honorer diberikan dari pos anggaran lainnya. Hal itu dikarenakan dana BOS sangat mepet untuk operasional sekolah.

“Gaji guru honorer harus dari pos yang lebih strategis, karena yang dialami guru honorer adalah statusnya yang tidak jelas,” ujar Ubaid Matraji. (ant/jpnn/fajar).

Sumber: <https://fajar.co.id/2020/02/14/nyaris-separuh-guru-honorer-tak-punya-nputk-kebijakan-nadiem-makarim-bukan-solusi/>

Merdeka Belajar dan Timbulnya Kekhawatiran Baru



14 Februari 2020

19:53 WIB

Editor: Agung Muhammad Fatwa

Sejumlah pelajar mengamati berbagai benda koleksi saat kegiatan belajar di Museum Negeri Sumut di Medan, Sumatera Utara, Rabu (22/1/2020). Kegiatan itu bertujuan untuk menumbuhkan minat berkunjung ke museum sebagai tempat belajar. ANTARAFOTO/Septianda Perdana

JAKARTA – Sedikit embusan “angin surga” yang menerpa para guru honorer, di bulan Februari 2020 ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mencoba untuk mengurai secara perlahan benang kusut yang selama ini mengikat nasib mereka.

Melalui program Merdeka Belajar jilid III, mantan Bos Gojek itu memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menggunakan 50% dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menggaji guru honorer. Alokasi tersebut naik cukup signifikan, dari sebelumnya maksimal hanya 15% untuk sekolah negeri, dan 30% sekolah swasta.

“Ini adalah langkah pertama Kemendikbud untuk membantu menyejahterakan guru-guru honorer yang memang layak mendapatkan upah lebih layak,” ujar Nadiem, saat meluncurkan program Merdeka Belajar jilid III beberapa waktu lalu.

Sayangnya, ternyata tak semua guru honorer bisa menikmatinya, mengingat ada sejumlah persyaratan yang mengikat. Di antaranya, guru yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019. Nah, untuk kepemilikan

NUPTK saja, sebanyak 53% guru honorer tercatat tidak memilikinya.

Selain penambahan alokasi upah guru honorer, sebenarnya ada tiga kebijakan lagi soal fleksibilitas penggunaan dana BOS yang juga memberi angin segar untuk pengembangan pendidikan. Antara lain, transfer dana BOS langsung dikirim ke rekening sekolah.

Kemudian, unit *cost* dana BOS naik sebesar Rp100 ribu per siswa dan bersifat otonom serta fleksibel. Tapi, insentif tersebut tetap harus dibarengi dengan pengetatan pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Kekhawatiran Baru

Sepintas, kebijakan Sang Menteri anyar ini memang terlihat baik. Tapi kebijakan tersebut justru menimbulkan kekhawatiran baru. Untuk pengistimewaan penggunaan dana BOS demi mengangkat derajat guru honorer, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Ramli Rahim khawatir, kebijakan ini justru punya potensi merugikan pihak sekolah.

“Kebijakan baru ini akan menguntungkan guru honorer, tapi membuntungkan sekolah. Biaya operasional sekolah harusnya bukan hanya untuk honorer karena itu untuk pembangunan kualitas sekolah dan sebagainya,” ujar Ramli kepada *Validnews*, Kamis (13/2).

Besarnya alokasi dana BOS untuk honor guru honorer itu dikhawatirkan juga membuka kemungkinan sekolah-sekolah bertindak nakal. Seperti mengutip pungutan liar demi menutupi biaya operasional yang sudah terpakai untuk mendongkrak gaji guru honorer.

Adanya kebijakan dana BOS tersebut langsung ditransfer ke rekening sekolah, juga tak lepas dari kritiknya. Menurutny, kebijakan tersebut memunculkan kegelisahan, nantinya pemerintah daerah akan lepas tangan untuk membantu mengembangkan mutu sekolah. Hal lainnya, kebebasan mengelola dana BOS yang diberikan kepada sekolah, dikhawatirkan digunakan untuk kegiatan atau pengadaan yang sejatinya tidak ada dalam pos atau petunjuk teknis (juknis).

Lebih lanjut, dia berpendapat, selama ini porsi dana BOS belum dikucurkan dengan adil. Terutama bagi sekolah-sekolah yang hanya memiliki jumlah siswa sedikit, serta berada di lokasi dengan kondisi geografis yang berat.

“Karena bilangan pembagi di sekolah berjumlah siswa banyak itu, lebih kecil jika dibandingkan sekolah dengan jumlah siswa sedikit, yang hampir pasti bilangan pembaginya besar untuk berbagai kebutuhan,” tuturnya.

Jadi Bumerang

Kebijakan ini juga dikhawatirkan juga menjadi bumerang bagi pelaksanaan program Merdeka Belajar secara keseluruhan. Jangan sampai karena tidak bisa mengelola secara bijak, porsi untuk peningkatan mutu sekolah dan pembelajaran menjadi terabaikan, hanya karena mengutamakan kesejahteraan guru honorer.

Sejatinya, dana BOS sendiri, juga digunakan untuk peningkatan kualitas guru, baik melalui pelatihan, pendampingan, maupun pembinaan berkelanjutan. Jika dijalankan dengan Merdeka Belajar jilid I, guru memang dituntut untuk memiliki kemampuan dan kreativitas yang tinggi

dalam mengajar.

Khusus soal peningkatan kompetensi guru, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, peningkatan alokasi dana BOS untuk guru honorer justru semakin mengubur upaya peningkatan kompetensi dan kualitas guru di sekolah. Ia menyebutkan, pemerintah harusnya menelurkan kebijakan nyata untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai penentu kelulusan siswa, bukan justru mengurangi dana dengan mengalokasikannya kepada guru honorer.

“Sebelumnya saja tidak ada kebijakan nyata untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru. Sekarang malah ada alokasi untuk guru honorer, tapi dana pelatihan guru makin berkurang. Jadi kontradiktif,” imbuh Ubaid kepada *Validnews*, Kamis (13/2).

Menurutnya, pemerintah masih “miskin” inisiatif untuk membangun kemampuan guru. Kebijakan yang ditelurkan dilihatnya justru kontradiktif dengan kebijakan Nadiem yang *ngebet* menggantikan Ujian Nasional (UN) dengan mekanisme asesmen di tahun 2021 mendatang. Dengan konsep tersebut, guru menjadi penentu kelulusan.

Jika para guru tidak disiapkan dengan kemampuan yang paripurna, tidak ada jaminan pula siswa lulus dengan kualitas yang mumpuni. Sebab menurutnya, kualitas seorang siswa sangat berhubungan erat dengan kualitas dan kompetensi guru.

“Misalkan TOEFL guru saja hanya 300, masa berharap siswa bisa 500. Jadi jangan dimarahin siswanya saja. Harap maklum, gurunya saja tidak berkualitas. Pemerintah juga tidak pernah evaluasi kinerja guru, hanya menyalahkan saja,” paparnya.

Dari data Kemendikbud di akhir tahun 2019, guru di Indonesia yang memiliki sertifikat ternyata tidak mencapai 50% di semua jenjang sekolah. Untuk itu, JPPI terus mendorong para guru untuk mengupayakan kompetensi guru secara mandiri.

Penentu Kelulusan

Harris Iskandar, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Menengah (Plt Dirjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbud menjelaskan, dalam konsep asesmen, kompetensi minimum guru memang akan menjadi penentu kelulusan. Ini karena semuanya dikembalikan kepada otoritas guru dan kewenangan sekolah.

“Sebenarnya sesuai undang-undang,” ucap Harris kepada *Validnews*, Selasa (11/2).

Ia pun menggaransi, dengan menjadikan guru sebagai penentu kelulusan tidak serta-merta nilai kelulusan menjadi subjektif. Pasalnya, ada Dewan Guru sebagai pengawas setiap guru yang akan menjadi penilai nantinya. Standar kelulusan siswa tersebut juga tidak bisa lepas dari standar nasional pendidikan.

Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Doni Koesoema menyebut, sertifikat guru pada dasarnya tidak bisa menjadi patokan kualitas guru. Karena pada kenyataannya, masih banyak guru yang tidak bersertifikat, namun mempunyai kualitas mengajar yang baik, begitu juga sebaliknya.

Tapi ia menilai, umumnya guru yang sudah tersertifikasi adalah guru sudah memenuhi kriteria standar nasional. Untuk menyiasatinya, Doni menyebut harus ada pendampingan dan pengembangan yang terus menerus.

“Harus dibantu baik itu dalam proses pembelajaran maupun di sekolah. Tapi kita harus tahu dulu apa saja kelemahannya dan kemampuannya, jadi bisa jitu memulai dari sisi mana yang ditingkatkan,” ujar Doni kepada *Validnews*, Kamis (13/2).

Dijelaskan, digantinya UN dengan asesmen kompetensi minimum ini tidak merubah standar nasional pendidikan. Untuk itu, setiap lembaga pendidikan tetap mengacu kepada delapan poin standar nasional pendidikan.

Tambah

Ilmu

Namun, Doni meminta Kemendikbud lebih menjelaskan secara detail bagaimana mekanisme dari asesmen kompetensi minimum itu. “Tujuan asesmen itu harus jelas bagaimana mekanismenya apa yang diuji, harus jelas. Jadi memang harus dikawal agar sesuai dengan tujuan awalnya,” ucapnya.

Pergantian UN ke asesmen memang menjadikan guru sebagai faktor penting. Untuk itu, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengusulkan kepada Kemendikbud untuk menambah kompetensi guru untuk mendukung program Merdeka Belajar ini.

Ia menyebutkan seharusnya setiap guru dibekali oleh cara-cara jitu mengarahkan muridnya. Apalagi, amanat Merdeka Belajar juga mengusung konsep belajar di luar ruangan kelas.

“Gurunya juga harus ditambah ilmu, bagaimana caranya mengarahkan anak-anak untuk menyukai belajar di dalam dan luar ruang kelas, mau belajar pada pengalaman orang lain, bisa mengambil pelajaran dari lingkungan dan seterusnya,” papar Ledia kepada *Validnews*, Kamis (13/2).

Sebagai penentu kelulusan, Ledia meminta kepada para guru tidak boleh menilai siswa secara subjektif. Untuk itu, ia menekankan pembekalan ilmu guru dan peningkatan kompetensi guru sebagai penilai segera dilakukan.

Ia menilai, belum banyak guru yang berpengalaman mengevaluasi atau menilai karakter siswa. Ditambah lagi, masih marak kasus perundungan alias *bullying* di sekolah yang akan menjadi faktor penentu lainnya.

“Karena guru harus dipaksa untuk bisa menggali ada apa di belakang perilaku siswanya. Cara mengasesmen begitu kan perlu ilmu. Apakah sudah merata kemampuan guru-guru di seluruh Indonesia?” kata Ledia. **(Gisesya Ranggawari)**

Sumber: <https://www.validnews.id/nasional/Merdeka-Belajar-dan-Timbulnya-Kekhawatiran-Baru-PdT>



Reporter: admin |

Editor: admin |

Selasa 18-02-2020,11:54 WIB

JAKARTA - Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler tahap I senilai Rp 9,8 triliun telah cair pada Februari ini. Bahkan telah disalurkan ke ratusan ribu sekolah. Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufansa Wira Sakti mengatakan Pemerintah telah menyalurkan dana BOS reguler tahap I ke 136.579 sekolah pada Februari 2020. Totalnya senilai Rp9,8 triliun. Pencairan dan penyaluran dipercepat sesuai dengan komitmen bersama Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri. “Penyaluran Dana BOS ke sekolah-sekolah pada bulan Februari 2020 ini lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang rata-rata baru masuk ke rekening sekolah pada bulan Maret dan April,” kata Nufansa, Senin (17/2). Proses penyaluran yang lebih cepat ke rekening sekolah akan dapat membuat kegiatan operasional sekolah bisa lebih cepat terselenggara. Sekolah dapat lebih cepat dalam menyampaikan laporan tanpa menunggu sekolah lain meskipun dalam wilayah yang sama. “Penyaluran langsung ke rekening sekolah juga tetap ditatausahakan dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga sisi akuntabilitas tetap terjaga,” katanya. Penyaluran dana BOS secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Sekolah ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik. Alokasi dana BOS reguler tahap I ini sebesar 30 persen untuk masing-masing sekolah yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk Tahap II dan III akan disalurkan sebesar 40 persen dan 30 persen. Dengan skema penyaluran terbaru ini, maka sebesar 70 persen dana BOS nantinya dapat langsung diterima sekolah pada semester I. Terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengkritisi 50 persen dana BOS digunakan untuk gaji guru honorer. Hal ini menurutnya sangat kontradiktif dengan peraturan yang ada. Selama ini pemerintah berjanji untuk mengangkat guru honorer sebagai pegawai negeri sipil (PNS) ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Namun yang terjadi malah dana BOS digunakan untuk menggaji guru honorer. “Dana BOS itu sangat mepet untuk operasional sekolah. Harusnya honorer kan diberikan dari pos lain, atau yang lebih strategis statusnya harus diperjelas. Kalau operasional dikurangi banyak, maka itu akan mengundang pungli,” katanya. Skema maksimal 50 persen untuk gaji guru ini, menurutnya berpotensi diskriminatif. Sebab ada

prasyarat guru honorer tersebut harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Pada kenyataannya, sangat banyak guru honorer, yang tak punya NUPTK. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebaiknya segera merevisi Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS untuk menghindari diskriminasi. “Dengan syarat NUPTK ini, banyak guru honorer yang tidak bisa mengakses dana BOS. Itulah kenapa saya katakan kebijakan ini hanya gertak sambal dan tidak strategis sama sekali, dan NUPTK ini akan menimbulkan masalah baru,” ucapnya. Dia pun mengusulkan, jika pemerintah ingin dana BOS menjadi salah satu solusi untuk kesejahteraan guru, maka jangan ada persyaratan NUPTK. Ubaid juga meminta pemerintah mewaspadai pengelolaan dana BOS. Pasalnya, pengelolaannya masih tertutup dan tidak partisipatif. “JPPI menemukan selama ini, pengelolaan dana BOS ini hanya dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara tanpa melibatkan elemen lain,” ujarnya. Karenanya, sebelum melakukan transfer langsung, pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi kepada para guru dan kepala sekolah. Sebab, tidak semuanya paham pengelolaan dana BOS. “Harus pemerintah yang menginisiasi pelatihan pengelolaan dana BOS secara akuntabel, transparan, dan partisipatif sebelum dana BOS ditransfer. Apabila mereka tidak bisa mengelola secara transparan dan akuntabel, maka berpotensi besar menjadi jebakan masuk bui,” ujarnya.(gw/fin) Penyaluran dana BOS Tahap I 94.680 Sekolah Dasar total Rp4,44 triliun 23.625 Sekolah Menengah Pertama total Rp2,21 triliun 6.857 Sekolah Menengah Atas total Rp1,22 triliun 9.932 Sekolah Menengah Kejuruan total Rp1,84 triliun 1.485 Sekolah Luar Biasa total Rp70,1 miliar.

Sumber: <https://fin.co.id/read/46603/Dana-BOS-Tahap-I-Rp98-Triliun-Cair>

Masih Perlukah Sekolah Islam Terpadu di Indonesia?



By Drean Muhyil

10 Maret 2020

Koordinator Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji (Gatra/Ucha Julistian)

Jakarta, Gatra.com - Setidaknya beberapa dekade belakangan ini, sekolah berlabel Islam Terpadu (IT) bermunculan di Indonesia. Sekolah IT sendiri muncul di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang pendekatannya cenderung sekuler. Hal ini tentu berbeda dari madrasah-madrasah yang berada dalam pengawasan Kementerian Agama (Kemenag).

Sekolah IT sendiri muncul dengan kesan modern namun tetap agamis, berbeda dengan madrasah yang terkesan tradisional. Sekolah IT sendiri biasanya lebih mahal daripada madrasah atau sekolah umum lainnya. Namun, tak sedikit yang mempertanyakan akreditasi sekolah-sekolah mahal berlabel Islam ini.

Pengamat Pendidikan sekaligus Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) atau Network for Education Watch Indonesia (NEW Indonesia), Ubaid Matraji mengatakan bahwa sekolah IT hadir atas dasar kemauan masyarakat yang ingin membangun sekolah dengan mengelaborasi pengetahuan umum dengan agama di bawah Kemendikbud. Sementara itu, kurikulum pelajaran agama di sekolah IT sendiri menjadi kebijakan tiap sekolah/yayasan dan tidak diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud.

“Kurikulum nasional tidak mengatur jauh sampai Islam Terpadunya. Muatan-muatan Islamnya itu dari sekolah sendiri tetapi mata pelajaran yang wajib sudah dari Kemendikbud,” ujarnya kepada Gatra, Selasa (10/3).

Untuk rujukan pendidikan Islamnya sendiri, kata Ubaid, sangat beragam tergantung pada kecenderungan pengelola sekolah itu sendiri. Kurikulum pengajaran Agama Islam-nya pun belum diatur oleh Kemendikbud.

Hal ini tentu turut membuka peluang bagi oknum yang ingin mengajarkan paham ekstrem dan intoleran atas nama agama melalui bangku sekolah. Menurut Ubaid, Kemendikbud sudah seharusnya mengatur konten-konten ajaran Islam dalam sekolah-sekolah IT.

“Ya bahaya sekali kalau tidak diatur. Kita tidak tahu kecenderungan Islam seperti apa yang diajarkan oleh sekolah-sekolah berbasis Islam Terpadu itu,” imbuhnya.

Dari segi konten, lanjutnya, agama merupakan suatu konten yang baik. Namun, dalam kegiatan belajar mengajar, guru bisa saja mengajak para murid untuk membangun toleransi dan kebersamaan atau justru malah memberikan pemahaman ekstrem dan radikal.

Bagaimana konten itu dielaborasi, bagaimana konten itu di kontekstualisasi, bagaimana teks-teks agama itu ditafsirkan, itu yang dalam tanda kutip rawan. Jadi bisa dibawa ke kanan, bisa dibawa ke kiri,” tutur Ubaid.

Terkait hal tersebut, dia berpandangan bahwa Kemendikbud harus segera melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah IT. Bahkan, jika sekolah-sekolah IT ini banyak melakukan penyimpangan dan tidak terdapat banyak perbedaan dengan sekolah lainnya, menurut dia lebih baik ditiadakan saja.

“Jelas kalau mau mengembangkan soal konten agama ya mending diarahkan ke madrasah yang kompetensi gurunya jelas, memahami tentang konten keislaman,” katanya.

Dia mengungkapkan, berdasarkan data dari lembaga-lembaga riset independen menunjukkan bahwa guru-guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum saja banyak terpapar paham-paham radikalisme. Untuk itu, dia mengimbau agar pemerintah menjadikan data-data tersebut sebagai referensi dalam membuat kebijakan awal dalam mengatur sektor pendidikan dan pengajar di Indonesia.

“Jadi saya pikir sebagai pengelola institusi pendidikan, penting juga untuk berkolaborasi dengan Kemenag lalu melakukan strategi-strategi yang lebih efektif untuk dijalankan oleh sekolah-sekolah,” katanya.

Secara lebih lanjut dia menjelaskan, hampir tiap tahun ditemukan kasus pertanyaan-pertanyaan dalam ujian yang menjurus ke paham radikalisme. Tidak hanya itu, pada tahun 2019 lalu juga ditemukan kasus buku-buku ajar di sekolah yang mengajarkan konsep khilafah islamiyah yang telah dilarang oleh pemerintah RI. “Artinya kalau tiap tahun terjadi hal seperti ini itu kan artinya pembiaran,” tegasnya.

Untuk itu, dia menilai pemerintah sudah seharusnya melakukan langkah-langkah investigatif, preventif terkait hal tersebut. Selain itu, dia juga meminta adanya kebijakan tentang perbukuan nasional.

Reporter: Drean Muhyil Ihsan

Editor: Rohmat Haryadi

Sumber:

<https://www.gatra.com/news-471749-milenial-masih-perlukah-sekolah-islam-terpadu-di-indonesia.html>

Kemendikbud Harus Buka Profil Organisasi Penggerak ke Publik Publik harus dilibatkan secara transparan dan akuntabel



Editor: Agung Muhammad Fatwa

Ilustrasi. Siswa SDN Selodakon 03 belajar di ruang kelas yang rusak di Desa Selodakon, Tanggul, Jember, Jawa Timur, Kamis (6/2/2020). ANTARAFOTO/Seno

JAKARTA – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyampaikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus transparan dalam seluruh proses program Organisasi Penggerak. Mulai dari proses pendaftaran hingga implementasi dari organisasi-organisasi yang terpilih.

“Artinya sampai hari ini sudah berapa organisasi yang *apply*, *submit* proposal, lalu nanti sampai pengumuman juga misalnya harus *clear* siapa yang memperoleh kelompok apa di antara Gajah, Macan, dan Kijang. Saya pikir publik harus dilibatkan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya kepada *Validnews*, Rabu (11/3).

Keterlibatan masyarakat sipil diperlukan untuk dapat menilai kapabilitas organisasi yang dipilih dalam program ini. Salah satu bentuk transparansi yang bisa dilakukan dengan membuka atau memberi akses kepada publik terhadap profil organisasi lengkap tersebut di situs resmi Kemendikbud.

Langkah ini diperlukan untuk menepis kemungkinan munculnya persepsi kalau Kemendikbud hanya bagi-bagi proyek kepada pihak-pihak terdekatnya. Hal ini, kata Ubaid, serupa dengan

ketika pemerintah menggelar tender untuk suatu proyek atau program tertentu.

“Untuk menepis anggapan publik seperti itu, maka profil dari organisasi penggerak yang dapat Gajah, Macan, maupun Kijang itu bisa diakses oleh publik. Dengan demikian, organisasi yang dapat disebut Gajah itu apakah benar secara profilnya dia memang layak Gajah, artinya sudah banyak *track record* yang dilakukan,” kata Ubaid.

Dengan demikian, dia menegaskan, publik mendapat penjelasan suatu organisasi dipilih sebagai organisasi penggerak dan masuk ke dalam kategori tertentu. Lalu transparansi kepada publik juga harus dilakukan dalam hal pengelolaan program dan keuangan dari organisasi tersebut.

Ubaid berpendapat program organisasi penggerak merupakan terobosan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, di mana pemerintah menggandeng masyarakat sipil beserta dengan pendanaannya. Program ini juga disebut cukup strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sehari sebelumnya, Pengamat Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Itje Chodidjah mengungkapkan, organisasi yang terpilih akan membantu guru dalam proses belajar di kelas. Sebab, bagaimanapun yang menjadi program organisasi akan linear dengan kurikulum dan program pemerintah.

“Oleh sebab itu, organisasi-organisasi ini tidak bisa lepas juga dari apa yang digariskan untuk sekolah. Kalau seandainya ada organisasi yang ingin melakukan sesuatu yang tidak langsung berhubungan, tetapi memberikan dampak positif terhadap literasi, numerasi, dan karakter, mereka bisa menjadi bagian daripada pengembangan sekolah,” ucapnya.

Menurut dia, organisasi-organisasi yang selama ini bergiat di bidang pendidikan akan menyambut baik program organisasi penggerak. Bekerja sama dengan pemerintah akan memberi mereka kemudahan tertentu.

“Ketika diberi kemudahan melalui program organisasi penggerak ini, justru organisasi-organisasi lebih mudah untuk meminta izin, bergabung, mengundang guru karena memang ada *endorsement* dari Kemendikbud,” pungkasnya.

Sumber: <https://www.validnews.id/nasional/Kemendikbud-Harus-Buka-Profil-Organisasi-Penggerak-ke-Publik-koO>

Belajar di Rumah Harus Dibarengi Bekerja Dari Rumah



Muhammad Syahrul Ramadhan · 17 Maret 2020 15:31
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji . Foto: Dok. Pribadi

Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut kegiatan belajar di rumah harus dibarengi dengan kebijakan Kerja Dari Rumah (KDR). Karena dengan begitu orang tua juga bisa memantau proses pembelajaran yang dilakukan secara daring oleh sekolah.

“Orang tua harus mendampingi dan harusnya mereka bisa *work from home*,” ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji kepada *Medcom.id*, Jakarta, Selasa, 17 Maret 2020.

Lebih lanjut Ubaid menjelaskan, selain mendampingi pembelajaran secara daring. Orang tua juga bisa mengajak anak untuk berdiskusi maupun mengerjakan sebuah proyek bersama. “Belajar bersama, bikin proyek bersama, diskusi bersama, melakukan eksperimen bersama, dan lain-lain,” terangnya.

Sementara terkait pembelajaran di rumah ini diharapkan dilakukan secara fleksibel. Memanfaatkan semua teknologi yang tersedia. “Yang efektif adalah pembelajaran dengan menggunakan online system. Pembelajaran harus dilakukan secara fleksibel dan bisa memanfaatkan sarana IT,” terangnya.

Terkait pemantauan pembelajaran, sekolah dan guru diharapkan menjalin koordinasi dengan orang tua siswa. Sehingga, kegiatan belajar mengajar berjalan lancar. “Guru dan sekolah harus aktif melakukan monitoring melalui berbagai jaringan berbasis zonasi,” jelasnya.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/9K507vRk-belajar-di-rumah-harus-dibarengi-bekerja-dari-rumah>

JPPI Nilai Penghapusan UN Seharusnya Tidak Tunggu Corona



Rakhmatulloh Selasa, 24 Maret 2020 - 12:30 WIB

JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengaku setuju keputusan menghapus Ujian Nasional (UN) dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Keputusan meniadakan UN muncul dari rapat bersama antara Komisi X DPR dan Pemerintah. Ubaid menyatakan, seharusnya UN sudah harus dihapus sejak dulu, tanpa harus menunggu wabah penyakit seperti virus Corona atau COVID-19 mewabah di Indonesia. “Kenapa harus nunggu Corona? Dari dulu JPPI setuju UN dihapus,” ujar Ubaid saat dihubungi SINDOnews, Selasa (24/3/2020). (Baca juga: Tiadakan UN, Pemerintah Bisa Gunakan Dananya untuk Penanggulangan Corona) Kang Ubaid, sapaan akrabnya menegaskan, sejak awal virus tersebut ramai di China, pihaknya sudah meminta kepada Kementerian Pendidikan untuk mempertimbangkan ulang kebijakan UN. Jauh sebelum wabah ini muncul, Ubaid sudah juga sudah menyarankan agar UN diiadakan. Sehingga tak perlu menunggu pandemi ini datang. “Jadi sebenarnya UN itu tidak strategis dan tidak penting. Harusnya pemerintah dari awal langsung stop UN, bukan nunggu 2020, atau ada pandemi semacam ini,” kata mantan Ketua Lesbumi NU ini.

Peringati Hardiknas, JPPI: Pendidikan Indonesia Masih Gagap Hadapi Bencana



Maria Fatima Bona / RSAT

Sabtu, 2 Mei 2020 | 15:44 WIB

Ilustrasi guru mengajar. (ANTARA FOTO)

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan, menjalankan pendidikan jarak jauh (PJJ) pada situasi pandemi Covid-19 ini membelalakkan mata. Pasalnya, layanan pendidikan di Indonesia masih gagap menghadapi bencana. Padahal, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana.

Menurut Ubaid, seharusnya pemerintah mampu menghadapi situasi ini sejak awal. Namun, pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara belum menjadi sektor utama dalam situasi darurat. “Mengabaikan sektor pendidikan di kala bencana adalah kelalaian fatal yang mengundang bencana berikutnya yang lebih destruktif,” kata Ubaid dalam keterangan pers Memperingati Hari Pendidikan Indonesia, Sabtu (2/5/2020).

Untuk itu, Ubaid mendorong pemerintah melakukan peningkatan kompetensi guru. Menurut dia, mau tidak mau, situasi ini akan menjadi hal baru yang harus dibiasakan. Pembelajaran tidak harus dilakukan dengan tatap muka di dalam kelas, tapi bisa dilakukan di manapun dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam.

“Ini menjadi momentum untuk meng-*upgrade* kompetensi para guru untuk dapat melakukan proses-proses pembelajaran secara fleksibel, kreatif, dan inovatif,” ujarnya.

Selain kompetensi guru, Ubaid menyoroti, kurikulum pembelajaran saat ini yang masih mengacu

pada pendidikan normal. Akibatnya, guru harus mengajar setiap hari, anak-anak mengerjakan tugas banyak setiap hari, dan juga orang tua harus mendampingi anak setiap hari.

Menurut Ubaid, perlu adanya reformasi kurikulum darurat. Pemerintah harus membuat pedoman dan kurikulum pembelajaran pada saat pandemi. Pasalnya, hal ini penting supaya belajar tetap dapat dilakukan dengan menyenangkan, tidak membuat anak stres, dan ada capaian target-target yang terukur. “Kalau situasi normal sekolah biasa ada target harian, nah di saat darurat, target-targetnya bisa dirancang model mingguan bahkan bulanan,” ujarnya.

Selanjutnya, Ubaid menyoroti kebijakan pemerintah yang tidak menjadikan pendidikan bagian penting dalam penanggulangan Covid-19. Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan dana darurat sekitar Rp 405 triliun untuk penanggulangan wabah Covid-19 yang menjangkit banyak bidang itu. Sayangnya, bidang pendidikan tidak termasuk. Bahkan, dana pendidikan di Kemdikbud dan Kemag dipangkas dan direalokasikan untuk sektor lain.

Menurut Ubaid, kebijakan pemerintah ini akan berdampak beberapa hal. *Pertama*, ancaman putus sekolah. Ubaid menyebutkan, angka kemiskinan naik tajam dalam situasi seperti ini. Tentu ini akan berdampak pada kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

“Buat makan saja susah, apalagi buat bayar sekolah. Sebab, sekolah kita masih saja banyak bayar pungutan ini dan itu. Mendapatkan akses sekolah adalah hak dasar warga negara, jadi ini harus dijamin, jangan malah diabaikan,” ujarnya.

Kedua, ancaman sekolah gulung tikar. Ubaid menyebutkan, pendidikan Indonesia didominasi sekolah swasta. Maka, sangat perlu dibantu. Apalagi berdasarkan hasil jejak pendapat, Kemdikbud, 2020, hampir 56 persen sekolah swasta di Indonesia mengalami kesulitan biaya operasional. “Kalau ini dibiarkan, ada banyak guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik, yang terlantar,” ujarnya.

Untuk mencegah hal ini, Ubaid mendorong percepatan birokrasi pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan tambah anggaran pendidikan. Sebab, dana pendidikan juga disalurkan kepada para penerima manfaat yang terdampak Covid-19 melalui institusi pendidikan.

“Jadi, harusnya dana pendidikan itu ditambah, bukan malah disunat. Bahkan dana BOS saat ini, masih banyak yang belum cair, karena birokrasi yang masih rumit,” katanya.

Ubaid menambahkan, pemerintah juga harus menyiapkan skema bantuan sosial (bansos) khusus untuk guru honorer. Sebab, mereka termasuk orang yang paling terdampak dalam institusi pendidikan.

“Jangan ambilkan gaji guru honorer dari dana BOS, apalagi masih banyak yang susah cair. Ini akan mengurangi biaya operasional untuk menunjang proses pembelajaran. Harusnya, ada skema bansos khusus untuk guru honorer,” pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com

Sumber: <https://www.beritasatu.com/archive/627835/peringati-hardiknas-jppi-pendidikan-indonesia-masih-gagap-hadapi-bencana>

Pemerintah Dinilai Masih Abaikan Sektor Pendidikan

Sekitar 56% sekolah swasta di Indonesia mengalami kesulitan biaya operasional selama pandemi covid-19



02 Mei 2020

15:13 WIB

Editor: Agung Muhammad Fatwa

JAKARTA – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai, pemerintah masih abai terhadap sektor pendidikan dalam situasi pandemi corona (covid-19). Dana darurat sekitar Rp405 triliun untuk penanggulangan covid-19 belum menyelamatkan sektor pendidikan sama sekali.

“Bahkan, dana pendidikan justru dipotong dan direalokasikan untuk sektor lain. Akibatnya, ancaman di sektor pendidikan kian nyata di depan mata,” ujar Ubaid dalam keterangan resmi, Sabtu (2/5).

Ia menyebut ada beberapa ancaman serius jika pemerintah tidak segera menyelamatkan sektor pendidikan dari dampak pandemi covid-19 ini. Salah satunya ancaman putus sekolah para siswa karena angka kemiskinan akan meningkat terdampak dari situasi pandemi ini.

“Berdampak pada kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Buat makan saja susah, apalagi buat bayar sekolah. Padahal mendapatkan pendidikan adalah hak dasar warga negara, jadi ini harus dijamin, jangan malah diabaikan,” paparnya.

Selain itu, ancaman lain juga menyasar bangkrutnya sekolah swasta. Ia menyebut hampir 56%

sekolah swasta di Indonesia mengalami kesulitan biaya operasional selama pandemi covid-19.

“Kalau ini dibiarkan, ada banyak guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang akan terlantar juga tentunya,” ucapnya.

Ditambah, ada juga ancaman depresi massal yang melanda semua pihak di sekolah, mulai dari anak, orang tua, guru, kepala sekolah, dan lainnya. Hal itu karena menurut Ubaid, kurikulum pembelajaran saat ini masih mengacu pada pendidikan normal.

Akibatnya, guru harus mengajar setiap hari, anak-anak mengerjakan tugas banyak setiap harinya, dan juga orang tua harus dampingi anak tiap hari. Padahal, di saat yang bersamaan, mereka juga harus menghadapi situasi yang serba sulit.

“Belajar model seperti ini tidak boleh diteruskan, harus ada panduan dan kurikulum belajar dalam kondisi darurat. Jika situasi ini dibiarkan, depresi massal akan terjadi dan tubuh kian rentan terhadap virus,” katanya.

Kurikulum Darurat

Di sisi lain, menurutnya situasi pandemi ini juga menunjukkan bahwa ternyata pembelajaran pendidikan di Indonesia masih sangat konvensional, dan belum mampu memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal sebagai bagian dalam proses pembelajaran.

Untuk itu, Ubaid menerangkan pihaknya merekomendasikan adanya reformulasi kurikulum darurat. Pemerintah harus membuat pedoman dan kurikulum pembelajaran khusus pada masa pandemi.

Harapannya supaya belajar tetap dapat dilakukan dengan menyenangkan, tidak membuat anak stres, dan ada capaian target-target yang terukur.

“Misalnya, kalau situasi normal sekolah biasa ada target harian, nah di saat darurat, target-targetnya bisa dirancang model mingguan bahkan bulanan,” jelas Ubaid.

Lebih lanjut, Ubaid juga meminta pemerintah untuk segera mempercepat birokrasi pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tambah anggaran pendidikan. Pasalnya, dana pendidikan juga disalurkan kepada para penerima manfaat yang terdampak covid melalui institusi pendidikan.

“Jadi, harusnya dana pendidikan itu ditambah, bukan malah disunat. Bahkan dana BOS saat ini, masih banyak yang belum cair, karena birokrasi yang masih rumit,” tegas Ubaid.

Dia juga menilai guru honorer perlu diberikan bantuan sosial (bansos). Menurutnya seharusnya ada skema bansos khusus untuk guru honorer, karena mereka termasuk orang yang paling terdampak dalam institusi pendidikan.

“Jangan ambilkan gaji guru honorer dari dana BOS, apalagi masih banyak yang susah cair. Ini akan mengurangi biaya operasional untuk menunjang proses pembelajaran,” imbuhnya.

Ke depannya, Ubaid berharap pemerintah segera meningkatkan kompetensi guru. Situasi seperti ini tentu menjadi hal baru yang harus dibiasakan oleh semua guru.

Lantaran pembelajaran tidak dilakukan dengan tatap muka di dalam kelas, jadi bisa dilakukan di manapun dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam.

“Ini menjadi momentum untuk meningkatkan kompetensi para guru untuk dapat melakukan proses-proses pembelajaran secara fleksibel, kreatif, dan inovatif,” tuturnya.

Sumber: <https://www.validnews.id/nasional/Pemerintah-Dinilai-Abaikan-Sektor-Pendidikan-Saat-Pandemi-nFP>

Pengamat: Ancaman Sektor Pendidikan Kian Nyata



02 Mei 2020, 20:53 | Tim Redaksi

Ilustrasi (Unsplash)

JAKARTA - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) menjadi peringatan agar pemerintah jangan mengesampingkan urusan pendidikan di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 saat ini. Mengabaikannya merupakan kelalaian fatal yang dapat mengundang bencana. Perlu langkah sistematis di sektor pendidikan dalam menghadapi pandemi.

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, layanan pendidikan di Indonesia masih gagap menghadapi bencana. Hal itu terlihat dari pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara yang belum menjadi prioritas pada situasi darurat.

Ubaid mencontohkan, dari dana darurat penanggulangan COVID-19 sebesar Rp405 triliun, nyatanya tidak menyentuh sektor pendidikan sama sekali.

“Bahkan, dana pendidikan di Kemendikbud dan Kemenag disunat dan direalokasikan untuk sektor lain,” kata Ubaid kepada wartawan. “Akibatnya, ancaman di sektor pendidikan kian nyata,” tambahnya.

Padahal banyak ancaman mengintai dunia pendidikan kala pandemi. Misalnya saja ancaman putus sekolah. Ubaid bilang pandemi akan berdampak pada kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Sebab sekolah kita masih banyak yang mengambil pungutan.

Belum lagi, soal ancaman sekolah gulung tikar. Pasalnya tak sedikit jumlah sekolah swasta di Indonesia yang tutup. Mereka adalah komponen yang paling terdampak pandemi. Survei Kemendikbud 2020 mencatat, hampir 56 persen sekolah swasta di Indonesia terhimpit biaya

operasional.

Selain itu masalah depresi massal juga mengancam banyak pihak sekolah. Mulai dari siswa, orang tua, guru, orang tua, kepala sekolah dan lainnya.

Persoalannya kita masih menggunakan kurikulum pendidikan normal. Akibatnya, anak-anak dibebani tugas banyak tiap hari, guru-guru kesulitan menyampaikan materi, belum lagi orang tua yang harus mendampingi anaknya tiap hari.

“Jika situasi ini dibiarkan depresi massal akan terjadi dan tubuh kian rentan terhadap virus,” kata Ubaid.

Hal ini menunjukkan pembelajaran pendidikan di Indonesia masih sangat konvensional dan belum mampu memanfaatkan teknologi serta sumberdaya lokal sebagai proses pembelajaran.

Sumber: <https://voi.id/berita/5427/pengamat-ancaman-sektor-pendidikan-kian-nyata>

Pemerintah Dinilai Gagap Selamatkan Sektor Pendidikan Saat Pandemi



Laporan: Tsani Ariant

Sabtu, 2 Mei, 2020 / 11:35 WIB

Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah

MONITOR, Jakarta – Pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara belum menjadi sektor utama dalam situasi darurat Covid-19. Ubaid Matraji selaku Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai layanan pendidikan di Indonesia masih gagap menghadapi bencana.

Menurutnya, sikap pemerintah mengabaikan sektor pendidikan di kala bencana adalah kelalaian fatal yang mengundang bencana berikutnya yang lebih destruktif.

“Saat ini, pemerintah terkesan belum menyelamatkan sektor pendidikan, tetapi membiarkan pendidikan berjalan terseok-seok. Dana darurat sekitar Rp405 triliun untuk penanggulangan wabah covid-19 yang menyasar banyak bidang itu, ternyata tidak untuk menyelamatkan sektor pendidikan sama sekali,” kritik Ubaid Matraji, Sabtu (2/5).

“Bahkan, dana pendidikan di Kemendikbud dan Kemenag disunat dan direalokasikan untuk sektor lain. Akibatnya, ancaman di sektor pendidikan kian nyata di depan mata,” tambahnya. Akibatnya, pandemi ini memunculkan masalah baru di dunia pendidikan, diantaranya ancaman putus sekolah. Ubaid mengatakan, angka kemiskinan naik tajam dalam situasi seperti ini.

“Tentu ini akan berdampak pada kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Buat makan saja susah, apalagi buat bayar sekolah. Sebab, sekolah kita masih saja banyak bayar

pungutan ini dan itu. Mendapatkan akses sekolah adalah hak dasar warga negara, jadi ini harus dijamin, jangan malah diabaikan,” ujar Ubaid.

Kedua, muncul ancaman sekolah gulung tikar. Sebab, tidak semua sekolah itu negeri, banyak juga yang swasta. Belum lagi madrasah, yang mayoritas adalah swasta.

“Hampir 56% sekolah swasta di Indonesia mengalami kesulitan biaya operasional (Jejak pendapat, Kemendikbud, 2020). Kalau ini dibiarkan, ada banyak guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik, yang terlantar,” paparnya.

Ketiga, ancaman depresi massal. Ubaid menuturkan, hal ini bisa melanda semua pihak di sekolah, mulai dari anak, orang tua, guru, kepala sekolah, dan lainnya. Kurikulum pembelajaran kita saat ini masih mengacu pada pendidikan normal. Akibatnya, guru harus mengajar tiap hari, anak-anak mengerjakan tugas banyak tiap hari, dan juga orang tua harus damping anak tiap hari.

“Padahal mereka juga harus menghadapi situasi yang serba sulit. Belajar model seperti ini tidak boleh diteruskan, harus segera dihentikan, lalu harus ada panduan dan kurikulum belajar dalam kondisi darurat. Jika situasi ini dibiarkan, depresi massal akan terjadi dan tubuh kian rentan terhadap virus,” kritik Ubaid.

“Ini semua bisa terjadi karena pemerintah masih abai terhadap sektor pendidikan dalam situasi pandemi,” pungkasnya.

Sumber: <https://monitor.co.id/2020/05/02/pemerintah-dinilai-gagap-selamatkan-sektor-pendidikan-saat-pandemi/>

Gawat! Ubaid Sebut Indonesia Menghadapi Tiga Ancaman Besar Termasuk Depresi Massal



Sabtu, 02 Mei 2020 – 15:15 WIB

Ilustrasi depresi. Foto: AFP jpnn.com,

JAKARTA - Pengamat Pendidikan Ubaid Matraji mengungkapkan Indonesia saat ini menghadapi sedikitnya tiga masalah besar. Yaitu ancaman anak-anak putus sekolah, depresi massal, dan sekolah gulung tikar. “Situasi pandemi ini membelalakkan mata kita, layanan pendidikan di Indonesia masih gagap menghadapi bencana. Padahal, Indonesia ditakdir menjadi negara yang rawan bencana. Seharusnya pemerintah mampu menghadapi situasi ini sejak awal,” kata Ubaid dalam pesan elektroniknya, Sabtu (2/5). Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) ini menyayangkan pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara belum menjadi sector utama dalam situasi darurat. Menurutnya, mengabaikan sektor pendidikan di kala bencana adalah kelalaian fatal yang mengundang bencana berikutnya yang lebih destruktif. Saat ini, pemerintah terkesan belum menyelamatkan sektor pendidikan, tetapi membiarkan pendidikan berjalan terseok-seok. Dana darurat sekitar Rp 405 triliun untuk penanggulangan wabah covid-19 yang menyasar banyak bidang itu, ternyata tidak untuk menyelamatkan sektor pendidikan sama sekali. “Bahkan, dana pendidikan di Kemendikbud dan Kemenag disunat dan direalokasikan untuk sektor lain. Akibatnya, ancaman di sektor pendidikan kian nyata di depan mata,” ucapnya. Dia menyebutkan, ada tiga ancaman besar yang mengintai Indonesia, yaitu: 1. Ancaman putus sekolah Angka kemiskinan naik tajam dalam situasi seperti ini. Tentu ini akan berdampak pada kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Buat makan saja susah, apalagi buat bayar sekolah. Sebab, sekolah kita masih saja banyak bayar pungutan ini dan itu. Mendapatkan akses sekolah adalah hak dasar warga negara, jadi ini harus dijamin, jangan malah

diabaikan. 2. Ancaman sekolah gulung tikar Baca Juga: 4 Indikator Remaja Mengalami Depresi Minum Susu Bisa Mengatasi Depresi? HNW: Cabut RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Bukan Sekadar Ditunda South Tangerang Minuman ini bisa membunuh semua parasit di dalam tubuh! Tidak semua sekolah itu negeri. Banyak juga yang swasta. Belum lagi madrasah, yang mayoritas adalah swasta. Mereka semua adalah komponen yang paling terdampak pandemi ini. Hampir 56 persen sekolah swasta di Indonesia mengalami kesulitan biaya operasional (Jejak pendapat, Kemendikbud, 2020). Kalau ini dibiarkan, ada banyak guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik, yang terlantar. 3. Ancaman depresi massal Ini bisa melanda semua pihak di sekolah, mulai dari anak, orang tua, guru, kepala sekolah, dan lainnya. Kurikulum pembelajaran kita saat ini masih mengacu pada pendidikan normal. Akibatnya, guru harus mengajar tiap hari, anak-anak mengerjakan tugas banyak tiap hari, dan juga orang tua harus damping anak tiap hari. Padahal mereka juga harus menghadapi situasi yang serba sulit. Belajar model seperti ini tidak boleh diteruskan, harus segera dihentikan, lalu harus ada panduan dan kurikulum belajar dalam kondisi darurat. Jika situasi ini dibiarkan, depresi massal akan terjadi dan tubuh kian rentan terhadap virus. “Ini semua bisa terjadi karena pemerintah masih abai terhadap sektor pendidikan dalam situasi pandemi. Juga menunjukkan, ternyata pembelajaran pendidikan kita masih sangat konvensional, dan belum mampu memanfaatkan teknologi dan sumberdaya lokal sebagai bagian dalam proses pembelajaran,” bebernya.

Sumber: <https://www.jpnn.com/news/gawat-ubaid-sebut-indonesia-menghadapi-tiga-ancaman-besar-termasuk-depresi-massal>

JPPI: Pendidikan Indonesia Masih Gagap Hadapi Bencana



Laporan SERIKAT NEWS
Sabtu, 2 Mei 2020 - 17:03 WIB

SERIKATNEWS.COM – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan bahwa menjalankan pendidikan jarak jauh (PJJ) pada situasi pandemi korona ini membelakangkan mata. Pasalnya, layanan pendidikan di Indonesia masih gagap menghadapi bencana, padahal Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana.

Ubaid mengatakan bahwa seharusnya pemerintah mampu menghadapi situasi ini sejak awal. Namun, pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara belum menjadi sektor utama dalam situasi darurat.

“Mengabaikan sektor pendidikan di kala bencana adalah kelalaian fatal yang mengundang bencana berikutnya yang lebih destruktif,” kata Ubaid dalam keterangan pers Memperingati Hari Pendidikan Indonesia, Sabtu (2/5/2020).

Untuk itu, Ubaid mendorong pemerintah melakukan peningkatan kompetensi guru. Menurutnya, mau tidak mau situasi ini akan menjadi hal baru yang harus dibiasakan. Pembelajaran tidak harus dilakukan dengan tatap muka di dalam kelas, tapi bisa dilakukan di mana pun dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam.

“Ini menjadi momentum untuk meng-upgrade kompetensi para guru untuk dapat melakukan proses-proses pembelajaran secara fleksibel, kreatif, dan inovatif,” ujarnya.

Selain kompetensi guru, Ubaid menyoroti kurikulum pembelajaran saat ini yang masih mengacu pada pendidikan normal. Akibatnya, guru harus mengajar setiap hari, anak-anak mengerjakan

tugas banyak setiap hari, dan juga orang tua harus mendampingi anak setiap hari.

“Perlu adanya reformasi kurikulum darurat. Pemerintah harus membuat pedoman dan kurikulum pembelajaran pada saat pandemi. Pasalnya, hal ini penting supaya belajar tetap dapat dilakukan dengan menyenangkan, tidak membuat anak stres, dan ada capaian target-target yang terukur,” katanya.

“Kalau situasi normal sekolah biasa ada target harian, nah di saat darurat, target-targetnya bisa dirancang model mingguan bahkan bulanan,” imbuh Ubaid.

Kemudian, Ubaid menyoroti kebijakan pemerintah yang tidak menjadikan pendidikan bagian penting dalam penanganan korona. Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan dana darurat sekitar Rp405 triliun untuk penanganan wabah Covid-19 yang menyasar banyak bidang itu.

“Sayangnya, bidang pendidikan tidak termasuk. Bahkan, dana pendidikan di Kemdikbud dan Kemag dipangkas dan direalokasikan untuk sektor lain,” imbuhnya.

Menurut Ubaid, kebijakan pemerintah ini akan berdampak beberapa hal. Pertama, ancaman putus sekolah. Ubaid menyebutkan, angka kemiskinan naik tajam dalam situasi seperti ini. Tentu ini akan berdampak pada kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

“Buat makan saja susah, apalagi buat bayar sekolah. Sebab, sekolah kita masih saja banyak bayar pungutan ini dan itu. Mendapatkan akses sekolah adalah hak dasar warga negara, jadi ini harus dijamin, jangan malah diabaikan,” ujarnya.

Kedua, ancaman sekolah gulung tikar. Ubaid menyebutkan bahwa pendidikan Indonesia didominasi sekolah swasta. Maka, sangat perlu dibantu. Apalagi berdasarkan hasil jejak pendapat, Kemdikbud, 2020, hampir 56 persen sekolah swasta di Indonesia mengalami kesulitan biaya operasional.

“Kalau ini dibiarkan, ada banyak guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik, yang terlantar,” ujarnya.

Untuk mencegah hal ini, Ubaid mendorong percepatan birokrasi pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan tambah anggaran pendidikan. Sebab, dana pendidikan juga disalurkan kepada para penerima manfaat yang terdampak korona melalui institusi pendidikan.

“Jadi, harusnya dana pendidikan itu ditambah, bukan malah disunat. Bahkan dana BOS saat ini, masih banyak yang belum cair, karena birokrasi yang masih rumit,” katanya.

Lebih lanjut, Ubaid mengatakan pemerintah juga harus menyiapkan skema bantuan sosial (bansos) khusus untuk guru honorer. Sebab, mereka termasuk orang yang paling terdampak dalam institusi pendidikan.

“Jangan ambilkan gaji guru honorer dari dana BOS, apalagi masih banyak yang susah cair. Ini akan mengurangi biaya operasional untuk menunjang proses pembelajaran. Harusnya, ada skema bansos khusus untuk guru honorer,” pungkasnya.

Sumber: <https://serikatnews.com/jppi-pendidikan-indonesia-masih-gagap-hadapi-bencana/>

Jppi minta pemerintah selamatkan sector pendidikan



Minggu, 3 Mei 2020 13:38 WIB

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji (Indriani)

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta pemerintah untuk menyelamatkan sektor pendidikan yang terdampak pandemi COVID-19. “Saat ini pemerintah terkesan belum menyelamatkan sektor pendidikan dan membiarkan pendidikan berjalan terseok-seok. Dana darurat sekitar Rp405 triliun untuk penanggulangan pandemi COVID-19 yang menyasar banyak bidang itu, ternyata tidak untuk menyelamatkan sektor pendidikan sama sekali. Bahkan, dana pendidikan di Kemendikbud dan Kemenag dikurangi dan direalokasikan untuk sektor lain,” ujar Ubaid dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Akibatnya, lanjut dia, ancaman di sektor pendidikan kian nyata di depan mata. Beberapa ancaman di sektor pendidikan, yakni ancaman putus sekolah, angka sekolah gulung tikar, hingga ancaman depresi massal.

“Angka kemiskinan naik tajam dalam situasi seperti ini. Tentu ini akan berdampak pada kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Buat makan saja susah, apalagi buat bayar sekolah. Sebab, sekolah kita masih saja banyak bayar pungutan ini dan itu. Mendapatkan akses sekolah adalah hak dasar warga negara, jadi ini harus dijamin, jangan malah diabaikan,” paparnya.

Oleh karena itu, JPPI memberikan beberapa rekomendasi pada pemerintah. Di antaranya, reformulasi kurikulum darurat, percepat birokrasi pencairan BOS dan tambah anggaran pendidikan, berikan bansos untuk guru honorer, dan tingkatkan kompetensi guru.

Pemerintah harus membuat pedoman dan kurikulum pembelajaran saat pandemi. Ini penting supaya belajar tetap dapat dilakukan dengan menyenangkan, tidak membuat anak stres, dan ada capaian target-target yang terukur. Misalnya, kalau situasi normal sekolah biasa ada target harian, nah di saat darurat, target-targetnya bisa dirancang model mingguan, bahkan bulanan,” terang dia.

Ubaid juga meminta agar pemerintah tidak mengalokasikan honor guru honorer dari dana BOS, apalagi masih ada dana BOS yang belum cair.

“Ini akan mengurangi biaya operasional untuk menunjang proses pembelajaran. Harusnya, ada skema bansos khusus untuk guru honorer. Mereka termasuk orang yang paling terdampak dalam institusi pendidikan,” imbuh Ubaid.

Pewarta: Indriani
Editor: Endang Sukarelawati

Sumber: <https://www.antaranews.com/berita/1461807/jppi-minta-pemerintah-selamatkan-sektor-pendidikan>

Abaikan Pendidikan di Masa Pandemi Akan Mengundang Bencana Berikutnya Rakhmatulloh



Minggu, 03 Mei 2020 - 00:02 WIB views: 4.241

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji menyatakan, pandemi virus Corona yang terjadi di Indonesia, telah membuka mata tentang layanan pendidikan. Foto/Illustrasi/SINDOnews

JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyatakan, pandemi virus Corona atau Covid-19 yang terjadi di Indonesia, telah membuka mata tentang layanan pendidikan di Indonesia yang dianggap masih gagap menghadapi bencana. Padahal, Indonesia ditakdir menjadi negara yang rawan bencana. Menurut Ubaid, harusnya pemerintah mampu menghadapi situasi ini sejak awal. Tetapi ternyata, pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara belum menjadi sektor utama dalam situasi darurat. “Mengabaikan sektor pendidikan di kala bencana adalah kelalaian fatal yang mengundang bencana berikutnya yang lebih destruktif,” tutur Ubaid dalam refleksi Hardiknas 2020 kepada SINDOnews, Sabtu (2/5/2020).

Menurutnya, saat ini pemerintah terkesan belum menyelamatkan sektor pendidikan, tetapi membiarkan pendidikan berjalan terseok-seok. Dana darurat sekitar Rp405 triliun untuk penanggulangan wabah corona yang menyasar banyak bidang, ternyata tidak untuk menyelamatkan sektor pendidikan sama sekali. “Bahkan, dana pendidikan di Kemendikbud dan Kemenag disunat dan direalokasikan untuk sektor lain. Akibatnya, ancaman di sektor pendidikan kian nyata di depan mata,” kata Ubaid. Ubaid menuturkan, dalam kondisi pandemi corona yang seakan tak tampak ujungnya, pemerintah diingatkan berbagai hal menyangkut dunia pendidikan kita. Pertama ancaman putus sekolah. Angka kemiskinan naik tajam dalam situasi seperti ini. Tentu ini akan berdampak pada kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Buat makan saja susah, apalagi buat bayar sekolah. Sebab, sekolah kita masih saja banyak bayar

pungutan ini dan itu. Mendapatkan akses sekolah adalah hak dasar warga negara, jadi ini harus dijamin, jangan malah diabaikan. Kedua, ancaman sekolah gulung tikar. Tidak semua sekolah itu negeri. Banyak juga yang swasta. Belum lagi madrasah, yang mayoritas adalah swasta. Mereka semua adalah komponen yang paling terdampak pandemi ini. Hampir 56% sekolah swasta di Indonesia mengalami kesulitan biaya operasional (Jejak pendapat, Kemendikbud, 2020).

Kalau ini dibiarkan, ada banyak guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik, yang terlantar. Ketiga, ancaman depresi massal. Ini bisa melanda semua pihak di sekolah, mulai dari anak, orang tua, guru, kepala sekolah, dan lainnya. Kurikulum pembelajaran kita saat ini masih mengacu pada pendidikan normal.

Akibatnya, guru harus mengajar tiap hari, anak-anak mengerjakan tugas banyak tiap hari, dan juga orang tua harus damping anak tiap hari. Padahal mereka juga harus menghadapi situasi yang serba sulit.

Belajar model seperti ini tidak boleh diteruskan, harus segera dihentikan, lalu harus ada panduan dan kurikulum belajar dalam kondisi darurat. Jika situasi ini dibiarkan, depresi massal akan terjadi dan tubuh kian rentan terhadap virus.

Kata Ubaid, ini semua bisa terjadi karena pemerintah masih abai terhadap sektor pendidikan dalam situasi pandemi. Juga menunjukkan, bahwa ternyata pembelajaran pendidikan kita masih sangat konvensional, dan belum mampu memanfaatkan teknologi dan sumberdaya lokal sebagai bagian dalam proses pembelajaran.

Untuk itu, JPPI memberikan beberapa rekomendasi: Pertama, reformulasi kurikulum darurat. Pemerintah harus membuat pedoman dan kurikulum pembelajaran di kala pandemi. Ini penting supaya belajar tetap dapat dilakukan dengan menyenangkan, tidak membuat anak stres, dan ada capaian target-target yang terukur.

Misalnya, kalau situasi normal sekolah biasa ada target harian, nah di saat darurat, target-targetnya bisa dirancang model mingguan bahkan bulanan. Kedua, percepat birokrasi pencairan BOS dan tambah anggaran pendidikan.

Sebab, dana pendidikan juga disalurkan kepada para penerima manfaat yang terdampak Covid-19 melalui institusi pendidikan. Jadi, harusnya dana pendidikan itu ditambah, bukan malah disunat. Bahkan dana BOS saat ini, masih banyak yang belum cair, karena birokrasi yang masih rumit. Ketiga, berikan bansos untuk guru honorer. Jangan ambilkan gaji guru honorer dari dana BOS, apalagi masih banyak yang susah cair. Ini akan mengurangi biaya operasional untuk menunjang proses pembelajaran.

Harusnya, ada skema bansos khusus untuk guru honorer. Mereka termasuk orang yang paling terdampak dalam institusi pendidikan. Keempat, upgrade kompetensi guru. Mau tidak mau, situasi ini akan menjadi hal baru yang dibiasakan.

Pembelajaran tidak harus dilakukan dengan tatap muka di dalam kelas, tapi bisa dilakukan dimanapun dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam. Ini menjadi momentum untuk meng-upgrade kompetensi para guru untuk dapat melakukan proses-proses pembelajaran secara fleksibel, kreatif, dan inovatif.

Sumber: <https://edukasi.sindonews.com/read/15193/144/abaikan-pendidikan-di-masa-pandemi-akan-mengundang-bencana-berikutnya-1588439139?showpage=all>

Imbas Covid-19, sekolah terancam gulung tikar



Fathor Rasi

Minggu, 03 Mei 2020 16:25 WIB

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pemerintah terkesan belum menyelamatkan sektor pendidikan dan membiarkan pendidikan berjalan terseok-seok.

Untuk itu JPPI meminta pemerintah untuk menyelamatkan sektor pendidikan yang terdampak pandemi Covid-19.

“Dana darurat sekitar Rp405 triliun untuk penanggulangan pandemi Covid-19 yang menysasar banyak bidang itu, ternyata tidak untuk menyelamatkan sektor pendidikan sama sekali. Bahkan, dana pendidikan di Kemendikbud dan Kemenag dikurangi dan direalokasikan untuk sektor lain,” ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/5).

Akibatnya, lanjut dia, ancaman di sektor pendidikan kian nyata di depan mata. Beberapa ancaman di sektor pendidikan, yakni ancaman putus sekolah, sekolah gulung tikar, hingga ancaman depresi massal.

“Angka kemiskinan naik tajam dalam situasi seperti ini. Tentu ini akan berdampak pada kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Buat makan saja susah, apalagi buat bayar sekolah. Sebab, sekolah kita masih saja banyak bayar pungutan ini dan itu. Mendapatkan akses sekolah adalah hak dasar warga negara, jadi ini harus dijamin, jangan malah diabaikan,” paparnya.

JPPI kemudian memberikan beberapa rekomendasi pada pemerintah, di antaranya: Reformulasi

kurikulum darurat, mempercepat birokrasi pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), menambah anggaran pendidikan, memberikan bansos untuk guru honorer, dan tingkatkan kompetensi guru.

“Pemerintah harus membuat pedoman dan kurikulum pembelajaran saat pandemi. Ini penting supaya belajar tetap dapat dilakukan dengan menyenangkan, tidak membuat anak stres, dan ada capaian target-target yang terukur. Misalnya, kalau situasi normal sekolah biasa ada target harian, nah di saat darurat, target-targetnya bisa dirancang model mingguan, bahkan bulanan,” terang dia.

Ubaid juga meminta agar pemerintah tidak mengalokasikan honor guru honorer dari dana BOS, apalagi masih ada dana BOS yang belum cair.

“Ini akan mengurangi biaya operasional untuk menunjang proses pembelajaran. Harusnya, ada skema bansos khusus untuk guru honorer. Mereka termasuk orang yang paling terdampak dalam institusi pendidikan,” imbuh Ubaid.

Sebelumnya, survei Kemendikbud menyebut sekitar 56% sekolah swasta di Tanah Air kesulitan akibat pandemi Covid-19. Mereka meminta agar pemerintah membantu operasional sekolah tersebut.

“Survei yang kami lakukan, sekitar 56% sekolah swasta yang ada minta agar pemerintah membantu pada masa krisis ini,” ujar Pelaksana tugas Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad di Jakarta, Rabu (29/4).

Tak hanya itu, hasil survei Kemendikbud itu juga menyebutkan sekitar 60% siswa sekolah negeri dan swasta meminta agar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dibayar 50%.

Orang tua siswa rata-rata mengalami kendala keuangan yang berkorelasi dengan kemampuan dalam membayar SPP. Sementara operasional sekolah swasta, sebagian besar masih mengandalkan SPP yang berasal dari siswa. (Ant)

Sumber: <https://www.alinea.id/nasional/imbas-covid-19-sekolah-terancam-gulung-tikar-b1ZMN9tXw>

Mendikbud Diminta Waspada Ancaman Putus Sekolah Semasa Covid



CNN Indonesia
Senin, 04 Mei 2020 08:55 WIB

Bukan hanya pembelajaran jarak jauh, Jaringan pemantau meminta Nadiem memerhatikan ancaman putus sekolah dan sekolah bangkrut di tengah masa pandemi Corona. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim diminta mewaspada ancaman putus sekolah akibat krisis di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

“Angka kemiskinan naik tajam dalam situasi seperti ini. Tentu ini akan berdampak pada kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Buat makan saja susah, apalagi buat bayar sekolah,” ujar Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji melalui keterangan tertulisnya.

Ia menilai hal ini mungkin terjadi, mengingat tidak semua sekolah bebas dari pungutan biaya. Selain itu, banyak pula sekolah swasta di dalam pendidikan Indonesia yang tak bisa begitu saja membebaskan pungutan biaya atas murid-muridnya.

Hal tersebut, kata Ubaid, akan memunculkan ancaman banyak sekolah gulung tikar alias bangkrut di tengah wabah. Merujuk pada jajak pendapat yang telah dilakukan Kemendikbud, Ubaid mengatakan hampir 56 persen sekolah swasta mengalami kesulitan biaya operasional.

Lihat juga: Mengajarkan Anak Soal Corona Lewat Dongeng Menurutnya, ancaman depresi juga menghantui guru, orang tua sampai siswa. Pasalnya sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terkait situasi corona sendiri belum menemukan formula yang tepat.

Masih banyak guru memberikan tugas bertumpuk, orang tua juga harus mendampingi anak mengerjakan lebih dari satu sampai dua tugas tiap hari.

“Padahal mereka [orang tua] juga harus menghadapi situasi yang serba sulit. Belajar model seperti ini tidak boleh diterus-teruskan. Harus segera diberhentikan,” ujarnya.

Untuk itu JPPI menyerukan agar pemerintah membentuk kurikulum darurat. Kurikulum ini nantinya bakal jadi pedoman pembelajaran di tengah pandemi.

Kurikulum darurat dinilai penting untuk mewujudkan pembelajaran menyenangkan, dan untuk mengukur target pencapaian pendidikan.

Kompetensi guru dalam hal ini perlu didorong. Pasalnya PJJ tak hanya bergantung pada infrastruktur, namun juga pengajar. Pemerintah juga diminta memfasilitasi pendidikan untuk semua kalangan, untuk memastikan hak belajar tersalurkan dengan adil.

“Terutama berikan afirmasi kepada kelompok-kelompok yang selama ini tertinggal, seperti perempuan, kelompok difabel, anak-anak di daerah 3T dan lain-lain,” tambahnya.

PJJ sudah diberlakukan sebulan lebih di sebagian besar daerah di Indonesia. Kemendikbud sendiri tengah merangkai skenario kemungkinan PJJ diterapkan hingga tahun ajaran baru 2020/2021.

Refleksi seorang murid sekolah dasar (SD) belajar melalui siaran streaming TVRI di rumahnya, di Padang, Sumatera Barat (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Lihat juga:Hardiknas, DPR Sindir Pangkas Dana Pendidikan untuk Corona DPR Minta Nadiem Gerakkan Guru Door to Door di Daerah

Pada hari yang sama, secara terpisah, anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki menyarankan Nadiem menggerakkan guru untuk bekerja secara ‘door to door’ atau menemui siswa secara langsung untuk mengatasi persoalan PJJ bagi siswa di daerah tanpa akses internet hingga listrik di tengah pandemi Covid-19.

Langkah tersebut, kata Zainuddin, bisa diawali Nadiem dengan membentuk Gugus Depan Layanan Pendidikan untuk Siswa di Daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal di Tengah Pandemi Covid-19

“Guru penggerak ini nanti harus menjumpai siswanya mungkin kalau memungkinkan door to door, bukan dikumpulkan,” kata Zainuddin saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Sabtu.

Dia menyampaikan, model proses belajar mengajar yang diterapkan bagi siswa di daerah tanpa akses internet hingga listrik harus pembelajaran berbasis masalah atau proyek (problem based learning), bukan bersifat konvensional.

Zainuddin mengatakan setiap guru yang ditugaskan bisa membentuk tim yang terdiri dari beberapa berbagai macam mata pelajaran untuk meminta siswa mempelajari spesies hewan atau tumbuhan yang berada di sekitar lingkungannya secara tematik.

Dia melanjutkan, setiap siswa diberikan waktu sekitar satu pekan untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan proyek yang ditugaskan. Menurutnya, langkah ini penting dilakukan untuk

mengurangi interaksi antara siswa dan guru di tengah pandemi virus corona.

“Guru dalam satu tim merumuskan realitas yang ada di masyarakat secara tematik jadi pembelajarannya tematik, satu proyek bisa diamati beberapa guru biologi, fisika, kimia, bahasa Indonesia,” tutur politikus PAN tersebut.

Lihat juga:Curhat Kecele Peserta Pelatihan Kartu Prakerja ala Jokowi Nadiem pun harus membekali para guru yang ditugaskan itu dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Menurutnya, para guru itu juga harus diberikan uang transportasi dan insentif dalam melaksanakan tugasnya.

Sementara itu di sejumlah daerah, sudah ada guru-guru yang berinisiatif menyambangi rumah siswa karena keterbatasan alat telekomunikasi dan jaringan internet. Salah satunya dilakukan Guru SD75/1 Pasar Terusan Batanghari, Jambi, Dedi Kurniawan.

Saat menyambangi rumah siswa, Dedi mengatakan tetap memperhatikan aturan untuk menjaga jarak. “Siswa yang rumahnya berdekatan kita minta untuk belajar bersama, maksimal tiga anak agar mereka bisa menjaga jarak dalam belajar. Saya minta mereka juga memakai masker,” kata Dedi dilansir dari Antara.

Lihat juga:Akses Internet Terbatas, Guru di Jambi Keliling Rumah Siswa Sebelumnya, Pelaksana tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Hamid mengaku pihaknya tengah memikirkan persoalan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa di daerah tanpa akses internet hingga listrik.

Kegiatan belajar dari rumah ini diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia karena penyebaran virus corona sejak awal Maret 2020 lalu.

Hamid mengatakan di beberapa daerah mungkin pembelajaran dilakukan lewat radio atau komunitas. Ia pun meminta guru di daerah tak punya akses internet hingga listrik itu berinovasi dalam mengajar. (fey, mts/kid)

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200504081412-20-499675/mendikbud-di-minta-waspada-ancaman-putus-sekolah-semasa-covid>

Kemendikbud Serahkan Cara Belajar di Rumah Era Corona ke Guru



Selasa, 05 Mei 2020 14:14 WIB

Plt Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad meminta guru berinovasi terkait belajar jarak jauh. (Humas Forum Merdeka Barat 9)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta guru dan kepala sekolah untuk berinovasi terkait pembelajaran di masa pandemi Virus Corona.

“Kita mendorong setiap guru dan kepek untuk melakukan inovasi pembelajaran sesuai dengan kondisi masing-masing daerah,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid, dalam keterangan tertulisnya, kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/5)

Lihat juga: Tahun Ajaran Baru, Pemerintah Diminta Urus Internet di Desa Dia juga mengaku belum akan menerbitkan petunjuk pelaksana (juklak) ataupun petunjuk teknis (juknis) soal cara pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Tampaknya saat ini, Kemdikbud belum akan mengeluarkan juklak atau juknis PJJ,” aku Hamid.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengkritisi pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi Corona. Dari kalangan guru, mereka kesulitan menerapkannya mengingat keterbatasan fasilitas. Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kebayoran Lama Cicis Sulastri mengaku terhambat karena belum ada mekanisme konkret terkait pelaksanaan belajar jarak jauh. “Banyak orang tua murid yang

menanyakan kepada saya. Tapi, saya belum bisa berkomentar karena belum ada juknis (petunjuk jenis), belum ada surat edaran,” kata dia.

Guru yang lain dari SMPN 60 Jakarta Nurnaningsih mengatakan pembelajaran jarak jauh secara digital sulit dilakukan di sekolahnya karena mayoritas siswa berasal dari keluarga tidak mampu.

Lihat juga: Akses Internet Terbatas, Guru di Jambi Keliling Rumah Siswa “Kalau untuk daring, di SMPN 60 itu anak miskin semua, hampir semuanya penerima KJP (Kartu Jakarta Pintar), itu kendala kami. Kalau guru bisa saja, tapi muridnya fasilitasnya yang enggak ada,” kata dia.

Keterbatasan fasilitas internet pun membuat guru di Sumenep dan Jambi berinisiatif berkeliling dari rumah ke rumah siswa untuk mengajar.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai belum ada formula yang tepat dalam PJJ ini. Ia pun mendorong Kemendikbud membentuk kurikulum darurat saat Corona.

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200505131801-20-500225/kemendikbud-serahkan-cara-belajar-di-rumah-era-corona-ke-guru>

Keberlangsungan Pendidikan Terancam Pandemi



Selasa, 05 Mei 2020 06:00 WIB Waktu Baca 2 menit

Foto : istimewa

Semua pihak harus bekerja sinergis membantu warga terdampak Covid-19 untuk mencegah terjadinya peningkatan angka putus sekolah.

JAKARTA - Pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara belum menjadi salah satu sektor utama dalam situasi darurat pandemi Covid-19. Layanan pendidikan dinilai masih gagap dalam menghadapi situasi bencana non alam ini.

“Mengabaikan sektor pendidikan di kala bencana adalah kelalaian fatal. Pengabaian ini bisa mengundang bencana berikutnya yang lebih destruktif,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji kepada Koran Jakarta, Senin (4/5). Ubaid menilai dibanding menyelamatkan sektor pendidikan, pemerintah malah membiarkan pendidikan berjalan terseok-seok. Hal tersebut terlihat dari penganggaran dana darurat Covid-19 yang tidak memasukan sektor pendidikan. Ia menambahkan dana pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) justru dipangkas dan direalokasi untuk sektor lain. Akibatnya, ancaman di sektor pendidikan kian nyata di depan mata. Ubaid menyebut jika pemerintah masih abai terhadap sektor pendidikan maka akan ada beberapa ancaman yang muncul. Pertama, jumlah siswa yang putus sekolah akan bertambah mengingat angka kemiskinan meningkat sehingga orang tua tidak mampu

menyekolahkan anak. Ancaman kedua, tambah Ubaid, adalah akan banyak sekolah terutama sekolah swasta yang gulung tikar. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Kemendikbud sendiri, hampir 56 persen sekolah swasta di Indonesia mengalami kesulitan biaya operasional.

“Kalau ini dibiarkan, ada banyak guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang terlantar,” jelasnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Ubaid meminta pemerintah mempercepat birokrasi pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, sebisa mungkin ada penambahan dana pendidikan. Dia juga meminta pemerintah memberikan bantuan sosial bagi para guru honorer. Hal itu perlu dilakukan karena para guru honorer termasuk orang paling terdampak dalam institusi pendidikan.

“Selain kesejahteraan, reformasi kurikulum darurat, dan upgrade kompetensi guru harus dilakukan,” tandasnya.

Investasi Jangka Panjang

Pada kesempatan terpisah, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, menyebut sektor pendidikan harus menjadi perhatian pemerintah. Hal ini harus dilakukan karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang.

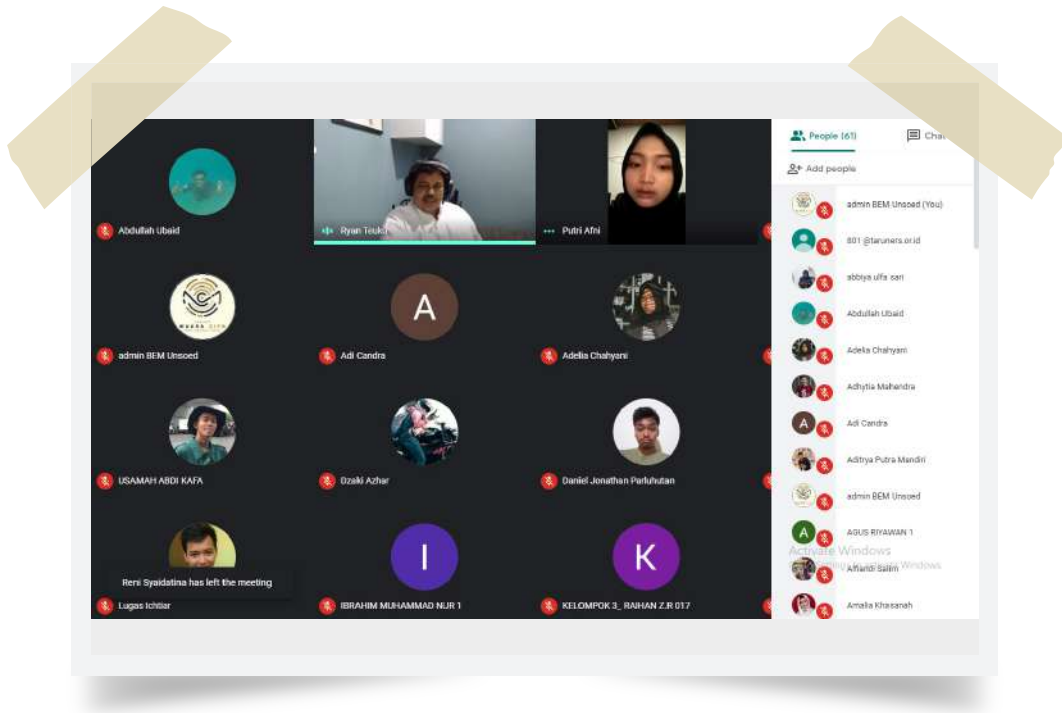
“Saya kira ekonomi, kesehatan, sangat mendesak, tapi pendidikan ini ketinggalan satu semester saja, dampaknya dahsyat sekali,” ucapnya. Arif berharap pemerintah mempunyai skenario hingga akhir tahun mengantisipasi gelombang pandemi Covid-19. Pemerintah, lanjutnya, bisa memberi stimulus dana abadi pendidikan, maupun insentif dalam bentuk lain. “Berbagai insentif, termasuk menyiapkan skenario terjadi sampai Desember sehingga Presiden Joko Widodo minta BUMN menyiapkan kuota gratis,” katanya. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, menyampaikan akan ada perubahan besar di sektor pendidikan pasca pandemi Covid-19. Peran teknologi, lanjutnya, akan mendominasi sektor pendidikan.

Redaktur : Marcellus Widiarto

Penulis : Muhamad Marup

Sumber: <https://koran-jakarta.com/keberlangsungan-pendidikan-terancam-pandemi?page=all>

DISKON Hardiknas di Masa Pandemi : Berbagai Masalah Kebijakan Kampus Terhadap Mahasiswa



ByMedia Aplikatif

MEI 5, 2020 Berita BEM Unsoed, Diskusi Online, Hari Pendidikan Nasional, Kementerian Kajian dan Aksi Strategis

Purwokerto, BEM Unsoed – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Aliansi Bem se-Unsoed mengadakan diskusi dengan tema “Hardiknas di Masa Pandemi : Berbagai Masalah Kebijakan Kampus Terhadap Mahasiswa”. Diskusi ini dilakukan secara *online* melalui Google Meet pada Selasa (2/5) pukul 16.00-17.30 WIB. Agenda diskusi mengundang tiga pakar untuk memberikan pendapat dari berbagai sudut pandang. Ketiga pembicara tersebut ialah:

1. Ubaid Matraji (Koordinator Nasional Jaringan pemantau Pendidikan Indonesia)
2. T. Junaidi, S. E., M.Pi (Dosen FPIK Unsoed)
3. Lugas Ichtiar (Koordinator Isu Pendidikan Tinggi BEM SI)

Materi pertama dalam diskusi ini disampaikan oleh Ubaid Matraji, membahas keadaan pendidikan Indonesia di masa pandemi. “Tidak hanya kampus yang terdampak, tetapi pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA juga turut terdampak pandemi Covid-19. Tetapi, kurikulum yang ada tidak siap untuk melakukan pembelajaran *online* dan masih belum memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung pembelajaran,” jelas Ubaid.

T. Junaidi selaku Dosen FPIK Unsoed menjelaskan lebih mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di kampus. “Permasalahannya yaitu pada sumber daya manusia di level *top leader*, karena seringkali mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang dirasakan

mahasiswa. Permasalahan selanjutnya yaitu pada dosen, yang terkadang *overlapping* dalam proses pembelajaran dan tidak melihat kemampuan mahasiswa. Kemudian muncul juga permasalahan mengenai transparansi anggaran, yang sampai sekarang masih belum bisa diselesaikan,” ungkapnya.

Pemotongan anggaran pendidikan dan carut-marut kebijakan kampus di tengah pandemi ini juga tak lepas dari sorotan pada agenda diskusi ini. Lugas Ichtiar, selaku Korsu Dikti BEM SI mengungkapkan permasalahan pendidikan tinggi di tengah pandemi. “Indonesia tidak siap menghadapi pandemi ini. Terlihat dengan adanya pemotongan anggaran pendidikan sebesar tiga triliun yang seharusnya anggaran tersebut tidak boleh disentuh. Kemudian semenjak kuliah daring, fasilitas kampus juga tidak bisa diakses. Mahasiswa bahkan ditambah beban kuota internet untuk proses pembelajaran ditambah dengan permasalahan UKT yang ada,” tambah Lugas.

Hari Pendidikan Nasional bukan hanya sebatas perayaan, melainkan menjadi momentum bagi kita untuk melakukan evaluasi. Dengan adanya diskusi ini, harapannya wawasan kita dapat diperluas terkait permasalahan pendidikan hari ini.

Penulis : Dzaki Azhar

Editor : Chrisdian Provita Bella

Sumber: <https://blog.bem-unsoed.com/diskusi-online-peringatan-hari-pendidikan-nasional/>

Sentil Ambisi Ibu Kota Negara, Pengamat: Bakal Terjadi Kebodohan Massal



Muhammad Nursam - Nasional

Minggu, 10 Mei 2020 14:24 PM

FAJAR.CO.ID -- Pengamat Pendidikan Ubaid Matraji mengungkapkan, akan terjadi kebodohan massal dan kegagalan bonus demografi bila masalah kekurangan guru PNS dalam lima tahun ke depan tidak diselesaikan.

Bencana itu bisa saja terjadi lantaran pemerintah tidak fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan lebih mementingkan pembangunan infrastruktur salah satunya dengan proyek ambisiusnya pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.

“Yang kami lihat, tidak ada kebijakan pemerintah yang strategi untuk mengatur tata kelola tenaga pendidik di sekolah. Akibatnya apa yang hari ini tercermin. Guru yang ada mutunya rendah, masih banyak kekurangan guru, yang honorer dibiarkan menggantung tanpa status,” terang Ubaid kepada JPNN.com, Minggu (10/5).

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) itu menambahkan, kondisi tersebut berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia.

Jangan heran jika tingkat literasi siswa Indonesia rendah dan skor PISA (Programme for International Student Assessment) tiap tahun trennya merosot.

Dalam situasi pandemi seperti ini, pemerintah juga dinilai abai terhadap sektor pendidikan.

Padahal sektor ini juga sangat terdampak dan korbannya banyak sekali.

“Carut marut masalah pendidikan karena tidak ada sinkronisasi antarkebijakan, juga integrasi antarkementerian terkait sektor pendidikan. Pendidikan belum menjadi sektor yang utama. Padahal kalau mau SDM unggul ya pendidikannya dong yang diutamakan,” kritiknya.

Ubaid menyentil sikap agresif pemerintah yang masih berambisi membangun IKN.

Harusnya pemerintah memahami, infrastruktur sehebat apapun tanpa disokong SDM unggul pasti tidak akan mampu berdiri kokoh, dan nilai gunanya juga rendah.

Kondisi ini diperparah dengan rendahnya sinkronisasi dan integrasi antara pusat serta daerah.

“Semua pihak harus sadar, sektor pendidikan ini kan urusan bersama pusat dan daerah. Sampai saat ini masih jalan sendiri-sendiri dan belum sinkron,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, Dirjen GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Kemendikbud Iwan Syahril akan menghadapi masalah besar terkait kekurangan guru. Pasalnya, saat ini lebih dari 60% guru berstatus non-PNS

Bahkan Ramli memprediksikan kekurangan guru akan semakin besar dalam 5 tahun ke depan. Lantaran jumlah guru pensiun juga membesar.

Dia menyebutkan, tahun 2020, ada 72.976 guru pensiun. Lalu tahun 2021 ada 69.757.

Selanjutnya tahun 2022 ada 86.650, tahun 2023 ada 83.841 dan tahun 2024 ada 78.420 guru PNS yang pensiun. (jpnn)

Sumber: <https://fajar.co.id/2020/05/10/sentil-ambisi-ibu-kota-negara-pengamat-bakal-terjadi-kebodohan-massal/>

Pengamat: Sekolah Tak Bisa Langsung Normal jika Dibuka Juli



CNN Indonesia

Selasa, 12 Mei 2020 06:16 WIB

Pengamat pendidikan menilai pembelajaran tidak bisa dilaksanakan seperti normal apabila sekolah dibuka kembali pada Juli nanti. Ilustrasi belajar di sekolah. (CNN Indonesia/Safir Makki).

Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menilai proses pembelajaran tidak bisa dilaksanakan seperti normal jika rencana membuka kembali sekolah diputuskan pada Juli mendatang.

Menurut Ubaid, pihaknya menyarankan hal tersebut mengingat banyak keluhan stres dan tekanan yang ditemukan pada siswa selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) karena dampak Covid-19 atau virus corona.

“Saran kami ada semacam stress healing. Karena anak-anak kan kodratnya bermain. Tapi selama pandemi harus stay at home. Mereka juga tertekan,” ucap Ubaid kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Senin (11/5).

Berkaca pada beberapa bulan ke belakang, katanya, banyak kendala pada pelaksanaan PJJ yang mengakibatkan ketimpangan hak belajar anak. Hal ini tak lepas dari situasi mendadak dan kurangnya persiapan PJJ selama pandemi.

Lihat juga:Corona Jatim Melonjak, Doni Minta TNI Bantu Tangani “Kalau lihat beberapa bulan penerapan PJJ itu nyatanya kita terseok-seok. Belum siap tapi harus siap. Akibatnya guru hanya

bisa memberikan tugas menumpuk ke anak, enggak ada feedback,” ujarnya.

Ubaid mengatakan kendala yang terjadi bukan hanya pada metode mengajar guru. Tapi juga ketimpangan fasilitas yang dimiliki siswa. Juga masalah biaya pendukung belajar yang dimiliki orang tua.

Dalam pandangan Ubaid, pemerintah belum memiliki panduan atau kurikulum darurat untuk diterapkan di tengah pandemi guna menanggulangi masalah ini.

Untuk itu ia menilai wacana belajar kembali di sekolah bisa jadi solusi yang positif. Salah satunya karena mempertimbangkan kondisi psikologis siswa selama PJJ dilakukan.

Tentunya, lanjut Ubaid, sekolah dibuka dengan mempertimbangkan protokol kesehatan dan faktor keamanan siswa serta pendidik. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan metode belajar yang menyesuaikan kondisi psikologis siswa di awal tahun ajaran.

Kemendikbud sebelumnya mengatakan berpeluang membuka kembali sekolah pada pertengahan Juli atau tahun ajaran 2020/2021. Pembukaan sekolah kembali itu dimungkinkan untuk daerah yang sudah dinyatakan aman dari wabah Covid-19.

PJJ sendiri sudah berlangsung sejak pertengahan Maret di sebagian besar daerah di Indonesia. Survei Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menemukan 58 persen anak tidak suka belajar dari rumah.

Lihat juga: 52 Klaster-1.502 Positif, Jatim Terbanyak ke-2 Kasus Corona Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengaku mendapat banyak laporan dari siswa terkait PJJ selama pandemi. Kebanyakan didominasi aduan tertekan karena tugas menumpuk.

Analisis kebijakan publik dari Wahana Visi Indonesia, Tira Maya Malino menilai pemerintah harus mempertimbangkan kondisi psikososial siswa ketika PJJ dilakukan.

Hal itu karena pihaknya menemukan laporan siswa tertekan akibat jadwal PJJ yang ketat. Maupun sikap orang tua yang tak mendukung kegiatan belajar di rumah. (fey/ugo)

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200511131513-20-502059/pengamat-sekolah-tak-bisa-langsung-normal-jika-dibuka-juli>

Juli Kembali Sekolah, JPPI: Harus Ada Capacity Building untuk Para Guru Rakhmatulloh



Senin, 18 Mei 2020 - 07:16 WIB views: 4.023

Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok

JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengingatkan agar model pendidikan jangan langsung masuk ke konten mata pelajaran. Perlu ada stress healing, mengingat sudah terlalu lama siswa sekolah dari rumah. Hal ini dikataka Ubaid merespon wacana Kemendikbud yang akan kembali membuka proses belajar mengajar di sekolah pada Juli 2020 mendatang.

“Karena selama di rumah anak-anak itu stres, karena enggak bisa main dan banyak tugas dari sekolah,” ujar Ubaid saat dihubungi SINDOnews, Senin (18/5/2020).

Ubaid menyarankan harus ada capacity building atau pembangunan kapasitas untuk para guru agar mereka dapat melakukan proses pembelajaran secara kreatif, inovatif, dan mampu menggunakan sumber-sumber belajar baik di sekolah maupun luar sekolah. Selain itu, kata Ubaid, perlu juga melibatkan para orang tua dan masyarakat di luar sekolah untuk terlibat dalam proses pembelajaran.

“Kalau pun sudah masuk sekolah, tetap harus memperhatikan protokol Covid. Sebab Juli itu belum bisa dipastikan bebas sepenuhnya,” pungkas Ubaid.

Sumber: <https://nasional.sindonews.com/read/33844/15/juli-kembali-sekolah-jppi-harus-ada-capacity-building-untuk-para-guru-1589760352>

Belajar dari Rumah: Masih Ada Kesenjangan Pendidikan di Indonesia?

Reporter : ABC

Editor ;ABC

Kamis, 28 Mei 2020 17:32 WIB

Belajar dari rumah telah menjadi bagian dari ‘new normal’ warga Indonesia dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi virus corona. Namun kendala infrastruktur dan teknologi membuat adanya kesenjangan pendidikan antar daerah.

Selain harus mengajar dengan metode online sebagai dosen di Universitas Pattimura, ia juga harus mendampingi kedua anaknya belajar dari rumah.

Putra sulungnya, Hillary de Queoljoe sekarang duduk di kelas 7 SMP Negeri 6, sementara adik Hillary, Marchella de Qoeljoe adalah murid kelas 1 Sekolah Citra Kasih, di Ambon, Maluku.

“Sekolah negeri tidak sama dengan sekolah swasta. Sekolah yang swasta lebih terorganisasi dan rapi,” kata Sherly kepada Hellen Souisa dari ABC News.

“Adik setiap hari ada tugas, nanti hasilnya dikirim melalui *Gmail*. Tapi Kakak tugasnya [dari sekolah] tidak menentu, dalam satu minggu mungkin hanya ada 2 atau 3 tugas,” tambahnya.

Sekitar 4.000 kilometer dari kota Ambon, Vincent, seorang murid kelas 5 Sekolah Dasar di Desa Semudun, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat mengaku lebih suka belajar di sekolah.

“Saya lebih suka belajar [di sekolah] seperti biasa karena di rumah bosan tidak ada teman,” ujarnya kepada Natasya Salim.

Sejak akhir Maret lalu, Vincent dan adiknya, Wilson, yang duduk di kelas 3, belajar di rumah dengan menyaksikan tayangan TVRI, sesuai instruksi dari sekolah mereka yaitu SD Negeri 19 Semudun.

Melalui program TVRI bertajuk “Belajar Dari Rumah”, yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), murid-murid seperti Vincent dan Wilson bisa mendengarkan penjelasan tentang

Itulah yang dialami sebagian anak-anak Indonesia, khususnya yang berada di luar Pulau Jawa,

saat sedang sekolah dari rumah di tengah pandemi virus corona.

Di saat ada anak-anak lain, khususnya di kota-kota besar, yang tetap belajar lewat gawai canggih dan internet, banyak pula yang tak memilikinya.

Seperti yang diakui oleh Siti Maulia Rizki, seorang guru dari Madrasah Tsanawiah Negeri di Kabupaten Aceh Besar.

Sebagai seorang wali kelas, ia menceritakan jika hanya lebih dari separuh murid-muridnya yang memiliki ponsel, tapi masalahnya tidak hanya sampai di situ.

“Belum lagi rata-rata anak-anak berasal dari keluarga ekonomi ke bawah, jadi meski punya hape tapi tidak punya paket internet,” kata Siti kepada Erwin Renaldi.

Madrasah tersebut saat ini hanya bisa mengandalkan platform WhatsApp karena dianggap paling sederhana dan tidak banyak membutuhkan data internet.

“Kadang-kadang hari ini kita memberikan tugas untuk anak-anak, baru dibalas besok atau bahkan minggu depan setelah punya paket internet,” tambahnya.

Sumber: <https://www.tempo.co/abc/5637/belajar-dari-rumah-masih-ada-kesenjangan-pendidikan-di-in-donesia>

Sekolah di tengah pandemi Covid-19: Para siswa ‘tertinggal’ secara akademik, orang tua: ‘Saya pilih anak selamat’



- Callistasia Wijaya
- Wartawan BBC News Indonesia

2 Juni 2020

SUMBER GAMBAR, ANTARA FOTO Keterangan gambar, Seorang siswa SD mengerjakan ulangan praktek mata pelajaran IPA tentang Identifikasi Sifat Campuran melalui media daring di rumahnya, Desa Laladon, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, (11/05).

Menjelang awal tahun ajaran baru 13 Juli mendatang, sejumlah guru dan orang tua menyatakan khawatir dengan perkembangan akademik para siswa setelah diterapkannya pendidikan jarak jauh (PJJ) untuk menekan penularan Covid-19.

Mereka mengatakan, keterbatasan fasilitas pendukung hingga ketidaksiapan siswa belajar di rumah, membuat sistem itu “belum efektif”- keadaan yang mengakibatkan capaian akademik siswa “tertinggal”, menurut seorang pengamat pendidikan.

Ada orang tua siswa yang berharap anaknya segera kembali ke sekolah, tapi ada juga yang tidak sepakat kegiatan belajar secara tatap muka diberlakukan karena alasan kesehatan.

Sementara, pemerintah meminta pihak terkait memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mengoptimalkan PJJ.

Alih-alih belajar di rumah, siswanya kini hanya membantu orang tua mereka masing-masing berladang karena tidak adanya layanan internet di desa itu.

“Saya *kan* daerahnya termasuk daerah tertinggal. Di sana belum ada sinyal. Jangankan sinyal internet, untuk telepon, SMS itu pun hanya tempat tertentu saja yang ada sinyalnya,” ujar Oktoriyadi.

Menonton siaran TVRI pun tidak bisa karena tidak adanya sumber listrik di siang hari, ujar Oktoriyadi. Itu membuatnya khawatir.

“Saya sangat mengkhawatirkan anak-anak tidak mendapat akses pendidikan.”

“Kalau saya pikir di daerah saya, sebaiknya anak-anak diberlakukan sekolah seperti biasa, dengan pertimbangan di sana belum juga terlalu zona merah. Sekolah bisa dilaksanakan dengan protokol pencegahan Covid-19, seperti menjaga jarak,” kata Oktoriyadi.

Sementara, di Tegalwaru, Purwakarta, Jawa Barat, keadaannya sedikit lebih baik meski penuh tantangan, seperti dituturkan seorang guru sekolah dasar negeri, Dian Misastra.

Ia mengatakan tak semua dari siswanya, yang kebanyakan anak dari petani, memiliki ponsel. Karenanya, ia harus mengunjungi rumah siswa-siswanya untuk mengajar secara langsung, hal yang dilakukannya secara sukarela meski dikatakannya “belum mendapatkan insentif”.

Meski begitu, ia mengatakan tak mungkin kurikulum yang normal bisa diterapkan dalam PJJ. Jika sekolah baru dibuka akhir tahun atau awal tahun depan, dampaknya pun akan sangat besar bagi siswa, katanya.

Maka itu, ia berpendapat, jika situasi sudah aman dan memungkinkan, sekolah mestinya dapat dibuka kembali.

“Misalnya zona di sini *nggak* terlalu berbahaya, *nggak* harus semua sekolah dirumahkan. Ada yang kondisi aman, lanjut masuk sekolah dengan protokol kesehatan,» ujarnya.

Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52661836>

Ubaid: Banyak Orang Tua Murid Alami Kesulitan Ekonomi, PPDB Ditunda Saja



Senin, 08 Juni 2020 – 14:23 WIB

Siswi ikut PPDB. Foto: JawaPos.com jpnn.com,

JAKARTA - Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menetapkan tahun ajaran baru pada pertengahan Juli 2020 dikritik Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Menurut Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI, pendaftaran peserta didik baru (PPDB) kali ini terlalu dipaksakan karena hanya untuk mengikuti kalender pendidikan.

“Kenapa harus dipaksakan tahun ajaran baru dimulai bulan depan, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang mendera masyarakat Indonesia, khususnya rakyat kecil. Untuk makan saja, mereka tak tercukupi, apa lagi untuk bayar pendaftaran sekolah, uang gedung, dan juga kuota internet untuk mengawal proses PPDB. Ini sungguh kami menilai sebagai kebijakan yang tidak manusiawi,” beber Ubaid dalam pesan elektroniknya pada Senin (8/6).

Dia menyebutkan, di kala pandemi ini, JPPI mendapat banjir pengaduan dari masyarakat terkait rencana pemerintah untuk membuka kembali sekolah. Juga soal memaksakan PPDB dan tahun ajaran baru bulan Juli 2020. Dari semua pengaduan yang terkumpul, hanya ada 24% yang setuju dengan PPDB dan tahun ajaran baru pada Juli 2020. Sisanya, sebanyak 59% setuju diundur sampai situasi pandemi berakhir, dan sejumlah 17% yang setuju diundur pada Januari 2021.

“Ini menunjukkan masyarakat memang masih belum siap untuk menghadapi tahun ajaran baru,” ucapnya. Ubaid mengungkapkan, ada beberapa alasan orang tua tidak setuju PPDB di bulan ini dan mereka juga menolak kalender pendidikan akan dimulai Juli 2020.

Sumber: <https://www.jpnn.com/news/ubaid-banyak-orang-tua-murid-alami-kesulitan-ekonomi-ppdb-ditunda-saja>

Pemerintah Diminta Gratiskan Biaya Pendidikan Siswa Terdampak Covid-19



Citra Larasati · 08 Juni 2020 10:55

Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyodorkan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait pelaksanaan kegiatan pendidikan memasuki kenormalan baru (new normal) dan pandemi covid-19.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji meminta Pemerintah tidak memaksakan untuk memulai tahun ajaran baru di Juli 2020 mendatang. Termasuk juga tidak menggelar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai bagian dari rangkaian proses memasuki tahun ajaran baru tersebut.

“Tunda PPDB dan undur tahun ajaran baru. Menunda proses PPDB dan mengundur tahun ajaran baru sampai pandemi usai, atau paling cepat Januari 2021. Ini harus dilakukan supaya pembukaan sekolah tidak sekadar kembali dibuka, tapi segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan matang,” kata Ubaid, dalam keterangannya, Senin, 8 Juni 2020.

JPPI juga meminta Pemerintah menggratiskan biaya sekolah bagi anak yang orang tuanya terdampak covid-19. Banyak orang tua yang terdampak secara ekonomi, mereka harus mendapatkan kebijakan afirmasi supaya anaknya tidak putus sekolah.

“Ini peran yang perlu dukungan pemerintah daerah,” tegasnya. Selain itu, Ubaid juga minta Kemendikbud untuk segera menerbitkan kurikulum pandemi. Selama pandemi, pemerintah harus mengoptimalkan pembelajaran via daring dan juga luring (luar jaringan) bagi masyarakat

yang tidak punya akses internet.

“Supaya optimal, pemerintah harus menyiapkan kurikulum darurat covid-19 dalam situasi pandemi. Jadi, bukan seperti sekarang yang sedang berjalan, kurikulum normal dipraktikkan di kala pandemi,” ujar Ubaid.

Kemudian JPPI meminta Pemerintah melakukan peningkatan capacity building para guru dan orang tua. Sebab dalam situasi pandemi ini, peran guru dan orang tua sangat penting dalam proses pembelajaran

Banyak guru dan orang tua yang belum siap mendampingi anak belajar dalam situasi pandemi, mereka harus dibekali dengan berbagai kemampuan dan juga keterampilan secara kreatif dan inovatif.

Terakhir, JPPI meminta Pemerintah menerapkan protokol kesehatan di sekolah. Sambil menunggu pandemi usai, sekolah dan institusi pendidikan lain perlu mempersiapkan diri untuk dapat menerapkan protokol kesehatan.

“Ini langkah pencegahan supaya tidak terjadi penyebaran covid-19 di sekolah jika sewaktu-waktu sekolah dibuka kembali,” imbuhnya.

Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyayangkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini yang terlalu dipaksakan, hanya karena untuk mengikuti kalender pendidikan. Kebijakan ini dinilai tidak manusiawi, karena digelar di tengah masyarakat yang tengah mengalami kesulitan akibat pandemi virus korona (covid-19).

Pernyataan ini disampaikan Ubaid bukan tanpa sebab. Sepanjang pandemi ini, JPPI mendapat banjir pengaduan dari masyarakat terkait rencana pemerintah untuk membuka kembali sekolah, juga soal memaksakan PPDB dan dimulainya tahun ajaran baru bulan Juli mendatang.

Dari semua pengaduan yang terkumpul, hanya ada 24 persen yang setuju dengan PPDB dan tahun ajaran baru pada Juli 2020. Sisanya, sebanyak 59 persen setuju diundur sampai situasi pandemi berakhir, dan sebesar 17 persen bahkan setuju tahun ajaran baru diundur hingga Januari 2021.

“Ini menunjukkan bahwa masyarakat memang masih belum siap untuk menghadapi tahun ajaran baru,” tegasnya.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/8KyXmpEk-pemerintah-di-minta-gratiskan-biaya-pendidikan-siswa-terdampak-covid-19>

PPDB Tetap Digelar di Masa Pandemi, Pemantau: Tak Manusiawi



Setidaknya ada beberapa alasan kenapa masyarakat tak setuju dengan PPDB di bulan ini.

Rep: Ali Mansur / Red: Agus Yulianto

Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA. Panitia memeriksa proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring di SMAN 3 Bandung, Jalan Belitung, Kota Bandung, Senin (8/6). Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK dan SLB di Jawa Barat digelar secara daring dalam dua tahap yakni 8 - 12 Juni dan 25 Juni - 1 Juli

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di masa pandemi Covid-19 terlalu dipaksakan. Karena hanya untuk mengikuti kalender pendidikan, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang mendera masyarakat Indonesia, khususnya rakyat kecil.

“Untuk makan saja, mereka tak tercukupi, apalagi untuk bayar pendaftaran sekolah, uang gedung, dan juga kuota internet untuk mengawal proses PPDB. Ini sungguh kami menilai sebagai kebijakan yang tidak manusiawi,” keluh Ubaid Matraji saat dikonformasi **Republika.co.id**, Senin (8/6).

Setidaknya ada beberapa alasan kenapa masyarakat tidak setuju dengan PPDB di bulan ini dan mereka juga menolak kalender pendidikan akan dimulai Juli 2020. Diantaranya, Orang tua terkendala ekonomi karena terdampak Covid-19. Biaya SPP semester kemarin saja banyak yang nunggak, apalagi harus bayar untuk PPDB.

“Banyak uang yang harus dikeluarkan oleh orang tua saat PPDB. Karenanya kenyataannya proses

PPDB tetap berbayar, apalagi di jenjang SMA/SMK/MA, dan juga sekolah-sekolah swasta. Ini sangat memberatkan orang tua,” kata Ubaid.

Kemudian, PPDB online tidak akan berjalan efektif. Ubaid menjelaskan, pada situasi normal saja, seperti pada tahun- sebelumnya, PPDB online menuai banyak masalah, apalagi sekarang situasi pandemi, tentu sangat tidak efektif. Tahun lalu, PPDB online saja harus ngantri datang ke sekolah dari subuh untuk bisa memasukkan data, bagaimana dengan sekarang? Kemungkinan besar kekacauan akan kembali terulang.

“Khawatir terpapar covid karena pandemi belum usai. Ini diawatirkan oleh orang tua karena anak-anaknya berpeluang besar terpapar covid-19. Banyak sekolah yang belum siap menerapkan protocol covid-19 karena keterbatasan sarana dan juga sumber daya,” terang Ubaid.

Alasan selanjutnya, pembelajaran online berjalan tidak optimal. Selama pandemi, pembelajaran dilakukan di rumah dengan menggunakan cara online. Ini berjalan tidak efektif, karena keterbatasan sarana dan juga akses. Begitu juga dengan Kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Banyak diantara mereka juga terkendala dalam memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran.

“Tentu saja jika ini dipaksakan, pembelajaran tidak akan optimal,” tegas Ubaid.

Oleh karena itu, menurut Ubaid, JPPI menghimbau dan memberikan rekomendasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) agar melakukan beberapa langkah. Antaranya, menunda PPDB dan Undur tahun ajaran baru. Menunda proses PPDB dan mengundur tahun ajaran baru sampai pandemi usai, atau paling cepat Januari 2021.

“Ini harus dilakukan supaya pembukaan sekolah tidak sekedar kembali dibuka, tapi segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan matang,” ungapnya.

Kemudian juga menggratiskan biaya sekolah bagi anak yang terdampak covid-19. Banyak orang tua yang terdampak secara ekonomi, mereka harus mendapatkan kebijakan afirmasi supaya anaknya tidak putus sekolah. Ini peran yang perlu dukungan pemerintah daerah. Serta terbitkan kurikulum pandemi. Karena selama pandemi, pemerintah harus mengoptimalkan pembelajaran via daring dan juga non-daring bagi masyarakat yang tidak punya akses internet.

“Supaya optimal, pemerintah harus menyiapkan kurikulum dalam situasi pandemi. Jadi, bukan seperti sekarang yang sedang berjalan, kurikulum normal dipraktikkan di kala pandemi,” ungapnya.

Selanjutnya, melakukan capacity building bagi para guru dan orang tua. Dalam situasi pandemi, peran guru dan orang tua sangat penting dalam proses pembelajaran. Banyak guru dan orang tua yang belum siap mendampingi anak belajar dalam situasi pandemi, mereka harus dibekali dengan berbagai kemampuan dan juga keterampilan secara kreatif dan inovatif.

Terakhir, sambung Ubaid, terapkan protokol kesehatan di sekolah. Sambil menunggu pandemi usai, sekolah dan institusi pendidikan lain perlu mempersiapkan diri untuk dapat menerapkan protokol kesehatan. “Ini langkah pencegahan supaya tidak terjadi penyebaran covid-19 di sekolah jika sewaktu-waktu sekolah dibuka kembali,” tutup Ubaid.

Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/qbljz0396/ppdb-tetap-digelar-di-masa-pandemi-peman-tau-tak-manusiawi>

JPPI Usul Tahun Ajaran Baru 2020 Diundur Januari 2021 Syarief Oebaidillah | Humaniora



Senin 08 Juni 2020, 19:51 WIB

Antara Tahun ajaran baru JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengusulkan Kemendikbud agar pelaksanaan Tahun Ajaran Baru 2020 diundur menjadi Januari 2021.

JPPI juga menilai proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sedang berjalan terlalu dipaksakan hanya untuk mengikuti kalender pendidikan, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang mendera masyarakat Indonesia, khususnya rakyat kecil.

“ Dampak pandemi covid 19 membuat masyarakat kesulitan. Untuk makan saja, mereka tak tercukupi, apalagi untuk bayar pendaftaran sekolah, uang gedung, dan juga kuota internet untuk mengawal proses PPDB. Kami menilai sebagai kebijakan yang tidak manusiawi, “ kata Koordinator JPPI Ubaid Matraji di Jakarta, Senin (8/6) Ubaid mengutarakan kala pandemi ini, JPPI mendapat banjir pengaduan dari masyarakat terkait rencana pemerintah untuk membuka kembali sekolah, juga soal memaksakan PPDB dan tahun ajaran baru bulan Juli 2020.

Dari semua pengaduan yang terkumpul, hanya ada 24% yang setuju dengan PPDB dan tahun ajaran baru pada Juli 2020. Sisanya, sebanyak 59% setuju diundur sampai situasi pandemi berakhir, dan sejumlah 17% yang setuju diundur pada Januari 2021*. “Ini menunjukkan bahwa masyarakat memang masih belum siap untuk menghadapi tahun ajaran baru,“ tegasnya. Sejumlah alasan mereka tidak setuju PPDB di bulan ini dan mereka juga menolak kalender pendidikan akan dimulai Juli 2020, menurut Ubaid antara lain, pertama para orang tua terkendala ekonomi karena terdampak covid. Biaya SPP semester saja banyak yang menunggak, apalagi harus membayar

untuk PPDB. Banyak uang yang harus dikeluarkan oleh orang tua saat PPDB.

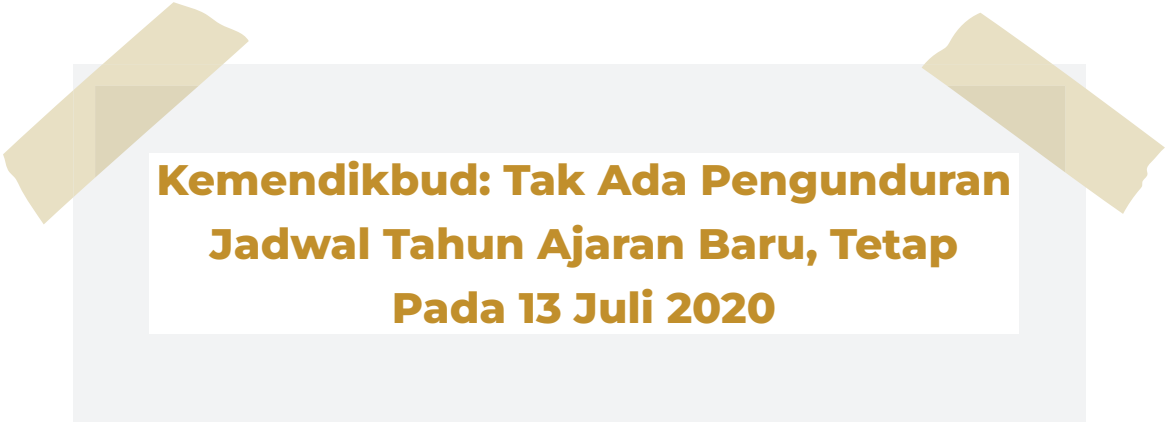
“Kenyataannya proses PPDB tetap berbayar, apalagi di jenjang SMA/SMK/MA, dan juga sekolah-sekolah swasta. Ini sangat memberatkan orang tua, “ tegasnya. Baca juga :Mendagri Minta Pemda Segera Cairkan NPHD Pilkada sebelum 15 Juni Kedua, PPDB online tidak akan berjalan efektif. Pada situasi normal saja, seperti pada tahun- sebelumnya, PPDB online menuai banyak masalah, apalagi sekarang situasi pandemi, tentu sangat tidak efektif. Tahun lalu, PPDB online saja harus mengantri datang ke sekolah dari subuh untuk bisa memasukkan data, bagaimana dengan sekarang? Kemungkinan besar kekacauan akan kembali terulang.

Ketiga, khawatir terpapar covid karena pandemi belum usai. Ini di khawatirkan oleh orang tua karena anak-anak berpeluang besar terpapar covid-19. Banyak sekolah yang belum siap menerapkan protocol covid-19 karena keterbatasan sarana dan juga sumber daya.

Ke empat, pembelajaran online berjalan tidak optimal. Selama pandemi, pembelajaran dilakukan di rumah dengan menggunakan cara online. Ini berjalan tidak efektif, karena keterbatasan sarana dan juga akses. Ke lima, kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Saat ini banyak guru dan tenaga kependidikan yang terdampak covid 19.

Banyak diantara mereka juga terkendala dalam memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Tentu saja jika ini dipaksakan, pembelajaran tidak akan optimal. JPPI juga mengusulkan Kemendikbud menerbitkan kurikulum pandemi. Selama pandemi, pemerintah harus mengoptimalkan pembelajaran via daring dan juga non-daring bagi masyarakat yang tidak punya akses internet. Supaya optimal, pemerintah harus menyipakan kurikulum dalam situasi pandemi. Jadi, bukan seperti sekarang yang sedang berjalan, kurikulum normal dipraktikkan di kala pandemi. JPPI minta Kemendikbud melakukan capacity building bagi para guru dan orang tua.. Dalam situasi pandemi, peran guru dan orang tua sangat penting dalam proses pembelajaran. Banyak guru dan orang tua yang belum siap mendampingi anak belajar dalam situasi pandemi, mereka harus dibekali dengan berbagai kemampuan dan juga keterampilan secara kreatif dan inovatif. Pemerintah diminta terapkan protokol kesehatan di sekolah. “Sambil menunggu pandemi usai, sekolah dan institusi pendidikan lain perlu mempersiapkan diri menerapkan protokol kesehatan. Ini langkah pencegahan supaya tidak terjadi penyebaran covid-19 di sekolah jika swaktu-waktu sekolah dibuka kembali, “ pungkasnya.(OL-2)

Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/319121/jppi-usul-tahun-ajaran-baru-2020-diundur-januari-2021>



Kemendikbud: Tak Ada Pengunduran Jadwal Tahun Ajaran Baru, Tetap Pada 13 Juli 2020

Nisa Muslimah

Selasa, 9 Juni 2020 | 22:02 WIB

Jakarta, KlikAnggaran.com -- Kemendikbud memastikan tahun ajaran baru tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah direncanakan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Evy Mulyani bahwa tak ada pengunduran jadwal tahun ajaran baru 2020/2021.

“Tahun ajaran baru tetap. Tahun Ajaran 2020/2021 dimulai pada Senin ketiga Juli yang akan datang,» ujarnya melalui konferensi pers daring Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Selasa (9/6).

Tahun ajaran 2020/2021 sendiri jatuh pada 13 Juli 2020. Namun rincian kalender pendidikan pada tiap daerah dibuat masing-masing pemerintah daerah.

Evy menegaskan pada tahun ajaran baru ini bukan berarti sekolah langsung menerapkan pembelajaran tatap muka. Kemendikbud sejauh ini masih melakukan kajian dan analisa terkait pembukaan sekolah bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Ia menekankan pihaknya bakal mengutamakan kebijakan kesehatan dan keselamatan guru, siswa dan orang tua dalam memutuskan pembukaan sekolah.

Menurutnya sebagian besar sekolah bakal tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Namun kepastian metode belajar tergantung perkembangan kondisi di masing-masing daerah.

Evy menjelaskan ada sejumlah alternatif metode belajar untuk sekolah yang masih melakukan PJJ. Ini termasuk pembelajaran daring, melalui televisi atau radio.

Plt Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid sebelumnya menyampaikan wacana pembukaan sekolah pada pertengahan Juli 2020.

Namun wacana itu hanya untuk sekolah yang berada di daerah dengan zona hijau. Ia menyatakan syarat rincinya akan diumumkan langsung oleh Mendikbud Nadiem Makarim dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Namun hingga ini Nadiem belum banyak bersuara soal pembukaan sekolah. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga belum menjawab konfirmasi perihal pembukaan sekolah.

Sejumlah pihak pun mulai menagih kepastian pembukaan sekolah ke Kemendikbud. Ini karena banyak hal yang dinilai perlu diperhatikan dalam membuka sekolah di tengah pandemi.

Permintaan pengunduran tahun ajaran baru karena kekhawatiran terpapar corona dan pembelajaran jarak jauh yang dinilai kurang efektif sempat disuarakan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

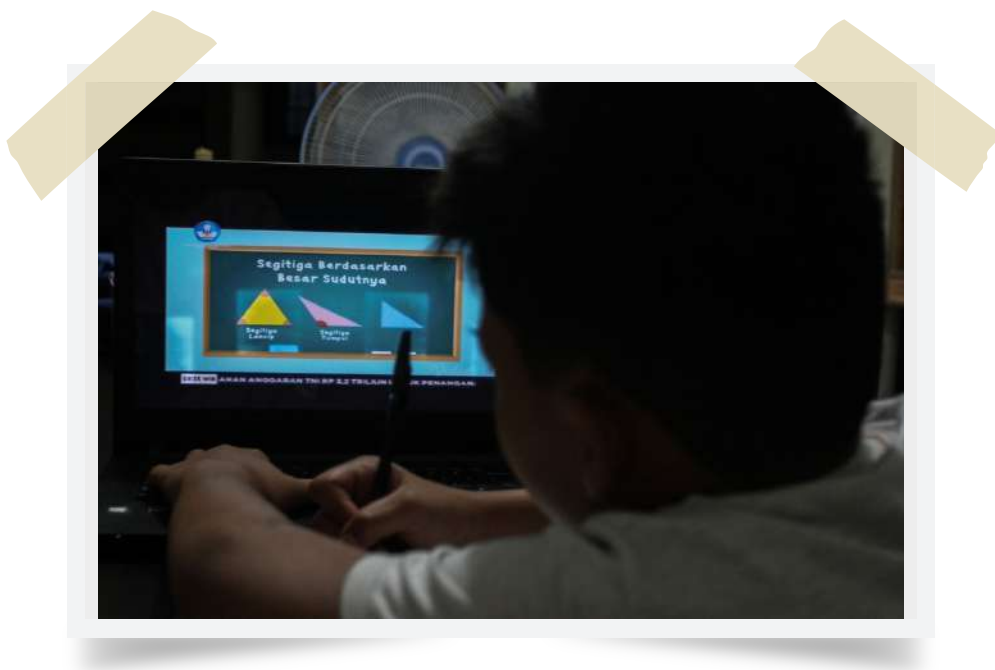
JPPI menemukan setidaknya 59 orang tua dalam laporannya setuju penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan tahun ajaran baru diundur sampai pandemi berakhir.

Sementara 17 persen pelapor mengaku setuju PPDB dan tahun ajaran baru diundur hingga 2021. Sedangkan yang setuju PPDB dan tahun ajaran baru dimulai Juli 2020 hanya 24 persen.

Editor: Nisa Muslimah

Sumber: <https://www.klikanggaran.com/kebijakan/pr-115962953/kemendikbud-tak-ada-pengunduran-jadwal-tahun-ajaran-baru-tetap-pada-13-juli-2020?page=2>

Pengamat: Buat Target Kurikulum Selama Pandemi



Maria Fatima Bona / IDS

Rabu, 17 Juni 2020 | 23:54 WIB

Ilustrasi belajar di rumah. (Antara)

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji berharap pemerintah melakukan formulasi ulang kurikulum pada masa pandemi. Pasalnya, dari hasil evaluasi, penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama tiga bulan terakhir ini tidak efektif karena beberapa target kurikulum tidak tercapai.

“Target kurikulum tidak tercapai karena kurikulum normal diterapkan pada situasi pandemi. Ini sangat tidak efektif harus dipersiapkan betul sebelum masuk tahun ajaran baru ini,” kata Ubaid kepada Suara Pembaruan, Rabu (17/6/2020) malam.

Kurikulum yang sesuai kondisi saat ini diperlukan agar ada target pendidikan yang akan dicapai selama masa pandemi. Untuk itu, dia mendorong perlu adanya koordinasi dari pemerintah pusat agar panduannya dapat diimplementasikan oleh pemda. Pasalnya, beberapa hal perlu diselaraskan bersama.

Ubaid juga menyoroti 6% sekolah di zona hijau yang diperbolehkan untuk dibuka kembali apabila memenuhi persyaratan pemerintah pusat. Kata Ubaid, secara teknis sangat rumit bagi sekolah dalam menerapkannya.

6% wilayah zona hijau buka sekolah ini juga tidak jelas pelaksanaannya nanti karena ada persyaratan apabila orang tua khawatir dan tidak berkenankan anak sekolah, maka diperbolehkan. Ini tentu membingungkan sekolah dan guru yang harus melayani tatap muka bagi yang enggak mau masuk sekolah. Mereka harus dilayani semuanya,” ujarnya.

Sumber: <https://www.beritasatu.com/archive/646333/pengamat-buat-target-kurikulum>

Kemendikbud Harus Hentikan Kerjasama dengan Netflix, Alihkan ke Lokal



Fahreza Rizky, Okezone · Kamis 18 Juni 2020 15:05 WIB

Ilustrasi (foto; Okezone)

JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengkritisi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menggandeng Netflix untuk menyajikan film dokumenter selama pelaksanaan belajar dari rumah.

Menurut Ubaid, Kemendikbud tidak pernah memberikan penjelasan ihwal hal tersebut kepada khalayak. Tak ayal, komunitas perfilman lokal merasa ditinggalkan dan tidak diperlukan. “Itu yang disesalkan banyak kalangan, tidak ada kejelasan sama sekali, dan komunitas film atau production lokal merasa ditinggal dan tidak diperlukan,” ucapnya kepada wartawan, Kamis (18/6/2020).

Ubaid mendesak Kemendikbud menghentikan kerjasama dengan Netflix terkait penyajian film kepada siswa. Sebaliknya, program itu diberikan kepada komunitas perfilman lokal. “Harus dihentikan dan dialihkan ke penyedia lokal dan berbasis pada komunitas,” tegas dia.

Ubaid menambahkan, penghentian kerjasama dengan Netflix terkait penyajian film merupakan momentum untuk memperkuat dan mendiseminasi konten-konten lokal. “Begitupula dengan komunitas-komunitas penyediaanya juga harus dilibatkan sebagai bagian dari misi saling menguatkan dan support satu sama lain,” tandas dia.

Sebagaimana diketahui, Kemendikbud mengumumkan akan menghadirkan film dokumenter Netflix yang ditayangkan melalui program Belajar dari Rumah (BDR) di melalui TVRI mulai 20 Juni 2020.

Upaya itu dilakukan Kemendikbud untuk memastikan agar dalam masa yang sulit ini masyarakat terus mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelajaran dari rumah, salah satunya melalui media televisi dengan jangkauan terluas di Indonesia.

Sumber: <https://nasional.okezone.com/read/2020/06/18/337/2232271/kemendikbud-harus-hentikan-kerjasama-dengan-netflix-alihkan-ke-lokal>

Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia



Kompas.com - 03/07/2020, 21:29 WIB

Ilustrasi PJJ(DOK. QUIPPER)

Penulis Irfan Kamil | Editor Kristian Erdianto JAKARTA, KOMPAS.com – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JJPI) Ubaid Matarji menilai, konsep pembelajaran jarak jauh masih sulit untuk diterapkan saat ini.

Menurut Ubaid, faktor sumber daya manusia maupun teknologi belum mendukung penerapan pembelajaran jarak jauh. “Semua tidak siap. Gurunya tidak siap karena tidak punya kompetensi di situ. Anaknya juga terkendala akses dan fasilitas. Sarana jaringan internet juga sangat terbatas. kalau pun ada, jaringannya buruk atau kuota tak terbeli,” kata Ubaid saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/7/2020).

Pembelajaran Jarak Jauh Akan Permanen Ubaid mengatakan, faktor teknologi dan situasi ekonomi saat ini membuat pembelajaran jarak jauh sulit diterapkan. Ia menyoroti banyaknya keluhan terkait kualitas jaringan internet di sejumlah daerah. Belum lagi situasi ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 akan membebani masyarakat jika harus mengeluarkan anggaran lebih untuk pendidikan.

Di sisi lain, menurut Ubaid, pemerintah juga harus menyiapkan kompetensi guru dan kurikulum baru. Ubaid menuturkan, harus ada peningkatan kompetensi guru untuk menjalankan model pembelajaran jarak jauh. Kemudian, pemerintah juga harus menyusun ulang kurikulum yang

sesuai model pembelajaran baru. “Harus ada penyesuaian dan reformulasi,” ucap Ubaid.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, metode pembelajaran jarak jauh nantinya bisa diterapkan permanen sesuai pandemi Covid-19. Menurut analisis Kemendikbud, pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar-mengajar akan menjadi hal yang mendasar. “Pembelajaran jarak jauh, ini akan menjadi permanen. Bukan pembelajaran jarak jauh pure saja, tapi hybrid model. Adaptasi teknologi itu pasti tidak akan kembali lagi,” kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Kamis (2/7/2020).

Nadiem mengatakan, pemanfaatan teknologi ini akan memberikan kesempatan bagi sekolah melakukan berbagai macam model kegiatan belajar. “Kesempatan kita untuk melakukan berbagai macam efisiensi dan teknologi dengan software dengan aplikasi dan memberikan kesempatan bagi guru-guru dan kepala sekolah dan murid-murid untuk melakukan berbagai macam hybrid model atau school learning management system, itu potensinya sangat besar,” tutur dia.

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/03/21293901/faktor-sdm-dan-teknologi-belum-mendukung-pembelajaran-jarak-jauh-di?page=all>

Pengamat: PPDB Langganan Ribut



Ilham Pratama Putra · 03 Juli 2020 16:12

Jakarta: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terus menjadi polemik di masyarakat. Kisruh PPDB seolah hanya peristiwa yang berulang dari tahun ke tahun, tanpa perbaikan.

PPDB ini selalu ribut, sudah langganan. Apalagi zonasi ini sudah diberlakukan lima tahun, sampai hari ini masih ribut,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, dalam diskusi daring, Jumat, 3 Juli 2020.

Menurut Ubaid, akar masalah bukan datang dari masyarakat. Namun, kebijakan pemerintah terkait PPDB tidak pernah matang dan menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

“Mau meratakan pendidikan, tapi di daerah terus buat sekolah favorit, sekolah model. Orang jadi berebut dan berjubel. Kalau daya tampung tidak ada jadinya marah,” lanjut Ubaid.

Bagi Ubaid, langkah yang disebut pemerataan pendidikan ialah menyamakan kualitas guru dan sekolah. Jadi, siswa maupun orang tua tidak dibutakan untuk mengantri ke sekolah favorit.

Ubaid menambahkan, DKI Jakarta justru malah membuat aturan seleksi usia. Ia mengakui, kebijakan ini bisa mengakomodasi siswa berusia tua masuk ke sekolah negeri, namun ternyata muncul masalah baru.

“Yang muda-muda kan jadinya tergeser. Ini kan diskriminatif layanan pendidikan. Gara-gara usia dia tidak dapat layanan pendidikan. Harusnya semua orang berhak mendapatkan layanan,” ungkap Ubaid.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/9K50zgBk-pengamat-ppdb-langganan-ribut>

Polemik batasan usia dalam PPDB 2020



Calon siswa yang usianya lebih tua diutamakan dalam PPDB berbasis sistem zonasi di DKI Jakarta.

Marselinus Gual Rabu, 08 Jul 2020 13:32 WIB

Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menuai polemik. Bagi calon siswa yang terlalu lama menganggur, Permendikbud itu menutup pintu untuk mengenyam bangku sekolah.

Dalam Permendikbud itu, seorang siswa dianggap tidak memenuhi syarat untuk bersekolah di SMA atau SMK jika usianya di atas 21 tahun pada 1 Juli tahun berjalan. Untuk SMP, batasannya berusia 15 tahun pada 1 Juli tahun berjalan.

Kekisruhan juga muncul lantaran Permendikbud itu ditafsirkan DKI Jakarta lewat penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021.

Disebutkan dalam SK tersebut, jika jumlah pendaftar PPDB jalur zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Artinya, jika persyaratannya lengkap, seorang calon siswa bisa saja tidak diterima pihak sekolah lantaran kurang tua.

Kebijakan itu diprotes kalangan orangtua siswa selama beberapa hari terakhir. Tak hanya itu, para orangtua juga berencana menggugat SK Disdik DKI Jakarta ke PTUN.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai gelombang protes terkait persyaratan PPDB muncul di DKI Jakarta akibat salah kaprah dalam

penerapan Permendikbud No 44/2019.

Jika namanya skema zonasi, menurut dia, seharusnya persyaratan usia tidak diikutsertakan. “Kalau dalam zonasi yang diukur adalah jarak, kok yang diukur adalah usia? Itu salah semua, salah kaprah,” kata Ubaid saat dihubungi Alinea.id, Minggu (5/7) malam.

Ubaid juga mempersoalkan jatah siswa zonasi DKI Jakarta yang hanya 40%. Menurut dia, kebijakan itu bertentangan dengan aturan Permendikbud yang menetapkan sebanyak 50% siswa yang diterima sekolah harus berbasis sistem zonasi.

Sumber: <https://www.alinea.id/infografis/polemik-batasan-usia-dalam-ppdb-2020-b1ZQj9v7p>

Siswa di Tangsel Belajar Online Tanpa Fasilitas, JPPI: Kualitas Turun Jauh



Sabtu, 18 Juli 2020 18:42

Penulis: Jaisy Rahman Tohir | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya

Upacara online SDN Pondok Cabe Ilir 02, Pamulang, Tangsel, diunduh dari Youtube Suaib Gledek, Senin (13/6/2020).

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memandang serius faktor ketidaksiapan pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur proses belajar online atau daring di tengah pandemi Covid-19.

Hal yang banyak terjadi di luar wilayah Pulau Jawa, namun mirisnya, terjadi pula di Tangerang Selatan (Tangsel) kota yang beririsan langsung dengan DKI Jakarta.

Di tengah pandemi Covid-19, metode online dianggap sebagai solusi.

Siswa tidak perlu datang ke sekolah sehingga tidak ada kerumunan yang berpotensi menjadi klaster penularan virus ganas itu.

TribunJakarta.com mendapati kasus tersebut di SDN Pondok Cabe Ilir 02, Pamulang, Tangsel.

Sebanyak 300 lebih dari 600-an siswa SDN tersebut tidak memiliki ponsel untuk belajar daring.

“Itu terjadi di Tangerang Selatan dan di daerah lain. Di luar Jawa mungkin persentasinya sampai 80%, anak-anak yang enggak punya akses gara-gara perangkat yang tidak tersedia,” ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji saat dihubungi TribunJakarta.com, Sabtu (18/7/2020).

Ubaid mengatakan, konsekuensi tidak adanya fasilitas belajar online itu bisa fatal. Kualitas pendidikan di Indonesia menjadi taruhannya.

Pandemi Covid-19 membuat ilmu yang seharusnya didapatkan secara merata oleh seluruh siswa, kini hanya mudah diakses oleh siswa dengan ekonomi tinggi.

Mereka bisa membeli gawai yang mendukung proses pembelajaran.

“Yang pertama tentang kualitas. Kalau ini dipaksakan pasti kualitas turun jauh. Dalam situasi normal saja kualitas pembelajaran kita di sekolah kan masih rendah, literasi kita rendah dibandingkan negara lain,” ujarnya.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya

Sumber: <https://jakarta.tribunnews.com/2020/07/18/siswa-di-tangsel-belajar-online-tanpa-fasilitas-jp-pi-kualitas-turun-jauh>

Sistem PJJ Dinilai Masih Miliki Banyak Masalah



Deni Muhtarudin

Sabtu, 18 Juli 2020 | 18:31 WIB

Seorang siswi MTs Negeri 12 Jakarta saat belajar secara online dari rumah di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (14/7/2020). Memasuki tahun ajaran baru 2020/2021, sejumlah sekolah melakukan metode belajar secara online bagi daerah yang masuk dalam zona merah. Metode belajar secara online dilakukan berbeda-beda tergantung kemampuan fasilitas yang dimiliki sekolah dan tingkat keamanan daerah dalam masa pandemi. Pemberlakuan sekolah dengan tatap muka bagi zona merah masih belum diberlakukan (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring di masa pandemi Covid-19 tampaknya belum sepenuhnya berjalan mulus. Ada banyak kendala yang dihadapi masyarakat ketika metode ini diterapkan, salah satunya infrastruktur pendidikan belum merata.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti, menilai bahwa banyak permasalahan yang ditemukan dalam kebijakan PJJ ini. Retno mengungkapkan bahwa tidak semua siswa mampu melakukan PJJ secara maksimal lantaran akses pendidikan yang dimiliki tidak sama. “Kami menemukan bahwa PJJ secara daring itu bias kelas, dalam PJJ secara daring ini karena hanya anak dari keluarga menengah ke atas yang terlayani,” ungkapnya dalam webinar Forum Monitor bertajuk ‘Kebijakan dan Tantangan Pendidikan di Masa Pandemi’, Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Sementara bagi siswa yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah atau masuk kategori tidak mampu, Retno mengatakan, mereka tidak memiliki peralatan daring, sehingga tidak sanggup membeli kuota internet dan mereka tidak terlayani dalam PJJ secara daring tersebut.

Selain itu, permasalahan lainnya dalam kebijakan PJJ adalah bias kota dan desa. Retno mengatakan, anak-anak di kota terbiasa ditunjang oleh akses internet yang memadai sehingga bisa menunjang pembelajaran mereka.

“Asalkan punya kuota. Sementara pembelajaran dari desa ini, kami melihat bias Jawa dan luar Jawa, karena sebagian anak-anak di luar Jawa itu mengalami kesulitan mendapatkan sinyal sehingga harus jalan kaki jauh,” katanya.

Kritik yang sama juga disampaikan Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, terkait kebijakan PJJ ini. Syaiful mengakui masih banyak orang tua siswa yang belum siap menyediakan sarana pendidikan secara daring bagi anaknya.

Huda juga mengakui infrastruktur pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya beradaptasi dengan cara daring. Sehingga yang terkena dampaknya bukan hanya sekolah saja, melainkan orang tua siswa. “Tapi jujur harus diakui yang kena dampak kesulitan ekonomi tidak hanya sekolah tetapi orang tua juga mengalami dampak itu. Itu akhirnya tidak terselesaikan,” ujarnya.

Huda pun mendorong Kemendikbud untuk melakukan relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar bisa dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan lainnya.

“Kami mendorong Kemendikbud relaksasi. Bisa tidak cukup kebijakan afirmasi lain di luar dana BOS untuk membeli kuota, pulsa, termasuk terakhir ada BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk sekolah negeri sekarang sekolah swasta mendapatkannya. Saya berharap Kemendikbud cepat ambil terobosan dan inisiatif terus turun kebawah, lalu putuskan hari itu juga jika ada kendala,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, menilai bahwa Kemendikbud tidak memiliki progres jelas menyikapi pelaksanaan pendidikan di masa pandemi. Bahkan Ubaid menuturkan, Mendikbud Nadiem Makarim tampak menghindari permasalahan di sektor pendidikan.

“Tampaknya Kemendikbud tidak ada progres sampai hari ini, kita teriak-teriak sudah sangat kencang ya, kemudian kami lihat tampaknya Pak Menteri menutup mata dan telinga. Tampaknya mungkin begitu karena memang dari hasil survei KPAI tadi juga mengindikasikan itu kan, bahwa ini ada kelas antara di Jawa dan wilayah luar Jawa,” ujarnya.

Terakhir, dalam webinar ini, Direktur GTK Pendidik Kementerian Agama Suyitno, menyarankan agar pemerintah melakukan desain ulang metode pembelajaran pedagogi agar bisa beradaptasi dan menyesuaikan kondisi saat ini.

Tentunya, Suyitno mengatakan, hal ini harus dibarengi dengan upaya pendampingan para tenaga pendidik untuk siap menerapkan e-learning atau pembelajaran secara daring.

“Adapun program yang telah dilaksanakan yaitu Program Induksi PPG, AKG Online, Program Parenting, Program penguatan IT. Lalu program yang sedang kami laksanakan adalah layanan SIMPATIKA, dan Guru Madrasah Berbagi,” katanya.[]

Deni Muhtarudin

Sumber: <https://akurat.co/news/id-1168736-read-sistem-pjj-dinilai-masih-miliki-banyak-masalah>

Marah Saat Siswa Titipannya Ditolak, Lurah Benda Baru Dicurigai Sudah Terima Uang



Kompas.com - 18/07/2020, 16:22

Ilustrasi(shutterstock)

Penulis Muhammad Isa Bustomi | Editor Jessi Carina JAKARTA, KOMPAS.com - Keributan yang dilakukan oleh Lurah Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Saidun karena kesal calon siswa yang dititipkannya ditolak pihak sekolah SMA 3 Tangsel, menjadi perhatian. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyayangkan perilaku Saidun yang memancing keributan dengan menendang sejumlah barang di atas meja ruang Kepala SMA Negeri 3.

Sikap anak buah Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany itu justru menimbulkan kecurigaan penerimaan uang dari para orangtua siswa titipan. Baca juga: Marah Siswa Titipannya Ditolak SMAN 3 Tangsel, Lurah Benda Baru Terancam Dicapot “Ya (penerimaan uang) itu diduga kuat. Kalau misal tidak ada tindakan semacam (nerima uang) itu dia kan tidak mungkin melakukan hal-hal semacam itu,” ujar Ubaid saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (18/7/2020).

Menurut Ubaid, perilaku Saidun itu telah melanggar kewenangan jabatan sebagai lurah. Padahal, kata Dia, sosok Saidun seharusnya dapat menjadi panutan oleh masyarakat untuk bisa mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, termasuk dalam dunia pendidikan. “Seharusnya dia memberikan tauladan tapi malah memberikan contoh buruk tata kelola pendidikan di Indonesia. Ini praktik penyalahgunaan wewenang,” kata Ubaid.

Kapolsek Pamulang Kopol Supiyanto sebelumnya membenarkan peristiwa keributan yang dilakukan oleh Saidun di ruang Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tangsel. Baca juga: Fakta Kasus Lurah

Titip Murid ke Sekolah: Langgar Kode Etik ASN hingga Dilaporkan ke Polisi Menurut dia, Saidun kesal terhadap pihak sekolah lantaran sejumlah siswa yang direkomendasi agar tidak diloloskan. Setidaknya, ada 5 nama dari 6 yang diajukan dan ditolak sekolah. Satu di antaranya telah diterima di sekolah lain.

Penulis : Muhammad Isa Bustomi
Editor : Jessi Carina

Sumber: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/18/16220591/marah-saat-siswa-titipannya-ditolak-lurah-benda-baru-dicurigai-sudah?page=all>

JPPI: Kemendikbud di Bawah Nadiem Tidak Ada Progres



Posted on Juli 18, 2020 Author Yana Comment(0)

Post Views: 26

Channel9.id – Jakarta. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, Kemendikbud di bawah kepemimpinan Mendikbud Nadiem Makarim, belum menunjukkan perkembangan yang bagus untuk mengatasi berbagai masalah dalam kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Tampaknya Kemendikbud tidak ada progres sampai hari ini, teriak-teriak sudah sangat kencang ya, kemudian tampaknya pak menteri menutup mata dan telinga. Tampaknya mungkin begitu, karena emang dari hasil survei KPAI tadi mengindikasikan, bahwa ini ada kelas ada di Jawa dan wilayah luar Jawa,” kata Ubaid dalam Webinar ‘Kebijakan dan Tantangan Pendidikan di Masa Pandemi’, Jumat (17/7).

Menurut Ubaid, Nadiem Makarim tampak menutup mata dan telinga melihat banyaknya protes mengalir dari akar rumput.

Selain itu, Mendikbud tampak bimbang dalam membuat kebijakan. Hal ini bisa dilihat saat kalangan mahasiswa ramai-ramai memprotes Nadiem ketika uang kuliah tunggal (UKT) naik saat pandemi. Nadiem pun menjadi trending di lini masa media sosial.

“Pada prinsipnya sih, apa namanya Mendikbud ini kelihatan galau ya? Apa ini kalau kita cermati di media sosial itu ada banyak agar yang sempat trending ya belakangan ini. Ya misalnya yang sempat trending itu salah urus kebijakan,” pungkasnya.

Sumber: <https://channel9.id/jppi-kemendikbud-di-bawah-nadiem-tidak-ada-progres/>

Ngamuk & Titip Siswa, JPPI : Lurah Benda Baru Harus Disanksi Tegas



Rachman Deniansyah | Senin, 20 Juli 2020 | 16:36



Dibaca : 540

TANGERANGNEWS.com-Dunia pendidikan Kota Tangerang Selatan kembali tercoreng oleh dugaan praktik pencaloan siswa pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Parahnya lagi, dugaan praktik pencaloan itu dilakukan oleh seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Lurah di wilayah Benda Baru, Pamulang, Tangsel.

Bahkan lantaran siswa titipannya itu tidak diterima, Lurah Benda Baru, Saidun, mengamuk. Karena perbuatannya, ia pun dilaporkan ke polisi.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai bahwa oknum ASN itu harus mendapat sanksi tegas.

“Ini insiden memalukan. Pak Lurah harus diberi sanksi tegas. Tidak hanya karena perbuatannya, tapi juga terkait dengan status dia sebagai pimpinan di tingkat kelurahan yang harusnya memberikan teladan,” kata Ubaid saat dikonfirmasi, Jumat (17/7/2020).

Tindakan yang dilakukan oleh oknum Lurah itu, dikhawatirkan dapat menjadi pintu masuk atas semua kasus siswa titipan yang melibatkan banyak pihak.

“Siswa titipin ini selalu ada ketika masa PPDB. Tapi tidak pernah diungkap ke publik. Fakta di

Tangsel ini kian menjelaskan ke publik bahwa siswa titipan itu memang selalu ada, tapi ditutup-tutupi. Kalau praktik ini dipelihara, maka rusaklah integritas sekolah. Rusak pula integritas masa depan pemimpin bangsa ini,” tegasnya.

Sementara itu, sebelumnya Kapolsek Pamulang Kopol Supiyanto menegaskan bahwa kasus hukum yang menyeret seorang pejabat ini akan tetap dilanjutkan.

Saidun pun diancam atas dugaan kasus tindakan kekerasan memaksa orang untuk berbuat atau tidak berbuat dan pengrusakan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 (1) KUHP dan 406 KUHP.

“Lanjut, lanjut! lanjut lagi proses. Ini kan bukan delik aduan loh, tapi pidana murni. Yang penting saya profesional melaksanakan penyelidikan dan penyidikan titik sesuai ketentuan yang ada,” tegasnya.**(RMI/HRU)**

Sumber: <https://tangerangnews.com/tangsel/read/32102/Ngamuk-Titip-Siswa-JPPI-Lurah-Benda-Baru-Harus-Disanksi-Tegas>

Kiprah Tanoto-Sampoerna Jika Disandingkan dengan NU-Muhammadiyah



Hamsah umar - Pendidikan

Kamis, 23 Juli 2020 15:01 PM

Ilustrasi NU

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation menyebutkan bahwa mereka telah diajak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), untuk menjalankan Program Organisasi Penggerak (POP) dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Begitu juga dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dan Muhammadiyah. Namun mereka memutuskan keluar dari program tersebut. Alasannya adalah proses seleksi yang tidak jelas, salah satunya ketika verifikasi di lapangan.

Di mana dari 156 organisasi masyarakat (ormas) yang lolos, ketika dilakukan verifikasi lapangan, tidak ada pengurangan jumlah ormas. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan publik apakah benar lembaga independen yang melakukan verifikasi benar turun ke lapangan atau tidak.

Kembali ke Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation, jika dibandingkan dengan NU dan Muhammadiyah, tentunya mereka adalah lembaga baru. Tanoto sendiri dibangun pada 1981 dan Sampoerna Foundation didirikan pada 2001.

Sedangkan NU telah berdiri pada 1926 dan Muhammadiyah pada 1912. Keduanya lahir jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Di mana peran keduanya kala itu adalah membantu masyarakat

buta huruf agar lebih berpendidikan sebagai ormas pendidikan dan keagamaan.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji pun menyampaikan bahwa kedua lembaga baru tersebut masih begitu belia, jika bicara soal pendidikan di Indonesia pun, dikatakannya kalau mereka masih belum paham betul. Namun, berbeda dengan NU dan Muhammadiyah.

“Dia pemain baru yang mungkin tidak punya sejarah panjang soal pendidikan Indonesia, pendidikan itu kan sangat erat dengan akar budaya, Sampoerna dan Tanoto tau apa soal sejarah kebudayaan bangsa Indonesia seperti apa, NU dan Muhammadiyah lebih tau. di mana-mana pasti ada sekolah Muhammadiyah, di semua daerah pasti ada pesantren dan madrasah NU,” ungkapnya kepada JawaPos.com, Kamis (23/7).

Dia pun mempertanyakan alasan Kemendikbud mengajak dua pihak tersebut untuk menjalankan POP. Pasalnya, rekam jejaknya masih kalah jauh dengan dua lembaga terdahulunya. Bahkan, dikhawatirkan akan mengakibatkan bias (ketidakjelasan).

“Ngomongin pendidikan ngajak Tanoto sama Sampoerna, pendidikannya (pengajaran) bias kota, bias barat, bias kelas. Sementara NU dan Muhammadiyah ini kan pendidikan untuk semua kalangan, rakyat belajar di situ, orang di kampung belajar di situ, orang kota juga. Kalau Tanoto sama Sampoerna ini orang yang baru ngomong pendidikan kok dipercaya, ngga logis itu,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Tanoto Foundation dipilih oleh Kemendikbud untuk menjadi salah satu pelaksana POP. Mereka pun membiayai sendiri Program PINTAR Penggerak ini dengan nilai investasi lebih dari Rp 50 miliar untuk periode dua tahun (2020-2022).

Sedangkan, Sampoerna Foundation sendiri mengakui bahwa secara terbuka telah dipilih oleh Kemendikbud menjalankan program tersebut. Mereka juga telah menjalankan program pendidikan untuk peningkatan akses dan kualitas sekolah dan guru di Indonesia. Dengan menjangkau lebih dari 92.000 guru, 155.000 siswa, 855 sekolah dan 40 madrasah di 57 daerah dan 27 provinsi di Indonesia.

Kemudian, LP Ma'arif NU memiliki 6 ribu lebih lembaga pendidikan dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Saat ini secara mandiri sedang fokus menangani pelatihan Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah sebanyak 15 persen dari 45.000 sekolah atau madrasah di bawah naungan LP Ma'arif NU PBNU, dan satuan pendidikan formal NU berbasis pondok.

Lalu, Muhammadiyah sendiri memiliki 30.000 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Persyarikatan Muhammadiyah pun sudah banyak membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka. **(jpc/fajar).**

Sumber: <https://fajar.co.id/2020/07/23/kiprah-tanoto-sampoerna-jika-disandingkan-dengan-nu-muhammadiyah/>

Pengamat Pendidikan: Kisruh Program Organisasi Penggerak, Nadiem Tidak Mengerti Sejarah Pendidikan



Jumat, 24 Juli 2020 15:35 WIB

Penulis: Fahdi Fahlevi

Editor: Johnson Simanjuntak

Rina Ayu/Tribunnews.com

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji (berbaju batik) dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan 2019 di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat pendidikan Ubaid Matriaji menilai polemik yang terjadi pada Program Organisasi Penggerak terjadi karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tidak mengerti nilai sejarah pendidikan di Indonesia.

Polemik soal Program Organisasi Penggerak mencuat setelah NU, Muhammadiyah, dan PGRI keluar karena merasa ada kejanggalan dalam program ini.

“Mas menteri enggak tahu sejarah pendidikan. Dia memang enggak tahu. Tahunya sejarah pendidikan yang dia lihat keren di Sampoerna, di Tanoto. Dia enggak tahu bagaimana Muhammadiyah bangun sekolah di pelosok yang tidak ada listrik sampai hari ini. Dia enggak tahu orang-orang NU dakwah di pedalaman,” kata Ubaid kepada Tribunnews.com, Jumat (24/7/2020).

Menurut Ubaid, Nadiem seharusnya melibatkan sejumlah organisasi yang selama konsen membangun pendidikan di tanah air.

“Yang ngajarin pendidikan dan literasi dari sebelum Indonesia merdeka adalah NU dan Muhammadiyah. Nah kalau misalnya keduanya tidak jadi bagian organisasi penggerak, ini menjadi catatan buruk sejarah buruk pendidikan Indonesia,” tambah Ubaid.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) ini menilai seharusnya publik juga dilibatkan dalam proses verifikasi. Langkah ini dilakukan agar Program Organisasi Penggerak akuntabel dan transparan dalam pemilihan organisasi penerima bantuan.

Penggunaan anggaran negara yang besar menurut Ubaid perlu melibatkan publik untuk mengawasi.

“Menghabiskan dana besar tapi publik tidak dilibatkan. Tiba-tiba kita disuguhkan pengumuman yang lolos. Apakah lembaganya bagus atau tidak. Saya pikir penilaian masyarakat oenting dalam hal ini,” kata Ubaid.

Ubaid berharap Kemendikbud memperbaiki tata kelola serta melibatkan organisasi yang berkecimpung dalam dunia pendidikan pada proses uji kelayakan dan kepatutan.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak

Sumber: <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/24/pengamat-pendidikan-kisruh-program-organisasi-penggerak-nadiem-tidak-mengerti-sejarah-pendidikan>

Pemerintah Berencana Buka Sekolah di Luar Zona Hijau, Pengamat: Kebijakan Fatal



Kompas.com - 27/07/2020, 17:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JJPI) Ubaid Matarji menyoroti kebijakan pemerintah yang berniat membuka sekolah di luar zona hijau. Menurut Ubaid, pemerintah sedang kebingungan menyiasati pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Membuka sekolah dinilai menjadi cara yang mudah untuk dilakukan, tetapi fatal karena rawan penyebaran Covid-19.

“Tampaknya memang kebingungan dan tidak tahu harus bagaimana, cara yang mudah ya dibuka saja, tetapi ini menurut saya kebijakan yang fatal. Karena sekarang saja sudah banyak sekolah dan juga pesantren yang baru buka lalu Covid-19 menyebar di sana,” kata Ubaid saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/7/2020)

Oleh karena itu, kata Ubaid, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seharusnya mengeluarkan kurikulum pandemi. “Semua kalangan mendesak adanya kurikulum pandemi, tetapi pemerintah bergeming. Kemendikbud jangan terus tutup mata dan telinga, saatnya mendengarkan aspirasi warga,” kata Ubaid.

Menurut Ubaid, pemerintah jangan terburu-buru untuk membuka sekolah secara tatap muka. Sebab, pembukaan sekolah tatap muka dinilai dapat menimbulkan kerumunan yang berbahaya terhadap penyebaran Covid-19. “Harusnya yang belum hijau jangan buru-buru dibuka. Pastikan situasinya aman. Karena kerumunan di sekolah itu sangat rentan terhadap penyebaran virus,” ujar Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia ini. “Pembelajaran jarak jauh harus dimaksimalkan dengan reformulasi kurikulum saat pandemi,” lanjut dia.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebutkan, pemerintah akan memberi izin penyelenggaraan sekolah tatap muka di luar zona hijau Covid-19. Baca juga: Survei Cyrus Network: 54,1 Persen Responden Sangat Setuju Sekolah Dibuka Kembali Menurut Doni, pemberian izin ini akan segera diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan langkah-langkah. Dan mungkin tidak lama lagi akan diumumkan daerah-daerah yang selain zona hijau itu juga akan diberikan kesempatan melakukan kegiatan belajar tatap muka,” kata Doni dalam jumpa pers usai rapat dengan Presiden Jokowi, Senin (27/7/2020).

Namun, Doni menegaskan bahwa sekolah tatap muka di luar zona hijau ini harus digelar secara terbatas. Artinya, jumlah siswa yang hadir dalam satu kelas juga dibatasi. Durasi belajar di kelas juga dipersingkat. Doni menyebutkan, belajar jarak jauh yang diterapkan saat ini memang efektif untuk mencegah penularan Covid-19. Di sisi lain, banyak siswa di daerah yang kesulitan dalam belajar jarak jauh karena sulitnya sinyal internet.

Penulis : Irfan Kamil
Editor : Icha Rastika

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/27/17214861/pemerintah-berencana-buka-sekolah-di-luar-zona-hijau-pengamat-kebijakan?page=all>

Kritik Cara Nadiem Makarim Minta Maaf, Pengamat: Harusnya Diskusi Langsung, Bukan Lewat Online



[Khairunnisa Fauzatul A](#)

29 Juli 2020, 20:42 WIB

Tangkapan layar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, saat membuka acara PKN Tingkat II Angkatan XV Tahun 2020 yang digelar secara daring, Selasa 28 Juli 2020 /Iyud Walha di// dok humas kemendikbud

PR CIREBON - Belum lama ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim minta maaf terhadap tiga organisasi besar yang mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP), sekaligus meminta agar ketiga organisasi itu dapat kembali untuk memberi bimbingan dalam pelaksanaan POP.

“Dengan penuh rendah hati saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna,” ungkap Nadiem pada Jum’at, 24 Juli 2020.

Namun rupanya, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengomentari cara Nadiem saat meminta maaf secara online dengan pihak terkait adalah tidak tepat.

Pasalnya, minta maaf yang baik itu seharusnya dengan diskusi [langsung](#) untuk mencari jalan tengah terbaik, bukan minta maaf secara online.

“Minta maaf itu ya harus diskusi dan ngobrol santai, duduk bersama mencari win win solution. Bukan minta maaf secara online lagi,” kata Ubaid.

Lebih lanjut, Ubaid juga menilai misi Program Organisasi Penggerak (POP) diusung Menteri Pendidikan Nadiem Makarim kurang tepat.

Bahkan, bila merujuk video klarifikasi Nadiem terkait anggaran POP yang diunggah Selasa malam, 28 Juli 2020, diketahui sejak awal niat Kemendikbud bermitra dengan para penggerak pendidikan hanyalah untuk menemukan inovasi baru skala nasional.

Dalam arti lain, Nadiem juga menyebut misi program itu sebagai cara mencari jurus dan pola terbaik untuk mendidik penerus bangsa ini.

Masa tiga tahun hanya mencari pola? Terus kerja pemerataan mutu dan peningkatan kualitas sekolahnya kapan?,” tegas Ubaid dalam keterangan tertulis, seperti yang dikutip pada Rabu, 29 Juli 2020.

Dengan demikian, kerja sama dengan swasta itu seharusnya baik untuk pemerataan mutu, bukan hanya untuk mencari pola.

“Problem pendidikan kita butuh solusi yang cepat dan tepat. Jangan telat mikir dan sembunyi dari tuntutan publik,” pungkas Ubaid.

Sumber: <https://cirebon.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-04640928/kritik-cara-nadiem-makarim-minta-maaf-pengamat-harusnya-diskusi-langsung-bukan-lewat-online>

Sekolah anak: Rencana pemerintah buka sekolah di zona kuning saat pandemi Covid-19, dilema ‘desakan orang tua’ dan tudingan ‘bermain api’



- Ayomi Amindoni
- Wartawan BBC News Indonesia 29 Juli 2020

Pihak sekolah di Konawe, Sulawesi Tenggara, terpaksa menerapkan pembelajaran dengan tiga kali pertemuan tatap muka di sekolah dalam sepekan karena terbatasnya jaringan telekomunikasi untuk penerapan pembelajaran jarak jauh secara daring guna mencegah penyebaran COVID-19

Rencana pemerintah untuk membuka kembali sekolah di zona kuning disebut pengamat pendidikan sebagai “bermain api”, sebab dianggap terlalu berisiko pada keselamatan siswa. Apalagi masih banyak sekolah di zona hijau belum menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Contoh kasus terkini adalah dua staf sekolah positif Covid-19 di Pariaman, Sumatera Barat. Peristiwa itu membuat pemerintah setempat segera menutup kegiatan belajar mengajar tatap muka untuk kedua kalinya dan beralih kembali ke kelas online.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ainun Naim, mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi agar sekolah tatap muka di luar zona hijau—terutama zona kuning—bisa digelar dengan “kriteria yang lebih ketat” dan mengutamakan “kesehatan dan keselamatan”.

Rencana pemerintah tentang pembelajaran secara tatap muka di daerah zona kuning atau risiko rendah virus corona dikemukakan di tengah banyaknya desakan dari orang tua siswa agar pembelajaran tatap muka dapat dilakukan di luar zona hijau.

Pada 16 Juni lalu, Kemendikbud memutuskan untuk menggelar kembali sekolah tatap muka di zona hijau mulai 13 Juli.

Pengamat pendidikan, Itje Chodidjah, memandang rencana pembukaan sekolah di luar zona hijau terlalu berisiko pada keselamatan anak-anak. Apalagi, zona kuning memiliki risiko penularan lebih besar ketimbang zona hijau.

“Kita tidak bisa bermain api kalau akan membuka sekolah di zona apa pun, sekarang zona hijau sudah tidak mengikuti protokol kesehatan, apalagi di zona yang masih merah atau kuning,” ujar Itje kepada BBC News Indonesia, Selasa (28/07).

Merujuk dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sejumlah sekolah di 79 kabupaten/kota belum menyelaraskan kegiatan belajar tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat.

Adapun status zona suatu daerah ditetapkan oleh Satuan Tugas Covid-19, merujuk pada jumlah kasus dan level risiko penularan virus corona di daerah tersebut.

Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53567092>

Sekolah Tanpa Internet Tak Masuk

Program Laptop Rp17 T Nadiem



CNN Indonesia

Kamis, 29 Jul 2021 14:54 WIB

Ilustrasi penggunaan laptop di sekolah. (Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengatakan bantuan laptop dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada program Digitalisasi Sekolah bernilai Rp17 triliun diberikan untuk sekolah yang memiliki jaringan internet.”Diutamakan untuk sekolah yang sudah [ada] akses listrik dan internet lebih dulu,” kata Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek Samsuri kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/7).

Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim menganggarkan Rp17,42 triliun untuk bantuan laptop dan perangkat TIK kepada sekolah-sekolah di penjuru daerah. Bantuan yang diberikan berupa laptop, access point, konektor, layar proyektor, speaker aktif hingga internet router.

Untuk sekolah yang berada di area blankspot atau wilayah yang belum terakses listrik dan internet, Samsuri mengatakan pihaknya memberi upaya pendampingan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

“Ada program pendampingan melalui LPMP dan penyediaan buku. Juga ada program Kampus Mengajar,” tuturnya. Sebagai informasi, Kampus Mengajar adalah program yang diinisiasi Kemendikbudristek dengan mengajak mahasiswa mengabdikan diri mengajar di sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). Seiring program tersebut, Samsuri

juga mengaku terus berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong percepatan penyaluran internet di sekolah pada wilayah blankspot. Secara terpisah, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek Jumeri memastikan penyaluran paket TIK ke sekolah melalui program Digitalisasi Sekolah tepat sasaran.

“Kami punya data lengkap sekolah yang punya dan tidak punya TIK,” tuturnya, namun tidak merinci lebih lanjut soal klaim datanya tersebut. Jika mengacu pada catatan Pusat Data dan Informasi Kemendikbudristek per 2 Juni 2020, 8.522 sekolah belum teralirkan listrik dan 45.159 sekolah tidak memiliki akses internet. Di pihak lain, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji khawatir program bagi-bagi laptop berujung sia-sia lantaran ketidaksiapan sumber daya manusia (SDM). “Menurut saya [program digitalisasi sekolah] ini tidak mendesak. Karena kalau kita berkaca pada program-program sebelumnya, ada bantuan lab bahasa, lab komputer, coba lihat, dipantau di sekolah, dipakai enggak?” sindirnya, ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (29/7). Menurutnya, pemerintah harus mendorong transformasi pendidikan secara menyeluruh berupa keterbukaan informasi pengelolaan pendidikan lewat digitalisasi. Contohnya, informasi pengelolaan pendidikan masih terpusat di pimpinan sekolah sehingga akses informasi untuk warga sekolah lainnya minim. “Kalau program digitalisasi di situ hanya mengubah cara [belajar] saja tapi tidak merubah siswa bisa akses informasi, gimana rencana anggaran sekolah bisa dilakukan dengan partisipatif, orang tua, komite, masyarakat bisa awasi melalui platform digital itu, lalu buat apa?,” cetus Ubaid.

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210729133621-20-673770/sekolah-tanpa-internet-tak-masuk-program-laptop-rp17-t-nadiem>

Dari Program Organisasi Penggerak Kini Merdeka Belajar Andalan Nadiem Makarim dan Kemendikbud Disoal



Jumat, 31 Juli 2020 23:58

Editor: Arif Fuddin Usman

ILC TV ONE

Mendikbud, Nadiem Makarim saat tampil sebagai narasumber di ILC TV One. Dibahas di ILC TV One tadi malam, KPK didesak turun tangan, mengenal POP buatan Nadiem Makarim yang bikin Muhammadiyah dan NU mundur.

TRIBUN-TIMUR.COM - Kebijakan program «Merdeka Belajar» yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ternyata disoal.

Padahal sebelumnya, Program Organisasi Penggerak (POP), andalan Mendikbud

Nadiem Makarim juga tuai banyak protes

Oleh publik, terutama praktisi pendidikan, kebijakan kementerian yang dipimpin oleh mantan bos Gojek, Nadiem Makarim tersebut dinilai berpotensi akan menguntungkan entitas pendidikan swasta tertentu.

Sebab, frasa “Merdeka Belajar” saat ini sudah terdaftar sebagai nama dari sebuah merek dagang milik PT Sekolah Cikal di Kementerian Hukum dan HAM.

Mendikbud Nadiem Makarim pun disebut bisa saja dianggap telah mempromosikan produk swasta itu secara «gratis».

“Mendikbud dijerumuskan swasta pemilik merek untuk ‘menjadi brand ambassador’, enak sekali swasta pemilik merek punya duta besar menteri dan gratis,” kata Ahmad Rizali pada, Kamis (30/7/2020), dikutip dari laman Kompas.com berjudul Polemik Nama Merdeka Belajar, Nadiem Dinilai Dapat Promosikan Merek Swasta.

Lebih lanjut, Ahmad menganalogikan Merdeka Belajar dengan sebuah pantai.

Menurut dia, walaupun sama-sama bisa digunakan, namun ada yang diuntungkan jika merek itu bukan milik publik.

Sementara itu Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JJPI) Ubaid Matarji menilai ada konflik kepentingan dalam narasi Merdeka Belajar.

Sebab, kata dia, pemilik merek dagang tersebut adalah konsultan dari Kemendikbud.

“Ini jelas terjadi konflik kepentingan karena pihak swasta pemilik merek dagang itu adalah konsultan kemendikbud,” kata Ubaid.

Bahkan Ubaid menilai, narasi tersebut merupakan bentuk promosi negara terhadap produk pendidikan swasta.

Menurut dia, hal itu dapat berbahaya karena dilakukan oleh negara.

Sumber: <https://makassar.tribunnews.com/2020/07/31/dari-program-organisasi-penggerak-kini-merdeka-belajar-andalan-nadiem-makarim-dan-kemendikbud-disoal>

Polemik Nama Merdeka Belajar, Nadiem Dinilai Dapat Promosikan Merek Swasta

Penulis Irfan Kamil | Editor Bayu Galih

Kompas.com - 30/07/2020, 13:38 WIB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat meninjau persiapan SMAN 4 Kota Sukabumi untuk pembelajaran tatap muka di Sekolah, Rabu (08/07/2020). (Dok. Disdik Jabar)

JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan Merdeka Belajar yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai polemik di masyarakat, terutama di kalangan praktisi pendidikan. Kebijakan tersebut dinilai dapat menguntungkan entitas pendidikan swasta tertentu. Sebab, Merdeka Belajar saat ini sudah terdaftar sebagai merek dagang milik PT Sekolah Cikal di Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan, pengamat pendidikan Ahmad Rizali menilai, Mendikbud Nadiem Makarim bisa saja dianggap mempromosikan produk swasta itu secara gratis. “Mendikbud dijerumuskan swasta pemilik merek untuk ‘menjadi brand ambassador’, enak sekali swasta pemilik merek punya duta besar menteri dan gratis,” kata Ahmad Rizali saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

Lebih lanjut, Ahmad menganalogikan Merdeka Belajar dengan sebuah pantai. Menurut dia, walaupun sama-sama bisa digunakan, namun ada yang diuntungkan jika merek itu bukan milik publik. “Karena seperti pemilik pantai yang memberi izin kepada pemakai, sangat beda dengan pantai milik publik,” ujar Ahmad. Sementara itu Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JJPI) Ubaid Matarji menilai ada konflik kepentingan dalam narasi Merdeka Belajar. Sebab, kata dia, pemilik merek dagang tersebut adalah konsultan dari Kemendikbud. “Ini jelas terjadi konflik kepentingan karena pihak swasta pemilik merek dagang itu adalah konsultan kemendikbud,” kata Ubaid saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

Ia menilai, narasi tersebut merupakan bentuk promosi negara terhadap produk pendidikan swasta. Menurut dia, hal itu dapat berbahaya karena dilakukan oleh negara. Kemudian, narasi yang tersebar di seluruh Indonesia ini menguntungkan pihak swasta. “Ini promosi produk swasta secara gratis ke seluruh Indonesia, apalagi ini dilakukan oleh negara. Ini kesalahan fatal,” ujar Ubaid. “Pihak swasta tidak perlu promosi dengan mengeluarkan uang banyak, biar negara saja yang melakukan dengan uang rakyat.

Bahaya ini,” kata dia. Baca juga: Komisi X DPR Beri Masukan Program Merdeka Belajar, Ini Tanggapan Nadiem Makarim DPR sebelumnya telah menyatakan akan meminta penjelasan terkait kebijakan Merdeka Belajar yang menjadi polemik di masyarakat. “Agenda kita mengundang Mas Nadiem adalah meng-clear-kan menyangkut narasi Merdeka Belajar yang kemarin sempat diprotes publik,” kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda saat dihubungi Kompas.com (29/7/2020).

“Karena itu sudah menjadi merek dagang entitas pendidikan swasta tertentu,” ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemendikbud Evy Mulyani membantah bahwa program Merdeka Belajar untuk menguntungkan pihak tertentu. Baca juga: Terkait Slogan Merdeka Belajar, Ini Tanggapan Kemendikbud Evy mengatakan, Merdeka Belajar yang digunakan untuk mengampanyekan program dan kebijakan Kemendikbud terinspirasi dari ajaran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara. Filosofi Merdeka Belajar mengandung makna yang mendalam, yakni mengajarkan semangat dan cara mendidik anak untuk menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirnya, dan merdeka tenaga. “Filosofi inilah yang menjadi akar Merdeka Belajar yang dijalankan Kemendikbud saat ini,” kata Evy dalam konferensi daring, Senin (13/7/2020

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/13380921/polemik-nama-merdeka-belajar-na-diem-dinilai-dapat-promosikan-merek-swasta?page=all>

Nadiem Hanya Cerdas Di Gojek, 'Tak Becus' Urus Kemendikbud



Triwi diyanti Prasetyo 3 Agustus 2020, 09:32 WIB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.*nett

RINGTIMES BALI - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengungkapkan kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim yang dinilai hanya cerdas dibidang usaha transportasi daring Gojek, namun tidak di Kementerian yang dipimpinnya.

Ujang juga menilai kinerja Nadiem tidak beres atas carut marut pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang merugikan siswa dan orang tua siswa.

“Jika Kementerian tidak dipegang oleh ahlinya, maka tunggulah kehancurannya,” kata Ujang seperti dikutip Ringtimesbali.com dari laman RRI.co.id di Jakarta, Senin (3/8/2020).

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini mendesak agar Nadiem dicopot dari jabatannya, lantaran tidak becus untuk memerdekakan dan mencerdaskan anak bangsa.”Kaarena itu tak aneh dan tak heran, jika Kemendikbud banyak yang tak jelas kebijakannya,” tegasnya.

Diketahui, kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilakukan melalui daring, atau online, dirasa memberatkan orang tua siswa.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menegaskan, banyak masyarakat yang kewalahan menyediakan akses internet bagi anak-anaknya.

Ubaid mengungkapkan, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, kuota internet masih menjadi barang yang mahal. Masyarakat masih banyak yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan akses internet untuk kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.***

Editor: Triwidiyanti Prasetyo

Sumber: <https://ringtimesbali.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-28648356/nadiem-hanya-cerdas>



Pemerintah Harus Pastikan Kurikulum Darurat Bisa Dijalankan di Sekolah

Selasa, 11 Agustus 2020 - 19:55 WIB oleh Neneng Zubaidah

Kurikulum darurat yang diterbitkan pemerintah menjadi jawaban karena bisa mengurangi beban selama pembelajaran di masa pandemi virus Corona. Foto/Illustrasi/SINDOnews

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan, pada dasarnya dia mengapresiasi tentang pentingnya kurikulum darurat yang diberlakukan di masa pandemi ini yang telah dikeluarkan Kemendikbud

Namun lebih dari itu katanya, JPPI ingin memastikan bagaimana supaya kurikulum darurat yang berlaku pada kondisi khusus ini bisa dijalankan di sekolah. Hal ini ujarnya, yang belum terlihat sama sekali.

“Kalau tidak ada upaya untuk itu. Sayang sekali jika dibuat lalu disia-siakan,” kata Ubaid ketika dihubungi SINDOnews, Selasa (11/8/2020).

Ubaid menjelaskan, untuk memastikan kurikulum darurat ini bisa dijalankan maka berbagai strategi harus dilakukan. Dalam situasi pandemi seperti ini, jelasnya, pemerintah harus bisa membuat terobosan.

“Itu yang perlu dijelaskan oleh pemerintah ke publik. Supaya masyarakat juga tahu dan bisa terlibat dalam pengawasan,” terangnya.

Ubaid berharap, adanya koordinasi yang kuat antara instansi pemerintah dalam implementasi kurikulum darurat ini. Selain itu juga harus ada strategi pemberian pemahaman ke dinas pendidikan dan sekolah. Guru juga harus dikuatkan kompetensinya sehingga bisa mengimplementasikan kurikulum dalam PJJ.

“Itu yang diabaikan pemerintah biasanya. Sehingga kita khawatir kalau kurikulum itu dibuat lalu tidak ada yang pakai,” ujarnya.

Sumber: <https://edukasi.sindonews.com/read/130304/144/pemerintah-harus-pastikan-kurikulum-darurat-bisa-dijalankan-di-sekolah-1597147711>

Kisah Anak Sekolah di Dusun Terpencil NTB Belajar Lewat HT



Reporter: Alfian Putra Abdi tirto.id - 16 Agu 2020 12:00 WIB

Siswa di dusun terpencil di Sumbawa, NTB tak memiliki akses ke internet, jadi mereka belajar jarak jauh memakai HT.

tirto.id - Masyarakat Dusun Punik, Desa Batudulang, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) perlu berjalan kaki menanjak sejauh 500 meter menuju pegunungan hanya untuk mendapatkan sinyal internet. Itu pun berjudi, sebab tak melulu sinyal bagus.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebut pada 2018 lalu masih ada 31,8 persen penduduk di NTB yang belum menggunakan internet. Dusun Punik berada di ketinggian 840 mdpl, dengan topografi cekung akibat berada di antara perbukitan. Kurang lebih 500 KK mendiami dusun tersebut. Butuh waktu 1 jam 30 menit atau sekitar 35 kilometer dari pusat Kota Sumbawa untuk tiba di sana melalui jalur darat, dengan jalan yang tak semulus aspal perkotaan. Beruntung listrik sudah masuk ke tempat ini pada Agustus 2019.

PLN Unit Induk Wilayah NTB membangun jaringan di sana. Karena listrik pula para murid SDN Punik dan SMPN 3 Satap masih tetap bisa belajar meski tak di sekolah karena Corona. Di tengah keterbatasan internet, mereka belajar dengan cara yang tak lazim: menggunakan handie talkie (HT). Pegiat pendidikan sekaligus Dosen FKIP Universitas Samawa (Unsa) Rusdianto AR adalah inisiator konsep pembelajaran yang disebut smart learning yang mengandalkan jejaring sesama anggota Radio Amatir Penduduk Indonesia (RAPI) itu. Ide ini diperoleh setelah ia berdiskusi dengan dinas pendidikan setempat. “Kebetulan saya, para guru, dan kepala sekolah di sana satu grup di RAPI. Kami sharing seperti itu [menggagas belajar dengan HT],” ujar Rusdi kepada reporter Tirto, Senin (10/8/2020).

Metode belajar dengan HT lebih murah ketimbang pakai internet. Warga Dusun Punik yang mayoritas petani kopi hanya perlu mengisi ulang baterai HT sampai penuh. HT pun siap dipakai selama tiga hari. Sementara untuk pengadaan HT-nya sendiri, warga patungan, dan Rusdi yang membelinya.

Sebenarnya ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp800 ribu untuk SD dan Rp 1,2 juta untuk SMP yang bisa dipakai. Namun karena lama cair, uang BOS tak dipakai. Rusdi memborong HT bopeng buatan Cina dari toko jual beli daring yang masing-masing dijual dengan harga Rp105 ribu. Sekarang sudah ada 108 HT yang dipakai 60 siswa dan 8 guru tingkat SD; dan 35 siswa dan 5 guru tingkat SMP. Terdapat 16 saluran dalam frekuensi ultra tinggi atau Ultra High Frequency (UHF).

Siswa kelas 1 akan berada di saluran satu, siswa kelas 2 di saluran dua, begitu seterusnya sampai siswa kelas 9. Sisa saluran yang tersedia akan digunakan untuk kegiatan guru dan lain-lain. Tidak melulu untuk pembelajaran, melainkan bisa dimanfaatkan warga untuk “menginformasikan keluarga yang berada di kebun juga.” Ada kelebihan, ada pula kekurangan. HT tidak bisa digunakan di luar dusun. Cakupan radio hanya bisa menjangkau jarak kurang lebih 5 kilometer. Menurut Rusdi, metode belajar dengan HT akan terus digunakan dan selama “belum ada kebijakan yang melarangnya.”

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai inisiatif Rusdi dan kawan-kawan di Dusun Punik dapat menjadi percontohan bagi daerah lain yang mengalami kesulitan pembelajaran selama COVID-19. Selain memberdayakan masyarakat sekitar, menurut Ubaid, perlu juga adanya dukungan pemerintah dalam kelenturan memanfaatkan dana BOS agar “menyesuaikan dengan kebutuhan lokal.” Namun, pemerintah dan pihak sekolah harus berkoordinasi lebih lanjut sehingga dana BOS bisa dibelanjakan dengan benar. “Pihak sekolah juga harus memahami pengelolaannya. BOS ini masih jadi barang misteri di sekolah karena tidak dikelola secara transparan dan akuntabel,” ujarnya kepada reporter Tirto, Senin.

Reporter: Alfian Putra Abdi Penulis: Alfian Putra Abdi Editor: Maya Saputri

Sumber: <https://tirto.id/kisah-anak-sekolah-di-dusun-terpencil-ntb-belajar-lewat-ht-fXad>

Kemendikbud Diminta Tidak Tindaklanjuti Usulan Pendidikan Militer untuk Mahasiswa



Rabu, 19 Agustus 2020 16:27 WIB

Penulis: Fahdi Fahlevi

Editor: Johnson Simanjuntak

Ratusan anggota Resimen Mahasiswa mengikuti pawai Semarak Bela Negara di Kota Yogyakarta, Rabu (28/2/2018). Dalam pawai yang juga diikuti oleh institusi TNI-Polri tersebut diadakan dalam rangka memperingati serangan umum 1 Maret 1949. TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matriaji menilai wacana pemberian pendidikan militer satu semester untuk mahasiswa tidak memiliki relevansi.

Menurutnya sebaiknya pendidikan militer cukup diberikan di akademi militer, dan bukan di perguruan tinggi umum. “Itu rencana ngawur dan tidak berdasar. Memang relevansinya apa? Pendidikan militer ya di akademi militer,” ujar Ubaid kepada Tribunnews.com, Rabu (19/8/2020).

Ubaid menilai yang wajib diajarkan di perguruan tinggi umum adalah pengembangan nalar kritis. Menurutnya pendidikan militer di perguruan tinggi umum belum dibutuhkan karena tidak memiliki relevansi.

“Kalau di kampus-kampus umum ya yang perlu dikembangkan adalah penguatan nalar kritis dan proses-proses perdebatan yang dialogis,” kata Ubaid.

Dirinya meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menindaklanjuti usulan yang

dilontarkan Wamenhan Wahyu Trenggono tersebut.

“Enggak perlu (ditindaklanjuti) karena sama sekali tidak ada relevansinya,” pungkas Ubaid.

Seperti diketahui, Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Trenggono mengatakan rencananya mahasiswa bisa ikut pendidikan militer selama satu semester. Kemenhan dan Kemendikbud sedang menjajaki agar para mahasiswa bisa ikut Program Bela Negara.

Nantinya, kata Trenggono, hasil dari pendidikan tersebut akan dimasukkan ke dalam Satuan Kredit Semester.

Trenggono mengatakan rencananya program tersebut ditujukan agar Indonesia memiliki generasi milenial yang tidak hanya kreatif dan inovatif melainkan juga cinta bangsa dan negara dalam kehidupannya sehari-hari.

“Nanti, dalam satu semester mereka bisa ikut pendidikan militer, nilainya dimasukkan ke dalam SKS yang diambil. Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan. Semua ini agar kita memiliki milenial yang tidak hanya kreatif dan inovatif, tetapi cinta bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-harinya,” kata Trenggono dalam keterangan yang diterima pada Minggu (16/8/2020).

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak

Sumber: <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/19/kemendikbud-diminta-tidak-tindaklanjuti-usulan-pendidikan-militer-untuk-mahasiswa>

Orangtua Murid Gugat Gubernur DKI ke PTUN Terkait PPDB



Abdul Arif

Rabu, 19 Agustus 2020 | 14:09 WIB

Enam orang tua wali murid berserta Perkumpulan Wali Murid 8113 dan Perkumpulan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menggugat Kepala Dinas Pendidikan dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Suara.com/Bagaskara)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM-- Pelaksanaan PPDB DKI Jakarta berbuntut panjang. Sejumlah orangtua murid kini menggugat Kepala Dinas Pendidikan dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke PTUN.

Ada sebanyak 6 orangtua wali murid serta Perkumpulan Wali Murid 8113 dan Perkumpulan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang turut menggugat. Salah satu penggugat, Sandra Pratiwi mengatakan gugatan yang dilayangkan itu semata-mata untuk menuntut keadilan.

Menurutnya, PPDB DKI banyak merugikan anak-anak termasuk buah hatinya yang terpaksa gagal masuk sekolah negeri impiannya. Sandra pun menuntut Anies dengan beberapa hal.

“Pertama mungkin bisa pihak Pemprov bisa fasilitasi anak saya dengan cara dipindahkan tanpa adanya diskriminasi di sekolah negeri,” kata Sandra ditemui di PTUN DKI Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (19/9/2020).

Sandra mengatakan, anaknya kini terpaksa menimba ilmu di sekolah swasta. Menurutnya, kerugian materi banyak dialaminya akibat proses PPDB.

“Kedua kalau memang harus sekolah di swasta berarti ganti rugi selama saya sekolah di swasta, itu

harus dijamin sama pemerintah karena dirugikan,” ungkapnya.

Sandra mengatakan, kekinian anaknya harus menerima kenyataan pahit karena bersekolah di sekolah swasta lantaran kalah telak dari proses PPDB DKI jalur zonasi, bina RW, hingga bangku kosong.

Padahal menurut Sandra, anaknya sudah cukup umur dengan 15 tahun 8 bulan untuk memasuki bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri. Terlebih ia menyebut anaknya sebagai anak yang berprestasi.

“Saya cuma minta keadilan, saya tidak menyalahkan pribadi pihak mana pun, saya minta keadilan untuk anak saya. Anak saya, saya hanya minta anak saya mendapat pendidikan yang layak,” tuturnya.

“Yaitu sekolah negeri yang bagus seperti apa yang diimpi-impikan karena apa, perjuangan anak saya nilai bagus itu nggak gampang,” sambungnya.

Sebelumnya Ketua Wali Murid 8113, Heru Narsono, mengatakan pihaknya banyak menemui sejumlah pelanggaran dalam SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 tahun 2020 junto SK Nomor 670 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru tahun Pelajaran 2020/2021 terhadap peraturan di atasnya yakni Permendikbud No 44 tahun 2019 tentang PPDB.

“Dimana dimulai dari jalur afirmasi kemudian jalur zonasi kemudian prestasi itu secara seleksi penerapan di lapangan bertentangan dengan Permendikbud 44 tahun 2019,” ungkapnya.

Heru menambahkan, banyak orang tua wali murid melapor bahwa mereka telah menjadi korban dari adanya proses PPDB DKI Jakarta.

Lebih lanjut, dengan adanya gugatan ini, Heru berharap sejumlah peraturan yang dianggap melanggar dalam PPDB DKI bisa diganti agar tak merugikan lagi ke depannya.

“Nanti dalam putusan peraturan-peraturan yang melanggar itu diperbarui diganti yang selaras dengan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019,” tandasnya.

Sumber: <https://www.ayosemarang.com/read/2020/08/19/62279/orangtua-murid-gugat-gubernur-dki-ke-ptun-terkait-ppdb>

Anies Digugat ke PTUN soal PPDB DKI 2020, Begini Sikap Pemprov



Kadek Melda Luxia - detikNews
Kamis, 20 Agu 2020 13:18 WIB

Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Persoalan PPDB 2020 membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Dinas Pendidikan DKI digugat ke PTUN. Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan pihaknya akan mengikuti sesuai hukum acara di pengadilan. "Kami tangani sesuai hukum acara di pengadilan," kata Yayan melalui pesan singkat, Kamis (20/8/2020).

"Para penggugatnya adalah Perkumpulan Wali Murid 8113, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dan empat orang wali murid yang anaknya menjadi korban kebijakan," ucap Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji saat dihubungi, Rabu (19/8). "(Tergugat) Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan) dan Dinas Pendidikan DKI," ujarnya. Pendaftaran gugatan masuk dengan nomor perkara 161/G/TF/2020/PTUN.JKT. Pendaftaran dilakukan Rabu kemarin sekitar pukul 11.00 WIB di PTUN DKI Jakarta. Menurut Ubaid, sistem seleksi zonasi PPDB DKI Jakarta dengan seleksi utama berdasarkan usia tidak sesuai aturan, sehingga banyak calon siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri karena terlalu muda.

"Banyak orang tua yang dirugikan dan didiskriminasi karena PPDB zonasi berdasarkan usia. Pertama, aturan usia tidak sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ucapnya. Mereka menuntut ada perbaikan aturan di sistem PPDB tahun depan. Selain itu, ada rehabilitasi terhadap siswa yang dirugikan. "Tuntutannya, aturan PPDB Pemprov DKI harus

direvisi disesuaikan dengan Permendikbud 44/2019, dan Pemprov juga harus merehabilitasi korban PPDB DKI,” kata Ubaid.

“Rehabilitasi itu maksudnya antara lain, terhadap mereka yang terlempar dari sekolah negeri akibat usia, pemerintah harus memberikan jatah di sekolah negeri kalau memang bangkunya masih tersedia. Jika sudah tidak ada bangku kosong di negeri, Pemprov DKI harus memfasilitasi mereka untuk dapat bersekolah di swasta dengan tanggungan biaya sepenuhnya dari Pemprov DKI,” ujarnya. Seperti diketahui, soal seleksi usia dalam sistem zonasi PPDB 2020 DKI Jakarta menjadi polemik dan mendapat protes dari orang tua siswa. Seleksi usia menjadi seleksi pertama dalam sistem zonasi. Namun PPDB DKI Jakarta tetap menggunakan sistem tersebut sampai pelaksanaan penerimaan siswa selesai dilakukan.

Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-5140378/anies-digugat-ke-ptun-soal-ppdb-dki-2020-begini-sikap-pemprov>

Silang Pendapat Risma-Khofifah, Pengamat: Jangan Buat Bingung Rakyat



Bintang Pradewo

Kamis, 20 Agustus 2020 | 15:55 WIB

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Budiono/Jawa Pos)

JawaPos.com - Terdapat perbedaan pendapat terkait pembukaan sekolah antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Hal ini lantaran Pemkot Surabaya meminta untuk tetap dilakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ), sedangkan Pemprov Jawa Timur sendiri memperbolehkan sekolah tatap muka.

Menanggapi itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menuturkan bahwa perlu ada kesepakatan soal pembukaan sekolah antara dua pemerintah tersebut.

“Saya pikir perlu ada koordinasi yang dipererat, karena ini penting sekali, tidak hanya menyangkut 1-2 anak, tapi seluruh anak se-Jawa Timur,” tuturnya kepada JawaPos.com, Kamis (20/8).

Maka dari itu, persoalan apakah PJJ ini harus terus berlangsung atau menjadi tatap muka. Ini harus diputuskan dengan pasti. Sebab, beda pendapat ini akan semakin membuat masyarakat kebingungan.

“Semerintah itu jangan menunjukkan kebingungan kepada rakyat, karena rakyat sendiri sudah bingung dengan situasi semacam ini. Bingung secara ekonomi, kesehatan, psikologis. Jangan

ditambah dengan silang pendapat pemerintah,” jelasnya. Untuk itu, dia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengatasi permasalahan ini.

“Urusan sekolah itu adalah urusan Kemendikbud, meskipun eksekutornya adalah pemerintah daerah, tapi pimpinan tertinggi itu adalah menteri pendidikan dan kebudayaan (Nadiem Makarim) karena ini urusannya sekolah,” ujarnya.

Sebagai informasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur menyampaikan, Kota Surabaya kembali berstatus zona merah atau berisiko tinggi penularan setelah sempat zona jingga atau berisiko sedang selama sembilan hari.

Selain Kota Surabaya, daerah yang berstatus zona merah lainnya adalah Kabupaten Sidoarjo. Berikutnya, untuk daerah zona jingga atau daerah dengan risiko sedang penularan Covid-19 saat ini berjumlah 26 daerah, yakni Nganjuk, Bojonegoro, Kota Madiun, Bondowoso, Banyuwangi, Gresik, Kota Malang, Sumenep, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Blitar, Pacitan, dan Lamongan.

Selain itu, Kota Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Malang, Jember, Kota Pasuruan, Magetan, Ngawi, Kota Batu, Jombang, Tuban, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, serta Kota Blitar.

Untuk zona kuning atau daerah dengan risiko rendah penularan Covid-19, menurut Makhyan Jibril terdapat 10 daerah. Yakni Bangkalan, Pamekasan, Kota Kediri, Trenggalek, Situbondo, Kabupaten Madiun, Sampang, Tulungagung, Ponorogo, dan Lumajang. Untuk zona hijau di Jawa Timur masih belum ada.

Editor: Bintang Pradewo

Sumber: <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/20/08/2020/silang-pendapat-risma-khofifah-pengamat-jangan-buat-bingung-rakyat/>

Pemerintah Provinsi-Kabupaten/Kota Harusnya Satu Suara Soal Kebijakan



Mohamad Nur Asikin

Kamis, 20 Agustus 2020 | 16:58 WIB

Simulasi belajar tatap muka digelar di SMP 15 Kota Surabaya pada Senin (3/8). Pemkot Surabaya/Antara

JawaPos.com - Pilihan melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan bersekolah tatap muka masih menjadi polemik saat ini. Bahkan, Surabaya yang merupakan bagian Jawa Timur juga berbeda pendapat terkait hal tersebut, di mana kota itu lebih memilih PJJ ketimbang tatap muka. Mengenai itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan bahwa pemerintah daerah (pemda) harus satu suara atas hal tersebut.

“Kita berharap pemerintah satu suara soal ini, karena masing-masing kan harus ada konsekuensinya, kalau PJJ harus dijalankan, segala infrastruktur yang mendukung PJJ itu harus diadakan,” jelasnya kepada JawaPos.com, Kamis (20/8).

Jika ada perselisihan, ini akan membuat masyarakat kebingungan. Padahal, kondisi seperti sekarang ini, semua harus bersatu. Apalagi, terdapat perbedaan tanggung jawab antar pemerintah daerah dalam membawahi satuan pendidikan. Untuk pemerintah provinsi sendiri mengatur jenjang pendidikan SLB, SMA dan SMK. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota mengawasi satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP.

“Jangan yang menengah masuk, yang dasar ngga masuk, jadi tidak sinkron. Harusnya sama,

karena pertimbangan masuk atau tidak itu kan bukan soal usia atau jenjang sekolah, tapi apakah zona ini aman atau tidak,” tambahnya.

Jika pertimbangannya adalah usia atau jenjang sekolah, tidak ada relevansinya dengan perkembangan Covid-19. Maka dari itu, jangan paksakan kepala daerah mementingkan wilayahnya sendiri dan menimbulkan silang pendapat.

“Jadi rakyat itu tidak penting silang pendapat, tapi yg terpenting adalah bagaimana anak-anak bisa sekolah aman untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas,” imbuh dia.

Dia juga meminta untuk rapid dan swab test menjadi sebuah kewajiban pemerintah daerah sebelum membuka sekolah. “Untuk mendeteksi apakah masih ada yang positif atau tidak, ketika sudah tidak ada yang positif maka sekolah boleh dibuka, supaya sekolah itu bisa aman. Wajib untuk memastikan dan menjamin kesehatan anak dan perlindungan anak, itu harus dilakukan,” pungkasnya.

Sumber: <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/20/08/2020/pemerintah-provinsi-kabupaten-kota-harusnya-satu-suara-soal-kebijakan/>

Cerdas Bernalar, tetapi Tidak Cerdas Berpikir



Pendidikan seharusnya mendorong kemajemukan berpikir. Ini harus didukung sistem pembelajaran yang menghargai kemajemukan agar siswa tidak sekadar cerdas bernalar, tetapi juga cerdas berpikir.

Oleh YOVITA ARIKA

Sukarelawan membantu pelajar mengakses kanal Youtube saat belajar daring di Bis Online (Bison) milik Universitas Dinamika, Surabaya, di Kantor Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/8/2020). Akses internet memungkinkan siswa memperoleh beragam informasi. Guru perlu membantu siswa memaknai informasi tersebut sehingga menjadi pengetahuan.

Sistem pendidikan di Indonesia dinilai belum mendorong kemajemukan berpikir. Kebijakan-kebijakan pendidikan yang cenderung Jawa-sentris telah menekan kemajemukan. Praktik pembelajaran juga kurang mendorong cara berpikir kritis dan kreatif.

Hasilnya, pendidikan menghasilkan orang pandai, tetapi kurang menghargai keberagaman. Hasil kajian Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia pada 2012-2018, misalnya, menunjukkan kecenderungan sikap intoleransi yang menguat di kalangan anak muda terdidik (Kompas.com, 15/11/2019).

Editor:aloysius budi kurniawan

Sumber: <https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/08/21/cerdas-bernalar-tetapi-tidak-cerdas-berpikir/>

Mahasiswa Butuh Demokratisasi Kampus Bukan Komcad, Pak Prabowo



Reporter: Alfian Putra Abdi

Ilustrasi peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara di Korem 162/WB di Mataram, NTB, Selasa (6/11/2018). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi.

Pemerintah mencanangkan Komcad (komponen cadangan) bagi mahasiswa, padahal jauh lebih penting membangun kehidupan kampus yang demokratis. tirto.id - Generasi milenial diharapkan bisa bergabung dengan Komponen Cadangan (Komcad) sebagai wujud kecintaan terhadap negara.

Imbauan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono. Harapannya, Indonesia akan memasuki era bonus demografi pada 2025-2030, yang akan didominasi oleh usia produktif yakni para generasi milenial tersebut. Dalam keterangan tertulisnya pada 16 Agustus 2020, Sakti menampik Komcad disamakan dengan wajib militer.

Menurutnya, Komcad adalah “kesadaran dari warga masyarakat yang ingin membela negara jika terjadi perang.” Secara teknis, para warga akan dikembalikan ke masyarakat usai pelatihan. Kemudian akan dipanggil kembali jika situasi negara dalam keadaan siap tempur.

Hal tersebut, menurutnya, sesuai dengan UU Nomor 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Kementerian yang dibawah Menhan Prabowo Subianto ini akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar para mahasiswa bisa tergabung dalam program Bela Negara selama satu semester.

Tujuannya agar Indonesia “memiliki milenial yang tidak hanya kreatif dan inovatif, melainkan

cinta bangsa dan negara dalam kesehariannya.”Dalam kesempatan berbeda pada 21 Agustus 2020, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbud Nizam menyambut baik wacana tersebut. Menurutnya, program itu hanya bersifat sukarela dan bertujuan untuk “memenuhi hak mahasiswa.

”Menurut Nizam, apabila mahasiswa bergabung sebagai Komcad maka yang bersangkutan akan mendapatkan gelar lain di luar gelar sarjana dari kampus. Para mahasiswa itu, lanjut Nizam, berkesempatan “menjadi perwira cadangan” selagi memenuhi syarat.Segala bentuk pelatihan akan dipersiapkan oleh Kemhan. Selanjutnya, menurut Nizam, Kemendikbud akan bekerja sama dalam program-program kepemimpinan dan bela negara dengan Kemhan.

Wamenhan Ingin Milenial Gabung Komcad agar Lebih Cinta Negara Demokratisasi Kampus Lebih Urgen Sementara itu, Koordinator Pusat Dewan Eksekutif Mahasiswa PTKIN Se-Indonesia Onky Fachrur Rozie menilai wacana Komcad cukup bagus. Sebab, menurutnya, segala yang berkaitan dengan kecintaan terhadap bangsa dan negara perlu didukung, sebagaimana yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa ini. Namun, wacana tersebut menjadi tidak tepat jika diperuntukkan menghadapi tantangan bonus demografi.“Yang kita butuhkan pembentukan karakter milenial menuju bonus demografi, melalui media pembelajaran seperti kampus dan organisasi yang ada,” ujarnya kepada Tirto, Sabtu (22/8/2020).

Menurut Onky, pemerintah perlu memikirkan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Semisal dengan pembelajaran keahlian bagi para milenial untuk menghadapi dunia yang serba cepat.“Masih ada hal yang lebih urgen lagi di tengah mahasiswa yakni jaminan keberlangsungan pendidikan dan demokratisasi kampus,” ujarnya.Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah mau mengkaji ulang wacana Komcad dengan melibatkan milenial, khususnya kelompok mahasiswa.

Sebab, menurutnya, masih banyak “problematika yang lebih penting di dalam perguruan tinggi yang harus dibenahi.”Senada, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai para mahasiswa tidak perlu diikutsertakan sebagai Komcad meskipun sifatnya sukarela. Menurutnya, program semacam itu “cukup di akademi militer dan kepolisian, tidak perlu masuk-masuk kampus.”

Kemendikbud Jangan Asal Ikut Kemhan Kepada Tirto, Ubaid mengatakan, pemerintah semestinya fokus membenahi hal yang lebih memiliki urgensi. Semisal membenahi “kemerdekaan berpikir, penguatan nalar kritis, peningkatan kualitas riset dan pengabdian masyarakat,” hal tersebut “jauh lebih penting dari Komcad.”Ia juga mendesak Kemendikbud untuk bersikap dan tidak asal mengikuti usulan Kemhan.“Mendikbud harus punya pendirian, jangan asal ikut-ikutan. Tidak ada urgensi dan relevansi dengan peningkatan kualitas pendidikan di kampus,” ujarnya pada Sabtu (22/8/2020).

Sementara menurut Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) yang membidani aksi Gejayan Memanggil, pemerintah terlalu memaksakan penyeragaman konsep nasionalisme bagi kaum milenial melalui wacana Komcad. Padahal, menurut mereka, yang diwakilkan Humas ARB Lusi, “setiap orang berhak mengartikulasi, mendefinisikan dan mengekspresikan konsep nasionalismenya secara otonom.

”Selain itu, ARB memandang wacana Komcad tidak relevan dengan kondisi dunia yang sedang

menghadapi resesi ekonomi dan bukan ancaman perang fisik. Pemerintah seharusnya justru mempersiapkan diri mengatur strategi ekonomi mandiri dengan “memperkuat koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi akar rumput,” misalnya. Lebih lanjut, ARB memandang wacana Komcad akan berpotensi memperkuat peranan militer di ranah sipil. “Yang mana pengembalian militer ke barak merupakan konsensus yang sudah diperjuangkan lewat reformasi,” ujar Lusi kepada Tirto, Sabtu (22/8/2020). Reporter: Alfian Putra Abdi Penulis: Alfian Putra Abdi Editor: Maya Saputri

SUMBER: <https://tirto.id/mahasiswa-butuh-demokratisasi-kampus-bukan-komcad-pak-prabowo-fza3>

Kemendikbud Diminta Sinergi dengan Berbagai Sektor Terkait Pembelajaran Jarak Jauh

Kompas.com - 26/08/2020, 14:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersinergi dengan kementerian/lembaga lain serta sektor swasta untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurut Ubaid, saat ini orang tua siswa terkendala biaya penunjang seperti pembelian kuota internet. Ia menilai, dana-dana yang dimiliki kementerian lain dan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dapat digunakan untuk pelaksanaan PJJ. “Pemerintah perlu bersinergi dengan kementerian lain, bahkan sektor swasta agar ada dana CSR, dana abadi pendidikan, dana desa atau dana di APBD. Itu semua bisa digerakkan untuk mendukung PJJ,” kata Ubaid saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/8/2020).

Menurut Ubaid, bantuan Kemendikbud dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung PJJ banyak tidak terealisasi di sekolah swasta. Selain itu, dana tersebut juga dinilai kurang akibat digunakan untuk menggaji guru honorer. “Dana BOS di lapangan untuk support PJJ di sekolah juga banyak tidak terealisasi, terutama di sekolah-sekolah swasta,” ujar Ubaid. “Dana BOS untuk operasional saja pas-pasan, bahkan juga kurang. Malah dipotong untuk gaji guru honorer, sementara orangtua di sekolah swasta juga banyak yang nunggak SPP akibat ekonominya terdampak Covid-19,” tutur dia.

Pembelajaran Jarak Jauh Secara terpisah, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, saat ini banyak komponen masyarakat yang membantu orangtua untuk anaknya menjalankan PJJ. Salah satunya datang dari dunia usaha yang memberikan promo kuota internet untuk meringankan biaya PJJ. Oleh sebab itu, Huda meminta Kemendikbud mengkoordinasikan bantuan dari berbagai komponen masyarakat terkait PJJ.

“Kalau inisiatif dari pelaku dunia usaha sudah jalan ya, beberapa provider sudah memberikan paket khusus hemat bagi siswa dan seterusnya, karena tidak semua orang tua tahu kalau ada promo-promo sifatnya yang memberikan keringanan kuota kepada siswa,” kata Huda.

“Saya berharap ada tangan-tangan dari Kemendikbud yang mengkoordinasikan ini sampai pada level daerah,” tutur dia. Baca juga: Komisi X DPR Panggil Mendikbud Nadiem untuk Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh Menurut Huda, koordinasi juga dibutuhkan agar bantuan yang diberikan berbagai komponen masyarakat tepat sasaran. “Supaya juga tepat sasaran, supaya yang menggunakan promo ini memang yang betul-betul siswa yang kesulitan akses dan kesulitan membeli kuota. Nah itu kan butuh koordinasi,” ujar Huda.

Penulis : Irfan Kamil
Editor : Kristian Erdianto

SUMBER: <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/14550881/kemendikbud>



JPPI: Program Komcad Mahasiswa Bentuk Kemunduran Reformasi

Redaksi Kalbar Online 22/08/2020

Nasional

KalbarOnline.com – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah menginisiasi Program Bela Negara untuk Komponen Cadangan (Komcad) militer di perguruan tinggi. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan bahwa ini merupakan bentuk kemunduran.

Menurut Ubaid, program ini sama saja menarik kembali Indonesia yang sudah masuk ke era reformasi, ke zaman orde baru. “Reformasi sudah jalan, sudah bagus malah ditarik ke era orde baru lagi. Tidak ada relevansi pendidikan militer di kampus, tujuannya apa? Kalau tujuannya bela negara, cinta Tanah Air itu tidak perlu menggunakan cara militer,” ujarnya kepada KalbarOnline.com, Sabtu (22/8).

Ia menegaskan bahwa kampus merupakan tempat nalar kritis, tempat orang berdebat dan bertukar pikiran, membaca literatur teori yang ada di dunia tentang konsep bernegara, sehingga kesadaran akan cinta tanah air, bela negara itu harus dibangun dari proses perdebatan tersebut.

“Bukan cara yang doktrinasi itu, ngga ada relevansinya. Bukan tempatnya. Kalau cinta Tanah Air kita melemah, bela negara kita melemah,” jelas dia.

Menurutnya, soal kecintaan terhadap Tanah Air harus dievaluasi, apakah sudah ada atau belum soal penanaman cinta terhadap bangsa sendiri di sekolah dan kampus. “Kalau belum ada ya diadakan, caranya kesadaran akan cinta Tanah Air, kesadaran akan bela negara, itu harus dibangun dari kesadaran kritis, bukan doktrinasi, bukan kamu harus cinta Indonesia karena kamu WNI, tapi harus melalui proses dialogis dan perdebatan yang kritis,” imbuh Ubaid.

“Nalar kritis dan *critical thinking* itu harus diperdebatkan di meja sekolah dan kuliah, sehingga si anak itu sadar akan pentingnya NKRI. (Kecintaan kepada Tanah Air) Berawal dari proses perdebatan,” tutupnya.

Sumber: <https://www.kalbaronline.com/2020/08/22/jppi-program-komcad-mahasiswa-bentuk-kemunduran-reformasi/>



Harus Ada Kolaborasi Semua Pihak untuk Atasi Permasalahan PJJ

Redaksi KalbarOnline

KalbarOnline.com – Permasalahan pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih belum terselesaikan. Hal itu pun menjadi salah satu alasan kenapa sekolah diperbolehkan belajar tatap muka.

Untuk itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji pun meminta, agar ada kolaborasi antara kementerian dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan hal tersebut.

“Saya pikir tidak hanya kerjasama antar kementerian, tapi juga pemerintah daerah itu dari provinsi sampai desa. Bagaimana pemerintah yang mengelola anggaran itu menjadikan pendidikan sebagai prioritas, tidak hanya kesehatan saja, tapi juga pendidikan,” ujarnya kepada KalbarOnline.com, Jumat (21/8).

Kemudian, badan usaha milik negara (BUMN) juga harus dilibatkan mengatasi permasalahan PJJ. Salah satunya adalah PT PLN (Persero). “(PLN) harus (kontribusi), karena pjj ini kebutuhan masyarakat akan listrik itu naik, bahkan semua orang mengeluh karena listriknya naik, karena penggunaannya naik karena di rumah,” jelasnya.

Pasalnya, hambatan PJJ bukan hanya keterbatasan akses, seperti wifi dan gadget. Di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) itu, kata dia banyak yang listriknya bisa mati berkali-kali. Hal ini pun menghambat PJJ secara luar jaringan.

Maka dari itu, menurutnya perlu ada subsidi yang ditujukan kepada daerah 3T tersebut. Dengan keterlibatan berbagai pihak, kemungkinan permasalahan PJJ pun akan terselesaikan.

“Jadi yang diperkuat dalam konteks PJJ itu jangan diasumsikan hanya daring, luring juga harus diperkuat, karena kalau PJJ hanya mengandalkan daring, daerah-daerah di Indonesia kan nggak kayak kota-kota, seperti Jakarta dan Surabaya yang jaringannya dan listriknya stabil. Kalau daerah itu bisa 5 kali mati lampu sehari, bisa 8 jam,” pungkasnya.

Sumber: <https://www.kalbaronline.com/2020/08/21/harus-ada-kolaborasi-semua-pihak-untuk-atasi-permasalahan-pjj/>

JPPI Cium Indikasi Pungutan Liar di PPDB DKI



Reporter Lani Diana Wijaya

Editor Aditya Budiman

Jumat, 3 Juli 2020 21:21 WIB

Petugas melayani warga yang melaporkan anaknya usai lolos dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 melalui jalur zonasi di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa 30 Juni 2020. Pemprov DKI Jakarta menetapkan tahap pelaporan diri siswa yang lolos seleksi PPDB zona zonasi berakhir pada Selasa siang dan dilanjutkan PPDB tahap akhir apabila terdapat sisa kuota di sekolah dengan hanya diperuntukkan bagi calon siswa beridentitas diri asal Jakarta. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji, mengatakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) selalu menuai polemik setiap tahun. Abdullah juga menyinggung dugaan [pungutan liar](#) alias pungli dalam PPDB DKI.

“Kita tahu kalau PPDB setiap tahun menuai polemik, ada pungli, ada penyelewengan. Setiap tahun selalu bikin ricuh,” kata dia dalam diskusi virtual, Jumat, 3 Juli 2020.

Abdullah mencontohkan PPDB 2019 yang memicu demonstrasi di Jawa Timur, Jawa Tengah hingga luar Pulau Jawa. Para orang tua dan siswa mempermasalahkan kebijakan jalur zonasi sekolah.

Tahun ini PPDB Jakarta yang jadi soal. Sejumlah orang tua murid mengeluhkan syarat seleksi usia dalam PPDB jalur zonasi sekolah. Menurut Abdullah, petunjuk teknis atau juknis PPDB DKI

bertentangan dengan regulasi di atasnya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019.

Permendikbud 44 Tahun 2019 membahas soal PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Di dalamnya memuat kuota jalur zonasi sekolah minimal 50 persen dari kapasitas. Namun, Dinas Pendidikan DKI hanya memasukkan kuota 40 persen. Selain itu, lanjut dia, Pemprov DKI menyeleksi calon murid yang mendaftar jalur zonasi sekolah berdasarkan usia bukan jarak.

“Jika ada peraturan di daerah yang itu bertentangan dengan peraturan yang lebih atas, itu automatically batal. Jadi PPDB DKI cacat hukum,” tutur Abdullah.

Abdullah juga memperoleh informasi soal dugaan pungutan liar pada PPDB DKI. Dia menuturkan ada calon siswa yang sudah lolos PPDB harus registrasi dan mengucurkan biaya Rp 5-10 juta. Tujuannya menjamin calon murid mendapatkan kursi.

“Saya dengar di DKI sudah banyak pungli-pungli dilakukan karena keterbatasan kuota dan kursi,” ujar Abdullah. “Ketika pengawasan dari masyarakat, orang tua lemah maka celah-celah untuk pungutan liar, jual-beli kursi masih menjadi sasaran empuk dan sekolah bisa bermain di situ.”

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Dewi Anggraeni, membenarkan dugaan pungli tersebut. Dewi menceritakan kisah salah satu anak yang mendaftar di sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) naungan Kementerian Agama. Namun dia tak menyebut lokasi sekolah.

Anak itu, menurut dia, diharuskan memilih tiga sekolah ketika mendaftar PPDB. Sekolah pilihan pertama rupanya menolak. Sang anak kemudian lolos di sekolah pilihan kedua. Tiba-tiba pihak sekolah pilihan pertama menelepon untuk menawarkan kursi senilai Rp 10-15 juta.

“Ada pihak-pihak dari pilihan pertama menghubungi untuk menjual kursi karena ada yang mungkin lolos tapi tidak diambil,” ujar Dewi. “Sebenarnya itu masalah klasik yang ICW temukan juga selama ini di isu pendidikan.”

Sumber: <https://metro.tempo.co/read/1361022/jppi-cium-indikasi-pungutan-liar-di-ppdb-dki>

PPDB Ricuh, Pemprov DKI Jakarta Diminta Fasilitas Murid yang Tak Lolos Seleksi



Pemerintah harus memikirkan jalan keluar agar tak ada anak-anak di DKI Jakarta yang putus sekolah.

Oleh: Fitri Novia Heriani

Bacaan 2 Menit

Foto: RES

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 di DKI Jakarta berjalan ricuh. Kericuhan ini disebabkan karena Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengubah sistem pendaftaran melalui Jalur Zonasi menggunakan Usia Tertua ke Usia Termuda sebagai prioritas utama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Aturan ini dinilai bertentangan dengan Permendikbud No. 44/2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji, menyebut bahwa proses penerimaan siswa baru di Indonesia memang kerap menuai polemik, baik di pulau Jawa maupun luar pulau Jawa. Untuk tahun ini, PPDB di DKI Jakarta menjadi perhatian lantaran adanya perbedaan penerapan regulasi, di mana seleksi menggunakan kriteria usia dan bukan zonasi.

Ubaid menilai bahwa selayaknya aturan PPDB DKI Jakarta batal karena bertentangan dengan

Permendikbud 44/2020. Ia juga mengkritik pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang terkesan lepas tangan setelah menerbitkan aturan, minim pengawasan sehingga kericuhan saat PPDB terulang tiap tahunnya. (Baca: Advokat dan Orangtua Murid Mengadu ke Ombudsman Terkait PPDB 2020)

“Aturan PPDB DKI jelas batal karena bertentangan dengan Permendikbud 44 Tahun 2020. Seharusnya seleksi didasarkan pada jarak, tapi DKI Jakarta berdasarkan usia. Pemerintah keluaran aturan terus lepas tangan, tiap tahun ada polemik, pungli, dan ricuh. Seharusnya bikin posko, pemerintah harus punya struktur itu, saat PPDB tidak ada posko harusnya ada pengawasan lebih massif kemudian partisipasi masyarakat bisa kesitu. PPDB online bermasalah sehingga PPDB offline tetap dilakukan, dan ini adalah lahan basah yang potensial jual beli kursi dan itu lepas dari perhatian pemerintah,” kata Ubaid dalam sebuah diskusi daring, Jumat (3/7).

Perwakilan Koalisi Orang Tua Murid Jakarta, Kusman Sulaeman, mengaku kecewa terhadap aturan terbaru PPDB di DKI Jakarta. Seluruh jalur PPDB yang disediakan oleh pemerintah dalam Permendikbud 44/2020 penerapannya bermasalah, termasuk jalur prestasi.

Kusman mencatat setidaknya ada empat pasal Permendikbud yang dilanggar oleh DKI Jakarta, yakni Pasal 11 mengenai urutan yang didahulukan, pasal 25 ayat (1) dan (2) dimana seleksi didasarkan pada jarak, dan juga pasal 28. “Aturan di DKI Jakarta menggunakan usia. Banyak yang mengecewakan termasuk jalur prestasi,” imbuhnya.

Perwakilan Koalisi Orang Tua Murid Jakarta lainnya, Jumono mengklaim bahwa pihak perwakilan orang tua selalu menyurati Dinas Pendidikan tiap tahun ajaran baru. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan masukan terkait kriteria PPDB. Namun sayangnya, masukan itu tidak pernah terakomodir dalam Juknis PPDB sehingga saat diterapkan selalu memunculkan persoalan.

Selain itu, pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkesan mengabaikan sosialisasi terkait aturan terbaru PPDB. Akibatnya, orang tua murid banyak yang tidak paham dan berdampak kepada nasib pemenuhan Pendidikan anak.

Namun mengingat waktu PPDB sudah berakhir, maka Juwono menilai pemerintah harus memikirkan jalan keluar agar tak ada anak-anak di DKI Jakarta yang putus sekolah, mengingat pembatalan PPDB tak bisa dilakukan. Dalam konteks ini, Dinas Dikbud DKI Jakarta diharapkan dapat turun tangan untuk mencari jalan keluar untuk anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri dan swasta karena terkendala biaya.

“Daya tampung untuk di DKI terhadap jumlah lulusan berbading jauh, kalau dirilis di media SMP baru 32 persen, SMA 19 persen. Pemprov harus memenuhi wajib belajar itu harus dituangkan dalam pembiayaan artinya bahwa anak-anak usia sekolah jangan putus sekolah. Caranya ya dibiayai walaupun swasta, membiayai anak-anak yang tidak tertampung di negeri ke swasta. Pemprov DKI harus menutup itu, alokasi dana Pendidikan DKI besar, tapi habis untuk apa masyarakat tidak tahu,” tegasnya.

Ubaid menambahkan salah satu jalan keluar yang bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini adalah dengan menambah kuota zonasi. Karena bagaimanapun, lanjut Ubaid, anak-anak yang tak lolos seleksi PPDB menjadi tanggung jawab pemerintah untuk didistribusikan.

“Aturan sebelumnya sudah dijalankan ya dicabut. Sekarang begini kalau sudah lolos, kemudian registrasi ulang akan lebih ricuh. Pemerintah harus menambahkan kuota zonasi. Anak-anak yang sudah mendaftar tapi tak lolos jd tanggung jawab pemerintah untuk mendistribusikannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyatakan PPDB tahun 2020 sudah sesuai peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Proses yang sudah dilalui dan akan dijalankan dalam PPDB 2020 ini kami sudah berkoordinasi dengan Kemendikbud dan sudah sesuai dengan peraturan kementerian yang ada,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, seperti dilansir *Antara*, Senin (29/6).

Menurutnya, PPDB Tahun Ajaran 2020/2021 DKI Jakarta sudah menyelesaikan empat tahapan seleksi PPDB, yakni jalur inklusi, afirmasi, prestasi non akademis dan jalur zonasi dengan kuota yang sudah ditentukan. Kuota tersebut berdasar Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim pada 10 Desember 2019 besaran kuota untuk jalur zonasi adalah 70 persen, namun itu masih dibagi lagi.

Itu terdapat dalam Pasal 11 ayat 2 yang berisi jalur zonasi paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah. Untuk jalur afirmasi (warga kurang mampu) paling sedikit 15 persen dari daya tampung sekolah.

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak lima persen dari daya tampung Sekolah. Sedang sisa kuota sebesar 30 persen digunakan untuk jalur prestasi yang meningkat dari sebelumnya yang hanya sekitar 15 persen. Kendati demikian, pemerintah daerah memiliki keleluasaan soal kuota tersebut asalkan minimal kuota dalam Permendikbud itu terpenuhi.

Sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f02ae3c01bc4/ppdb-ricuh--pemprov-dki-jakarta-diminta-fasilitasi-murid-yang-tak-lolos-seleksi/>

Pengamat Sebut Pendidikan Militer ke Kampus Macam Orde Baru



CNN Indonesia

Senin, 17 Agu 2020 15:59 WIB

Demo mahasiswa. (Foto: CNN Indonesia/ Farid)

Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai usulan pendidikan militer di kampus oleh Kementerian Pertahanan dapat melemahkan nalar kritis mahasiswa.”(Pendidikan militer) itu malah menumpulkan nalar itu sendiri yang seharusnya (jadi) ruh dari mahasiswa,” kata Ubaid ketika dikonfirmasi pada Senin (17/8).Dia menuturkan rasa cinta tanah air untuk mahasiswa bukanlah dengan cara pendidikan militer yang dipaksakan, melainkan dengan dialog. Ubaid meminta pendidikan militer dibatalkan dan memberikan ruang lebih banyak kepada mahasiswa untuk berdiskusi

Senada, Pengamat Pendidikan Indra Charismiadi mengatakan usulan pendidikan militer di kampus tidak tepat dilakukan di Indonesia dan menganalogikannya seperti Orde Baru.”Kita tahu Orde Baru modelnya seperti itu, tidak menumbuhkan rasa cinta Tanah Air juga,” ujarnya. Orde Baru merupakan masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun dan bercirikan pada militerisme. Soeharto jatuh dari kekuasaannya pada 1998 lalu.Pada pemerintahan Soeharto juga dikenal dengan upaya dugaan manipulasi sejarah dalam pendidikan dan mengedepankan jargon pembangunan sebagai bentuk kekuasaannya. Sejumlah pihak yang menolak rencana Soeharto bakal dicap antipembangunan.Dalam hal pembangunan, militer pun kerap kali dilibatkan oleh Soeharto.Lihat juga:Kemenhan Usul Mahasiswa Ikut Pendidikan Militer di 1 Semester”Jadi sebenarnya rasa cinta Tanah Air bukan seperti itu. Bukan model militerisme. Kecuali kita punya kebutuhan seperti Singapura, karena negaranya kecil mereka mewajibkan

semua warga negara laki-laki wajib militer,” lanjut dia.

Dia pun meminta agar sebuah usulan pendidikan tidak digaungkan asal-asalan namun harus ada kerangka lebih dahulu dengan adanya tujuan, tahapan, hingga cara mencapainya. Sebelumnya Kementerian Pertahanan akan menggandeng Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan pendidikan militer melalui Program Bela Negara kepada para mahasiswa. Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan program bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara bagi generasi milenial.

“Nanti, dalam satu semester mereka bisa ikut pendidikan militer, nilainya dimasukkan ke dalam SKS yang diambil. Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan,” ucapnya, Senin (17/8). Lebih lanjut, Trenggono mengungkapkan Program Bela Negara dilakukan pihaknya untuk menumbuhkan rasa bangga milenial menjadi warga negara Indonesia.

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200817153720-20-536552/pengamat-sebut-pendidikan-militer-ke-kampus-macam-orde-baru>

Pemangkasan Tunjangan Guru, Apa Dampak pada Dunia Pendidikan?



Senin, 20 Juli 2020 21:00 WIB

Ilustrasi guru yang sedang mengajar. (ANTARA/Adiwinata Solihin)

INDOZONE.ID - Pemerintah melakukan realokasi anggaran Bantuan Operasional dan Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Salah satunya ialah tunjangan guru terpaksa harus dipangkas. Lalu apa dampak pada dunia pendidikan di Indonesia?

Menurut Ubaid, adanya pemangkasan atas hak guru tersebut tentu akan berpengaruh dengan kinerja mereka dalam mendidik peserta didik di bangku sekolah. Ini menjadi persoalan tersendiri di tengah pandemi virus corona (Covid-19) melanda Indonesia.

Dia menambahkan, di tengah situasi saat ini proses belajar mengajar yang dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak akan berjalan efektif. Selain itu, dengan aturan yang baru juga banyak anak-anak tidak bisa sekolah.

Melihat kondisi saat ini, Koordinator Nasional JPPI ini pun meyakini bahwa dampak dari pemangkasan tunjangan juga akan dirasakan peserta didik yang capaian akademik yang tidak maksimal. Ini tentu imbas dari kinerja para guru yang tidak 100% bekerja atau mengajar.

Diketahui, pemerintah melakukan realokasi anggaran BOS dan TPG). Akibatnya, dana BOS terpangkas dari Rp54,31 miliar menjadi Rp53,45 miliar. Sementara anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) terpangkas dari Rp53,83 miliar menjadi Rp50,88 miliar. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020.

Sumber: <https://www.indozone.id/news/L9sa7kR/pemangkasan-tunjangan-guru-apa-dampak-pada-dunia-pendidikan>

JPPI: PPDB DKI Cacat Hukum



Ilham Pratama Putra · 03 Juli 2020 16:10

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyebut, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta cacat hukum. Sebab, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak mengikuti aturan yang diatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Permendikbud no 44 tahun 2019.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB, daerah harus memberikan kuota 50 persen untuk sistem zonasi. Sementara dalam juknis PPDB DKI Jakarta nomor 501 tahun 2020, angka itu dikurangi. “Sehingga kemarin benar jika aturan PPDB ini jelas batal karena zonasinya 40 persen. Padahal itu di (Permendikbud 44) 50 persen. PPDB ini cacat hukum karena tidak mengikuti aturan di atasnya,” kata Ubaid, dalam Diskusi Daring, Jumat, 3 Juli 2020.

Parahnya lagi, kata Ubaid, Pemerintah pusat seolah tutup mata ketika daerah tak mengikuti aturan yang lebih tinggi. Masyarakat bahkan tidak disediakan posko pengaduan. “Pemerintah keluarkan aturan lalu lepas tangan. Harusnya pemerintah bikin posko, bukan Kami yang masyarakat sipil yang bikin posko,” sambung dia.

Tak adanya posko pengaduan ini memiliki buntut permasalahan yang lebih berbahaya lagi. Akan ada pihak yang menawarkan masyarakat agar tetap diterima di sekolah negeri.

“Jadi ada celah pungutan liar (pungli) agar bisa masuk ke sekolah tertentu bayar lima sampai 10 juta. Ini yang kalau tidak ada pengawasan dan perhatian itu jadi masalah selanjutnya. Sayang ini lepas dari perhatian,” pungkasnya.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/yKXAo6XN-jppi-ppdb-dki-cacat-hukum>

JPPI: Ada Konflik Kepentingan di Merek Dagang Merdeka Belajar



Ilham Pratama Putra · 17 Juli 2020 20:22

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengaku terkejut, saat program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), “Merdeka Belajar” didaftarkan sebagai merek dagang atas nama PT. Sekolah Cikal. Pihaknya menilai ada konflik kepentingan antara Kemendikbud dan PT Sekolah Cikal sebagai pemilik merek tersebut.

“Kita semua terbelalak, ini jelas Conflict of interest, padahal ini jadi konsep andalan Mas Menteri, akan menjadi kebingungan,” kata Ubaid dalam diskusi pendidikan bertema Kebijakan dan Tantangan Pendidikan di Masa Pandemi yang digelar Forum Monitor, Jumat 17 Juli 2020.

Terlebih lagi pendiri Sekolah Cikal, Najelaa Shihab, saat ini juga merupakan Dewan Pembina di Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) yang merupakan mitra Kemendikbud. Ubaid pun mempertanyakan, posisi program Merdeka Belajar saat ini.

Apakah program ini murni sebagai gebrakan pendidikan Mendikbud atau hanya barang dagang yang bakal menguntungkan pihak swasta pemilik merek. “Kita ingin sesuatu yang surprise dari Mas Nadiem, tapi masyarakat malah kecewa,” ujarnya.

Ubaid menyebut, hingga saat ini pihaknya belum bisa membaca arah pendidikan Indonesia sejak dipimpin Nadiem. Belum ada skenario pendidikan yang jelas, terutama di tengah pandemi virus korona (covid-19). “Misal sekarang kalender pendidikan sudah mulai 13 Juli, tapi kurikulum daruratnya belum dipersiapkan. Pendidikan Kita kualitasnya bisa turun jelas dong. Kondisi normal saja bermasalah apalagi situasi macam ini,” ujarnya.

Belum lagi, sempat terjadi kegaduhan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Seolah pemerintah tidak memperhatikan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

“Padahal pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan. Kalau sudah seperti ini bagaimana. Anak yang masuk swasta nantinya jangan sampai PHP (Pemberi Harapan Palsu) ditanggung pemerintah dulu,” sambung Ubaid.

Ubaid berharap, Nadiem mau duduk bersama menyelesaikan masalah pendidikan. Sebab, menurutnya Nadiem kurang mendengarkan masukan dari para *stakeholder* pendidikan,

“Semua pihak dari parlemen, KPAI teriak sudah sangat kencang, tampaknya apakah Menteri tutup mata dan terlinga. Bahkan di medsos sampai dicari-cari. Kita ingin pendidikan berkualitas tapi keberpihakan Mendikbud, Kita belum menemukan,” pungkasnya.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/VNx45vgN-jppi-ada-konflik-kepentingan-di-merek-dagang-merdeka-belajar>

JPPI: Program Komponen Cadangan Tak Relevan Diterapkan di Kampus



Ilham Pratama Putra · 21 Agustus 2020 17:05

Jakarta: Lembaga Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tak perlu terlibat jauh dalam pengembangan program komponen cadangan (Komcad) Kementerian Pertahanan. Program berisi pendidikan militer itu dinilai belum punya urgensi diterapkan di perguruan tinggi. “Jangan asal ikut-ikutan menuruti usulan yang tidak ada urgensinya,” ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji kepada Medcom.id, Jumat, 21 Agustus 2020.

Menurut Ubaid, pendidikan militer juga tidak relevan diterapkan di kampus. Sebab pendidikan militer tidak ada hubungannya dengan peningkatan kualitas pendidikan. “Relevansinya dengan peningkatan kualitas pendidikan di kampus tidak ada. Masih banyak urusan yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kampus,” ujarnya.

Bagi Ubaid, Kemendikbud sebaiknya fokus mengelola Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah pandemi virus korona. Hal itu jauh lebih penting dari pada memberikan pendekatan militer untuk saat ini. “Ya PJJ tentu itu jauh lebih penting dari pada mengurus perkara yang tidak ada urgensi dan

relevansinya. Kemudian, Memperkuat nalar kritis mahasiswa dan juga perdebatan ilmiah yang kritis-transformatif itu jauh lebih penting dari pada pendekatan militeristik yang indoktrinasi,” terangnya.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tengah menyiapkan program Komponen Cadangan (Komcad), program pendidikan militer kepada warga negara berusia 18-35 tahun. Komcad disiapkan untuk pengerahan melalui mobilisasi. Tujuannya, memperbesar dan memperkuat TNI dalam menghadapi ancaman militer.

Kemendikbud turut mendukung jalannya program tersebut. Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nizam menyebut program Komcad tak bersifat wajib bagi mahasiswa. Komcad bersifat sukarela dan jadi bagian pemenuhan hak mahasiswa dalam kebijakan Kampus Merdeka.

“Hak tersebut kita penuhi melalui skema kampus merdeka. Sehingga mahasiswa dapat mengambil haknya untuk menjadi komponen cadangan pertahanan negara,” kata Nizam.

Nizam percaya program ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kepemimpinan dan bela negara. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara menyatakan warga negara Indonesia (WNI) punya hak menjadi komponen cadangan.

“Mahasiswa dapat mengambil haknya untuk menjadi komponen cadangan pertahanan negara,” ucap Nizam.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/0kp0x57k-jppi-program-komponen-cadangan-tak-relevan-diterapkan-di-kampus?p=all>

Banyak Guru Terpapar Covid-19, JPPI: Jangan Buru-buru Buka Sekolah



Maria Fatima Bona / IDS
Senin, 24 Agustus 2020 | 22:29 WIB

Ilustrasi sekolah tatap muka. (Antara)

Jakarta, Beritasatu.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebutkan ada 42 guru dan dua pegawai tata usaha sekolah yang meninggal akibat Covid-19 di seluruh Indonesia. Merespons hal tersebut, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan, pemerintah seharusnya melindungi guru dengan mempertimbangkan secara matang kebijakan pendidikan di masa pandemi.

“Jika masih ada penambahan jumlah yang positif terpapar Covid-19 setiap hari, pemerintah jangan buru-buru membuka kembali sekolah,” ujarnya kepada Suara Pembaruan, Senin (24/8/2020).

Ubaid menyebutkan, perlindungan terhadap siswa dan guru harus dinomorsatukan sehingga tidak jatuh korban yang sia-sia. Oleh karena itu, Ubaid berharap, pemerintah daerah (pemda) mengutamakan keselamatan siswa dan guru saat akan kembali membuka sekolah tatap muka. “Ini yang dikhawatirkan banyak pihak dan kini menjadi kenyataan. Seharusnya pemerintah mempertimbangkan matang-matang soal kebijakan pendidikan di masa pandemi ini,” kata Ubaid.

Kendati demikian, ia menyarankan instansi pemerintah untuk bersinergi dalam membuat kebijakan, yakni mengutamakan pertimbangan kesehatan dan perlindungan siswa dan guru. Selain itu, sebelum sekolah kembali dibuka, pemerintah harus menyiapkan dan memastikan penerapan protokol kesehatan di sekolah.

Sumber: <https://www.beritasatu.com/irawati-diah-astuti/nasional/668883/banyak>

Penyaluran Subsidi Kuota Harus Berkaca dari Bansos Sebelumnya



Dinarsa Kurniawan

Selasa, 1 September 2020 | 14:48 WIB

Guru memberikan materi saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) kepada siswa kelas XI secara daring di SMA Negeri 8 Jakarta, Senin (13/7/2020). Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sekolah tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. HARITSAH ALMUDATSIR/ JAWA POS

JawaPos.com - Pemerintah telah meluncurkan banyak bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut di maksudkan untuk menopang perekonomian masyarakat.

Mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bansos Kartu Prakerja. Lalu ada juga, subsidi listrik, subsidi UMKM serta bantuan subsidi upah (BSU). Salah satu yang terbaru adalah bantuan subsidi pulsa bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Melihat itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, pemerintah harus bercermin pada penyaluran bansos-bansos sebelumnya.

“Banyak yang tidak tepat sasaran, datanya out of date kemudian ada dugaan penyelewengan, karena bantuan internet ini datang belakangan, harus berkaca pada bantuan yang sudah-sudah,” terang dia kepada JawaPos.com, Selasa (1/9).

Dia meminta pemerintah untuk merincikan strategi bagaimana agar bansos tepat sasaran, calon penerima bantuan yang diverifikasi serta pengawasan dan pemantauan yang melibatkan publik.

“Yang jelas bantuan ini jangan dilepas, harus berangkat dari pengalaman-pengalaman bantuan yang sudah, jadi proses pemantauan dan evaluasi itu harus diperketat dan kriterianya harus jelas, siapa yang berhak dan tidak berhak,” jelasnya.

Dengan koordinasi yang erat, kata Ubaid, ini akan membantu pemerintah dalam pengawasan penyaluran bantuan subsidi pulsa. “Masyarakat bersama-dengan pemerintah untuk mensukseskan program ini, membantu mengawasi supaya tepat sasaran,” terang dia. (*)

Sumber: <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/01/09/2020/penyaluran-subsidi-kuota-harus-ber-kaca-dari-bansos-sebelumnya/?fbclid=IwAR3TxDC5kazULDT3PUNVGEcxSv9KzkLSgqW4yzDM-vjw-wCU5u21QmouH9FY>

Berikan Kuota Gratis untuk Guru Honorer Saja

Editor: Ahmadi Sultan

Selasa, 1 Sep 2020 - 16:15 WIB

batampos.co.id – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyampaikan kepada pemerintah untuk tidak memberikan kuota gratis kepada guru yang menerima tunjangan kinerja daerah. Pasalnya, guru tersebut sudah dirasa mampu.

Sepaham dengan itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan kuota gratis tersebut kepada yang butuh saja. Salah satunya guru honorer.

“Yang perlu subsidi kuota itu yang membutuhkan, kalau modelnya PNS udah dapet tunjangan segala macam, ngga perlu. Yang perlu itu guru honorer yang dia tidak dapat subsidi manapun, itu penting mendapatkan prioritas,” jelasnya kepada JawaPos.com, Selasa (1/9).

“Tapi kalau misalnya dia sudah PNS kemudian dapat tunjangan dan ada sertifikasi segala macam, saya pikir itu ngga relevan,” sambung dia.

Dia juga meminta agar pengawasan dan penyaluran bantuan dari Kemendikbud berlangsung dengan lancar. Untuk itu, perlu ada koordinasi yang intens bersama pemerintah daerah, dinas pendidikan daerah dan pihak sekolah.

“Kalau ngga itu kan pemborosan anggaran, menghamburkan uang rakyat karena itu kan uang rakyat juga, jadi kalau tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, ya pasti jatuhnya pemborosan,” imbuhnya.

Untuk daerah penerima, menurut dia yang patut untuk dibantu adalah daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan) yang memiliki jaringan internet. “Bantuan ini kan bantuan internet, pasti tidak akan berguna di sekolah yang jaringan internetnya bermasalah, ngga berguna karena jaringan ngga ada. juga daerah-daerah yang listriknya aja ngga ada,” pungkasnya.

Sumber: <https://batampos.co.id/2020/09/01/berikan-kuota-gratis-untuk-guru-honorer-saja/?fbclid=IwAR1z6yWurYPuSnkjL9Pf8i2ibBFirIcE2dbR6fkbGbhrTB0R7-LnwFzQ0E8>

Data Siswa Penerima Bantuan Kuota Internet 35 GB Harus Ditampilkan oleh Kepsek



Rabu, 2 September 2020 pukul 14.34 Editor

Ilustrasi. (Radar Malang)

JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta agar kepala sekolah (kepsek) mempublikasikan penerima bantuan kuota internet 35GB dari pemerintah untuk mendukung siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh secara daring dari rumah.

“Iya (koordinasi erat), benteng terakhir (penyaluran subsidi) kan di level sekolah, calon penerima bantuan ini, itu datanya harus dipublish di sekolah sehingga verifikasi data dan potensi tidak tepat sasaran itu bisa diminimalisir,” ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji kepada JawaPos.com (Grup Radar Bekasi), Selasa (1/9). Menurutnya, jika tidak dipublikasi dan data penerima hanya diketahui oleh kepala sekolah saja, ada kecenderungan terjadinya conflict of interest atau konflik kepentingan.

“Didistribusikan sendiri oleh kepala sekolah, datanya di data sendiri oleh kepala sekolah, maka kemungkinan besar ada potensi penyelewengan dan tidak tepat sasaran karena tidak melibatkan partisipasi publik, dan tidak dikelola secara transparan dan akuntabel,” jelas dia.

Ubaid juga meminta agar pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera membuat petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai pedoman pemberian bantuan. Jika telah ada juklak dan juknis, maka hal selanjutnya yang tinggal dilakukan adalah mensosialisasikannya kepada para pemangku kepentingan.

“Supaya mereka tahu kalau harus dapet bantuan itu berapa nilainya, berhak atau tidak, karena

masyarakat kalau merasa dirinya nggak berhak, kalau dikasih ya ditolak kan. tempat informasi semacam posko di sekolah, kalau ada anak atau guru yang dia merasa berhak tapi tidak di data itu bisa melapor ke posko dan datanya bisa di revisi,” tutupnya.

Sementara, Pengamat Pendidikan Tengku Imam Kobul mengatakan, bahwa Kemendikbud jangan hanya sekedar memberikan bantuan kuota internet kepada peserta didik. Tetapi juga harus segera menyampaikan juknisnya.

“Jangan cuma sekedar ngasih kuota saja, harus dijelaskan teknis penggunaannya agar siswa yang mendapatkan bantuan bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya” ujar Imam.

Menurutnya, Kemendikbud belum menyampaikan secara detail terkait bantuan kuota internet. Padahal, program ini harus dipersiapkan dengan matang agar anggaran yang dikeluarkan oleh negara dapat benar-benar bermanfaat.

“Saya lihat ini hanya sekedar ngasih kuota saja, belum jelas teknisnya. Saya rasa Mendikbud bisa lah membuat rancangan belajar melalui program bantuan kuota ini, agar gak cuma kuota saja yang didapat, tapi manfaat belajarnya juga bisa didapat,” pungkasnya.

Sumber: https://bekasi.pojoksatu.id/baca/data-siswa-penerima-bantuan-kuota-internet-35-gb-harus-di-tampilkan-oleh-kepsek?fbclid=IwAR0kADKu_Ps805tizOMNW_6T88vduiYeBQnSEaEGhNQZnzF2e1c-J8Et-Dt8

Penyaluran Kuota Gratis Harus Dipublikasikan Pihak Sekolah

Editor: Ahmadi Sultan

Rabu, 2 Sep 2020 - 08:45 WIB

batampos.co.id – Pemerintah memberikan subsidi kuota gratis sebesar 35 GB untuk para siswa yang mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring. Satuan pendidikan melalui kepala sekolah diminta untuk mendata nomor handphone siswa dan menginputnya ke aplikasi Dapodik.

Untuk menghindari adanya penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta agar kepala sekolah mempublikasikan para penerima subsidi kuota gratis.

“Iya (koordinasi erat), benteng terakhir (penyaluran subsidi) kan di level sekolah, calon penerima bantuan ini, itu datanya harus dipublish di sekolah sehingga verifikasi data dan potensi tidak tepat sasaran itu bisa diminimalisir,” jelas dia, Selasa (1/9).

Menurut dia, jika tidak dipublikasi dan data penerima hanya diketahui oleh kepala sekolah saja, ada kecenderungan terjadinya conflict of interest atau konflik kepentingan. Dengan begitu, dana sebesar Rp 7,2 triliun. “Didistribusikan sendiri oleh kepala sekolah, datanya di data sendiri oleh kepala sekolah, maka kemungkinan besar ada potensi penyelewengan dan tidak tepat sasaran karena tidak melibatkan partisipasi publik, dan tidak dikelola secara transparan dan akuntabel,” jelas dia.

Ubaid juga meminta agar pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera membuat petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai pedoman pemberian bantuan. Jika telah ada juklak dan juknis, maka hal selanjutnya yang tinggal dilakukan adalah mensosialisasikannya kepada para pemangku kepentingan.

“Supaya mereka tau kalau harus dapet bantuan itu berapa nilainya, berhak atau tidak, karena masyarakat kalau merasa dirinya ngga berhak, kalau dikasih ya ditolak kan. tempat informasi semacam posko di sekolah, kalau ada anak atau guru yang dia merasa berhak tapi tidak di data itu bisa melapor ke posko dan datanya bisa di revisi,” tutupnya.

Sumber: https://batampos.co.id/2020/09/02/penyaluran-kuota-gratis-harus-dipublikasikan-pihak-sekolah/?fbclid=IwARITWxBUoi0wGyTsUzB4c2qKAp1PGIW_PSbqFEB9mXFGC0bN8NkeFkYekw

JPPI Kritisi Langkah Kemenag Potong Dana BOS



Kamis 10 September 2020, 00:29 WIB

Madrasah Syarief Oebaidillah

MI/Fransisco Carolio Hutama Gani Kegiatan santri di Pondok Pesantren

LANGKAH Kementerian Agama (Kemenag) yang memotong dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk lembaga pendidikan keagamaan madrasah, pondok pesantren semasa pandemi covid-19 menuai kritikan dan sorotan berbagai kalangan.

Sebelumnya, pada rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Fachrul Razi ,Selasa (8/9) sepakat mengembalikan pemotongan BOS senilai R 890 miliar untuk dikembalikan penggunaannya pada fungsi semula. Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengingatkan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mesti mengetahui bahwa Kemenag tidak hanya mengurus soal agama, tapi juga urusan pendidikan yaitu madrasah dan pesantren.

“Kita amat sayangkan Menag memotong dana BOS pendidikan agama ini, dia harus tahu pendidikan adalah bagian dari sektor yang terdampak covid-19, jadi harus mendapat prioritas program dan penambahan anggaran, bukan malah disunat. Apalagi mayoritas madrasah, lebih dari 95% itu adalah swasta. tentu sangat terpukul dengan adanya pandemi ini. harusnya mendapat anggaran tambahan hasil realokasi anggaran di Kemenag, bukan malah dipotong,” tegas Ubaid Matraji menjawab Media Indonesia, Rabu (9/9)

Ubaid mengemukakan madrasah dan pesantren di bawah Kemenag adalah pendidikan yang

berbasis komunitas yang terdiri dari banyak rakyat kecil sebagai penerima manfaat. “Jika kebijakan Kemenag tidak berpihak pada madrasah dan pesantren, maka dia mengabaikan pendidikan rakyat dan mengabaikan sektor swasta yang justru selama ini menopang madrasah dan pesantren yang berkontribusi dalam membangun pendidikan di negara ini,” tegasnya

Ubaid mengingatkan lagi kesepakatan Menag dengan Komisi VIII DPR yang akan mengembalikan potongan dana BOS Madrasah dan pesantren senilai Rp890 miliar “Jangan hanya janji-janji atau memberi harapan palsu atau PHP, harus dilakukan dengan segera dan cepat. Sebab jika bergerak lambat, maka ada banyak hak-hak madrasah dan pesantren yang terabaikan akibat penundaan yang sengaja dilakukan Menag ini,” tandas Ubaid.

Ditanya tentang perkembangan BOS Sekolah di lingkungan Kemendikbud, Ubaid mengutarakan belum ada temuan spesifik karena sekolah masih melakukan pendataan subsidi kuota internet oleh pemerintah. Pada raker Komisi VIII DPR dengan Menag, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menegaskan sejak awal Komisi VIII DPR tidak menyetujui pemotongan anggaran BOS untuk lembaga pendidikan keagamaan. Menurutnya Kemenag tidak kooperatif karena berjanji tidak memotong dana BOS.

“Bayangkan madrasah itu tidak ada pandemi saja terseok-seok, apalagi ada pandemi. Yang viral seolah-olah Komisi VIII setuju dengan pemotongan itu,” kata Yandri Susanto pada raker tersebut. (OL-7)

Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/343591/jppi-kritisi-langkah-kemenag-potong-dana-bos-madrasah>

Potong BOS Madrasah dan Pesantren, Sikap Kemenag Disesalkan, JPPI : Harusnya Ditambah Bukan Disunat



Siswandi · 10 Sep 2020, 15:52

Menteri Agama Fachrul Razi

RIAU24.COM - Koordinator Nasional Jaringan Pengawas Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengaku menyesalkan langkah Kementerian Agama (Kemenag). Hal itu setelah instansi tersebut memotong dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah dan pesantren. Jumlahnya juga cukup besar, yakni mencapai sebesar Rp100 ribu per siswa.

“Pendidikan adalah salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi ini, harusnya anggaran ditambah bukan malah disunat,” lontarnya, dilansir sindonews, Kamis 10 September 2020.

Ubaid menilai, sejak awal Program Jarak Jauh yang diterapkan selama Pandemi COVID-19 tidak berjalan efektif. Sehingga, proses belajar ini seharusnya diperkuat dengan anggaran yang ada seperti BOS supaya berjalan lebih baik.

Bahkan bila perlu anggarannya justru ditambah. Sedangkan penambahan itu bisa digunakan untuk peningkatan kompetensi guru, pengadaan sarana penunjang, bantuan langsung ke siswa dan guru honorer.

“Ini kok malah dikurangi. Apa maunya Menag ini. Madrasah mau dibawa ke mana? Di kementerian agama itu bukan hanya soal radikalisme Pak Menag, tapi Pendidikan juga menjadi core utama di kementerian ini,” sindirnya.

“Ini kok malah dikurangi. Apa maunya Menag ini. Madrasah mau dibawa ke mana? Di kementerian

agama itu bukan hanya soal radikalisme Pak Menag, tapi Pendidikan juga menjadi core utama di kementerian ini,” sindirnya.

“Ini menunjukkan kebijakan Menag ini tidak perpihak kepada pendidikan rakyat. Sebab madrasah dan pesantren adalah mayoritas dikelola swasta dan berbasis masyarakat,” pungkasnya. ***

Sumber: <https://m.riau24.com/berita/baca/1599728018-potong-bos-madrasah-dan-pesantren-sikap-ke-menag-disesalkan-jppi-harusnya-ditambah-bukan-disunat?fbclid=IwAR2gW8iLKGa-JX4h8tjgabw2-qPNtAaWtQOAc6Ge5R2hCl75hvLDaxg-l-oE>

Kemenag Potong BOS Madrasah-Pesantren, JPPI:

Harusnya Ditambah bukan Disunat



Rakhmatulloh Kamis, 10 September 2020 - 15:11 WIBViews: 4.222

Menteri Agama Fachrur Razi. Foto/Dok/SINDOnews

JAKARTA - Kordinator Nasional Jaringan Pengawas Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengaku menyesalkan langkah Kementerian Agama (Kemenag) yang memotong dana BOS madrasah dan pesantren Rp100.000 per siswa. “Pendidikan adalah salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi ini, harusnya anggaran ditambah bukan malah disunat,” kata Ubaid saat dihubungi SINDOnews, Kamis (10/9/2020).

Ubaid menilai, sejak awal Program Jarak Jauh yang diterapkan selama Pandemi COVID-19 tidak berjalan efektif. Sehingga, proses belajar ini seharusnya diperkuat dengan anggaran yang ada seperti BOS supaya berjalan lebih baik. Ia mengusulkan justeru anggarannya perlu ditambah untuk peningkatan kompetensi guru, pengadaan sarana penunjang, bantuan langsung ke siswa dan guru honorer.

“Jadi harusnya ditambah. Ini kok malah dikurangi. Apa maunya Menag ini. Madrasah mau dibawa kemana? Di kementerian agama itu bukan hanya soal radikalisme Pak Menag, tapi Pendidikan juga menjadi core utama di kementerian ini,” ujarnya. Untuk itu, Kemenag seharusnya paham mengenai hal ini. Baginya, sekolah yang memiliki anggaran cukup besar, idealnya tetap harus ditambah dana BOS-nya selama pandemi COVID-19, ini madrasah sektor penting yang dananya minim dan mayoritas swasta malah justru dikurangi.

“Ini menunjukkan kebijakan Menag ini tidak perpihak kepada pendidikan rakyat. Sebab madrasah dan pesantren adalah mayoritas dikelola swasta dan berbasis masyarakat,” pungkask dia.

Sumber: <https://edukasi.sindonews.com/read/160198/212/kemenag-potong-bos-madrasah-pesantren-jp-pi-harusnya-ditambah-bukan-disunat-1599725342?fbclid=IwAR3kArMf3cdZjGCYRXFiNY08NeVL1IPVD-DGViHJ3yNLaxXqSeKln27UEo8>

Bantuan kuota internet gratis Kemendikbud bakal cair pekan ini



Selasa, 15 September 2020 / 14:33 WIB

ILUSTRASI. JAKARTA, 02/09-PROGRAM INTERNET GRATIS. Sejumlah pelajar melakukan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Balai Warga RT 05/RW 02 Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2020). JAK Wifi adalah program internet gratis dari Pemprov DKI Jakarta

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menyalurkan bantuan kuota internet gratis untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen mulai pekan ini.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nizam mengatakan, semua nomor handphone yang didaftarkan mahasiswa ke kampus untuk program bantuan subsidi kuota telah masuk sistem pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) dan data pokok pendidikan (Dapodik).

Rencananya bantuan kuota untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen akan mulai disalurkan pekan ini. “Pekan ini bantuan kuota cair Insya Allah,” kata Nizam kepada Kontan, Selasa (15/9).

Nizam mengatakan, jika semua proses lancar, penyaluran bantuan kuota tersebut bisa mulai disalurkan pekan ini. Seperti diketahui, kuota yang akan diberikan untuk siswa 35 GB, Guru 40 GB, Mahasiswa 50 GB, dan Dosen 50 GB untuk setiap bulannya.

“Kalau semua lancar pekan ini sudah dilaksanakan,” ucap Nizam.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf mengatakan, hal yang perlu diperhatikan pemerintah agar program ini tepat sasaran adalah cara mendata dan pihak yang mendata. Kemudian siapa

saja yang dianggap berhak.

“Apakah semua siswa atau hanya mereka yang tidak mampu. Semua ini tentu harus masuk data dapodik, sehingga akan transparan nantinya siapa yang mendapatkan atau tidak mendapatkan,” kata Dede.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta nama-nama calon penerima bantuan harus dipublikasikan perguruan tinggi dengan harapan semua orang bisa mengawasi. Sebab, program ini berpotensi menjadi program yang tidak efektif jika penerima bantuan tidak tepat sasaran.

“Ini untuk supaya tepat sasaran. Dana triliunan itu bisa menjadi pemborosan uang jika disalurkan tidak tepat sasaran,” kata Ubaid.

JPPI menyoroti pemberian bantuan kuota di daerah – daerah yang sarana prasarana pendukungnya tidak memadai. Seperti di daerah-daerah yang jaringan listriknya tidak stabil atau bahkan yang tidak ada listrik. Tentunya bantuan tersebut hanya diuntungkan bagi sekolah-sekolah atau peserta didik yang tinggal di daerah – daerah yang ada jaringan internetnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

Sumber: <https://personalfinance.kontan.co.id/news/bakal-cair-pekan-ini-bantuan-kuota-internet-gratis-dari-kemendikbud?fbclid=IwAR2ZzpysW41Nz2LXRzkcO8-wNAiTYKzVBRvQdVUfRL7FpLXT9-EL-RMX3MbM>

Bakal cair pekan ini, bantuan kuota internet gratis dari Kemendikbud



Rabu, 16 September 2020 | 12:59 WIB

Reporter: Vendy Yhulia Susanto

ILUSTRASI. Bakal cair pekan ini, bantuan kuota internet gratis dari Kemendikbud. FOTO: Sejumlah pelajar melakukan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Balai Warga RT 05/RW 02 Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2020). BANTUAN SOSIAL –

JAKARTA. Pemerintah berencana menyalurkan bantuan kuota internet gratis untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen mulai pekan ini. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nizam mengatakan, semua nomor handphone yang didaftarkan mahasiswa ke kampus untuk program bantuan kuota internet gratis telah masuk sistem pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) dan data pokok pendidikan (Dapodik).

Rencananya bantuan kuota internet gratis untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen akan mulai disalurkan pekan ini. “Pekan ini bantuan kuota cair Insya Allah,” kata Nizam kepada Kontan, Selasa (15/9). Nizam mengatakan, jika semua proses lancar, penyaluran bantuan kuota internet gratis bisa mulai disalurkan pekan ini. Seperti diketahui, kuota yang akan diberikan untuk siswa 35 GB, Guru 40 GB, Mahasiswa 50 GB, dan Dosen 50 GB untuk setiap bulannya.

“Kalau semua lancar pekan ini sudah dilaksanakan,” ucap Nizam. Baca Juga: Jaga produktivitas selama WFH, Arupa Cloud Nusantara luncurkan cloud desktop Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf mengatakan, hal yang perlu diperhatikan pemerintah agar program ini tepat sasaran adalah cara mendata dan pihak yang mendata. Kemudian siapa saja yang dianggap berhak mendapat bantuan kuota internet gratis .

“Apakah semua siswa atau hanya mereka yang tidak mampu. Semua ini tentu harus masuk data dapodik, sehingga akan transparan nantinya siapa yang mendapatkan atau tidak mendapatkan,” kata Dede. Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta nama-nama calon penerima bantuan harus dipublikasikan perguruan tinggi dengan harapan semua orang bisa mengawasi. Sebab, program ini berpotensi menjadi program yang tidak efektif jika penerima bantuan tidak tepat sasaran. “Ini untuk supaya tepat sasaran. Dana triliunan itu bisa menjadi pemborosan uang jika disalurkan tidak tepat sasaran,

” kata Ubaid. JPPI menyoroti pemberian bantuan kuota di daerah – daerah yang sarana prasarana pendukungnya tidak memadai. Seperti di daerah-daerah yang jaringan listriknya tidak stabil atau bahkan yang tidak ada listrik. Tentunya bantuan tersebut hanya diuntungkan bagi sekolah-sekolah atau peserta didik yang tinggal di daerah – daerah yang ada jaringan internetnya

Oleh karena itu, JPPI mendorong pemerintah membuat pemetaan kualitas sekolah. Jadi semua bentuk program dan pemberian bantuan berdasarkan data. Hal ini harusnya tidak menjadi kendala apalagi Mendikbud Nadiem Makarim yang berpengalaman di bidang teknologi. “Harusnya sekolah itu ada pemetaan kualitasnya. Mana sekolah yang sarana-nya sudah bagus, mana sekolah-sekolah yang sarana-nya masih buruk dan perlu ditingkatkan,” ucap dia. Seperti diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, akan memberikan bantuan subsidi kuota kepada siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama empat bulan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ). Anggaran yang disediakan program ini sebesar Rp 9 triliun.

Editor: Hasbi Maulana | Reporter: Vendy Yhulia Susanto

Sumber: <https://personalfinance.kontan.co.id/news/bakal-cair-pekan-ini-bantuan-kuota-internet-gratis-dari-kemendikbud?fbclid=IwAR2ZzpysW4tNz2LXRzkcO8-wNAiTYKzVBRvQdVUfRL7FpLXT9-EL-RMX3MbM>

Karpet Merah Terbentang Untuk Kampus Asing



Koran SINDO Kamis, 17 September 2020 - 07:01 WIB

RUU Ciptaker tak hanya ditujukan pada upaya menciptakan kondusivitas iklim usaha, tapi juga men-
yasar pada penyederhanaan regulasi pendidikan yang mengarah pada komersialisasi. Foto/dok

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) tak hanya ditujukan pada upaya menciptakan kondusivitas iklim usaha, tapi juga menyasar pada penyederhanaan regulasi pendidikan. Ironisnya, penyederhanaan regulasi pendidikan ini justru terkesan memberikan bentangan karpet merah bagi masuknya kampus asing dan memicu potensi komersialisasi pendidikan. Sejumlah perubahan regulasi pendidikan dalam RUU Ciptaker meliputi penghapusan persyaratan pendirian perguruan tinggi asing di Indonesia, penghapusan prinsip nirlaba dalam otonomi pengelolaan perguruan tinggi, dan penghapusan kewajiban bagi perguruan tinggi asing untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi nasional.

Selain itu, RUU Ciptaker kluster pendidikan juga menghapus sanksi pidana dan denda bagi satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran administratif, tidak adanya kewajiban bagi program studi untuk melakukan akreditasi, hingga dosen lulusan luar negeri tidak perlu lagi melakukan sertifikasi. Perubahan-perubahan tersebut tercantum dalam RUU Ciptaker Pasal 33 (6-7) tentang program studi tidak wajib melakukan akreditasi, Pasal 45 (2) tentang sertifikasi dosen tidak wajib bagi dosen lulusan PT LN yang terakreditasi, Pasal 53 tentang badan hukum pendidikan nasional dapat berprinsip nirlaba, Pasal 63 tentang penghapusan prinsip nirlaba dalam otonomi pengelolaan perguruan tinggi, Pasal 65 tentang perguruan asing tidak wajib bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri, Pasal 67, 68, 69 tentang penghapusan sanksi pidana dan bagi perguruan tinggi yang melakukan pelanggaran administratif, Pasal 78 tentang penyelenggara/satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran hanya disanksi secara administratif, dan Pasal 90 tentang penghapusan persyaratan pendirian perguruan tinggi asing di Indonesia. Pasal-pasal tersebut mengubah regulasi lama yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor

20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tentang Badan Hukum Pendidikan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, yang berprinsip nirlaba dan harus mendapatkan izin menteri.

Lalu Pasal 65 ayat (3) UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas dan Pasal 90 ayat (4) serta ayat (5) UU Nomor 12/2012 tentang Dikti, yang semula wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan nasional, mengutamakan dosen, pengelola dan tenaga kependidikan WNI, serta wajib mendukung kepentingan nasional

Selain itu, ketentuan umum poin (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti yang berbunyi: Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

“Ada beberapa pasal terkait pendidikan di RUU Ciptaker yang kontraproduktif dengan filosofi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Jika benar-benar diterapkan, maka RUU Ciptaker kluster pendidikan akan membawa Indonesia sebagai pasar bebas pendidikan,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Jumat (11/9/20).

Huda menjelaskan, semangat yang dibawa oleh RUU Ciptaker mengarah pada liberalisasi pendidikan. Peran negara dibuat seminimal mungkin dan menyerahkan penyelenggaraan pendidikan pada kekuatan pasar. “Kondisi ini akan berdampak pada tersingkirnya lembaga-lembaga pendidikan berbasis tradisi, seperti pesantren dan kian mahal biaya pendidikan,” ujarnya. Huda menilai, dari berbagai aturan baru ini tampak nyata jika RUU Ciptaker memberikan karpet merah terhadap masuknya perguruan tinggi asing ke Indonesia serta kebebasan perguruan tinggi untuk memainkan besaran biaya kuliah.

Selain itu, kian longgarnya aturan sertifikasi, akreditasi, hingga penghapusan ancaman sanksi denda dan pidana akan berdampak pada pengabaian asas kesetaraan mutu dari perguruan tinggi.

“Khusus penghapusan sanksi pidana dan denda akan berdampak pada lemahnya penegakan hukum pada perguruan tinggi, yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi. Bisa dibayangkan jika kondisi itu terjadi saat banyak perguruan tinggi asing berdiri di sini. Mereka bisa leluasa melakukan pelanggaran administratif tanpa dibayangi sanksi pidana atau denda,” katanya.

Sumber: https://nasional.kontan.co.id/news/bantuan-kuota-internet-gratis-kemendikbud-bakal-cair-pekan-ini?fbclid=IwAR2vkHrOregSJGXKvt-sm-nJgrSDdaoMjk15rZv_xVjfWcDBCfjjdm4m3Zs

Subsidi Kuota

Jumat, 18 September 2020 / 13:07 WIB

KONTAN.CO.ID - Pemerintah segera menyalurkan bantuan kuota internet gratis ke siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Mengutip Kontan.co.id Selasa (15/9), Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Nizam mengatakan, semua nomor ponsel yang didaftarkan sudah masuk sistem pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) dan data pokok pendidikan (Dapodik).

Kuota yang diberikan adalah siswa 35 gigabyte (GB), guru 40 GB, mahasiswa 50 GB, dan dosen 50 GB setiap bulan. Total jenderal, bantuan kuota ini bernilai jumbo: Rp 9 triliun. Nizam menargetkan, bantuan kuota itu cair pekan ini.

Tapi hingga Kamis (17/9) belum ada tanda-tanda kuota itu terdistribusi. Masih banyak hal mengganjal. Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf mengatakan, program ini harus tepat sasaran. Ia berharap ada kepastian penerima kuota, apakah semua siswa atau hanya yang tidak mampu. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji meminta calon penerima bantuan dipublikasikan agar banyak yang mengawasi. Program ini berpotensi tidak efektif jika penerima bantuan kuota ini tak tepat sasaran.

Tak cuma itu, dari sisi operator telekomunikasi memiliki ganjalan. Tanggal 3 September 2020, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengirimkan surat ke empat menteri sekaligus. Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Mendikbud dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Dalam surat yang salinannya KONTAN peroleh menyebutkan, Kemdikbud menetapkan harga kuota Rp 1.000 per GB. "Harga itu bukan harga yang diberlakukan ke pelanggan. Harga tersebut di bawah biaya menyediakan layanan per GB," bunyi surat tersebut. Dan sebagian penerima subsidi kuota itu sudah berlangganan operator telekomunikasi. Kuota itu untuk mengakses situs yang sudah disepakati, tapi termasuk YouTube. Nah, YouTube ini dikhawatirkan tak cuma mengakses materi pendidikan.

Jadi, subsidi bukan berasal dari pemerintah, tapi operator. Hal ini mengancam pendapatan mereka. Dalam surat tersebut, operator meminta kompensasi berupa pengurangan beban regulatory charges. Seperti Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Sebaiknya pemerintah dan operator duduk bersama menyelesaikan beragam persoalan ini. Dan harus segera selesai. Taruhannya adalah masa depan anak bangsa.

Penulis : Ahmad Febrian

Redaktur Pelaksana

Sumber: <https://analisis.kontan.co.id/news/subsidikuota?fbclid=IwAR3izRh5CrNtApChTyKc2aRMxyTk-DIZFvM9RLWtBCjJFWTtFwBP3wH4QtI>



JPPI Katakan Pandemi Harusnya Jadi Momentum Peningkatan Pendidikan

Nurul Adriyana Salbiah

Minggu, 20 September 2020 | 14:07 WIB

Sejumlah anak-anak sekolah mengikuti belajar secara daring atau online dengan fasilitas WiFi yang disediakan secara gratis oleh warga di Perumahan Pondok Mulya I, Beji, Depok, Rabu (29/7/2020). WiFi gratis ini oleh warga sekitar kompleks perumahan sebagai bentuk kepedulian atas kesulitan warga dalam menyediakan dana untuk kebutuhan belajar online. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

JawaPos.com - Pandemi Covid-19 harus dijadikan momentum peningkatan pendidikan. Hal ini diungkapkan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. “Ini momentum yang harus dimanfaatkan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan karena situasi ini kita tidak tau kapan berakhir. Mau tidak mau, situasi ini dipaksa oleh Covid,” ujar Ubaid ketika dihubungi JawaPos.com, Minggu (20/9).

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memprotes pendidikan kurang menjadi perhatian saat ini. Tapi menurut Ubaid, Mendikbud tidak perlu menyinggung pendidikan mengalami krisis akibat adanya pandemi. Sebelum ada pandemi pun, ini juga telah terjadi.

“Problemnya bukan hanya pada saat pandemi, sebelum pandemi pun performa pendidikan kita itu buruk. Pra covid saja sudah buruk, ini sudah jatuh tertimpa tangga karena Covid sehingga sebenarnya ini bukan kemudian menjadi hal buruk yang tidak bisa bangkit,” tuturnya.

Terlebih lagi, tenaga pendidikan alias guru masih kurang kompetensinya. Untuk itu, dengan waktu guru yang lebih luang daripada sebelumnya, kondisi ini harus dijadikan pemacu.

“Apakah ini akan diratapi saja sebagai sebuah bencana, atau menjadi titik balik bahwa kompetensi guru kita perlu ditingkatkan. Dalam konteks ini semua guru aktivitasnya tidak sepadat waktu normal,” jelasnya.

“Ini momentum pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru, gimana pemetaan dan intervensi, sehingga pemerataan mutu pendidikan tidak hanya menjadi wacana dan bisa dieksekusi,” tutup Ubaid.

Seperti diketahui, sebelumnya Nadiem mengungkapkan solusi ke depan di bidang pendidikan di

tengah pandemi Covid-19 jarang dibahas. Padahal, pendidikan merupakan salah satu indikator penting agar sebuah negara bisa lebih berkembang disamping ekonomi dan kesehatan.

“Semua orang membicarakan soal risiko kesehatan dari Covid dan juga krisis ekonomi, tapi saya tidak mendengar banyak orang yang membicarakan soal krisis pendidikan, itu yang terjadi dan itu membuat saya frustrasi. padahal itu bisa berpengaruh permanen untuk generasi sekarang,” ujar dia dalam Yidan Prize Asia Pacific Annual Conference secara virtual, Rabu (16/9).

Editor: Nurul Adriyana Salbiah

Sumber: <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/20/09/2020/jppi-katakan-pandemi-harusnya-jadi-momentum-peningkatan-pendidikan/>



JPPI Sebut Penghapusan Mapel Bukti Nadiem Tidak Paham Sejarah

JawaPos.com – Mata pelajaran sejarah rencananya akan dihapuskan dan dibatasi dalam kurikulum pendidikan nasional 2021. Hal tersebut pun mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Salah satunya diungkapkan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan bahwa mata pelajaran sejarah merupakan bagian pembentukan karakter peserta didik.

“Pendidikan karakter itu menjadi penting, kesadaran sejarah atau literasi sejarah itu menjadikan bangsa kita menjadi kuat,” ujarnya kepada *JawaPos.com*, Minggu (20/9).

Dia pun menduga bahwa Mendikbud Nadiem Makarim tidak memiliki perspektif sejarah yang kuat. Di mana mantan bos Gojek itu pernah berkata, ‘saya mungkin tidak tau masa lalu, tapi saya tahu masa depan’.

“Itu dibenarkan oleh kebijakan-kebijakan setelahnya, sampai mau menghilangkan pelajaran sejarah. Tampaknya Mas Menteri mengesampingkan tradisi, budaya dan sejarah dan hanya menjadikan SDM seperti robot-robot yang akan dipasangkan dalam mesin industri masa depan, padahal bukan begitu. manusia punya dimensi yang berbeda,” imbuhnya.

Ubaid beranggapan, Nadiem melihat manusia hebat adalah manusia yang bisa menatap masa depan, tapi tidak dipandang sebagai manusia yang utuh dan bisa berbudaya. Akan tetapi, apa bisa hal tersebut mengembangkan tradisi leluhur bangsa Indonesia.

“Kita ada di zona pasar bebas, kalau kita tidak punya kesadaran dan literasi sejarah yang kuat, ya tamatlah bangsa ini, kita menjadi generasi masa depan yang tidak tau akar budaya yg mengikuti arus budaya luar dan menjelekkan budaya sendiri,” tegasnya. (*)

Sumber: <https://aktual.co.id/2020/09/20/jppi-sebut-penghapusan-mapel-bukti-nadiem-tidak-paham-sejarah/>

Penggunaan Subsidi Kuota Internet Dibatasi, Pengamat: Kebijakannya Tidak Tepat Guna



Maria Fatima Bona / IDS

Senin, 21 September 2020 | 23:48 WIB

Ilustrasi belajar dalam jaringan di rumah. (Antara)

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) resmi menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020. Subsidi kuota yang diberikan Kemdikbud dibagi untuk kuota umum dan kuota belajar.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mempertanyakan petunjuk teknis (juknis) Kemdikbud yang membatasi penggunaan kuota ini. Menurut Ubaid, apabila Kemdikbud membatasi kemampuan jelajah siswa dan mahasiswa, tentu subsidi kuota internet yang menghabiskan anggaran Rp 7,2 triliun ini akan sia-sia dan tidak tepat guna.

Pasalnya, kuota belajar jumlahnya lebih banyak dari kuota umum. Sementara penggunaan kuota belajar sangat terbatas. Oleh karena itu, ia yakin bahwa kuota belajar itu tidak akan terserap dengan baik.

Ubaid mengatakan, pemberian subsidi kuota ini seharusnya tidak ada batasan karena siswa dan mahasiswa memiliki sumber tak terbatas dalam belajar.

Sumber: https://www.beritasatu.com/irawati-diah-astuti/nasional/678995/penggunaan-subsidi-kuota-internet-dibatasi-pengamat-kebijakannya-tidak-tepat-guna?fbclid=IwAR3kduOwRJ_FPkiFFmOVAGc-Jxd-l4q_trSKTMVThlIQPUWOGPDFgZMaCkRA

Pembatasan Bantuan Kuota Dinilai Tak Tepat Guna



Neneng Zubaidah Selasa, 22 September 2020 - 10:52 WIB

Sejumlah siswa mengikuti proses belajar-mengajar dengan daring atau pembelajaran jarak jauh.

Foto/Dok/SINDOnews

JAKARTA - Bantuan kuota internet Kemendikbud yang dibagi dua untuk kuota umum dan kuota belajar dinilai tidak akan tepat guna karena guru dan siswa tidak bisa bebas menjelajahi sumber belajar yang tidak terbatas. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji berpendapat, semestinya bantuan kuota yang diberikan Kemendikbud itu bisa dipakai untuk apapun untuk kepentingan guru dan siswa dalam menunjang pembelajaran. Dia menilai, justru menjadi pertanyaan publik saat ini mengapa Kemendikbud membagi kuota tersebut.

Ubaid menjelaskan, bagaimanapun proses belajar dan juga sumber belajar yang bisa dijelajahi siswa dan guru selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) itu sangat tidak terbatas. “Kemampuan jelajah internetnya terbatas ya tentu akan sia sia dan tidak tepat guna. Dana triliunan tidak termanfaatkan dengan baik oleh peserta didik,” katanya ketika dihubungi SINDOnews, Selasa (22/9).

Dia menilai, jika bantuan kuota dibatasi dengan kuota belajar maka dari pengalaman yang sebelumnya itu sangat terbatas dan tidak bisa untuk membuka sumber-sumber belajar lain. Jika hal ini terjadi, katanya, kuota belajar yang besar itu tidak terserap dengan baik dan pasti menguntungkan provider

Ubaid menerangkan, masa pembelajaran dengan sistem PJJ di masa pandemi ini lebih bersifat luas dimana sumber belajar ada dan bisa dijelajahi baik melalui daring maupun luring. Oleh karena

itu dia pun berharap kemampuan jelajah kuota internetnya jangan dibatasi pemanfaatannya buat guru dan siswa. Ubaid menuturkan, untuk memaksimalkan PJJ setelah Kemendikbud membagikan bantuan kuota maka peran guru harus diperkuat. Sehingga dampaknya nanti bisa terjadi terjadi pembelajaran yang interaktif, fleksibel dan inovatif. “Jadi kuota itu dimanfaatkan untuk pembelajaran secara luas,” terangnya.

Sumber: <https://edukasi.sindonews.com/read/172366/212/pembatasan-bantuan-kuota-dinilai-tak-tepat-guna-1600744180?fbclid=IwAR2ZzpysW41Nz2LXRzkcO8-wNAiTYKzVBRvQdVUfRL7F-pLXT9-ELRMX3MbM>

Angka Putus Kuliah Capai 50 Persen



Risky AnggionoSelasa, 22 September 2020, 6:11 AM

BANDUNG – Pandemi Covid-19 telah membuat banyak sektor terkena dampak, salah satunya pendidikan. Untuk perguruan tinggi, saat ini angka putus kuliah sudah mencapai sekitar 50 persen.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, hal ini merupakan hal yang wajar. Apalagi kuliah merupakan barang mahal, hanya orang yang punya kemampuan ekonomi saja yang bisa kuliah. Sementara ketersediaan kampus berbiaya murah masih sedikit.

BANDUNG – Pandemi Covid-19 telah membuat banyak sektor terkena dampak, salah satunya pendidikan. Untuk perguruan tinggi, saat ini angka putus kuliah sudah mencapai sekitar 50 persen.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, hal ini merupakan hal yang wajar. Apalagi kuliah merupakan barang mahal, hanya orang yang punya kemampuan ekonomi saja yang bisa kuliah. Sementara ketersediaan kampus berbiaya murah masih sedikit.

“Sangat wajar sekali, masyarakat Indonesia banyak yang bermasalah soal ekonomi yang terdampak gara-gara ini. Banyak masyarakat Indonesia yg di PHK, korbannya mereka yang berkuliah itu ngga melanjutkan,” terang dia, dilansir dari bandung.pojoksatu.id, kemarin.

Meskipun ada keringanan seperti uang kuliah tunggal (UKT) serta Kartu Indonesia Pintar-

Kuliah (KIP-K), itu hanya meringankan sebagian kalangan saja. Karena kuliah kan butuh bayar kontrakan atau kosan, makan, operasional, dan akomodasi kuliah.

“Itu kan mahal. Kalau kampusnya ada di samping rumah sih enggak masalah disubsidi UKT, tapi kebanyakan yang kuliah kan di luar pulau dan kota,” tambahnya.

Dia pun tidak menjamin, pasca pandemi selesai mahasiswa yang sebelumnya putus kuliah akan kembali lagi. Sebab, negara atau masyarakat sendiri tentunya masih dalam tahap recovery ekonomi. “Belum (kembali kuliah), misalnya Covid selesai kan recovery ekonomi masih running” jelas dia.

Maka dari itu, Ubaid mengusulkan agar mahasiswa kembali masuk dalam perkuliahan dengan cepat, perlu ada relaksasi lain. Salah satunya afirmasi dari pihak kampus.

“Perlu ada kebijakan dari kampus memberikan afirmasi, ngga hanya diskon mungkin digratiskan. Kita punya dana abadi pendidikan, bisa dialokasikan disitu (afirmasi). Hak mendapatkan layanan pendidikan itu hak warga negara,” pungkas dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud, Abdul Kahar menyebut angka putus kuliah meningkat di tengah pandemi Covid-19. Bahkan tingkat putus kuliah bisa mencapai 50 persen.

“Rata-rata di perguruan tinggi swasta sangat rentan putus di tengah jalan. Sebelumnya 18 persen, ditambah kondisi Covid-19 ini bisa sampai 50 persen,” terang dia dalam siaran live, Kamis (17/9). (bbs/tur)

Sumber: https://jabarekspres.com/2020/angka-putus-kuliah-capai-50-persen/?fbclid=IwAR0dm7DOqD-49QoHO_SRnYvyE9QI78HsxbIIpPRSEVrjHYdXQNUm55Ilm1U

JPPI Dorong Pemerintah Pusat dan Daerah Duduk Bersama Atasi Problem Mutu Guru



Oktaviani

Senin, 25 November 2019 | 09:20 WIB

Ilustrasi - Hari Guru Nasional (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO, Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mendorong Pemerintah pusat dan daerah untuk duduk bersama mengatasi problem besar mutu guru saat ini. “Jika tidak, maka kebijakan apapun dari pusat susah berjalan di sekolah karena tidak adanya political will dari daerah,” kata Ubaid saat dihubungi **AKURAT.CO**, Senin (25/11/2019).

Begitu juga dengan penguatan pendidikan karakter bagi guru. Sebab, posisi guru sangat sentral di sekolah dan mereka diteladani oleh siswa. Ia menilai hari ini sekolah-sekolah di Indonesia miskin keteladanan. “Ini titik lemah guru-guru di Indonesia yang penting untuk ditingkatkan, dengan cara menguatkan kemampuan Pedagogi (Ilmu atau seni) guru dalam proses pembelajaran,” ungkapnya.

Ubaid mengatakan dengan digabungkannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pendidikan tinggi. Penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang mencetak guru-guru.

“Mengapa output gurunya kok lemah. Jadi harus ada evaluasi dan perubahan sistem serta kurikulum di LPTK,” tegasnya. Selain itu, menurut Ubaid, harus ada peta jalan pemerataan kualitas dan persebaran guru. Ini berakibat pada mutu sekolah yang tidak merata, dan kisruh tiap tahun saat PPDB. “Harus ada kebijakan afirmasi untuk guru honorer. Selama ini mereka hanya di kasih Pemberian Harapan Palsu (PHP), tapi nihil realisasi,” tandasnya.

Sumber: <https://akurat.co/news/id-874645-read-jppi-dorong-pemerintah-pusat-dan-daerah-duduk-ber-sama-atasi-problem-mutu-guru>

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Zona Merah Diminta Tak Paksakan Sekolah Tatap Muka



Kompas.com - 04/12/2020, 08:02 WIB 2

Seorang siswa mencoba duduk di meja belajar yang ditambahkan plastik di sekelilingnya di SMAN 4 Kota.Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020).(KOMPAS.COM/BUDIYANTO

KOMPAS.com – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta sekolah yang berada dalam zona merah peta persebaran Covid-19 tidak memaksakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka (PTM). Ia berharap pemerintah daerah tidak memberi izin sekolah melakukan pembelajaran tatap muka pada zona tersebut. Meskipun, dalam kebijakan dari surat keputusan bersama (SKB) empat Menteri memperbolehkan sekolah membuka pembelajaran tatap muka dengan tidak menggunakan peta persebaran Covid-19. “Karena tren yang masih terus naik terutama di zona merah, maka pemerintah daerah jangan memaksakan PTM di zona merah,” kata Ubaid saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/12/2020).

Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka “Jika dipaksakan, ini merupakan kebijakan bunuh diri massal. Sudah jelas berbahaya, pemerintah malah membuat kebijakan PTM,” kata dia. Oleh karena itu, ia mendorong sekolah maupun pemerintah daerah betul-betul memerhatikan bahaya penularan virus Covid-19 di lingkungan sekolah. JPPI berharap sekolah tidak terburu-buru melakukan pembelajaran tatap muka dan lebih memperkuat pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan penyelenggaraan pembelajaran semester Genap TA 2020/2021 di masa pandemi Covid-19.

Ditinjau Kembali Hal itu berdasarkan keputusan bersama empat menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Nadiem mengatakan, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atau

kantor wilayah kementerian agama untuk menentukan pembelajaran tatap muka. Pemberian izin dapat dilakukan secara serentak ataupun bertahap tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah. Adapun kebijakan tersebut mulai berlaku pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau mulai Januari tahun depan

Penulis : Irfan Kamil
Editor : Diamanty Meiliana

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/04/08020411/kasus-covid-19-terus-meningkat-zona-merah-diminta-tak-paksakan-sekolah-tatap>

Tangkal Penyebaran Covid-19, JPPI Dukung Rapid Antigen



Dimas Ryandi

Minggu, 20 Desember 2020 | 15:48 WIB

NGGAK SAKIT KAN: Seorang bocah menjalani tes Covid-19 di Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang. Bandara tersebut menyediakan posko khusus untuk melakukan rapid test antigen dan antibodi. (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

JawaPos.com - Mulai 18 Desember lalu, Pemerintah menetapkan mulai 18 Desember lalu, masyarakat yang hendak bepergian wajib menyertakan rapid antigen sebagai syarat ke luar atau ke dalam kota. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah penularan Covid-19 di libur panjang natal 2020 dan tahun baru 2021 (nataru).

Menanggapi hal itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengapresiasi langkah tersebut. Sebab, apabila mobilitas masyarakat tidak terkendali, maka akan berpengaruh negatif pada dunia pendidikan.

Pasalnya, pada Januari 2021 nanti, seluruh sekolah yang telah memenuhi daftar ceklis dan mendapat izin dari pemerintah daerah (pemda), sekolah serta komite sekolah akan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). “Untuk menahan laju penyebaran, saya setuju itu diterapkan,” ungkapnya kepada JawaPos.com, Minggu (20/12).

Akan tetapi, ia memberikan imbauan, ada baiknya keluarga yang memiliki anak di usia sekolah serta para guru tidak melakukan bepergian. Sebab, khawatirnya akan menimbulkan kluster Covid-19 di lingkungan sekolah. “Meski libur, sebaiknya menahan diri karena kasus masih

mengalami peningkatan. Apalagi sekolah akan masuk, ini bisa meningkatkan risiko menyebar ke sekolah. Bisa lewat guru, orang tua, anak, maupun masyarakat. Menghindari risiko tertular ini penting,” tegasnya.

Kemudian, ia juga meminta agar para pemda dan sekolah melakukan pemantauan dengan ketat kesiapan pembukaan sekolah. Jangan ada kelalaian yang menimbulkan bahaya bagi pendidikan Indonesia.

“Sekolah tidak bisa dibuka sembarangan. Harus dengan pertimbangan matang, kesiapan penerapan protokol kesehatan, zona wilayah, dan juga persetujuan orang tua dan masyarakat sekitar,” tandas Ubaid.

“Dinas tidak boleh egois mementingkan dirinya sendiri lalu berdampak pada keselamatan jiwa anak dan masyarakat,” sambungnya.

Editor:Dimas Ryandi

Sumber: <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/20/12/2020/tangkal-penyebaran-covid-19-jp-pi-dukung-rapid-antigen/>

**TAHUN
2021**

JPPI Kritik Program Kampus Mengajar Kemendikbud, Dinilai Berpotensi Buang-buang Anggaran



Penulis: Resty

Kamis, 11 Feb 2021

Nadiem Makarim/youtube kemendikbud RI

Terkini.id, Jakarta – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik Program Kampus Mengajar yang diluncurkan oleh Kemendikbud. JPPI menilai bahwa program Kampus Mengajar tidak memiliki kebaruan.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai program Kampus Mengajar yang baru diluncurkan Mendikbud Nadiem Makarim tak jauh berbeda dari Kuliah Kerja Nyata yang digelar kampus-kampus.

Menurutnya, program Kampus Mengajar yang mendorong mahasiswa untuk mengajar di daerah Terpencil, Terbelakang, dan Terdepan (3T) juga sudah dilakukan oleh kampus-kampus di Indonesia melalui program KKN.

“Yang dilakukan, mendorong ke daerah 3T, itu sudah dilakukan oleh kampus-kampus. Ada kampus yang mendorong mahasiswa melakukan KKN ke daerah 3T,” kata Ubaid Matraji pada Rabu, 10 Februari 2021, dilansir dari CNNIndonesia.com.

Berpotensi menjadi pemborosan anggaran

Ubaid Matraji menjelaskan bahwa jika tidak dipersiapkan dengan matang dan tidak berkelanjutan, maka program Kampus Mengajar hanya akan berujung pada pemborosan anggaran.

“Kalau tidak dipersiapkan dengan matang dan tidak ada program yang berkesinambungan dan

berkelanjutan, ya itu pasti ujung-ujungnya adalah pemborosan, buang-buang anggaran,” ujar Ubaid Matraji.

Seperti diketahui, Kampus Mengajar dilakukan dengan mengajak mahasiswa semester 5 ke atas menjadi pengajar di Sekolah Dasar (SD) di daerah 3T.

Pembekalan bagi peserta Kampus Mengajar akan dilakukan selama 7 hari.

Mahasiswa yang menjadi peserta Kampus Mengajar akan mendapatkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 2,4 juta serta biaya hidup sebanyak 700 ribu per bulan.

Kemendikbud merencanakan bahwa jumlah mahasiswa yang akan dipersiapkan untuk program Kampus Mengajar adalah 15.000 orang.

Maka, jumlah dana yang dibutuhkan untuk membayar mahasiswa saja yaitu sebesar 67,5 Miliar.

Dana program Kampus Mengajar ini akan diambil dari dana pendidikan abadi yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Dilansir dari laman resmi Kemendikbud Dikti, Program Kampus Mengajar ini merupakan bagian dari Kampus Merdeka yang sebelumnya sudah diluncurkan oleh Nadiem Makariem sebagai Menteri Pendidikan dan Budaya.

Selain untuk membantu anak-anak Sekolah Dasar di daerah 3T untuk bisa belajar di masa pandemi, program Kampus Mengajar ini juga bertujuan untuk mengasah kepemimpinan, kematangan emosional, dan kepekaan sosial para mahasiswa.

Sumber: <https://makassar.terkini.id/jppi-kritik-program-kampus-mengajar-kemendikbud-dinilai-berpotensi-buang-buang-anggaran/>

Mas Menteri Nadiem dan Sederet Tudingan Program Copy-Paste



Kamis, 11 Feb 2021

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Nadiem Makarim punya sejumlah julukan semenjak namanya kian dikenal sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan. Paling beken, dia sering disapa 'mas menteri' karena usianya yang tergolong muda. Kini julukan lain disinggung dapat menggambarkan ragam upaya dan langkah Nadiem dalam membenahi dunia pendidikan. Ia disebut-sebut doyan 'copy paste' kebijakan lama yang disulap menjadi program baru di kementerian.

"Harus diakui mendikbud kita urusan copy paste, plagiasi, contek karya orang lain, bukan hal baru," kata pengamat pendidikan dari Vox Populi Institut Indonesia Indra Charismiadi ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (10/2).

"Kita lihat program-program beliau mulai dari Merdeka Belajar, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Organisasi Penggerak, portal Guru Belajar itu kan copy paste semua dari Sekolah Cikal," imbuhnya lagi. Pernyataan Indra itu disampaikan merespons program baru Nadiem, Kampus Mengajar. Melalui program itu, ia mengajak mahasiswa membantu guru mengajar siswa Sekolah Dasar (SD) di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

Program ini dinilai mirip-mirip dengan kegiatan sebuah lembaga nirlaba di bidang pendidikan yang dibentuk mendikbud dua generasi di belakang Nadiem, Anies Baswedan. Ketika masih menjabat rektor Universitas Paramadina, gubernur DKI itu membentuk Indonesia Mengajar.

Indra menyatakan kemiripan antara program Nadiem dan pihak lain bukan hanya ini. Kejadian serupa, menurutnya, sempat tercium di pertengahan tahun lalu ketika pria kelahiran Singapura itu diserbu isu ‘mencuri’ merek dagang milik sekolah swasta, Sekolah Cikal.

Sederet kebijakan Nadiem di dunia pendidikan diberikan julukan ‘Merdeka Belajar’. Benang merahnya, setiap kebijakan yang dia buat bertujuan memberikan fleksibilitas kepada peserta didik dan pendidik untuk membuat inovasinya sendiri di dunia pendidikan.

Banyak pihak mempertanyakan nama Merdeka Belajar yang ternyata secara hukum milik pihak swasta. Pendiri Sekolah Cikal Najeela Shihab mengakui dia adalah pemilik resmi slogan itu. Merdeka Belajar merupakan salah satu program

pelatihan guru yang dia buat sejak 2015. Buntutnya, merek itu dihibahkan ke Kemendikbud. Najeela bahkan menerbitkan buku dengan judul ‘Merdeka Belajar di Ruang Kelas’ pada 2017, khusus mengulik konsep pendidikan itu. “Proses belajar yang bermakna mensyaratkan kemerdekaan guru dan murid dalam menentukan tujuan dan cara belajar yang efektif,” tulis rangkuman di balik sampul bukunya.

Meremehkan Pendidikan Dasar

Selain bukan inovasi baru, Indra menilai Kampus Mengajar juga bukan strategi yang tepat jika tujuannya untuk membenahi kendala pembelajaran karena pandemi covid-19. Saat meluncurkan program itu, Nadiem mengatakan mahasiswa bisa jadi agen perubahan yang bakal membantu proses belajar di jenjang pendidikan dasar.

“Anak mahasiswa disuruh ngajar, pertanyaannya adalah kualifikasi apa yang dimiliki anak-anak kita ini disuruh ngajar adik-adik kelasnya? Apa mereka punya kapasitas? Ini yang bisa membuktikan ternyata pemerintah menganggap enteng, menganggap remeh,” tuturnya.

Lihat juga: Kuota Program Kampus Mengajar Dibuka untuk 15 Ribu Mahasiswa Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahrizal Martha Tanjung mengatakan yang dibutuhkan sekolah di daerah 3T bukan tenaga pendidik dari kalangan mahasiswa. Tapi jaringan internet dan dukungan gawai untuk belajar daring.

Ketika kedua hal tersebut mereka tak punya, pembelajaran tatap muka jadi satu-satunya solusi yang paling ampuh. Dan menurut Fahrizal ini sudah diberikan Nadiem dengan menetapkan SKB 4 Menteri yang mengizinkan sekolah di semua zona dibuka dengan syarat.

“Malah justru lebih tepat mahasiswa membantu siswa-siswa yang belajar daring dengan model KKN (Kuliah Kerja Nyata). Karena dalam pembelajaran daring banyak kendala, karena banyak yang belajar satu arah dengan menggunakan Whatsapp saja,” ucapnya.

“Kalau di daerah 3T dengan anjuran melaksanakan pembelajaran tatap muka saya kira sudah ketemu solusinya,” lanjut dia.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mempermasalahkan kegiatan Kampus Mengajar yang menurut dia tak jauh berbeda dengan KKN di kampus. Hanya saja mahasiswa di program ini bukan cuma diimangi nilai, tapi juga uang kuliah hingga Rp2,4 juta dan biaya hidup Rp700 ribu per bulan.

Karena cenderung tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah berjalan dan implementasinya yang belum tentu berdampak besar, ia khawatir ujung-ujungnya program ini hanya buang-buang anggaran negara. Dengan kuota jumlah peserta sekitar 15 ribu orang, artinya dibutuhkan setidaknya Rp67,5 miliar untuk menjalankan program ini.

“Kalau tidak dipersiapkan dengan matang dan tidak ada program yang berkesinambungan dan berkelanjutan, ya itu pasti ujung-ujungnya adalah pemborosan, buang-buang anggaran,” ujar Ubaid.

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210211070756-32-605024/mas-menteri-na-diem-dan-sederet-tudingan-program-copy-paste>.

Mirip KKN, Kampus Mengajar Dinilai Berpotensi Jadi Pemborosan



CNN Indonesia
Kamis, 11 Feb 2021 06:41 WIB

Mendikbud Nadiem Makarim. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai program Kampus Mengajar yang baru diluncurkan Mendikbud Nadiem Makarim tak jauh berbeda dari Kuliah Kerja Nyata yang digelar kampus-kampus. Ubaid menyoroti efektivitas penggunaan dana negara yang dikeluarkan untuk program tersebut. Ubaid menilai Kampus Mengajar berpotensi buang-buang uang negara. Selain karena konsepnya serupa KKN yang sudah ada, menurut dia program itu seolah tak disiapkan dengan matang.

“Yang dilakukan, mendorong ke daerah 3T, itu sudah dilakukan oleh kampus-kampus. Ada kampus yang mendorong mahasiswa melakukan KKN ke daerah 3T,” kata dia ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (10/2).

Daripada membuat program baru, ia berpendapat seharusnya Kemendikbud berupaya memaksimalkan KKN yang sudah ada. Caranya dengan memastikan sebelum terjun ke lapangan, mahasiswa dibekali tujuan dan strategi yang jelas untuk mencapainya.

Lihat juga: DPR Minta Program Kampus Mengajar Diselaraskan dengan KKN
Selain itu, ia menyinggung pembekalan peserta Kampus Mengajar yang hanya dilakukan 7 hari. Sementara menurutnya, dampak yang berarti dari intervensi mahasiswa di daerah baru bisa terjadi jika dipersiapkan dengan benar.

Mendikbud Nadiem Makarim sendiri mengharapkan mahasiswa bisa menjadi solusi kendala pembelajaran di daerah 3T karena pandemi covid-19 lewat program ini. Ubaid tak yakin tujuan itu bisa tercapai dengan rencana yang seadanya.

“Kalau tidak dipersiapkan dengan matang dan tidak ada program yang berkesinambungan dan berkelanjutan, ya itu pasti ujung-ujungnya adalah pemborosan, buang-buang anggaran,” kata dia.

Ia menyebut kondisi ini kian miris ketika dilakukan di tengah pandemi. Menurutny masih banyak kendala pendidikan yang membutuhkan dukungan dana besar dari pemerintah, namun belum terselesaikan.

Lihat juga: Kuota Program Kampus Mengajar Dibuka untuk 15 Ribu Mahasiswa
Seperti diketahui, Kampus Mengajar dilakukan dengan mengajak mahasiswa semester 5 ke atas menjadi pengajar di sekolah dasar (SD) di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). Dari kegiatan ini, mahasiswa bakal mendapat nilai setara 12 satuan kredit semester (SKS)

Selain nilai, mahasiswa juga bakal mendapat bantuan uang kuliah tunggal (UKT) hingga Rp2,4 juta dan biaya hidup Rp700 ribu per bulan. Dengan jumlah kuota peserta yang disiapkan mencapai 15 ribu orang, setidaknya dibutuhkan Rp67,5 miliar untuk mendanai program itu. Uang tersebut berasal dari dana pendidikan abadi yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Sementara itu, Sesditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Paristiyanti Nurwardhani mengatakan program Kampus Mengajar berbeda dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Tapi keduanya adalah bagian dari Kampus Merdeka, rangkaian kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim di pendidikan tinggi.

“KKN aktivitas yang lain dalam Kampus Merdeka. Jadi ada delapan aktivitas. Jadi beda kegiatan,” katanya ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (10/2).

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210211061647-20-605012/mirip-kkn-kampus-mengajar-dinilai-berpotensi-jadi-pemborosan>.

UN Ditiadakan, JPPI: Penentuan Kelulusan Siswa Bisa Bersifat Partisipatif



Jumat, 5 Februari 2021 20:22 WIB

Penulis: Fahdi Fahlevi

Editor: Eko Sutriyanto

lihat fotollustrasi pelajar SMA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meniadakan ujian nasional (UN), ujian kesetaraan, dan ujian sekolah pada tahun ini.

Sehingga penentuan kelulusan siswa pada tahun ini diserahkan kepada penilaian pihak sekolah.

Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji langkah Kemendikbud ini tepat karena memberikan ruang lokalitas dalam penilaian siswa. “Saya setuju harus berbasis sekolah untuk menangkap keragaman dan lokalitas,” ujar Ubaid kepada Tribunnews.com, Jumat (5/2/2021).

Meski begitu, Ubaid memint agar kompetensi tenaga pendidik yang memberikan nilai harus dilakukan penguatan. Dirinya juga meminta agar bentuk evaluasinya dikembangkan secara beragam menyesuaikan minat, bakat, dan kompetensi siswa.

“Yang harus dievaluasi itu adalah semua aspek capaian kualitas pendidikan, jadi bukan hanya siswanya saja yang dievaluasi tapi juga gurunya, sarannya, dan proses pembelajarannya,” tutur Ubaid.

Ubaid juga meminta agar proses penilaiannya dibuat lebih partisipatif. Langkah ini, menurut Ubaid, perlu dilakukan agar penilaian dilakukan secara transparan.

Cara ini, menurut Ubaid, dapat menghilangkan potensi “main mata” antara pihak sekolah dan siswa dalam proses penentuan kelulusan. “Tetap ada indikator-indikator yang disepakati untuk mengukur dan menilai. Meskipun tidak harus berupa angka-angka yang matematis. Penilaian ini juga harus bersifat partisipatif sehingga prosesnya terbuka dan tidak ada main mata,” pungkash Ubaid.

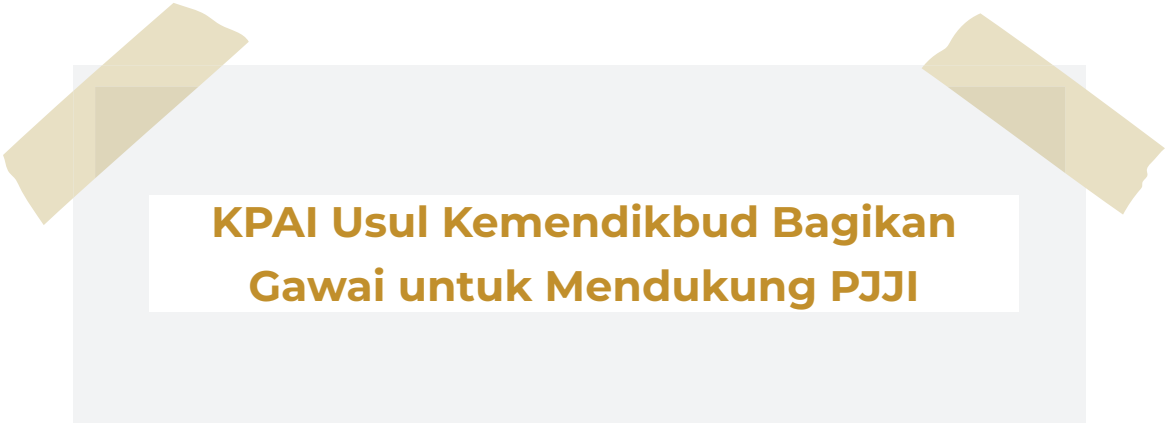
Seperti Kemendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menerbitkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan [Ujian Nasional](#) dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Melalui surat edaran yang diterbitkan pada 1 Februari 2021 itu, Nadiem menetapkan bahwa Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan pada tahun 2021 ini ditiadakan. “Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan,” bunyi poin pertama surat edaran yang diterima Tribunnews.com dari Kemendikbud, Kamis (4/2/2021).

“Dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan tahun 2021, maka UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” lanjut bunyi surat edaran itu.

Pada surat tersebut, Nadiem mengungkapkan alasan peniadaan UN dan ujian kesetaraan adalah langkah responsif untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Mengingat penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat.

Sumber: <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/02/05/un-ditiadakan-jppi-penentuan-kelulusan-siswa-bisa-bersifat-partisipatif>



KPAI Usul Kemendikbud Bagikan Gawai untuk Mendukung PJJ

Iham Pratama Putra ·

17 Februari 2021 12:07

Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendukung proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sepenuhnya. Salah satu caranya yakni dengan membagikan alat belajar daring atau gawai untuk pelajar.

“KPAI mendorong Kemendikbud dan Dinas Pendidikan melakukan pemetaan dan membuat program pembagian alat daring untuk PJJ, sehingga anak-anak yang tidak memiliki alat daring bisa dipinjamkan melalui sekolah dan diberikan bantuan kuota internet,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam keterangannya, Rabu 17 Februari 2021.

Kemudian bagi daerah yang blank spot atau tidak memiliki jaringan internet diberikan bantuan penguat sinyal. Sehingga, PJJ dapat berlangsung dan pelajar dapat terus mengikuti proses pembelajaran di tengah pandemi covid-19 dengan aman.

KPAI mendorong dinas-dinas pendidikan di daerah memetakan sekolah yang memiliki pelajar dengan potensi putus sekolah. Pemantauan terkait biaya pendidikan juga harus dilakukan.

“Mereka harus dibantu, baik yang di sekolah negeri maupun sekolah swasta agar hak atas pendidikan tetap dapat dipenuhi oleh pemerintah atau Negara dalam keadaan apapun,” terang Retno.

Pemetaan diperlukan agar potensi putus sekolah tidak berujung pada tingkat pernikahan anak dan pekerja anak. Pihaknya juga mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Dinas-dinas PPPA di berbagai daerah untuk mengkampanyekan bahayanya perkawinan anak.

“Kita ingin mencegah terjadinya perkawinan anak karena putus sekolah di masa pandemi covid-19,” ungkapnya.

Sumber: https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ObzZgzxb-kpai-usul-kemendikbud-bagikan-gawai-untuk-mendukung-pjj?utm_source=desktop&utm_medium=terbaru&utm_campaign=WP

SKB 3 Menteri Soal Larangan Seragam Agama di Sekolah Bakal Efektif?



Penulis:Yopi Makdori

Diperbarui 04 Feb 2021, 13:47 WIB

Ilustrasi seragam SMA (sumber: iStock)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi melarang Pemerintah Daerah (Pemda) dan sekolah negeri untuk membuat aturan tentang seragam agama tertentu. Hal itu dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021 dan Nomor 219 Tahun 2021 antara Menteri Pendidikan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid meragukan aturan tersebut bisa berjalan dengan efektif. Pasalnya aturan seperti ini sebelumnya sudah ditelurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui sejumlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).

“Ya keputusan ini tidak hanya menjadi sebuah retorika atau pidato-pidato, tapi bagaimana ini dikawal dan harus diimplementasikan di lapangan. Karena kejadian ini (intoleran) itu hampir tiap tahun terjadi, dan itu terjadi di banyak daerah tidak di satu daerah,” ucap Ubaid kepada **Liputan6.com**, Kamis (4/2/2021).

Ubaid beranggapan bahwa mestinya Kemendikbud tak perlu mengeluarkan SKB tersebut. Mengingat aturan serupa sudah tertuang pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, serta Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

Menurutnya, Kemendikbud mestinya menyibukkan diri untuk melakukan evaluasi mengapa intoleransi di sekolah masih kerap terjadi.

“Kalau evaluasi dilakukan, investigasi dilakukan, maka solusinya itu bukan keputusan bersama tapi nanti dilihat problem-nya apa? Apakah memang ada persoalan di paradigma guru-guru memahami tentang keragaman, bagaimana cara pandang antar-siswa atau orang tua terhadap keragaman di sekolah dan seterusnya,” katanya.

Ubaid sendiri secara personal menganggap aturan soal seragam wajar saja jika disusun oleh sekolah asalkan mengakomodir suara semua pihak. Pasalnya, ia melihat selama ini aturan soal seragam kerap mengesampingkan suara-suara minoritas dan tak dibicarakan secara bersama.

“Ini aturan bukan hanya soal seragam kan? Semua anak yang sekolah itu dia berhak mendapatkan hak untuk belajar bersama, beribadah di sekolah kemudian ada pelajaran agama sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya gitu kan?,” katanya.

Ubaid mengaku dirinya memang mendukung SKB tiga menteri itu. Namun ia juga meminta Kemendikbud untuk mengawasi implementasi kebijakannya di lapangan.

“Saya melihat kebijakan inikan mendorong untuk menghargai keragaman, jadi sekolah di mana pun berada harus menghargai keberagaman. Jadi prinsipnya saya setuju karena itu menghargai keberagaman dan semangatnya adalah pendidikan damai dan kebinekaan dan seterusnya,” kata Ubaid.

Namun untuk implementasi di lapangan, Ubaid meminta semuanya harus dibicarakan secara bersama-sama dan mesti mengedepankan kearifan lokal.

PESIMISTIS



Ubaid mengaku pesimistis terhadap implementasi SKB Tiga Menteri tersebut. Berkaca pada kebijakan-kebijakan sebelumnya, ia memandang masih banyak yang jalan di tempat.

“Karena kebijakan ini bukan kebijakan pertama. Kalau kita lihat Permendikbud itu sudah ada soal antisipasi kekerasan di sekolah, Permendikbud soal mendorong keberagaman. Pertanyaan saya bagaimana regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan itu pemerintah bisa menerapkannya di lapangan? Bagaimana *capacity building* untuk dinas-dinas, bagaimana *capacity building* penerapan di level kepala sekolah, bagaimana pengawasannya? Nah itu yang enggak terjadi,» sebut Ubaid.

Kendati Mendikbud Nadiem Makarim telah mengancam bakal memutus dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah yang membangkang aturan tersebut, Ubaid tetap meragukan efektivitas jalannya aturan tersebut.

“Menurut saya bisa jadi efektif tetapi sanksi itu tidak hanya dijalankan secara sendiri tetapi sebelum sanksi itu dilakukan apa upaya pemerintah untuk mendorong supaya kebijakan itu bisa dilakukan di lapangan,” kata dia.

Misalnya dengan memberikan pemahaman kepada pihak terkait soal kebinekaan dalam Pancasila agar menyamakan konsepsi soal pluralitas.

“Bagaimana pendidikan yang menghormati kepercayaan dan agama semua kalangan itu bagaimana. Itu kan harus dibangun dulu. Kalau paradigma itu enggak dibangun mau ada regulasi ya tetap nanti ada pelanggaran,” tegasnya.

Ubaid menilai jika hanya sanksi tanpa adanya pemahaman atau edukasi bagi pengelola pendidikan terlebih dulu maka kebijakan tersebut akan berjalan tersendat, kalau tidak mau disebut tak efektif.

“Nanti ada sanksi besok diulang lagi, karena di level pemangku kepentingannya, di level sekolah mereka tak punya perspektif tentang itu,” tandasnya.

SKB Tiga Menteri



Guru mengatur para murid sebelum upacara di SD Pasar Baru 05, Jakarta, Senin (27/7/2015). Usai libur panjang Idul Fitri para siswa kembali beraktivitas mengikuti pelajaran di sekolah untuk tahun ajaran 2015-2016. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Agama (Menag) menerbitkan Keputusan Bersama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Rabu (3/2/2021).

Keputusan ini disebut merupakan wujud konkret komitmen pemerintah dalam menegakkan “Bineka Tunggal Ika”, membangun karakter toleransi di masyarakat dan menindak tegas praktik-praktik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan tersebut.

Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim menguraikan tiga hal penting yang menjadi pertimbangan dalam menyusun SKB tiga Menteri ini. Pertama, bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal Ika; serta membangun dan memperkuat moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

“Kedua, sekolah berfungsi untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Serta membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama,” terang Mendikbud

Nadiem.

Yang ketiga, pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama, tambah Mendikbud.

Enam keputusan utama dari aturan ini di antaranya adalah 1) keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda); 2) peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: a) seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau b) seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

“Hak untuk memakai atribut keagamaan adanya di individu. Individu itu adalah guru, murid, dan tentunya orang tua, bukan keputusan sekolah negeri tersebut,” imbuhnya.

Selanjutnya, 3) Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama; 4) Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan.

“Implikasinya, kalau ada peraturan yang dilaksanakan baik sekolah maupun oleh Pemda yang bertentangan dengan aturan ini, dalam waktu 30 hari maka aturan tersebut harus dicabut,” tegas Mendikbud.

Kemudian, 5) jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang melanggar yaitu: a) Pemda memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan, b) gubernur memberikan sanksi kepada bupati/walikota, c) Kemendagri memberikan sanksi kepada gubernur, d) Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya.

“Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Ada sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar,” lanjut Nadiem.

Terakhir, 6) peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.

Keputusan Bersama Tiga Menteri ini dirancang untuk dapat menegakkan keputusan-keputusan terkait yang telah ditetapkan sebelumnya serta melindungi hak dan kewajiban warga masyarakat Indonesia terutama peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah negeri.

Sumber: <https://www.liputan6.com/news/read/4474938/skb-3-menteri-soal-larangan-seragam-agama-di-sekolah-bakal-efektif>

Ortu Siswa Protes Zonasi PPDB DKI 2021 Utamakan Jarak RT Rumah-Sekolah



Arief Ikhsanudin - detikNews
Jumat, 21 Mei 2021 09:16 WIB
Ilustrasi PPDB (Andhika Akbaryansyah/detikcom)

Jakarta - Koalisi Orang Tua Murid Jakarta memprotes aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI 2021. Para ortu kecewa terhadap aturan zonasi yang mengutamakan calon murid berdasarkan jarak RT rumah tinggal dan sekolah.”Menuntut agar Pemerintah Provinsi DKI merevisi Peraturan Pemerintah DKI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru untuk berpegang pada asas seleksi zonasi, yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, dengan mengukur jarak garis lurus antara rumah CPDB (calon peserta didik baru) dan sekolah, bukan batasan administratif RT yang dilakukan tahun ini,” ujar juru bicara Perkumpulan Wali Murid 8113, Jumono, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/5/2021).

Dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 32/2021 mengenai PPDB, aturan zonasi dicantumkan pada pasal 12. Aturan itu untuk jenjang pendidikan SMP hingga SMA. Begini isinya: Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan domisili CPDB dengan ketentuan sebagai berikut:a. Zona prioritas pertama, yang didasarkan dengan RT domisili CPDB sama dengan RT lokasi sekolah; b. Zona prioritas kedua, yang didasarkan dengan RT domisili CPDB berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT lokasi

sekolah, dan c. Zona prioritas ketiga, yang didasarkan dengan kelurahan domisili CPDB sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah yang dituju

Koalisi Orang Tua Murid Jakarta yang memprotes Pergub Gubernur DKI Anies Baswedan ini dari tergabung dalam Suara Orangtua Peduli, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dan Perkumpulan Wali Murid 8113.”Kami menganggap Pergub Nomor 32/2021 dan aturan lainnya tentang PPDB berpotensi zalim dan tidak berkeadilan bagi anak dan orang tua untuk mengakses layanan pendidikan,” ujar Jumono.”PPDB DKI ini juga menghambat hak anak dalam memenuhi kewajiban pemerintah melaksanakan program wajib belajar 12 tahun,” lanjutnya. Jumono juga menilai belum adanya aturan rinci tentang perhitungan indeks prestasi pada jalur prestasi seperti yang diamanatkan dalam Pergub Anies.

Padahal PPDB DKI dari SD hingga SMA akan dimulai pada 7 Juni 2021.”Masih banyak yang belum jelas. Ini terlihat dari ketidaksiapan para kepala sekolah pada waktu sosialisasi di sekolah-sekolah, ditandai dengan ketidakmampuan menjawab lebih dari apa yang tercantum pada naskah presentasi,” rilis Suara Orangtua Peduli, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan Perkumpulan Wali Murid 8113.

Ini Penjelasannya Pemprov DKI dinilai melanggar prinsip keadilan bagi anak-anak dalam proses seleksi dengan menerapkan kriteria umur.”Pemprov DKI telah bertindak sewenang-wenang karena tidak menghiraukan berbagai masukan dan tidak belajar dari pengalaman buruk PPDB tahun lalu, dengan tetap berkeras ‘mengukur umur bukan mengukur jarak’ dalam menerjemahkan zonasi,” kata Jumono.

Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-5577107/ortu-siswa-protes-zonasi-ppdb-dki-2021-utamakan-jarak-rt-rumah-sekolah>

Ubaid Rindu Mudik, Namun Bisa Disiasati dengan Video Call



Bintang Pradewo

Kamis, 13 Mei 2021 | 10:12 WIB

Seorang Andikpas melakukan silaturahmi via online dengan sanak keluarga di ruuang Lapas Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IA, Kota Tangerang, Senin (25/5/2020). Lapas Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IA terapkan kunjungan online via video call. Keluarga warga binaan hanya diperkenankan bertatap muka melalui perangkat komputer yang disediakan lapas. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

JawaPos.com - Perayaan Hari Raya Lebaran 1442 H kali ini berbeda dengan biasanya. Pasalnya, dunia sekarang ini tengah dilanda pandemi global Covid-19 yang membuat seluruh masyarakat wajib untuk menjaga jarak.

Kebiasaan kumpul-kumpul bersama keluarga pun menjadi momen yang tidak bisa dilakukan sekarang ini, seperti yang dialami oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji.

Selama ini, rutinitas di hari Lebaran adalah mudik untuk bertemu keluarga serta teman-teman. Namun, karena adanya larangan mudik dari pemerintah, dia pun tidak melakukannya.

“Biasanya saya mudik dan bersilaturahmi dengan keluarga. Dan juga biasanya juga ada reuni dengan kawan-kawan dulu di sekolah,” jelas dia kepada JawaPos.com beberapa waktu lalu.

Ia mengaku sangat merindukan kegiatan tersebut. Akan tetapi karena pandemi, aktivitas seperti bertemu orang banyak yang membuat kerumunan, kali ini masih tidak bisa dilaksanakan. Meskipun begitu, rasa rindu kini bisa disiasati dengan bertemu via daring.

“Kini suasana itu bisa kita lakukan dengan online, misalnya video call atau bareng-bareng video conference. Yang paling rindu dan tidak bisa dilakukan di masa pandemi adalah mendatangi dan sowan ke guru-guru dan para kiai. Ini rutin biasa kita (keluarga) lakukan,” ujarnya.

Di keluarganya, menu wajib ketika merayakan lebaran adalah opor ayam dan sate kambing. Bahkan, ia mengaku menu ini sudah ada dari jaman kakek-neneknya terdahulu. “Ini tradisi sudah temurun dari nenek moyang,” kata dia.

Di tengah keterbatasan ini, dirinya pun tetap mengucapkan rasa syukur dapat merayakan hari kemenangan secara utuh bersama keluarganya. “Saya bersyukur karena diberikan nikmat kesehatan meski Indonesia masih dilanda pandemi,” tambahnya.

Ubaid pun turut mengingatkan kepada khalayak luas untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di suasana lebaran dan seterusnya. Demi menurunkan rantai Covid-19, aturan ini harus ditegakkan.

“Patuh prokes harus didahulukan dan tetap dijalankan dalam situasi apapun. Jangan sampai larut dalam euforia lebaran, tapi lupa dengan patuh prokes yang juga merupakan perintah agama untuk mencegah bahaya atau kemudhorotan (kerugian),” tutupnya.

Editor: Bintang Pradewo

Sumber: <https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/13/05/2021/ubaid-rindu-mudik-namun-bisa-disiasati-dengan-video-call/>

Jaringan Internet di Papua Putus, Kebebasan Pers dan Akses Informasi Terhambat



24/05/2021

Anugrah Andriansyah

Seorang aktivis dalam unjuk rasa di depan Kementerian Komunikasi dan Informasi di Jakarta, menuntut pemerintah membuka akses internet di Papua dan Papua Barat, 23 Agustus 2019. (Foto: AFP)

Koneksi internet di sejumlah wilayah di Papua mati sejak 30 April akibat terputusnya sistem komunikasi kabel laut. Hal ini dinilai telah menghambat kebebasan pers dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Pemerintah diminta lebih transparan soal penyebab terputusnya koneksi internet di Papua.

VOA —

Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, mengatakan jaringan internet yang belum pulih di sejumlah wilayah di Papua setelah terputus selama tiga pekan pada akhir April lalu telah menghambat masyarakat dalam mengakses informasi.

“Dampaknya sudah kelihatan. Masyarakat juga sudah mengeluhkan sejak jauh hari bahwa yang terganggu pertama adalah dalam segi kemampuan untuk mengakses informasi,” kata Damar kepada VOA, Minggu (23/5) malam.

Koneksi internet di beberapa wilayah seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi di Papua, terputus pada 30 April hingga 21 Mei 2021.

Meski Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyatakan jaringan internet

tersebut telah pulih pada Jumat (21/5). Namun, kata Damar, informasi lapangan dan data yang diperoleh pihaknya justru menunjukkan fakta sebaliknya. Koneksi di empat daerah itu belum pulih sepenuhnya.

“Dari data yang kami ambil dari organisasi pemantau jaringan internet yang berbasis di London, yakni Netblocks, menunjukkan bahwa memang ada peningkatan jaringan. Tapi itu lewat koneksi satelit dan ini baru mencapai sekitar 57 persen kalau di Kota Jayapura. Sedangkan, di daerah lain itu tidak terlalu stabil,” ucapnya.

Pendidikan dan Ekonomi Terdampak

Meski koneksi sudah mulai pulih pada 21 Mei 2021, tetapi belum kembali ke kondisi sedia kala. Hal ini merugikan masyarakat, terutama untuk kegiatan pendidikan dan ekonomi.

Misalnya, ujar Damar, pendidikan jarak jauh tidak bisa dilaksanakan, padahal para pelajar sedang memasuki masa ujian.

“Lalu, juga mesin ATM yang seharusnya berfungsi banyak yang enggak bisa. Akibatnya masyarakat harus keluar dari rumah serta pelajar ke sekolah dan itu menimbulkan risiko. Kita sedang dalam masa pandemi,” ungkap Damar.

SAFNet Dorong Transparansi

Sampai saat belum diketahui secara pasti mengenai penyebab terputusnya jaringan internet di empat daerah tersebut. Berdasarkan situasi tersebut, SAFNet mendesak agar pemerintah menyampaikan secara transparan kepada publik penyebab gangguan internet di Jayapura dan sekitarnya pada 30 April 2021 dengan menyertakan bukti-bukti pendukung.

“Kalau dikatakan bahwa penyebab matinya karena faktor alam, tapi pernyataan di media sering tidak konsisten. Mulai dari karena gempa, pergeseran lempeng bumi, bahkan sampai ada yang mengatakan karena kuat ya arus laut,” ujar Damar.

Pemerintah diminta untuk mempercepat upaya pemulihan sistem komunikasi di Papua agar tidak memperburuk dampak sektor publik lainnya yang berkaitan dengan informasi, pendidikan, dan ekonomi. Kemudian, pemerintah harus menyediakan informasi yang akuntabel dan bisa diakses secara berkelanjutan oleh publik terkait pemulihan sistem komunikasi kabel laut Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) ruas Biak-Jayapura.

“Kami harap diperhatikan sekali oleh pemerintah karena sejak 2019 sudah ada peristiwa seperti ini. Jadi perlu mitigasi kalau sistem komunikasi diputus jangan sampai sektor layanan publik dan lainnya itu tidak ada mitigasinya,” ujar Damar.

Pemerintah juga diminta untuk mengatasi kesenjangan digital di Papua dengan menyediakan infrastruktur sistem komunikasi yang merata tanpa diskriminasi.

“Masyarakat Papua selama ini mengalami kesenjangan digital karena infrastrukturnya tidak memadai. Jadi kalau bisa diperbaiki lagi sehingga tidak ada kejadian yang kemudian semakin menjauhkan masyarakat Papua untuk mengakses hak-haknya,” pungkas Damar.

Peliputan Berita Terhambat

Terputusnya jaringan internet selama tiga pekan itu juga menjadi hambatan serius bagi jurnalis di Jayapura dan sekitarnya dan tentunya menghambat kebebasan pers di empat daerah di Papua itu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Ika Ningtyas, mengatakan para jurnalis di Papua yang wilayahnya mengalami gangguan koneksi internet tidak bisa memverifikasi informasi dengan cepat dan kesulitan mengakses serta mengirimkan berita ke redaksinya.

“Kemudian, ketika Telkom membangun internet dengan satelit dan pesan singkat atau SMS bisa digunakan. Akhirnya mengirim berita lewat SMS. Tapi itu tidak langsung terkirim jadi butuh beberapa jam untuk sampai ke redaksi,” kata Ika kepada VOA.

Bukan hanya itu, koran lokal Cenderawasih Pos terpaksa harus mengurangi jumlah halaman terbit karena kekurangan bahan berita dari kabar berita nasional akibat terputusnya jaringan internet. Terhambatnya kerja-kerja jurnalis tersebut berdampak langsung terhadap pemenuhan informasi kepada publik.

“Itu beberapa hal yang menjadi hambatan serius terkait putusnya internet di Papua. Padahal, kita tahu isu Papua lebih membutuhkan verifikasi dan ada peristiwa khusus,” ucap Ika.

Ika mengungkapkan ada kekhawatiran bahwa saat para jurnalis tidak bisa memverifikasi berita karena jaringan internet terputus, situasi tersebut dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mengontrol informasi terkait Papua. Apalagi, ketika jaringan internet terganggu ada sejumlah isu krusial, seperti operasi keamanan Satgas Nemangkawi dan evaluasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

“Ini membutuhkan verifikasi yang akurat juga dari teman-teman jurnalis untuk memastikan apa yang terjadi itu tidak melanggar HAM dan sebagainya. Akhirnya karena internet mati para jurnalis menjadi terganggu untuk melakukan tugas-tugas jurnalistiknya,” ujarnya.

AJI Indonesia telah mengirimkan surat ke Kominfo dan Telkom untuk meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi terkait matinya jaringan internet di empat wilayah di Papua tersebut. Namun, jawaban yang dikirim instansi terkait soal matinya jaringan internet dinilai tidak memuaskan.

“Jadi karena perbedaan-perbedaan ini justru membuat keraguan dari kami. Sebenarnya alasannya kenapa itu yang belum kami temukan dan tidak ada bukti pendukung” pungkas Ika.

Resolusi PBB

Pada 2016, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa akses internet sebagai hak asasi manusia. Oleh karena itu, penguatan terhadap infrastruktur internet berkaitan langsung untuk menjamin akses universal terhadap hak-hak lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hak atas kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers.

Sebelumnya, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dan Kominfo mengumumkan pada Kamis (6/5) tentang terputusnya sistem komunikasi kabel laut SMPCS ruas Biak-Jayapura di dasar laut, 280 km dari Biak dan 360 km dari Jayapura sejak 30 April 2021. Putusnya sistem komunikasi ini menyebabkan matinya koneksi internet di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Sarmi. Kominfo menduga putusnya sistem komunikasi itu diduga disebabkan oleh faktor alam.

Juru bicara Kominfo, Dedy Permady, mengatakan pergeseran lapisan bumi dasar laut sebagai penyebab putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL).

“Penyebab putusnya kabel ini diperkirakan adalah akibat pergeseran lapisan bumi di dasar laut. Hal ini mengakibatkan seluruh layanan Telkom Group mengalami gangguan dengan total trafik sebesar 135 Gbps,” jelasnya saat dikutip dari laman resmi Kominfo, Jumat (14/5).

Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan tidak ada gempa masif yang terjadi di sekitar Papua dalam dua bulan terakhir.

Sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/putusnya-jaringan-internet-di-jayapura-hambat-kebebasan-pers-hak-atas-informasi-/5901792.html>

Sistem Penerimaan Siswa Baru di Jakarta Disebut Memberatkan, Terkait Seleksi Umur dan Jarak RT



Amir Faisol

21 Mei 2021, 13:13 WIB

Ilustrasi sekolah tatap muka. Simak daftar sekolah di Jawa Tengah yang ikut serta uji coba Sekolah Tatap Muka (STM). /Antara Foto/Anas Padda

PIKIRAN RAKYAT - Perkumpulan Walk Murid dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyampaikan keberatan terhadap sejumlah aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta.

Juru bicara JPPI, Jumono mengatakan ada sejumlah keberatan yang disampaikan oleh wali murid, misalnya soal seleksi umur yang digunakan oleh pemerintah.

Kemudian wali murid juga meminta agar Pemprov Jakarta menggunakan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, dengan mengukur jarak garis lurus antara rumah calon peserta didik baru dan sekolah. “Bukan batasan administratif RT yang dilakukan tahun ini,” ujar Jumono saat dihubungi, Jumat, 21 Mei 2021.

Jumono mengatakan, Pemprov DKI telah bertindak sewenang-wenang karena tidak menghiraukan berbagai masukan dan tidak belajar dari pengalaman buruk PPDB tahun lalu.

Tahun ini, Pemprov Jakarta tetap berkeras mengukur umur bukan mengukur jarak dalam

menerjemahkan zonasi.

Dengan demikian Pemprov [Jakarta](#) telah melanggar prinsip keadilan bagi anak-anak dalam proses seleksi dengan menerapkan kriteria umur.

“Kami menganggap Pergub nomor 32/2021 dan aturan lainnya tentang PPDB berpotensi zolim dan tidak berkeadilan bagi anak dan orang tua untuk mengakses layanan Pendidikan,” kata dia.

Maka dengan demikian kata Jumono PPDB DKI ini juga menghambat hak anak dalam memenuhi kewajiban pemerintah melaksanakan program wajib belajar 12 tahun.

Oleh karena itu, Wali Murid, dan JPPI menuntut agar Pemerintah Provinsi DKI merevisi Peraturan Gubernur DKI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk teknis PPDB.

Pemprov diminta untuk berpegang pada asas seleksi zonasi, yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, dengan mengukur jarak garis lurus antara rumah CPDB dan sekolah bukan batasan administratif RT yang dilakukan tahun ini.

Jumono mengingatkan Pemprov Jakarta jangan sampai ada anak terhambat karena persoalan administrasi atau persoalan biaya untuk mengakses pendidikan.

“Karena sesuai dengan UUD, juga UU wajib belajar. Jadi ini kewajiban Pemprov dan Pempus, ini yang tidak dilakukan oleh Pemprov sejak 5 tahun lalu sampai sekarang, nggak ada perubahan,” katanya.***

Sumber: <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011939686/sistem-penerimaan-siswa-baru-di-jakarta-disebut-memberatkan-terkait-seleksi-umur-dan-jarak-rt>

Anggota DPR berharap anggaran Kemendikbudristek 2022 tak dipangkas, ini alasannya



Kamis, 27 Mei 2021 / 23:22 WIB

ILUSTRASI. Siswa SMK

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beban Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) hampir dipastikan bakal bertambah. Di tengah penambahan kewenangan dan beban yang harus ditanggung, anggaran untuk pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 malah dipangkas sampai Rp10,52 triliun dibandingkan anggaran tahun 2021.

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hetifah Sjaifudian mengatakan, saat Kemendikbud dan Kemenristek dilebur, anggaran antar kedua kementerian semestinya digabung atau bahkan dinaikkan dari total tahun 2021 mengingat fokus kementerian ini adalah menciptakan sumberdaya manusia unggul. “Kami menunggu penjelasan pemerintah mengenai dasar diambilnya keputusan ini,” ujar Hetifah dalam keterangannya, Kamis (27/5).

Berdasarkan paparan Bappenas yang beredar, anggaran pendidikan tahun 2022 tercatat Rp149,97 triliun, turun dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp160,49 triliun. Hetifah pun sangat menyesalkan rencana penurunan anggaran pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2022.

“Kami berharap hal ini tidak jadi direalisasikan dan anggaran Kemendikbudristek minimal bisa tetap sama dengan anggaran tahun 2021 agar pembangunan pendidikan dapat maksimal dan terfokus,” tegas dia.

Hal senada disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Ia mengungkapkan rencana ini makin menjadi bukti pemerintah sedang main-main dan hanya retorika dan pencitraan. Padahal, beban yang ditanggung Kemendikbudristek saat ini jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Menurut dia, pengurangan anggaran pendidikan akan semakin mengaburkan makna pentingnya riset dan teknologi. Dia menjelaskan, pengurangan anggaran pendidikan hanya akan menunjukkan bahwa kebijakan menciptakan SDM unggul hanya sebatas retorika dan pencitraan tanpa didukung budget yang jelas.

Padahal, penciptaan SDM unggul harus dimulai dari pendidikan berbasis data riset dan teknologi. “Jika tidak ada keberpihakan anggaran ke situ maka menjadi lucu. Masyarakat Indonesia sudah memahami mana retorika yang berbasis data dan retorika yang tidak berbasis data dan ngawur,” ungkap Ubaid.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

Sumber: <https://nasional.kontan.co.id/news/anggota-dpr-berharap-anggaran-kemendikbudristek-2022-tak-dipangkas-ini-alasannya>

Komisi X DPR Pertanyakan Pemangkasan Anggaran Kemendikbudristek dalam RAPBN 2022



Jumat, 28 Mei 2021 19:17 WIB

Penulis: Eko Sutriyanto

capture video

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Beban Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) hampir dipastikan bakal bertambah.

Di tengah penambahan kewenangan dan beban yang harus ditanggung, anggaran untuk pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 malah dipangkas sampai Rp 10,52 triliun dibandingkan anggaran tahun 2021.

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hetifah Sjaifudian mengatakan saat Kemendikbud dan Kemenristek dilebur, anggaran antar kedua kementerian semestinya digabung atau bahkan dinaikkan dari total tahun 2021 mengingat fokus kementerian ini adalah menciptakan sumberdaya manusia unggul. “Kami menunggu penjelasan pemerintah mengenai dasar diambilnya keputusan ini,” ujar Hetifah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/5).

Berdasarkan paparan Bappenas yang beredar, anggaran pendidikan tahun 2022 tercatat Rp149,97 triliun, turun dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp160,49 triliun. Hetifah pun sangat menyayangkan rencana penurunan anggaran pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2022.

“Kami berharap hal ini tidak jadi direalisasikan dan anggaran Kemendikbudristek minimal bisa tetap sama dengan anggaran tahun 2021 agar pembangunan pendidikan dapat maksimal dan terfokus,” tegas dia.

Hal yang sama disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Ia mengungkapkan rencana ini makin menjadi bukti pemerintah sedang main-main dan hanya retorika dan pencitraan. Padahal, beban yang ditanggung Kemendikbudristek saat ini jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Menurut dia, pengurangan anggaran pendidikan akan semakin mengaburkan makna pentingnya riset dan teknologi. Dia menjelaskan, pengurangan anggaran pendidikan hanya akan menunjukkan bahwa kebijakan menciptakan SDM unggul hanya sebatas retorika dan pencitraan tanpa didukung budget yang jelas.

Padahal, penciptaan SDM unggul harus dimulai dari pendidikan berbasis data riset dan teknologi. “Jika tidak ada keberpihakan anggaran kesitu maka menjadi lucu. Masyarakat Indonesia sudah memahami mana retorika yang berbasis data dan retorika yang tidak berbasis data dan ngawur,” ungkap Ubaid.

Ubaid melanjutkan, sesuai kebijakan Kemendikbudristek pembelajaran tatap muka direncanakan akan mulai dilakukan Juli 2021.

Kebijakan ini saja akan membutuhkan biaya yang sangat besar karena anggaran sekolah naik seiring penerapan protokol kesehatan, pengadaan alat-alat kesehatan, hingga penambahan kerja guru.

Tidak hanya itu, pemeliharaan teknologi di masa pandemi juga akan bertambah. Saat ini, banyak sekolah yang belum memiliki sarana yang harus difasilitasi untuk menunjang pembelajaran tatap muka. Belum lagi perencanaan riset dan teknologi serta implementasi kebijakan Merdeka Belajar yang membutuhkan biaya besar.

Menurut Ubaid, seharusnya tahun ini bisa dimulai dengan dukungan anggaran yang kuat agar tren kualitas pendidikan tidak terus turun. “Skor PISA juga turun terus belum naik dan kalau kondisinya semacam ini tidak ada perbaikan anggaran dari pemerintah pusat berarti ini sandiwara saja,” kata Ubaid.

Penulis: Eko Sutriyanto

Sumber: <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/28/komisi-x-dpr-pertanyakan-pemangkasan-anggaran-kemendikbudristek-dalam-rapbn-2021>

14 Rekomendasi KPAI Jelang Sekolah Tatap Muka Terbatas Dibuka Juli



Penulis: Karin Nur Secha - detikNews
Minggu, 06 Jun 2021 18:44 WIB

Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) berencana membuka pembelajaran tatap muka secara terbatas pada bulan Juli 2021 mendatang. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan sejumlah rekomendasi. Pemerintah telah mengeluarkan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang diluncurkan pada Maret 2021. Pada 2 Juni 2021, Kemendikbud-Ristek, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama juga telah meluncurkan panduan penyelenggaraan pembelajaran untuk Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah (PAUDDIKDASMEN).

“Kesehatan dan keselamatan anak tetap menjadi prioritas utama dalam Pembelajaran Tatap Muka (PTM),” kata Komisioner KPAI, Retno Listyarti, dalam diskusi zoom meeting bertajuk ‘Pembelajaran Tatap Muka’, Minggu (6/6/2021).

Retno menyebut menjelang PTM terbatas banyak orang tua khawatir bahwa PTM di masa pandemi tidak aman bagi anak. Tapi, ada juga orang tua yang mendesak agar sekolah segera dibuka. “KPAI sangat konsen dengan kebijakan PTM ini, sehingga sejak 2020 sampai Juni 2021 KPAI terus melakukan pemantauan penyiapan PTM dan ujicoba PTM di sejumlah daerah di Indonesia,” ucapnya.

Hasil Pengawasan PTM Tahun 2020 dan 2021 Retno membeberkan hasil pengawasan sejumlah sekolah dalam kegiatan PTM sejak tahun 2020. Menurutnya, KPAI melakukan pengawasan

persiapan PTM di 49 sekolah pada 21 kabupaten/kota di 9 Provinsi.

Adapun 9 provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, dan NTB. Hasil pengawasan tahun 2020 menunjukkan ketidaksiapan sekolah sebanyak 83,3%, dan hanya 16,7% sekolah yang siap PTM di masa pandemi.

“Pada tahun ini KPAI sudah melakukan pengawasan ke 42 sekolah pada 12 kabupaten/Kota di 7 provinsi. Pengawasan PTM dibantu mitra KPAI di daerah. Adapun hasilnya menunjukkan peningkatan kesiapan PTM yang mencapai 79,54%, dan yang belum siap hanya 20,46%,” katanya.

Retno menyebut ada sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan KPAI ke Mendikbud-Ristek, Menag, dan seluruh kepala daerah. Menurutnya, rekomendasi itu disampaikan untuk mendukung pemenuhan hak pendidikan anak dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak.

Berikut 14 Rekomendasi KPAI:

1. KPAI mendorong daerah untuk jujur pada data kasus covid 19 di wilayahnya. Ketika membuka madrasah/sekolah tatap muka, maka positivity rate covid-19 di daerah tersebut menjadi pertimbangan utama bagi pemenuhan hak hidup yang didalamnya termasuk hak sehat para peserta didik, selain faktor kesiapan infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP adaptasi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan. Jangan membuka PTM di sekolah/madrasah hanya dengan pertimbangan gurunya sudah di vaksin;
2. KPAI mendorong Pemerintah Daerah melibatkan ahli penyakit menular dan IDAI di daerahnya untuk meminta pertimbangan saat hendak memutuskan membuka madrasah/sekolah tatap muka pada Juli 2021 nanti. Jika positivity rate diatas 10% sebaiknya pemerintah daerah menunda pembukaan sekolah tatap muka; Advertisement
3. KPAI mendorong dukungan alokasi anggaran APBD dan APBN untuk mempersiapkan Pembelajaran Tatap Muka dan keberlangsungan pendidikan selama pandemi; Baca juga: Nadiem Target Sekolah Tatap Muka Juli, P2G: Sulit karena Vaksinasi Guru Masih Lambat
4. KPAI mendorong 5 SIAP menjadi dasar bagi pembukaan sekolah di Indonesia, yaitu Siap daerahnya, Siap sekolahnya, Siap gurunya, Siap orang tuanya dan Siap Anaknya. Jika salah satu dari lima tersebut belum siap, sebaiknya tunda buka sekolah tatap muka di masa pandemi covid-19;
5. KPAI mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota perlu melakukan nota kesepahaman terkait pendamping sekolah dalam PTM. Sekolah perlu mendapat edukasi dan arahan dalam penyusunan protokol kesehatan/SOP AKB di satuan pendidikan. Selain itu, sekolah dapat mengakses layanan fasilitas kesehatan terdekat ketika ada situasi darurat, misalnya ditemukan kasus warga sekolah yang suhunya di atas 37,3 derajat atau ada warga sekolah yang pingsan saat PTM berlangsung;
6. KPAI mendorong daerah untuk membuka sekolah tatap muka pada setiap jenjang pendidikan secara bertahap pada setiap jenjang pendidikan. Sedangkan untuk PAUD dan SD kelas 1-3, sekolah harus memperhatikan kesiapan siswa taat protokol kesehatan;

7. KPAI mendorong adanya edukasi tentang protokol kesehatan kepada pendidik, tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua secara komprehensif dan terus menerus agar semua pihak memiliki kesadaran tentang menjalankan protokol kesehatan dalam situasi pandemi. Semua warga sekolah harus jujur dengan kondisi kesehatannya, tidak berangkat jika memiliki tanda-tanda infeksi covid, dan atau menyampaikan kepada gugus tugas covid di sekolah sehingga dapat menghindarkan terjadinya kluster baru;
8. KPAI mendukung Pemerintah Daerah yang membuka sekolah tatap muka di pulau-pulau kecil atau wilayah-wilayah pelosok yang kasus covidnya nol atau sudah di bawah 5% positivity ratenya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan siswa yang masuk hanya 50%. Apalagi di wilayah-wilayah ini memiliki kendala besar dalam melaksanakan PJJ secara daring. Artinya, kebijakan membuka atau tidak PTM di Indonesia memang tidak bisa diseragamkan;
9. KPAI mengapresiasi ujicoba PTM di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah karena sangat hati-hati membuka sekolah meskipun hanya ujicoba di semua jenjang mulai dari SD sampai SMA/SMK. Sekolah yang terlibat kurang dari 5% dan hanya sekitar seperlima jumlah siswa yang mengikuti PTM secara terbatas. Untuk SD Hanya siswa kelas 4-6 yang mengikuti ujicoba PTM, sedangkan siswa kelas 1-3 SD belum dilibatkan dalam PTM, karena tidak mudah mendidik anak-anak dengan kebiasaan baru di sekolah saat masih masa pandemic covid-19;
10. KPAI mendorong kebijakan Belajar dari Rumah (BDR) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) harus diperbaiki agar dapat melayani semua anak dan mengatasi turunnya kualitas pendidikan. Selama pandemi, sekolah harus menerapkan PJJ dan PTM secara bergiliran, oleh karena itu Pemerintah harus terus menerus mengevaluasi dan memperbaiki PJJ dengan melakukan pemetaan kesenjangan akses digital antar sekolah dan antar daerah, serta pemetaan variasi PJJ atau BDR antar sekolah dan antar daerah;
11. KPAI mendorong PTM diselenggarakan dengan mengedepankan pembahasan pada materi-materi yang sulit dan sangat sulit di seluruh mata pelajaran, serta mengutamakan materi praktik yang sulit didaringkan;
12. KPAI juga mendorong PTM dapat digunakan untuk memberdayakan para guru Bimbingan dan Konseling (BK) melayani konseling anak-anak yang mengalami tekanan psikologis selama pandemi covid-19;
13. KPAI mendorong peningkatan pengawasan Pembelajaran Tatap Muka pada bulan Juli dengan mengoptimalkan fungsi Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah;
14. KPAI mendorong keterlibatan dan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan terkait anak khususnya dalam proses PTM, serta melakukan edukasi kepada sesama siswa diantaranya melalui organisasi intra sekolah seperti OSIS dan Pramuka.

Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-5595596/14-rekomendasi-kpai-jelang-sekolah-tatap-muka-terbatas-dibuka-juli/2>

WIB JPPI Usul Tahun Ajaran Baru 2020 Diundur Januari 2021



Syarief Oebaidillah |

Senin 08 Juni 2020

JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengusulkan Kemendikbud agar pelaksanaan Tahun Ajaran Baru 2020 diundur menjadi Januari 2021.

JPPI juga menilai proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sedang berjalan terlalu dipaksakan hanya untuk mengikuti kalender pendidikan, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang mendera masyarakat Indonesia, khususnya rakyat kecil.

“ Dampak pandemi covid 19 membuat masyarakat kesulitan. Untuk makan saja, mereka tak tercukupi, apalagi untuk bayar pendaftaran sekolah, uang gedung, dan juga kuota internet untuk mengawal proses PPDB. Kami menilai sebagai kebijakan yang tidak manusiawi, “ kata Koordinator JPPI Ubaid Matraji di Jakarta, Senin (8/6)

Ubaid mengutarakan kala pandemi ini, JPPI mendapat banjir pengaduan dari masyarakat terkait rencana pemerintah untuk membuka kembali sekolah, juga soal memaksakan PPDB dan tahun ajaran baru bulan Juli 2020.

Dari semua pengaduan yang terkumpul, hanya ada 24% yang setuju dengan PPDB dan tahun ajaran baru pada Juli 2020. Sisanya, sebanyak 59% setuju diundur sampai situasi pandemi berakhir, dan sejumlah 17% yang setuju diundur pada Januari 2021*.

“Ini menunjukkan bahwa masyarakat memang masih belum siap untuk menghadapi tahun ajaran baru, “ tegasnya.

Sejumlah alasan mereka tidak setuju PPDB di bulan ini dan mereka juga menolak kalender pendidikan akan dimulai Juli 2020, menurut Ubaid antara lain, pertama para orang tua terkendala ekonomi karena terdampak covid. Biaya SPP semester saja banyak yang menunggak, apalagi harus membayar untuk PPDB. Banyak uang yang harus dikeluarkan oleh orang tua saat PPDB. “Kenyataannya proses PPDB tetap berbayar, apalagi di jenjang SMA/SMK/MA, dan juga sekolah-sekolah swasta. Ini sangat memberatkan orang tua, “ tegasnya.

Kedua, PPDB online tidak akan berjalan efektif. Pada situasi normal saja, seperti pada tahun-sebelumnya, PPDB online menuai banyak masalah, apalagi sekarang situasi pandemi, tentu sangat tidak efektif. Tahun lalu, PPDB online saja harus mengantri datang ke sekolah dari subuh untuk bisa memasukkan data, bagaimana dengan sekarang? Kemungkinan besar kekacauan akan kembali terulang.

Ketiga, khawatir terpapar covid karena pandemi belum usai. Ini diawatirkan oleh orang tua karena anak-anak berpeluang besar terpapar covid-19. Banyak sekolah yang belum siap menerapkan protokol covid-19 karena keterbatasan sarana dan juga sumber daya.

Ke empat, pembelajaran online berjalan tidak optimal. Selama pandemi, pembelajaran dilakukan di rumah dengan menggunakan cara online. Ini berjalan tidak efektif, karena keterbatasan sarana dan juga akses.

Ke lima, kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Saat ini banyak guru dan tenaga kependidikan yang terdampak covid 19. Banyak diantara mereka juga terkendala dalam memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Tentu saja jika ini dipaksakan, pembelajaran tidak akan optimal.

JPPI juga mengusulkan Kemendikbud menerbitkan kurikulum pandemi. Selama pandemi, pemerintah harus mengoptimalkan pembelajaran via daring dan juga non-daring bagi masyarakat yang tidak punya akses internet. Supaya optimal, pemerintah harus menyipakan kurikulum dalam situasi pandemi. Jadi, bukan seperti sekarang yang sedang berjalan, kurikulum normal dipraktikkan di kala pandemi.

JPPI minta Kemendikbud melakukan capacity building bagi para guru dan orang tua.. Dalam situasi pandemi, peran guru dan orang tua sangat penting dalam proses pembelajaran. Banyak guru dan orang tua yang belum siap mendampingi anak belajar dalam situasi pandemi, mereka harus dibekali dengan berbagai kemampuan dan juga keterampilan secara kreatif dan inovatif.

Pemerintah diminta terapkan protokol kesehatan di sekolah. “Sambil menunggu pandemi usai, sekolah dan institusi pendidikan lain perlu mempersiapkan diri menerapkan protokol kesehatan. Ini langkah pencegahan supaya tidak terjadi penyebaran covid-19 di sekolah jika sewaktu-waktu sekolah dibuka kembali, “ pungkasnya. (OL-2)

Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/319121/jppi-usul-tahun-ajaran-baru-2020-diundur-januari-2021>

Pemerintah Diminta Gratiskan Biaya Pendidikan Siswa Terdampak Covid-19



Penulis: Citra Larasati

• 08 Juni 2020 10:55

Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyodorkan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait pelaksanaan kegiatan pendidikan memasuki kenormalan baru (new normal) dan pandemi covid-19.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji meminta Pemerintah tidak memaksakan untuk memulai tahun ajaran baru di Juli 2020 mendatang. Termasuk juga tidak menggelar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai bagian dari rangkaian proses memasuki tahun ajaran baru tersebut.

“Tunda PPDB dan undur tahun ajaran baru. Menunda proses PPDB dan mengundur tahun ajaran baru sampai pandemi usai, atau paling cepat Januari 2021. Ini harus dilakukan supaya pembukaan sekolah tidak sekadar kembali dibuka, tapi segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan matang,” kata Ubaid, dalam keterangannya, Senin, 8 Juni 2020.

JPPI juga meminta Pemerintah menggratiskan biaya sekolah bagi anak yang orang tuanya terdampak covid-19. Banyak orang tua yang terdampak secara ekonomi, mereka harus mendapatkan kebijakan afirmasi supaya anaknya tidak putus sekolah. “Ini peran yang perlu dukungan pemerintah daerah,” tegasnya.

Selain itu, Ubaid juga minta Kemendikbud untuk segera menerbitkan kurikulum pandemi. Selama pandemi, pemerintah harus mengoptimalkan pembelajaran via daring dan juga luring (luar jaringan) bagi masyarakat yang tidak punya akses internet.

“Supaya optimal, pemerintah harus menyiapkan kurikulum darurat covid-19 dalam situasi pandemi. Jadi, bukan seperti sekarang yang sedang berjalan, kurikulum normal dipraktikkan di kala pandemi,” ujar Ubaid.

Kemudian JPPI meminta Pemerintah melakukan peningkatan capacity building para guru dan orang tua. Sebab dalam situasi pandemi ini, peran guru dan orang tua sangat penting dalam proses pembelajaran.

Banyak guru dan orang tua yang belum siap mendampingi anak belajar dalam situasi pandemi, mereka harus dibekali dengan berbagai kemampuan dan juga keterampilan secara kreatif dan inovatif.

Terakhir, JPPI meminta Pemerintah menerapkan protokol kesehatan di sekolah. Sambil menunggu pandemi usai, sekolah dan institusi pendidikan lain perlu mempersiapkan diri untuk dapat menerapkan protokol kesehatan.

“Ini langkah pencegahan supaya tidak terjadi penyebaran covid-19 di sekolah jika sewaktu-waktu sekolah dibuka kembali,” imbuhnya.

Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyayangkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini yang terlalu dipaksakan, hanya karena untuk mengikuti kalender pendidikan. Kebijakan ini dinilai tidak manusiawi, karena digelar di tengah masyarakat yang tengah mengalami kesulitan akibat pandemi virus korona (covid-19).

Pernyataan ini disampaikan Ubaid bukan tanpa sebab. Sepanjang pandemi ini, JPPI mendapat banjir pengaduan dari masyarakat terkait rencana pemerintah untuk membuka kembali sekolah, juga soal memaksakan PPDB dan dimulainya tahun ajaran baru bulan Juli mendatang. Dari semua pengaduan yang terkumpul, hanya ada 24 persen yang setuju dengan PPDB dan tahun ajaran baru pada Juli 2020. Sisanya, sebanyak 59 persen setuju diundur sampai situasi pandemi berakhir, dan sebesar 17 persen bahkan setuju tahun ajaran baru diundur hingga Januari 2021.

“Ini menunjukkan bahwa masyarakat memang masih belum siap untuk menghadapi tahun ajaran baru,” tegasnya.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/8KyXmpEk-pemerintah-di-minta-gratiskan-biaya-pendidikan-siswa-terdampak-covid-19>

Pemantau Kritisi Analisis Pemerintah soal Belajar di Sekolah



Ilustrasi. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah sudah gagal sebelum memasuki tahun ajaran 2021/2022. (ANTARA FOTO/Hafidz MubarakA)

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah sudah gagal sebelum memasuki tahun ajaran 2021/2022.

Hal itu disampaikan sebagai bentuk kritik terhadap Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mengungkap tolak ukur keberhasilan PTM yang utama adalah tidak adanya penularan Covid-19 di sekolah.

Baca juga: Biaya Hotel Disetop, Puluhan Nakes Tempati Dua Sekolah DKI Sementara itu di beberapa daerah kluster sekolah sudah bermunculan. Seperti di SMA Negeri 1 Padang Panjang, Sumatera Barat terdapat 19 siswa positif Covid-19 karena tinggal di asrama selama PTM berlangsung. Selain itu 43 siswa SMA Negeri 1 Padang terkonfirmasi Covid-19 setelah mengikuti PTM dan menetap di asrama sekolah.

“Itu jelas bagian dari indikator kegagalan, kalau sejak awal [penularan Covid-19] dijadikan ukuran [keberhasilan]. Ketika ukuran itu tidak tercapai, berarti itu kegagalan,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/6).

Meskipun demikian, kata Ubaid, dengan munculnya kluster Covid-19 sekolah tak berarti pemerintah perlu membatalkan kebijakan PTM. Menurutnya, pemerintah harus menindaklanjuti insiden tersebut dengan evaluasi dan persiapan pembukaan sekolah yang matang.

Ubaid meminta pemerintah pusat maupun daerah tak hanya sekedar mengeluarkan pernyataan, tetapi juga terjun langsung memastikan persiapan sekolah menjelang tahun ajaran baru pada awal Juli 2021.

“Juli sudah beberapa minggu lagi dan akan tatap muka. Saatnya mereka kerja di bawah. Bukan berarti pusat bisa mengatakan ini wewenang pemda. Iya benar, tapi pusat juga punya wewenang agar mengawasi,” ujarnya.

Menurut pantauan Ubaid, klaster sekolah mulai bermunculan karena kurangnya pemahaman guru, siswa maupun orang tua terhadap antisipasi penyebaran Covid-19.

Ubaid mencontohkan dalam beberapa kasus guru atau siswa tetap datang ke sekolah meskipun sudah merasa tidak sehat atau sedang demam. Ia menduga hal ini karena siswa atau guru tidak menganggap serius gejala yang berpotensi terpapar Covid-19.

Sebelumnya, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek Jumeri mengungkapkan sejumlah tolak ukur keberhasilan PTM di tengah pandemi covid-19.

Selain tidak adanya penularan Covid-19 di sekolah, Jumeri mengatakan keberhasilan PTM juga dinilai dari proses belajar mengajar, interaksi guru-siswa, hingga keberhasilan guru menyampaikan materi kepada siswa.

Kemendikbudristek sendiri berkeras mewajibkan semua sekolah dibuka setelah vaksinasi covid-19 terhadap guru dan tenaga kependidikan rampung. Namun sekolah sudah bisa melakukan PTM meskipun belum menerima vaksinasi.

Mendikbudristek Nadiem Makarim menargetkan seluruh sekolah sudah dibuka pada Juli. Sementara vaksinasi guru dan tenaga kependidikan diproyeksi paling lambat selesai Agustus mendatang.

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210610141816-20-652687/pemantau-kritisi-analisis-pemerintah-soal-belajar-di-sekolah>.

Pro-Kontra Gelar Profesor Kehormatan untuk Megawati



Penulis: Yopi Makdori

Diperbarui 10 Jun 2021

Megawati Soekarnoputri Terima Gelar Doktor Honoris Causa (FOTO: Reza Rahmadansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Rencana Universitas Pertahanan (Unhan) untuk memberikan gelar Profesor Kehormatan (guru besar tidak tetap) kepada Megawati Soekarnoputri pada Jumat, 11 Juni 2021 mendapat menuai kritik. Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menyatakan keterkejutannya atas kabar tersebut.

Pasalnya selama ini para akademisi untuk memperoleh jabatan akademik tertinggi di perguruan tinggi itu memerlukan proses panjang dan berliku. Jenjang pendidikan untuk bisa mendapat gelar profesor juga harus lulusan doktoral.

“Untuk Profesor Madya saja, akademisi harus memiliki kumulatif angka kredit (KUM) 850. Sementara untuk Profesor penuh diperlukan KUM 1.000,” kata Jamiluddin dalam keterangannya, Kamis (10/6/2021).

KUM tersebut dikumpulkan akademisi dari unsur pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan unsur pendukung seperti mengikuti seminar ilmiah. Bahkan akademisi harus menulis artikel yang dimuat di jurnal ilmiah internasional.

“Hingga saat ini banyak akademisi belum memperoleh jabatan profesor karena terganjal pada pemuatan artikel di Scopus. Karena itu, para akademisi merasa tidak adil bila ada seseorang yang

terkesan begitu mudahnya memperoleh jabatan profesor. Moral akademisi bisa-bisa melorot melihat realitas tersebut,” tegasnya.

Terlebih lagi, Jamiluddin memandang kesan politis begitu kental dari pemberian jabatan profesor tersebut.

“Para akademisi semakin kecewa karena melihat secara vulgar aspek akademis sudah berbaaur dengan sisi politis,” tekannya.

Ia meminta agar, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim seyogianya dalam menertibkan pemberian jabatan profesor memisahkan aspek politis secara tegas dengan aspek akademis.

“Untuk itu, sudah saatnya menteri pendidikan tidak lagi terlibat dalam pemberian jabatan profesor. Sebab, menteri sebagai jabatan politis tidak selayaknya terlibat dalam pemberian jabatan akademis,” pungkasnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid menilai pemberian gelar kehormatan terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan itu tak lebih dari pencitraan.

“Ya inilah, itu banyak pencitraannya ya. Untuk pencitraan bagaimana meskipun dia gak punya jenjang akademik di sebuah institusi kampus, tapi dia bisa menggondol itu,” ucap Ubaid kepada Liputan6.com, Rabu (9/6/2021).

Ubaid menyarankan perguruan tinggi tak serampangan dan terwarnai oleh politik dalam memberikan gelar-gelar akademis.

“Sebenarnya publik itu juga bisa melakukan penilaian ya. Karena gelar kehormatankan gelar yang tidak bisa ditempuh secara jalur akademik, karena ini gelar kehormatan maka publik harus tahu, penilaian publik juga penting untuk diperhatikan,” katanya.

Menurut Ubaid, mestinya perguruan tinggi juga mempertimbangkan opini publik dalam memberikan gelar kehormatan terhadap seorang tokoh.

“Publik setuju atau tidak, karena publiklah yang menilai track record seseorang,” tandasnya.

Sumber: <https://www.liputan6.com/news/read/4578200/pro-kontra-gelar-profesor-kehormatan-untuk-megawati>

RUU KUP Sekolah Kena PPN Dinilai akan Mengarah ke Komersialisasi Pendidikan



Reporter: Riyan Setiawan,

11 Jun 2021 Ilustrasi PPDB. foto/Istockphoto Sekolah dikenakan PPN dinilai hanya akan membelokkan arah pendidikan ke komersialisasi dan privatisasi.

tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai upaya pemerintah yang akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sekolah sama saja mengarahkan pendidikan ke arah komersialisasi.

Hal tersebut menanggapi rencana pemerintah mengenakan PPN untuk sejumlah jasa yang tertuang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang merevisi UU Nomor 6 tahun 1983 tentang KUP. Salah satunya mengenai jasa pendidikan yang sebelumnya tidak dikenakan tarif PPN.

Saat ini, jasa pendidikan yang bebas PPN di antaranya yaitu pendidikan sekolah seperti PAUD, SD-SMA, perguruan tinggi; dan pendidikan luar sekolah.

“Saya melihatnya, pemerintah kita kian kuat membelokkan arah pendidikan ke komersialisasi dan privatisasi. Ini bahaya karena negara mau melepas tanggung jawab pendidikan yang menjadi hak melekat pada warga negara,” kata Ubaid kepada reporter Tirto, Jumat (11/6/2021).

RUU KUP diajukan pemerintah dan akan segera dibahas dengan DPR. Bagi sekolah yang tergolong mahal bakal dibandrol PPN dengan tarif normal yakni 12 persen. Sedangkan sekolah negeri misalnya dikenakan tarif 5 persen.

Untuk rincian tarif PPN sekolah atau jasa pendidikan berdasarkan jenisnya akan diatur

lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) bila beleid perubahan UU KUP itu disahkan.

Menurut Ubaid, kebijakan tersebut bahkan membuat biaya sekolah di Indonesia semakin bertambah. Dampaknya, biaya pendidikan akan semakin mahal. “Tanpa disadari, seakan kebijakan ini memberikan karpet merah pada si kaya. Sementara orang miskin dilarang sekolah,” ucapnya.

Oleh karena itu, JPPI mendesak pemerintah untuk menghentikan privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Lalu kembalikan pendidikan sebagai hak warga dan negara wajib menjaminnya.

“Bukan kewajiban warga untuk membayar sekolah. Tapi, negaralah yang harus memfasilitasi warganya untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas,” kata dia.

Sementara pengamat pendidikan Indra Charismiadi menilai pemerintah melanggar konstitusi apabila jasa pendidikan dikenakan tarif PPN. Sebab, berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

“Ini jelas melanggar konstitusi, inkonstitusional. Kala pemerintah mau membiayai pendidikan dasar, kenapa harus diberikan pajak? Dari situ sudah melanggar, dari mindset,” ucapnya kepada reporter Tirto, Jumat (11/6/2021).

Kepala Biro Humas dan Kerja sama Kemendikbud-Ristek Hendarman saat dimintai keterangan oleh Tirto, malah melempar permasalahan tersebut kepada Kementerian Keuangan. “Ide dari Kementerian Keuangan. Silakan ditanyakan dahulu ya ke sana,” kata Hendraman, Jumat (11/6/2021).

Sumber: <https://tirto.id/sekolah-kena-ppn-dinilai-akan-mengarah-ke-komersialisasi-pendidikan-ggMA>

Pemantau Kritisi Analisis Pemerintah soal Belajar di Sekolah



Penulis: Andriyana

Juni 11, 2021

Ilustrasi. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah sudah gagal sebelum memasuki tahun ajaran 2021/2022. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

JAKARTA, (FC).- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah sudah gagal sebelum memasuki tahun ajaran 2021/2022.

Hal itu disampaikan sebagai bentuk kritik terhadap Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mengungkap tolak ukur keberhasilan PTM yang utama adalah tidak adanya penularan Covid-19 di sekolah.

Sementara itu di beberapa daerah kluster sekolah sudah bermunculan. Seperti di SMA Negeri 1 Padang Panjang, Sumatera Barat terdapat 19 siswa positif Covid-19 karena tinggal di asrama selama PTM berlangsung.

Selain itu 43 siswa SMA Negeri 1 Padang terkonfirmasi Covid-19 setelah mengikuti PTM dan menetap di asrama sekolah.

“Itu jelas bagian dari indikator kegagalan, kalau sejak awal [penularan Covid-19] dijadikan ukuran [keberhasilan]. Ketika ukuran itu tidak tercapai, berarti itu kegagalan,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, Rabu (9/6).

Meskipun demikian, kata Ubaid, dengan munculnya klaster Covid-19 sekolah tak berarti pemerintah perlu membatalkan kebijakan PTM.

Menurutnya, pemerintah harus menindaklanjuti insiden tersebut dengan evaluasi dan persiapan pembukaan sekolah yang matang.

Ubaid meminta pemerintah pusat maupun daerah tak hanya sekedar mengeluarkan pernyataan, tetapi juga terjun langsung memastikan persiapan sekolah menjelang tahun ajaran baru pada awal Juli 2021.

“Juli sudah beberapa minggu lagi dan akan tatap muka. Saatnya mereka kerja di bawah. Bukan berarti pusat bisa mengatakan ini wewenang pemda. Iya benar, tapi pusat juga punya wewenang agar mengawasi,” ujarnya.

Menurut pantauan Ubaid, klaster sekolah mulai bermunculan karena kurangnya pemahaman guru, siswa maupun orang tua terhadap antisipasi penyebaran Covid-19.

Ubaid mencontohkan dalam beberapa kasus guru atau siswa tetap datang ke sekolah meskipun sudah merasa tidak sehat atau sedang demam.

Ia menduga hal ini karena siswa atau guru tidak menganggap serius gejala yang berpotensi terpapar Covid-19.

Sebelumnya, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek Jumeri mengungkapkan sejumlah tolak ukur keberhasilan PTM di tengah pandemi covid-19.

Selain tidak adanya penularan Covid-19 di sekolah, Jumeri mengatakan keberhasilan PTM juga dinilai dari proses belajar mengajar, interaksi guru-siswa, hingga keberhasilan guru menyampaikan materi kepada siswa.

Kemendikbudristek sendiri berkeras mewajibkan semua sekolah dibuka setelah vaksinasi covid-19 terhadap guru dan tenaga kependidikan rampung.

Namun sekolah sudah bisa melakukan PTM meskipun belum menerima vaksinasi. Mendikbudristek Nadiem Makarim menargetkan seluruh sekolah sudah dibuka pada Juli.

Sementara vaksinasi guru dan tenaga kependidikan diproyeksi paling lambat selesai Agustus mendatang.

Sumber: <https://fajarcirebon.com/pemantau-kritisi-analisis-pemerintah-soal-belajar-di-sekolah>

Ada Wacana Jasa Pendidikan Kena Pajak, JPPI: Ini Pelanggaran HAM



Penulis: Rian Firmansyah

- 14 Juni 2021, 13:02 WIB

Ilustrasi siswa sekolah dasar (SD) /PRFM

PRFMNEWS - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai rencana pemerintah yang bakal mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa pendidikan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebab, mendapatkan pendidikan secara layak merupakan salah satu hak dasar warga negara Indonesia.

“Sebagai pegiat pendidikan saya syok, ini kebijakan bencana kemanusiaan. Karena wacana ini adalah pelanggaran terhadap HAM untuk mendapat pendidikan secara layak,” kata Ubaid saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, hari ini Senin 14 Juni 2021.

Selain itu Ubaid juga menilai, wacana pengenaan pajak terhadap jasa pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

“Kalau ini terjadi, berarti kebijakan pemerintah dalam sektor pendidikan ini melakukan privatisasi atau komersialisasi pendidikan dan bertentangan dengan amanat UUD 45. Dimana pendidikan adalah tanggungjawab negara, bukan tanggungjawab privat sektor apalagi dikomersialkan,» katanya.

Dengan dikenakannya pajak terhadap jasa pendidikan, dia mengatakan akan berimbas terhadap biaya pendidikan.

Padahal sebelum dikenakan pajak pun, masih banyak anak usia sekolah yang tidak mendapat kesempatan mengenyam pendidikan akibat mahalny biaya sekolah.

“Pendidikan yang hari ini tanpa ada beban PPN pun masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat jatah bangku sekolah akibat tingginya biaya sekolah. Sementara sekolah negeri yang disediakan pemerintah, kursinya sangat terbatas,” katanya.

Daripada mengenakan pajak terhadap jasa pendidikan, ia bilang alangkah lebih baik jika pemerintah membuat kebijakan supaya seluruh anak Indonesia usia sekolah dapat memperoleh pendidikan.

“Harusnya pemerintah membuat kebijakan gimana caranya supaya anak Indonesia usia sekolah dapat haknya untuk mendapat layanan pendidikan berkualitas,» katanya.

Sebelumnya diketahui, pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa pendidikan.

Hal itu terungkap setelah draf revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beredar.

Dalam draf tersebut, tercantum bahwa pendidikan bakal dihapus dari daftar jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sumber: <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-132052492/ada-wacana-jasa-pendidikan-ke-na-pajak-jpii-ini-pelanggaran-ham?page=2>

Menelisik Kebijakan Jalur Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru



Firda Puri Agustine

Rabu, 16 Juni 2021 | 13:37 WIB

Suasana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) [Suara.com/Angga Budhiyanto]

TEBET, AYOJAKARTA – Sistem jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai efektif diberlakukan sejak tahun 2018. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018.

Sejak diberlakukannya sistem ini, berbagai pro dan kontra mulai bermunculan terutama di kalangan para orang tua yang anaknya merasakan kebijakan ini.

Tahun ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengeluarkan perubahan terkait jalur zonasi SMP-SMA/SMK pada PPDB 2021 di wilayahnya. Perubahan tersebut termaktub dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2021 dan SK Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Nomor 466 tahun 2021.

Terdapat perjenjangan zonasi di jenjang sekolah tersebut pada PPDB DKI 2021. Ada tiga prioritas zonasi tahun ini, yang pertama adalah prioritas satu, dimana tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru (CPDB) dan sekolah berada dalam satu RT.

Prioritas kedua, zonasi diperluas dengan RT irisan di sekitar sekolah atau masih satu RW dengan lokasi sekolah. Prioritas ketiga yaitu kelurahan domisili CPDB masih sama dengan kelurahan sekolah yang dituju.

“Karena kita ada 168 kelurahan tidak punya SMA, ada 86 kelurahan tidak punya SMP. Kalau zonanya langsung dari RT ke RW, nanti banyak warga yang tidak bisa sekolah, tidak bisa daftar lewat jalur zonasi,” kata Kasubag Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja saat dikonfirmasi Ayojakarta perihal alasan munculnya tiga prioritas tersebut, Selasa 15 Juni 2021.

Zonasi Dinilai Tidak Proporsional

Salah satu yang paling vokal menyuarakan kebijakan zonasi adalah Forum Orang Tua Murid (FOTM) DKI Jakarta. Juru Bicara FOTM Rahmi Yunita mengatakan munculnya tiga prioritas pada jalur zonasi tersebut adalah modifikasi yang tidak proporsional.

“Analisis kami atas ukuran zona menunjukkan bahwa mayoritas signifikan dari CPDB justru tinggal di zona prioritas 3. Artinya seleksi umur dikenakan pada mayoritas signifikan dari CPDB,” ujar Rahmi kepada **Ayojakarta**, Rabu 16 Juni 2021.

Dia menilai pada prioritas satu dan dua, para pemangku kebijakan seperti melakukan sesuatu yang buruk namun dikemas dengan cara yang halus. FOTM menilai kebijakan ini sebagai salah satu contoh sosialisasi yang tidak proporsional dan cenderung menyesatkan.

“Ini terindikasi dari bahan sosialisasi yang zoom in pada wilayah prioritas satu dan dua, tanpa zoom out ke wilayah prioritas tiganya,” ucap Rahmi.

Selain itu, FOTM menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk yang berulang kalinya tidak menerapkan aturan yang ada di Permendikbud untuk seleksi zonasi yang prinsipnya menggunakan jarak. Jika ditelisik, SK Kadisdik tersebut memiliki tiga aturan dalam jalur zonasi.

“Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui jalur zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan langkah sebagai berikut: 1. Usia dari yang tertua ke yang termuda. 2. Pilihan sekolah CPDB, 3. Waktu mendaftar,” tulis SK Kadisdik Nomor 466 tahun 2021.

Hal yang dirasakan FOTM terhadap berbagai kebijakan zonasi dalam PPDB juga dirasakan oleh Koalisi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai bahwa zonasi tidak kalah ruwet dengan sistem PPDB itu sendiri.

“Orang jadi bingung ini mengukur jarak atau usia? Tahun kemarin rebut usia, tahun ini bikin Pergub masih usia lagi. Ini pemerintah kan digaji oleh rakyat, tapi tidak mendengarkan suara rakyat, terus ngapain aja,” ucap Ubaid saat dihubungi Ayojakarta, Selasa 15 Juni 2021.

Zonasi Untuk Peningkatan Akselerasi Kualitas Sekolah

Kepala Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (BAN-S/M Kemendikbudristek) Toni Toharudin mengaku menyambut gembira ketika adanya kebijakan zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di beberapa tahun terakhir ini.

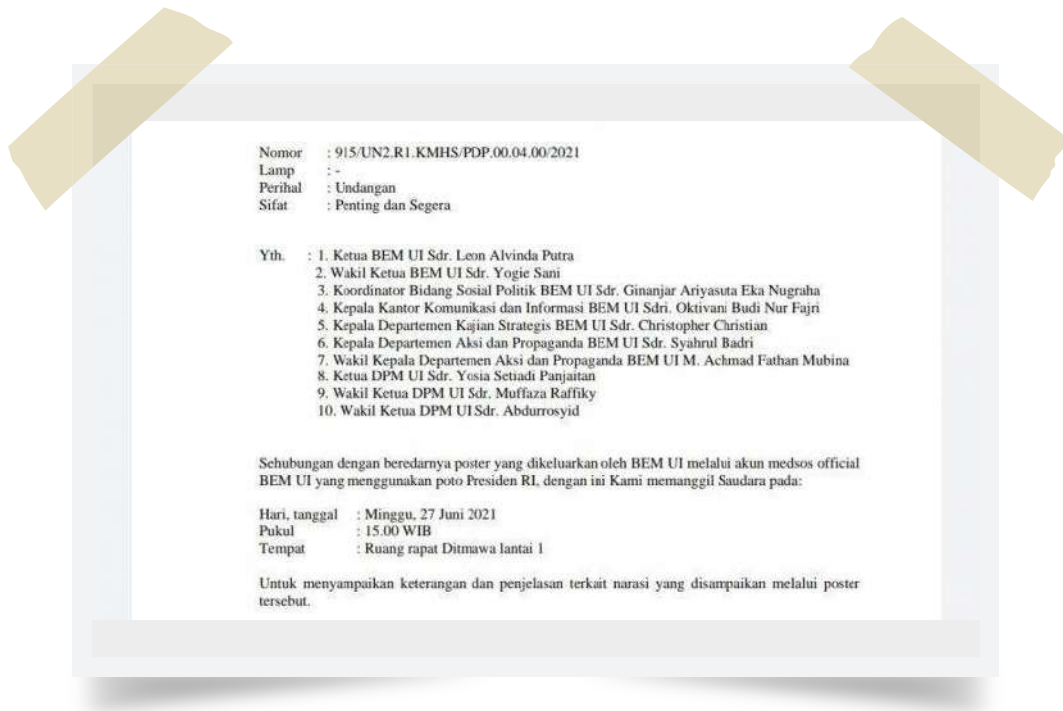
Kendati demikian, menurutnya kebijakan zonasi idealnya diberlakukan ketika standar kualitas satu sekolah dengan lainnya sudah sama. Namun pihaknya juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Toni menyebut alasan mengapa pihaknya menyetujui adanya zonasi dalam PPDB. Salah satunya yaitu semakin mudarnya label ‘sekolah favorit’ di masyarakat.

“Terlihat sekarang bahwa keinginan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah favorit makin lama makin menurun. Katakanlah, untuk masuk SMA 3, keinginan masyarakat menurun tetapi beralih ke SMA di zonasinya, sehingga SMA 3 bisa dibandingkan dengan yang lain juga,” ujar Toni saat menjadi pembicara di Fellowship Jurnalisme Pendidikan yang diinisiasi oleh GWPP dan PT. Paragon, Selasa 15 Juni 2021.

Dengan begitu, kata dia, akselerasi suatu sekolah akan meningkat. Hasil tersebut, Toni berharap pemerintah secara tidak langsung harus memenuhi standar kualitas tertentu di seluruh sekolah yang ada. “Harapannya makin lama sekolah itu meningkatkan standar kualitasnya, sehingga akan sejajar dengan sekolah lain. Saya mendukung kebijakan ini sehingga akselerasi terhadap kualitas semakin cepat,” pungkasnya.

Sumber: https://www.ayojakarta.com/nasional/pr-76767832/Menelisik-Kebijakan-Jalur-Zonasi-pada-Penerimaan-Peserta-Didik-Baru?page=2&_gl=1*yzccc0*_ga*MTQwNDg5MDg5LjE2ODc2NzQyMjE.*_ga_2BZPHNQNTD*MTY4NzY3NDIzMS4xLjAuMTY4NzY3NDIzMS4wLjAuMA..

Rektorat UI Panggil Pengurus BEM, JPPI: Katanya Kampus Merdeka, Masa Dibungkam



Penulis: Fahdi Fahlevi, Senin, 28 Juni 2021 12:25 WIB

Surat itu ditujukan kepada pengurus BEM UI, seperti Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Bidang Sosial Politik, Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matriaji mengkritik langkah Rektorat Universitas Indonesia (UI) yang memanggil pengurus BEM-UI terkait unggahan yang mengkritisi Presiden Joko Widodo.

Menurut Ubaid, sedianya pihak kampus tidak perlu membungkam kekritisan mahasiswa. Dirinya menilai hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai Kampus Merdeka yang digaungkan Kemendikbudristek. “Waduh, ini adalah kecelakaan sejarah. Lagi-lagi katanya Kampus Merdeka, masa pengkritik kembali dibungkam,” ucap Ubaid kepada Tribunnews.com, Senin (28/6/2021).

Ubaid menilai pemanggilan ini merupakan bentuk pembungkaman. Dirinya mengatakan perlakuan ini mirip dengan gaya pemerintah zaman Orde Baru. “Ini kemunduran sejarah. Masa kita balik lagi zaman orde baru yang antikritik,” tutur Ubaid.

Dirinya mengajak Rektorat UI dan Kemendikbudristek mengajak para mahasiswa berdialog. Mahasiswadiberikan panggung untuk membeberkan argumen dan dalil yang ilmiah. “Ya ajak dialog dong. Kasih panggung berdebat dong secara ilmiah, untuk adu argumen dan dalil. Bukannya malah dibungkam,” pungkas Ubaid.

Seperti diketahui, pihak UI memanggil sepuluh mahasiswa pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI yang terkait postingan “Jokowi: The King of Lip Service” pada Minggu (27/6/2021) kemarin.

Sumber: <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/28/rektorat-ui-panggil-pengurus-bem-jppi-katanya-kampus-merdeka-masa-dibungkam>

BEM UI Dipanggil Rektorat, Diretas: Sinyal Bahaya Demokrasi



Usai unggahan kritik terhadap Jokowi, BEM UI dipanggil rektorat, akun medsos diretas

Penulis: Andri Saubani

Gedung Rektorat Universitas Indonesia (UI) di Depok, Jawa Barat. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Ronggo Astungkoro, Haura Hafizhah, Sapto Andika Candra, Zainur Mashir Ramadhan, Febrianto Adi Saputro

Kritik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan melalui akun Twitter dan Instagram belakangan viral. Kritik itu disampaikan melalui utas meme janji-janji Jokowi yang dinilai sekadar janji manis atau *lip service*.

“JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE. Halo, UI dan Indonesia! Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu,” kata BEM UI lewat unggahannya, Sabtu (26/6).

Sehari setelah unggahan itu, 10 orang dari BEM UI dipanggil oleh pihak rektorat. Melalui surat resmi yang juga beredar viral, Ketua BEM UI **Leon Alvinda** Putra dkk dipanggil pihak rektorat untuk diminta keterangannya terkait unggahan kritik yang menyertakan foto Presiden Jokowi. Tidak hanya itu, Leon pada hari ini juga mengabarkan bahwa akun para anggota BEM UI mengalami peretasan.

Peretasan Akun Media Sosial Pada tanggal 27 dan 28 Juni 2021, telah terjadi peretasan akun media sosial kepada beberapa pengurus BEM UI 2021, diantaranya sebagai berikut:

1. Pukul 00.56 akun WhatsApp Tiara Sahfina (Kepala Biro Hubungan Masyarakat BEM UI 2021) tidak dapat diakses pic.twitter.com/z74eknSaeX

— Leon Alvinda Putra (@Leon_Alvinda) [June 28, 2021](#)

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengkritisi pemanggilan perwakilan BEM UI oleh Rektorat UI menyusul unggahan kritik terhadap Jokowi. Erasmus menilai pemanggilan ini sebagai sinyal berbahaya dalam iklim demokrasi.

“Suara kritis mahasiswa dibungkam. Pemanggilan itu kan intensinya represi, ini pengekangan, bahaya dalam demokrasi,» kata Erasmus kepada *Republika*, Senin (28/6).

Erasmus mempertanyakan urgensi dan waktu pemanggilan BEM UI oleh Rektorat UI yang dilaksanakan pada hari libur. Menurutnya, pihak Rektorat UI yang semestinya disanksi pemerintah karena memaksakan pertemuan tatap muka di masa pandemi Covid-19.

“Meminta penjelasan di hari Minggu, tatap muka, di saat Covid begini, UI justru tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang didorong Pak Jokowi, Rektorat UI yang harusnya ditegur oleh presiden atau pemerintah,» tegas Erasmus.

Selain itu, Erasmus mencermati tak ada aturan yang dilanggar BEM UI terkait unggahan tersebut. Sehingga, ia merasa heran terhadap pemanggilan BEM UI.

“Kalau pun itu urusan hukum, kan enggak ada pidananya? Apa urusan hukumnya? Emang Pak Jokowi tersinggung? Ya silakan Rektorat UI tanya presiden lah,» ujar Erasmus.

Erasmus menekankan, kritik terhadap pemimpin adalah hak warga negara yang menjunjung demokrasi. Apalagi menurutnya, kritik itu bukan bersifat merendahkan martabat seseorang karena disertai argumentasi.

“Apa pun aturan internal UI, ini hak warga negara, Hak BEM UI dan mahasiswa. Kritik itu dijamin konstitusi, dan mereka kritiknya berdasar, soal foto dan lain-lain itu kan satire, niatnya bukan merendahkan martabat, tapi kritik, apa masalahnya? *Enggak* ada,» ucap Erasmus.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pun ikut mengecam keras segala bentuk tindakan pembungkaman berekspresi dan berpendapat, khususnya di ruang-ruang akademis seperti di kampus. Kecaman Kontras ini merespons pemanggilan perwakilan BEM UI oleh pihak rektorat.

“Kami melihat bahwa upaya pemanggilan semacam ini merupakan indikasi pemberangusan kebebasan akademis dalam kampus,» ungkap Koordinator Kontras, Fathia Maulidiyanti, lewat keterangan tertulis yang *Republika* terima, Senin (28/6).

Fathia melihat, hal ini juga menegaskan kampus tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi mahasiswa untuk menyuarakan pendapat. Universitas, kata dia, seharusnya dapat melindungi kebebasan akademis, bukan justru mengatur ekspresi mahasiswanya.

Kontras menilai, apa yang dilakukan oleh Rektorat UI lewat Direktur Kemahasiswaan telah melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut, kata Fathia, diatur dalam Pasal 4 dan 24 UU Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan, “*Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.*”

“Sementara itu, pendidikan tinggi juga wajib menjunjung kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Sistem Pendidikan Nasional,” kata dia.

Kontras menilai, tindakan yang dilakukan oleh BEM UI lewat unggahannya merupakan bentuk kemerdekaan penyampaian pendapat yang sah. Hal itu sebagaimana diatur dalam instrument hukum HAM nasional maupun Internasional.

Walaupun kasus ini belum menyentuh ranah pidana, Kontras menilai potensi kasus-kasus serupa sangat besar berlanjut ke tahap pemolisian. Sebab, masih ada UU ITE yang didalamnya terdapat delik pencemaran nama baik dan setiap waktu bisa menjerat mereka yang kritis di ruang digital.

“Kasus pembungkaman kebebasan akademis UI merupakan rentetan panjang praktik-praktik pembungkaman ekspresi mahasiswa dalam kampus. Mahasiswa yang kritis kerap kali terbelenggu oleh sikap mental rektorat yang anti kritik,” kata Fathia.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matriaji menilai, pemanggilan BEM UI oleh pihak rektorat tergolong mencoreng dunia pendidikan. Ubaid menyayangkan institusi pendidikan yang justru tak menghargai kebebasan berekspresi.

“*Wah* ini sangat mencoreng institusi pendidikan kita. Katanya kampus merdeka, tapi lagi-lagi kita disuguhkan deretan kemunafikan,» kata Ubaid kepada **Republika**, Senin (28/6).

Ubaid menuding konsep Kampus Merdeka yang digagas Mendikbudristek Nadiem Makarim hanya slogan belaka. Sebab pada kenyataannya malah ada kampus yang mengekang ekspresi mahasiswa.

“Kampus merdeka hanya jadi slogan, nyatanya mulut dibungkam dan kebebasan diborgol. Ini menjadi indikator buruknya pengelolaan pendidikan kita,” ujar Ubaid.

Ubaid mengingatkan supaya kampus tak kembali menjadi alat penguasa seperti di era Orde Baru. Ia menyarankan supaya kritik dibalas dengan argumentasi bukan surat pemanggilan terhadap mahasiswa.

“Tindakan represif itu membuat kita mundur lagi ke sejarah orde baru dimana kritisisme kampus dibungkam. Harusnya pengkritik itu diberikan panggung untuk berdebat sebagai ruang ilmiah adu argumentasi dan uji dalil,” ucap Ubaid.

JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE pic.twitter.com/EVKE1Fp7vz

— BEM UI (@BEMUI_Official) June 26, 2021

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy ikut buka suara terkait kritik yang disampaikan BEM Universitas Indonesia (UI) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Muhadjir, ada dua hak yang perlu dijamin oleh setiap perguruan tinggi yakni kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.

Kebebasan akademik, kata dia, adalah kebebasan yang diperlukan dalam relasi antar sesama dosen dan sesama mahasiswa atau antardosen dan mahasiswa. Sementara kebebasan mimbar akademik digunakan dalam relasi warga kampus khususnya guru besar dengan pihak luar. Sebagai insan akademis, ujar Muhadjir, sudah semestinya dosen dan mahasiswa menggunakan hak tersebut sesuai prinsip akademik.

“Di samping fatsoen sebagai alat timbang tentang bagaimana kebebasan itu harus diekspresikan dengan elegan dan berkepatutan,” kata Muhadjir, Senin (28/6).

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral menekankan bahwa pada pemerintah tidak antikritik atau masukan apapun dari masyarakat. Donny menilai, kritik tersebut sebagai ekspresi dari mahasiswa yang perlu ditimbang lagi dengan data dan fakta. Bila memang ada data terkait kritik tersebut, Donny menambahkan, pemerintah tentu terbuka untuk berdiskusi dengan mahasiswa.

“Saya harus tegaskan bahwa pemerintah tidak antikritik. Asal kritik bisa dipertanggungjawabkan pasti akan direspons,” kata Donny.

Donny pun menanggapi sejumlah poin kritikan yang disampaikan mahasiswa, antara lain soal KPK hingga perihal ‘kangen didemo’. Soal KPK, Donny menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah menyampaikan pendapatnya mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK). Terkait keputusan akhir, ujarnya, KPK adalah badan independen yang tunduk pada keputusan kolektif.

“Kalau soal demo, kita tak bisa generalisir. Harus dilihat satu per satu. Apakah demonya mengandung unsur pidana sehingga ditangkap. Pada intinya pemerintah tidak antikritik,” kata Donny. Sementara itu, Juru Bicara Presiden, Fadjoel Rachman, menambahkan bahwa apa pun yang terjadi terkait dengan kemahasiswaan adalah tanggung jawab pimpinan kampus.

“Segala aktivitas kemahasiswaan di UI termasuk BEM UI menjadi tanggung jawab pimpinan UI,” kata Fadjoel.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, menilai, meme unggahan BEM UI merupakan kritik yang wajar terhadap Pemerintahan saat ini.

“Itu bukan merupakan bentuk penyerangan martabat & kehormatan ataupun penghinaan dan penistaan terhadap Presiden Jokowi,” kata Arsul saat dikonfirmasi, Senin (28/6).

Terkait pemanggilan oleh pihak rektorat, Arsul memandang narasi bahwa UI membatasi atau mengekang kebebasan berekspresi tidak perlu dikembangkan sepanjang tidak disertai dengan ancaman sanksi terhadap status akademik mahasiswa tersebut.

“Jika mereka dipanggil untuk diminta menjelaskan saja ekspresi dalam bentuk meme maka ya itu masih merupakan bentuk dari pembinaan bidang kemahasiswaan oleh Rektorat UI,” ungkapnya.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, substansi yang diungkapkan oleh BEM UI, bukan asal kritik. Menurut Herzaky, BEM UI, terlihat sudah melakukan kajian serius mengenai ini, karena ada daftar referensi yang dicantumkan dalam berbagai unggahannya.

“Gaya mengkritik seperti ini pun patut mendapatkan apresiasi dan dijadikan contoh. Bukan sekedar melontarkan kritik, melainkan berdasarkan kajian. Ada data dan fakta yang diungkap,” ucap Herzaky dalam keterangannya, Senin (28/6).

MAHASISWA MERDEKA APA ITU?



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka pada 12 April 2021.

Dalam program ini, mahasiswa dapat belajar di perguruan tinggi lain selama satu semester.

Program ini dapat diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.

Program ini dapat diikuti oleh mahasiswa semester 3 sampai semester 8.

Kegiatan selama pertukaran akan dikonversi menjadi 20 SKS. Sebagian SKS bisa tetap diambil dari perguruan tinggi asal melalui pembelajaran daring.

Prosesnya:

19-29 April 2021 Pendaftaran untuk perguruan tinggi dan dosen.

Mei 2021 Seleksi dosen membuat Modul Nusantara.

Mei-Juni 2021 Bimbingan teknis dosen.

Juli 2021 Pendaftaran mahasiswa. Mahasiswa yang ingin mendaftar bisa melihat daftar mata kuliah yang ditawarkan oleh kampus lain melalui pangkalan pendidikan tinggi.

Juli-Agustus 2021 Seleksi serta penempatan.

Agustus 2021-Januari 2022 Pelaksanaan pertukaran mahasiswa, sekaligus di dalamnya transfer SKS antarperguruan tinggi yang berpartisipasi.

Mahasiswa Merdeka (Ilustrasi) - (republika/mardiah)

Sumber: <https://news.republika.co.id/berita/qvf260409/bem-ui-dipanggil-rektorat-diretas-sinyal-bahaya-demokrasi-part1>

Rangkap Jabatan Sarat Konflik Kepentingan, Ari Kuncoro Didesak Mundur dari Rektor UI



Reporter: Merdeka

Selasa, 29 Juni 2021

Rektor UI Terpilih, Ari Kuncoro. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro tengah menjadi sorotan. Ari merangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid mendesak supaya Ari meletakkan jabatannya sebagai pimpinan di Kampus Kuning tersebut. Apa yang dilakukan Ari, menurut Ubaid merupakan sebuah contoh perilaku cacat moral. “Sebagai pertanggungjawaban publik dan cacat moral, mestinya dia mundur dari jabatan rektor,” kata Ubaid kepada Liputan6.com, Selasa (29/6).

Ubaid melihat rangkap jabatan Ari Kuncoro merupakan sebuah pelanggaran serius. Pelanggaran itu bukan melulu soal rangkap jabatan, melainkan juga menyangkut konflik kepentingan antara kedua jabatan yang diduduki Ari. “Ini sangat sarat dengan conflict of interest. Ini contoh buruk yang lagi-lagi dipertontonkan oleh kampus UI. Ini sangat memalukan,” pungkasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon juga turut berkomentar soal kabar Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro yang rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Fadli menyatakan bahwa bagaimana negara tak bangkrut, jika banyak pejabat yang merangkap jabatan. Ia menyarankan Ari Kuncoro agar memilih mau jadi rektor atau komisaris BUMN.

“Bagaimana tak bangkrut, banyak pejabat rangkap jabatan dan pendapatan dari negara. Rektor

UI pilih salah satu aja mau jadi Rektor atau mau jd Komisaris BUMN?,” tulis Fadli melalui akun Twitter pribadinya, dikutip Selasa (29/6/2021).

Rangkap Jabatan Rektor

Jajaran rektorat Universitas Indonesia (UI) memanggil pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI buntut unggahan soal **Jokowi: The King of Lip Service** pada Minggu petang, 27 Juni 2021. Sejumlah kalangan menilai bahwa pemanggilan tersebut terkesan berlebihan. Mengingat kritik mahasiswa terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar.

Belakangan diketahui ternyata Rektor UI, Ari Kuncoro menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hal ini awalnya diungkap mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz dalam unggahan di akun Twitter pribadinya.

“Rektor UI, Prof Ari Kuncoro itu Wakil Komisaris Utama BRI. Sebelumnya Komut BNI. Jadi paham kan kenapa pimpinan UI itu sangat sensitif dengan isu yg berkaitan dengan penguasa ? @BEMUI_Official tetaplah tegak #BEMUI,” cuit Donal seperti dikutip pada Selasa (29/6/2021).

Hal ini juga dipastikan dalam laman resmi BRI yang menunjukkan bahwa alumnus Brown University, Amerika Serikat (AS) itu telah menjabat wakil komisaris utama BRI sejak 2020 silam. Sampai saat ini Ari masih aktif menduduki posisi tersebut. Liputan6.com berusaha mengontak pihak BRI melalui pesan singkat dan telepon, namun hingga saat ini pihak BRI masih bergeming.

Dilarang dalam Statuta UI

Mengacu pada Statuta UI yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, rangkap jabatan yang dilakukan rektor UI tersebut merupakan tindakan haram.

Pada pasal 35 Statuta UI disebutkan bahwa rektor dilarang rangkap jabatan pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta. Berikut bunyi lengkap Pasal 35 pada Statuta UI, Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat; b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah; c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau e. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Sementara itu saat dimintai klarifikasi soal hal ini, pihak UI masih belum memberikan jawaban. Pun demikian dengan pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) kompak tak merespons soal hal tersebut.

Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/rangkap-jabatan-sarat-konflik-kepentingan-ari-kuncoro-didesak-mundur-jadi-rektor-ui.html>

Coreng Institusi Kampus, JPPI Minta OJK Tegas Soal Rektor Rangkap Jabatan



Penulis: M. Purwadi

Sabtu, 10 Juli 2021

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. Foto/Ist

JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawas sektor perbankan agar segera mengambil sikap tegas terkait sejumlah **rektor perguruan tinggi yang rangkap jabatan** di bank.

“Disebutkan jelas dalam peraturan **OJK**, bahwa salah satu syarat utama menjadi komisaris adalah mempunyai integritas. Lalu, integritas itu ditunjukkan dengan adanya sikap untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Peraturan OJK, no. 27 tahun 2016, pasal 5),» tegas Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, Jumat (9/7/2021).

Sementara, kata Ubaid, dalam kasus ini sudah jelas, bahwa adanya dokumen dan pengakuan soal rangkap jabatan yang jelas menyalahi peraturan perundang-undangan. Menurut Ubaid, OJK tidak harus menunggu, tapi bisa membatalkan persetujuan atas jabatan komisaris sejumlah rektor yang rangkap jabatan tersebut

Hal ini, kata Ubaid, sesuai dengan Peraturan OJK nomor 27 tahun 2016 pasal 28. “Meski begitu, kami menyayangkan sikap OJK yang terkesan diam dan cuci tangan. Padahal, OJK-lah pihak yang berwenang dalam memberikan persetujuan dan juga pengawasan sektor perbankan,” terangnya.

Karena itu, JPPI menuntut OJK untuk bersuara dan mengambil langkah tegas dengan mencopot jabatan komisaris rektor, karena melanggar aturan integritas di sektor perbankan. Jika dibiarkan,

ini akan merusak tata kelola industri keuangan, mencoreng institusi kampus.

“Bahkan berdampak pada bobroknya integritas di lembaga pendidikan tinggi yang digadagadag sebagai institusi penjaga moral, kontrol sosial, dan gerakan perubahan,” terang Ubaid.

JPPI memandang, kasus ini sangat serius karena menyangkut integritas rektor, pimpinan tertinggi di lembaga pendidikan tinggi. Bangsa ini sesungguhnya tidak hanya sedang menghadapi pandemi Covid-19, tapi juga pandemi krisis integritas. Banyak orang pintar dengan setumpuk gelar, tetapi itu tidak kemudian menjamin integritasnya. Lembaga pendidikan adalah benteng terakhir pertahanan integritas.

Jika institusi ini bobol, lalu di mana lagi kita bisa berharap. Untuk itu, kita semua harus menjaga marwah kampus sebagai institusi independen yang menyemai integritas calon-calon pemimpin masa depan,” jelas Ubaid.

Sebelumnya, JPPI menyebut kasus rangkap jabatan rektor sebagai komisaris BUMN, bukan hanya terjadi di Universitas Indonesia (UI). Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komaruddin Hidayat juga disebut rangkap jabatan dan melanggar statuta.

“Saat ini, Rektor UIII menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia (BSI) bank hasil merger BNI Syariah, BNI Syariah dan BSM,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji melalui keterangan tertulis, Selasa, 6 Juli 2021.

Ubaid mengatakan, informasi ini didapat dari pengaduan masyarakat. Ia menyebut, Komaruddin Hidayat pun diduga melanggar Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang melarang Rektor UIII memegang jabatan di BUMN/Perusahaan Swasta.

Sumber: <https://edukasi.sindonews.com/newsread/478848/211/coreng-institusi-kampus-jppi-minta-ojk-tegas-soal-rektor-rangkap-jabatan-1625846854/10>

PDIP Nilai Kritik BEM Unnes Fitnah, JPPI: Kemunduran Berdemokrasi!



Penulis: Kuswandi

Jumat, 9 Juli 2021

Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membentangkan spanduk saat menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (16/10/2020). Aksi tersebut untuk menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Semarang (Unnes) memberikan julukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai 'The Queen of Ghosting'. Sebab, Puan dinilai sering memberikan harapan palsu dan menyakiti rakyat.

Pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun menyebut bahwa kritikan tersebut mempunyai indikasi menista dan fitnah belaka. Adapun, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menuturkan, tidak terimanya kritikan merupakan kemunduran demokrasi.

“Itu kemunduran dalam berdemokrasi,” jelas dia ketika dihubungi JawaPos.com, Jumat (9/7).

Menurutnya, jika tidak menerima kritikan, masa ini kembali ketika sedang dijajah, yakni semua perkataan yang terlintas dari masyarakat adalah tidak benar. Pemerintahan tersebut dinilai otoriter. “Kita balik lagi zaman penjajahan dong, semua yang dikatakan masyarakat itu salah kalau tidak sesuai dengan penguasa, jangan balik lah ke masa penjajahan,” imbuhnya.

Sebaiknya pihak pemerintah menanggapi kritikan tersebut dengan baik. Jangan memberikan tanggapan tidak menerima.

“Kita sudah di masa demokrasi yang bagus, sehingga orang yang berbeda (pendapat) diajak untuk berdialog, berdebat dan diskusi, bukan langsung melaporkan karena ini penghinaan atau pencemaran nama baik, ajak debat aja,” tandasnya.

Sebagai informasi, Politikus PDIP yang juga Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyayangkan protes tersebut. Ia pun mempertanyakan apakah BEM Unnes memahami apa yang disampaikan, sebab dinilai fakta yang disajikan tidak utuh.

“Hanya dengan mendasarkan prasangka tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian, kajian untuk kemudian diuji publik tiba-tiba melakukan kesimpulan seperti itu yang bahkan cenderung menista, memfitnah dan menyerang kehormatan seseorang, apalagi orang tersebut kepala lembaga tinggi negara dan kepala lembaga kepresidenan,” ungkap dia kepada wartawan, Kamis (8/7) kemarin.

Sumber: <https://www.jawapos.com/nasional/01333413/pdip-nilai-kritik-bem-unnes-fitnah-jppi-kemunduran-berdemokrasi>

JPPI minta rektor rangkap jabatan mengundurkan diri



Editor: Zita Meirina

Selasa, 6 Juli 2021

Pertanggungjawaban moral dan menjaga marwah kampus

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta sejumlah rektor yang melakukan rangkap jabatan untuk mengundurkan diri.

“JPPI menduga, ada banyak kemungkinan, rangkap jabatan ini juga dilakukan oleh rektor-rektor di kampus lain. Hanya saja publik tidak tahu dan mereka masih menyembunyikan. Untuk itu, sebagai pertanggungjawaban moral dan menjaga marwah kampus, JPPI mendesak supaya para rektor tersebut mengundurkan diri,” ujar Ubaid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Sejumlah rektor yang melakukan rangkap jabatan diantaranya Rektor UI Ari Kuncoro yang melakukan rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama PT BRI dan Rektor UIII Komaruddin Hidayat yang rangkap jabatan sebagai komisaris di Bank Syariah Indonesia.

Ubaid menambah ada dua alasan utama mengapa pihaknya mendesak rektor - rektor tersebut mengundurkan diri. Pertama, kampus adalah institusi yang berperan sebagai moral force, tempat dimana gerakan moral dan pendidikan karakter para pemimpin bangsa ditempa. Apa jadinya jika kalangan intelektual di kampus mencontohkan perilaku yang tidak bermoral dengan melakukan tindakan yang jelas dilarang dalam peraturan. Ini tentu hal buruk yang harus dihindari.

Kedua, kampus juga berperan besar dalam kendali sosial. Ketika ribut-ribut soal politik yang sarat

kepentingan, seringkali gerakan kampus dan juga para rektor menyatakan sikap dan terlibat dalam perseteruan menjadi penengah dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan pada yang lemah. Oleh karena itu, peran-peran kampus dan pemimpinnya (rektor) seharusnya tidak tergadai dengan iming-iming jabatan atau kepentingan politik yang mempengaruhinya. “Rektor yang rangkap jabatan harus mengundurkan diri. Jika tidak, maka idealisme dan marwah kampus tergadai oleh konflik kepentingan dan kuasa jabatan,” imbuh dia.

Pemerintah tidak boleh gegabah dalam memberikan amanah jabatan kepada seseorang tanpa melihat rekam jejak dan riwayat calon pejabat. Atas kejadian rangkap jabatan rektor, JPPI menduga ada unsur pembiaran dan kesengajaan dari dua belah pihak.

Bank Indonesia dan OJK harus meningkatkan pengawasan, karena diduga banyak pejabat BUMN yang terlibat rangkap jabatan, tetapi luput dari pengawasan, bahkan terjadi pembiaran. “Khusus untuk kampus UIII, ini kampus baru yang segera beroperasi pada September 2021, harus menjadi contoh yang baik. Apalagi, ini adalah kampus internasional yang digadang-gadang oleh presiden sebagai pusat peradaban dunia Islam. Oleh karena itu, rektornya pun harus punya integritas yang tinggi,” imbuh dia.

Sumber: https://m.antaranews.com/amp/berita/2252058/jppi-minta-rektor-rangkap-jabatan-mengundurkan-diri#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16875233727324&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

Rektor Ari Kuncoro Rangkap Jabatan, JPPI Bakal Surati Jokowi soal Statuta UI



Penulis: Newswire

21 Juli 2021

Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro/ui.ac.id

Bisnis.com, JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) berencana bersurat ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi ihwal aturan rangkap jabatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI).

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai, jika aturan yang benar adalah yang belum direvisi. “Statuta yang lama itu sudah benar,” ujar dia, Rabu (21/7/2021).

Ubaid mengatakan, justru Rektor UI-lah yang mundur karena sudah menyalahi aturan lantaran memiliki dobel jabatan. Dia mengaku heran dengan malah berubahnya aturan Statuta UI. “Bukan malah aturannya yang diubah. Arogan sekali ini. Kami akan surat presiden soal ini,” kata Ubaid.

Menurut dia, rangkap jabatan memiliki potensi besar terjadi konflik kepentingan.

“Kampus itu kan lembaga independen, kalau rangkap-rangkap gitu ya pasti tidak bisa lagi bersikap independen dan obyektif. Suara kampus bisa bias menjadi suara kepentingan korporat. Di situ lah nanti kepercayaan publik terhadap kampus, runtuh,” kata Ubaid.

Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia.

Salah satu aturan yang berubah ialah ketentuan ihwal rangkap jabatan pimpinan

universitas di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan salinan PP, ketentuan tentang rangkap jabatan ini tertuang dalam Pasal 39 PP Nomor 75 Tahun 2021. Di aturan sebelumnya atau PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI, hal itu diatur di Pasal 35.

Berikut perbedaannya:

Pasal 35 PP Nomor 68 Tahun 2013:

Rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai:

- a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
- b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
- c. pejabat pada badan usaha mili negara/daerah maupun swasta;
- d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik, dan/atau
- e. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Pasal 39 PP Nomor 75 Tahun 2021 atau statuta terbaru:

Rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai:

- a. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
- b. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;
- c. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau
- d. pengurus/anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

Sebelumnya, Rektor UI Ari Kuncoro dikritik lantaran merangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Posisinya disorot setelah rektorat UI memanggil BEM UI lantaran unggahan di media sosial yang menjuluki Presiden Jokowi sebagai 'The King of Lip Service'.

Publik pun mengaitkan pemanggilan itu dengan posisi Ari Kuncoro di perusahaan pelat merah. Ombudsman Republik Indonesia mengatakan rangkap jabatan Rektor UI ini merupakan maladministrasi karena melanggar Statuta UI.

Sumber: <https://m.bisnis.com/amp/read/20210721/79/1419956/rektor-ari-kuncoro-rangkap-jabatan-jppi-bakal-surati-jokowi-soal-statuta-ui>

JPPI Bakal Surati Jokowi Soal Aturan Rangkap Jabatan Dalam Statuta UI



Reporter: Andita Rahma

Editor: Aditya Budiman

Rabu, 21 Juli 2021 11:03 WIB

Presiden Joko Widodo tiba di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Juni 2021. Kala itu Presiden Joko Widodo tampak mengenakan setelan jaket warna krem, baju kemeja putih, celana hitam, dan sepatu sneakers. Foto: BPMI Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) berencana bersurat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal aturan rangkap jabatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai jika aturan yang benar adalah yang belum direvisi. “Statuta yang lama itu sudah benar,” ujar dia saat dihubungi pada Rabu, 21 Juli 2021.

Ubaid mengatakan justru Rektor UI-lah yang mundur karena sudah menyalahi aturan lantaran memiliki dobel jabatan. Ia mengaku heran dengan malah berubahnya aturan Statuta UI. “Bukan malah aturannya yang diubah. Arogan sekali ini. Kami akan surat presiden soal ini,” kata Ubaid.

Menurut Ubaid, rangkap jabatan memiliki potensi besar terjadi konflik kepentingan. “Kampus itu kan lembaga independen, kalau rangkap-rangkap gitu ya pasti tidak bisa lagi bersikap independen dan obyektif. Suara kampus bisa bias menjadi suara kepentingan korporat. Di situ lah nanti kepercayaan publik terhadap kampus, runtuh,” kata Ubaid menambahkan.

Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia. Salah satu aturan yang berubah ialah ketentuan ihwal rangkap jabatan pimpinan universitas di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan salinan PP yang diperoleh Tempo, ketentuan tentang rangkap jabatan ini tertuang dalam Pasal 39 PP Nomor 75 Tahun 2021. Di aturan sebelumnya atau PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI, hal itu diatur di Pasal 35. Berikut perbedaannya:

Pasal 35 PP Nomor 68 Tahun 2013:

Rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai:

- a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
- b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
- c. pejabat pada badan usaha mili negara/daerah maupun swasta;
- d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik, dan/atau
- e. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Pasal 39 PP Nomor 75 Tahun 2021 atau statuta terbaru:

Rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai:

- a. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
- b. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;
- c. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau
- d. pengurus/anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

Sebelumnya, Rektor UI Ari Kuncoro dikritik lantaran merangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Posisinya disorot setelah rektorat UI memanggil BEM UI lantaran unggahan di media sosial yang menjuluki Presiden Jokowi sebagai ‘The King of Lip Service’.

Publik pun mengaitkan pemanggilan itu dengan posisi Ari Kuncoro di perusahaan pelat merah. Ombudsman Republik Indonesia mengatakan rangkap jabatan **Rektor UI** ini merupakan maladministrasi karena melanggar Statuta UI.

Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1485517/jppi-bakal-surati-jokowi-soal-aturan-rangkap-jabatan-dalam-statuta-ui>

Soal Bsu Rp 1,8 Juta Guru Honorer dan Non Pns Belum Jelas, Jppi: Kemendikbud Ristek Jangan Zolimi Mereka



Penulis:Rahmad

JURNAL MEDAN – Nasib para guru honorer dan non PNS belum juga ada kejelasan dari Kemendikbud Ristek terkait jadwal pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 1,8. Bantuan tersebut diberikan kepada guru honorer dan non PNS yang terdampak pandemi Covid-19.

Mengenai kejelasan BSU Rp 1,8 juta ini, Jurnal Medan sudah mencoba mengkonfirmasi langsung ke Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Iwan Syahril. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban.

Menanggapi hal itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta Kemendikbud Ristek agar tidak menzolimi para guru honorer dan tidak memberikan janji palsu kepada mereka.

“Mereka sudah berkali-kali menjadi korban PHP dari kebijakan pemerintah, mulai status yang terkatung-katung, janji-janji diangkat PNS, sampai bansos yang tak turun-turun,” tegas Ubaid kepada Jurnal Medan, Kamis, 16 september 2021.

Menurut Ubaid, pahlawan yang sesungguhnya di masa pandemi Covid-19 adalah para guru honorer dan non PNS. Meski status dan gajinya tidak jelas, tapi guru honorer tetap mendidik anak-anak bangsa dengan segala keterbatasannya.

Bahkan, lanjutnya, ada juga guru yang tidak mendapatkan gaji di masa pandemi, namun tetap mengajar.

“Jangan lah lagi di zolimi itu guru honorer, mereka adalah salah satu pahlawan yang sesungguhnya di masa pandemi ini. Meski statusnya enggak jelas dan gaji sangat minim, tapi mereka tetap membersamai anak-anak indonesia untuk melek literasi dengan segala keterbatasannya,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada Kemendikbud Ristek agar menepati janjinya menyalurkan BSU guru honorer dan non PNS tersebut.

“Kalau sudah menjadi hak guru honorer, ya harus ditunaikan. Guru honorer sangat terdampak ekonominya di masa pandemi ini. Kebijakan pemerintah harusnya berpihak pada guru-guru honorer, jangan hanya kasi janji-janji,” tandasnya.

Sebelumnya, Kemendikbud Ristek mengeluarkan rilis telah memperpanjang masa aktivasi rekening Bantuan Subsidi Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (BSU PTK) Bukan Pegawai negeri Sipil (BPNS) hingga 31 Juli 2021. Namun, hingga kini belum ada kejelasan kapan akan dicairkan.

Untuk program BSU guru honorer dan non PNS Rp 1,8 Juta kepada 2 Juta guru honorer dan non PNS saat pandemi covid 19, Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,5 triliun.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Subsidi Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penanganan Dampak Covid-19.

Kapuslapdik, Abdul Kahar menjelaskan bahwa penerima BSU PTK Bukan PNS Tahun 2020 yang sampai saat ini belum melakukan aktivasi atau mencairkan dananya, masih dapat melakukan aktivasi rekening di bank hingga 31 Juli 2021.

“Jadi, penerima BSU 2020 yang sampai saat ini belum mengaktivasi atau mencairkan dananya, masih dapat melakukan aktivasi rekeningnya paling lambat tanggal 31 Juli 2021,” disampaikan Abdul Kahar di Jakarta, pada Kamis, 8 Juli 2021.***

Sumber: <https://new-indonesia.org/soal-bsu-rp-18-juta-guru-honorer-dan-non-pns-belum-jelas-jppi-ke-mendikbud-ristek-jangan-zolimi-mereka/>

Jokowi Bolehkan Rektor UI Rangkap Jabatan, JPPI: Arogansi yang Memalukan!



Bangun Santoso | Stephanus Aranditio
Rabu, 21 Juli 2021 | 13:43 WIB
Kampus Universitas Indonesia . [suara.com]

Suara.com - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai, revisi Statuta Universitas Indonesia yang mengizinkan **Rektor UI** Ari Kuncoro rangkap jabatan di BUMN sebagai kebijakan memalukan.

Ubaid mengatakan, peristiwa ini adalah bentuk arogansi rektor yang tidak lagi mendengar desakan publik agar berintegritas satu jabatan saja. “Ini bentuk arogansi rektor. Rektor tak lagi mendengarkan desakan publik, tapi malah menggunakan kekuasaannya untuk membuat pagar besi. Ini pertunjukan memalukan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang rektor,” kata Ubaid saat dihubungi Suara.com, Rabu (21/7/2021).

Dia menilai, peristiwa ini berbahaya. Sebab bisa jadi dicontoh oleh kampus lain yang dengan mudahnya mengubah statuta kampus. “Ini kampus UI lho, kelakuan rektornya bisa dicontoh kampus-kampus lain. Bentar lagi UII juga, jangan-jangan sudah mempersiapkan revisi statutanya juga. Bahaya ini kalau diterus-teruskan,” ucapnya.

Ubaid mendesak Ari Kuncoro untuk mengambil sikap bijak atas polemik rangkap jabatan ini, sebab tidak baik untuk dunia pendidikan Indonesia. “Pak rektor, jadilah teladan yang baik. Bangsa ini sedang mengalami pandemi, bukan saja akibat covid, tapi juga pandemi krisis integritas,” imbuh Ubaid.



Jokowi Bolehkan Rektor UI Rangkap Jabatan

Sebelumnya, Rektor UI Ari Kuncoro boleh rangkap jabatan jadi komisaris BUMN. Statuta UI telah disahkan oleh Presiden Jokowi pada 2 Juli 2021 lalu lewat PP Nomor 75 Tahun 2021. Aturan baru ini menggantikan PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.

Perubahan itu berimbas pada bolehnya Rektor UI merangkap jabatan terletak pada Pasal 39 Statuta UI yang baru. Pasal 39 disebutkan mengubah ketentuan pada Pasal 35 statuta yang lama.

Pasal 35 dalam PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI memuat aturan yang melarang Rektor “merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.”

Selain itu, di butir huruf (e), Rektor UI juga dilarang merangkap sebagai «pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Sementara di Statuta UI terbaru, pada butir (c) Pasal 39 tertulis bahwa Rektor UI dilarang merangkap “sebagai direksi pada badan usaha milik negara/swasta maupun swasta.

Aturan yang melarang Rektor UI untuk menjabat pada jabatan yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI sudah tak ada lagi.

Rektor UI saat ini, Ari Kuncoro diketahui juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/ Independen Bank Rakyat Indonesia (BRI). Profil Ari Kuncoro sebagai wakil komisaris utama/ independen masih terpampang di website resmi BRI hingga saat ini.

Sumber: <https://www.suara.com/news/2021/07/21/134337/jokowi-bolehkan-rektor-ui-rangkap-jabatan-jp-pi-arogansi-yang-memalukan>

Rektor Bungkam Kritik, Menteri Membiarkan, JPPI: Slogan Kampus Merdeka Hanya Omong Kosong



Penulis: Muhammad Nursam - Nasional

Jumat, 9 Juli 2021 19:07 PM

FAJAR.CO.ID -- Kebijakan Merdeka Belajar dinilai masih belum memperlihatkan bukti kongkritnya. Pasalnya, dalam kebebasan berpendapat saja masih coba untuk dibungkam, seperti yang terjadi pada kasus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang mengkritik pemerintah.

“Saya lihat sampai hari ini slogan kampus merdeka masih omong kosong dan pak menterinya (Nadiem Makarim) tidak berani (membuktikan Merdeka Belajar),” jelas Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji ketika dihubungi JawaPos.com (grup FAJAR), Jumat (9/7/2021).

Ia melihat Nadiem yang tidak memberikan pernyataan atau mengambil sikap dalam kasus ini tak dapat membuktikan apapun soal kebijakan Merdeka Belajar. Apalagi, kasus ini bukan yang pertama kalinya, sebelumnya ada BEM Universitas Indonesia (UI) dan BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kalau bilang Kampus Merdeka, menterinya harusnya memelopori kemerdekaan berpendapat kayak gimana, kasus ini kan sudah banyak, tapi tidak ada statement dari pak menteri,” tutur Ubaid.

Setidaknya, lanjut Ubaid, Nadiem bisa menanggapi fenomena ini dengan mengajak mahasiswa

untuk menyampaikan pendapat secara baik. Contohnya adalah dengan memberikan fakta dan melalui penelitian.

“Harusnya pak menteri mengatakan mahasiswa harus terus melakukan kritik, mengevaluasi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Karena itu, Ubaid pun kembali mempertanyakan kehadiran Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk menengahi permasalahan ini.

“Iya dong (harus ambil tindakan), selama ini saya bilang dia abai dan sikapnya tidak jelas,” ungkapnya.

Dalam hidup berdemokrasi, menyampaikan pendapat merupakan hak semua pihak, termasuk kritik kepada pemerintah. Menurutnya, Nadiem dapat mengambil tindakan seperti memanggil rektor yang mengekang kebebasan pendapat mahasiswa.

“Kan bisa saja dipanggil rektor atau kasih teguran rektor yang melakukan tindakan yang tidak mendorong nalar kritis di level mahasiswa,” ujarnya.

Menurut Ubaid, ruhnya kampus itu adalah kritisisme, jika itu tidak ada, maka kampus sudah mati. Begitu juga dengan rakyat, siapa yang akan menyuarakan aspirasi masyarakat apabila kritikan dibungkam.

“Mau berharap kemana lagi, kampus tempat orang-orang kritis, kalau itu sudah dibungkam ya kita balik lagi pada rezim otoriter,” terangnya.

Apabila tidak ada tindakan dari pemimpin pendidikan di Indonesia itu, langkah terbaik adalah terus menyampaikan kritikan. “Ini kan kesan yang muncul, rektornya semena-mena, kemudian menterinya tidak melakukan evaluasi dan terkesan membiarkan,” pungkasnya.

Sumber: <https://fajar.co.id/2021/07/09/ректор-bungkam-kritik-menteri-membiarkan-jppi-slogan-kampus-merdeka-hanya-omong-kosong/>

Deretan Tanggapan Terkait Perubahan Statuta UI Rangkap Jabatan



Penulis: Devira Prastiwi

22 Juli 2021

Kampus Universitas Indonesia (UI) (Doc. Universitas Indonesia)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 menjadi PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI (Universitas Indonesia).

Dalam PP Nomor 75 Tahun 2021 itu terdapat revisi soal rangkap jabatan bagi rektor, wakil rektor, sekretaris, dan kepala badan.

Perubahan itu tepatnya terdapat dalam PP 75 Tahun 2021 Pasal 39 c yang hanya melarang rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan untuk menduduki jabatan direksi di sebuah perusahaan. Tak ada pelarangan menjabat sebagai komisaris.

Perubahan Statuta UI yang sudah resmi diundangkan itu pun menuai beragam tanggapan. Karena dengan begitu, maka rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan bisa menduduki posisi komisaris alias rangkap jabatan.

Salah satunya dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Menurut Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, perubahan statuta UI yang memberikan celah agar rektor bisa menjabat sebagai komisaris di suatu badan usaha, jelas bentuk sikap arogansi. Padahal, kata Ubaid, saat menjabat rangkap, Statuta UI jelas melarang rektor merangkap jabatan tersebut.

“Menurut saya ini jelas arogansi rektor. Harusnya kan mendengarkan lah aspirasi dari masyarakat. Bukan malah aturan yang diubah, harusnya yang merangkap jabatan melanggar aturan ya jadi harus mengundurkan diri,” kata Ubaid kepada Liputan6.com, Rabu, 21 Juli 2021.



**Berikut sejumlah tanggapan terkait perubahan Statuta UI
dihimpun Liputan6.com:**

JPPI

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Ikatan Alumni (ILUNI) Universitas Indonesia (UI) lintas almahmader menggelar Rapat Akbar Gerakan Anti Korupsi (GAK) Nasional di kampus UI Salemba, Jakarta, Jumat (20/3/2015). (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan, perubahan Statuta UI yang memberikan celah agar rektor bisa menjabat sebagai komisar di suatu badan usaha, jelas bentuk sikap arogansi.

Padahal, saat menjabat rangkap, Statuta UI jelas melarang rektor merangkap jabatan tersebut.

“Menurut saya ini jelas arogansi rektor. Harusnya kan mendengarkan lah aspirasi dari masyarakat. Bukan malah aturan yang diubah, harusnya yang merangkap jabatan melanggar aturan ya jadi harus mengundurkan diri,” kata Ubaid kepada Liputan6.com, Rabu 21 Juli 2021.

Dia mengungkapkan, apa yang dilakukan Rektor UI ini jelas presedern buruk bagi dunia pendidikan di tanah air. Bahkan seolah-olah itu difasilitasi oleh negara.

Menurut Ubaid, jika ini dibiarkan, maka jelas merusak independensi institusi pendidikan tinggi. Dan bisa saja kepercayaan publik bisa turun.

“Sehingga konflik-konflik kepentingan semacam itu akan menjadi tontonan kita nanti,” kata dia.

Ubaid menuntut agar pemerintah mencabut aturan yang berpotensi melanggengkan konflik kepentingan di tubuh perguruan tinggi tersebut, utamanya di UI.

“Harus dievaluasi oleh presiden dan menteri bahwa ini hal yang tidak baik. Ini preseden awal ya tidak pernah kita mengalami hal seperti ini. Menurut saya harus balik ke Statuta yang lama,” jelas Ubaid.



Partai Demokrat

Seminar Gizi untuk Bangsa (GUB) kembali dilaksanakan. Stunting menjadi fokus pada seminar yang dilaksanakan Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI) (sumber foto: Istimewa)

Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengkritisi revisi Statuta UI yang memberikan celah agar rektor bisa menjabat sebagai komisaris di suatu badan usaha.

Menurut dia, ini langkah reaktif pemerintah untuk meredam kekecewaan publik yang melihat Rektor UI bisa merangkap jabatan.

“Padahal, seharusnya ada proses review yang ketat sebelum pengangkatan rektor menjadi komisaris,” kata Herzaky pada keterangannya.

Menurutnya, UI seharusnya fokus terhadap posisinya yang mengalami penurunan berdasarkan QS World University Rankings.

“Ini yang seharusnya menjadi fokus rektor dan Kemendikbudristek. Keputusan yang diambil

oleh rektor harus terfokus dalam semangat meningkatkan performa akademik, mendukung riset dan inovasi, demi membawa nama baik universitas yang dipimpinnya. Apalagi, kegiatan pembelajaran kurang optimal akibat pandemi ini. Keputusan ataupun jabatan yang tidak relevan sebaiknya dihindari,” jelas Herzaky.

Permasalahan ketiga, lanjut dia, masyarakat menangkap sinyal pesan moral yang kurang baik dari kejadian tersebut. Hal itu dapat dilihat reaksi masyarakat di sosial media.

“Rektor perlu menjaga integritas dan menjadi teladan bagi mahasiswa dan akademisi. Menurut kami, kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran dan tidak boleh terulang kembali,” kata Herzaky.

“Kali ini Universitas Indonesia malah seakan dirusak kredibilitasnya oleh aturan ini,” sambung dia.

Herzaky mempertanyakan kebijakan Menteri BUMN dan juga Presiden Jokowi yang merevisi Statuta Universitas Indonesia sehingga Rektor UI diperbolehkan rangkap jabatan.

“Mengapa di saat kegelisahan rakyat memuncak terkait situasi Pandemi terkini? Apakah memang perubahan statuta UI ini menjadi prioritas? Apakah memang sengaja memantik kontroversi baru di tengah situasi sulit yang dihadapi rakyat dan negeri ini? Sehingga fokus kita teralih?,” tuturnya.

“Apakah pemerintah tak bisa berfokus, ke pandemi saja, sampai sibuk urus Statuta UI? Selamatkan nyawa rakyat, seperti yang selalu disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, itu yang harusnya menjadi prioritas,” tukas dia.

Sumber: <https://www.liputan6.com/news/read/4613022/deretan-tanggapan-terkait-perubahan-statuta-ui-rangkap-jabatan>

Rangkap Jabatan Rektor UIII dan Komisaris BUMN, Komaruddin Pilih Salah Satu di 2024



Reporter: Merdeka

Rabu, 7 Juli 2021 14:42

Komaruddin Hidayat. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Rektor Universitas Islam Indonesia Internasional (UIII), Komaruddin Hidayat didesak mundur dari posisinya oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) karena merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen di Bank Syariah Indonesia (BSI). Tindakan tersebut dianggap melanggar sejumlah ketentuan, termasuk Statuta UIII.

Merespons hal itu, Komaruddin Hidayat mengatakan bahwa tindakannya itu telah mendapat restu dari pihak Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).

“Saya sudah lapor dan minta izin pada Setwapres dan Ketua Wali Amanah untuk jadi komisaris di BSI, bahkan jadi jembatan dan jaringan untuk mengembangkan program Ekonomi Syariah di UIII. Pendeknya, UIII belum berjalan normal layaknya kampus sehingga tak ada lembaga yang dirugikan,” tegas dia kepada Liputan6.com, Selasa (6/7).

Komaruddin mengatakan, tindakannya patut dimaklumi mengingat kegiatan di UIII belum berjalan. Dan menurutnya rangkap jabatan yang dilakukannya tidak akan mempengaruhi independensinya.

“Sekedar info just for you. UIII ini masih masa perintisan, konsolidasi. Ketika jadi komisaris, kampus juga belum beroperasi. Jadi tidak mengganggu,” ujarnya.

Ia rela melepas jabatan dari salah satunya bila kampus UIII sudah mulai beroperasi. Kata

Komaruddin hal itu kemungkinan terjadi pada 2024 mendatang.

“Yes (siapa pilih salah satu), saya ikut merumuskan statuta itu. Yang terbayang rektor setelah saya setelah UIII jalan normal,” pungkasnya.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mendesak sejumlah rektor yang merangkap jabatan agar mengundurkan diri dari jabatannya. Tak terkecuali bagi Komaruddin Hidayat yang saat ini menduduki dua jabatan yang dikhawatirkan sarat akan konflik kepentingan.

“Kampus di bawah Kementerian Agama itu juga diduga melanggar hukum, persisnya Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang melarang Rektor UIII memegang jabatan di BUMN/Perusahaan Swasta,” kata Ubaid dalam keterangan tulis kepada Liputan6.com, Selasa (6/7/2021).

Ubaid bilang, kampus baru yang segera beroperasi pada September 2021 ini, harus menjadi contoh yang baik bagi kampus lain. Bukan justru sebaliknya.

“Apalagi, ini adalah kampus internasional yang digadang-gadang oleh presiden sebagai pusat peradaban dunia Islam. Karena itu, rektornya pun harus punya integritas yang tinggi,” tandasnya.

Reporter: Yopi M

Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/rangkap-jabatan-rector-uiii-dan-komisaris-bumn-komaruddin-pilih-salah-satu-di-2024.html>

Rektor yang Rangkap Jabatan Didesak untuk Mengundurkan Diri



Penulis: Rahel Narda Chaterine

Editor: Bayu Galih

6 Juli 2021, 10:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak para rektor yang memiliki rangkap jabatan sebagai pejabat pemerintahan mengundurkan diri.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji rangkap jabatan rektor sebagai unsur pejabat pemerintahan jangan sampai merusak marwah dan idealisme kampus karena adanya konflik kepentingan. “Rektor yang rangkap jabatan harus mengundurkan diri,” kata Ubaid dalam keterangan tertulis, Selasa (6/7/2021).

Sebagai informasi belakangan kemarin ramai berita soal Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro yang merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama Bank BRI.

Ari diduga melakukan maladministrasi karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI. Sebab, dalam Statuta UI ada pasal yang melarang rektor merangkap jabatan di perusahaan BUMN.

Selain UI, Ubaid pun mengatakan, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang berada di bawah Kementerian Agama diduga juga melanggar hukum. Ubaid menyebut Rektor UIII menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia (BSI) bank hasil merger

BNI Syariah, BNI Syariah dan BSM.

Padahal, menurut dia, dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) melarang Rektor UIII memegang jabatan di BUMN/Perusahaan Swasta.

Ia pun berharap Bank Indonesia dan OJK meningkatkan pengawasan karena diduga banyak pejabat BUMN yang terlibat rangkap jabatan. “Sebagai pemegang kuasa atas layanan jasa keuangan, harusnya BI dan OJK bisa mendeteksi lebih dini dan meniadakan soal kasus rangkap jabatan ini,” ujar Ubaid.

Dalam kesempatan yang sama, Ubaid juga meminta pemerintah tidak sembarangan memberikan amanah jabatan kepada seseorang tanpa melihat rekam jejak dan riwayat calon pejabat itu. “Atas kejadian rangkap jabatan rektor ini, JPPI menduga ada unsur pembiaran dan kesengajaan dari dua belah pihak,” kata dia.

Menurut Ubaid, kampus adalah institusi yang berperan sebagai tempat gerakan moral dan pendidikan karakter bagi calon para pemimpin bangsa.

Oleh karena itu, kalangan intelektual di kampus juga perlu mencontohkan perilaku yang bermoral dengan tidak melakukan tindakan yang jelas dilarang dalam peraturan.

Kemudian, ia menilai kampus berperan besar dalam kontrol sosial terhadap kehidupan bernegara. “Peran-peran kampus dan pemimpinnya (rektor) seharusnya tidak tergadai dengan iming-iming jabatan atau kepentingan politik yang mempengaruhinya,” tulis dia.

Sumber: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/07/06/10582881/rektor-yang-rangkap-jabatan-dide-sak-untuk-mengundurkan-diri>

COVID-19 Meledak, Sekolah Tatap Muka di Luar Jawa-Bali Terus Jalan?



Penulis: Riyan Setiawan

09 Juli 2021

Sejumlah murid mengikuti Ujian Akhir Sekolah (UAS) di Sekolah Dasar Negeri-1 Lhokseumawe, Aceh, Jumat (3/6/2021). ANTARA FOTO/Rahmad/foc

tirto.id - Pemerintah memutuskan rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di tujuh provinsi di Jawa-Bali dibatalkan. Keputusan ini seiring dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali pada 3 hingga 20 Juli 2021. Namun, hal ini tidak berlaku di luar Jawa-Bali meski kasusnya mulai merangkat naik.

PPKM Darurat jadi opsi pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin lantaran kasus COVID-9 di Indonesia terus melonjak usai Idulfitri 2021. Data Satgas COVID-19 per 7 Juli 2021, penambahan kasus baru bahkan mencapai 34.379 pasien, sehingga total seluruh menjadi 2.379.397. Dari jumlah ini, 343.101 di antaranya merupakan kasus aktif, 62.908 meninggal, dan 1.973.388 sembuh.

Selain kasus COVID-19 yang terus melonjak, kondisi Indonesia bertambah parah dengan munculnya virus varian baru. Berdasarkan data Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI pada 6 Juli 2021, ada sebanyak 553 kasus varian baru virus Corona di Indonesia. Jumlah ini merupakan akumulasi dari enam varian baru virus Corona, yaitu: Alpha, Beta, Delta, Eta, Iota, dan Kappa.

Dari keenam varian itu, varian Delta terlihat paling mendominasi di Indonesia dibandingkan varian lain, yaitu sebanyak 436 kasus. Kemudian varian Beta berada pada urutan kedua dengan jumlah 57 kasus, 51 Alpha, 5 Beta, 2 Kappa, dan 1 kasus varian Lota.

Melihat kasus COVID-19 terus meledak, jumlah kematian kian bertambah, serta varian baru yang didominasi Delta dan menyebar secara luas –tak hanya di 7 provinsi yang terapkan PPKM darurat--, apakah pembelajaran tatap muka di luar Jawa-Bali juga perlu ditiadakan? Baca juga: Pemerintah Buka Opsi PPKM Darurat Non Jawa-Bali, 43 Daerah Dipantau

Pembelajaran Tatap Muka Perlu Ditunda

Epidemiolog dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka), Mouhamad Bigwanto menyarankan sebaiknya pembelajaran tatap muka tak hanya ditiadakan di Jawa-Bali saja, tetapi juga di luar daerah tersebut.

Menurut Bigwanto, untuk sementara ini sampai berakhirnya PPKM Darurat yakni pada 20 Juli 2021 sebaiknya pembelajaran tatap muka ditiadakan dulu untuk mencegah penularan. “Jadi saran bijak saya tutup dulu sekolah, paling tidak sampai kita benar-benar bisa mengendalikan angka kasus,” kata Bigwanto kepada reporter Tirto, Rabu (7/7/2021).

Pengajar Ilmu Kesehatan Masyarakat Uhamka itu menyarankan sebaiknya daerah-daerah lain harus belajar dari penyebaran kasus di Jawa-Bali. Ia mencontohkan Pemprov DKI yang tetap menyelenggarakan uji coba PTM di tengah kasus yang melonjak. Terdapat tenaga pengajar dan kepala sekolah SDN Kenari 08 Jakarta Pusat yang terpapar virus Corona, meski diklaim tertular dari luar sekolah.

Bigwanto mengkhawatirkan, apabila pembelajaran tatap muka tetap digelar di tengah kondisi ini, maka akan terjadi penyebaran COVID-19, mengingat pelajar banyak yang masih pada usia anak-anak. “Apalagi varian Delta ini selain lebih cepat menular dan temuan di DKI banyak pada anak-anak,” kata dia.

Berdasarkan data Pemprov DKI, tren kasus positif aktif pada anak di bawah usia 18 tahun terus bertambah. Sebanyak 13% dari 9.366 kasus positif COVID-19 DKI per Rabu (7/7) adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun, dengan rincian, yaitu: 876 kasus adalah anak usia 6 - 18 tahun dan 306 kasus adalah anak usia 0 - 5 tahun. Sedangkan 7.268 kasus adalah usia 19 - 59 tahun dan 916 kasus adalah usia 60 tahun ke atas.

Saran Bigwanto cukup beralasan mengingat zona merah di luar Pulau Jawa-Bali juga terus bertambah. Berdasarkan data Satgas COVID-19 per 6 Juli 2021, sebaran zona merah (risiko tinggi) ada di 96 kabupaten/kota dan 27 di antaranya berasal dari luar Jawa-Bali. Data detail lihat link ini.

Tak hanya zona merah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga memprediksi terdapat tujuh provinsi di luar Jawa-Bali yang terancam serangan virus mutasi COVID dari India atau varian Delta itu. “Kami sudah lihat ada 5 provinsi di Sumatra dan 2 di Kalimantan yang kami harus hati-hati agar kita bisa mempersiapkan dengan baik,” kata Budi usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi dan jajaran tentang penanganan COVID-19, Selasa, 6 Juli 2021.

Ke-7 provinsi yang dimaksud Budi adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Sumatera Selatan dan Lampung. Pemerintah pun mengaku akan berusaha mengantisipasi penanganan COVID di daerah tersebut sebaik mungkin.

Perlu Pemetaan dan Prokes Ketat

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memandang pembelajaran tatap muka terbatas di luar Jawa-Bali tetap diselenggarakan, tapi khusus di daerah yang berstatus zona hijau. Namun, tetap disesuaikan dengan kemampuan kepala daerah, persiapan sekolah, hingga keinginan anak dan wali murid.

Jika ingin diselenggarakan pun harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat. “Belajar di sekolah itu lebih penting daripada daring, anak-anak sudah butuh itu. Jadi jika memenuhi syarat belajar tatap muka bisa digelar,” kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Fahriza Marta Tanjung kepada reporter Tirto, Rabu (7/7/2021).

Namun demikian, Fahriza meminta kepada sekolah agar memberikan mata pelajaran yang bersifat penting saja. “Seperti mata pelajaran yang sulit diberikan saat sekolah tatap muka. Kalau SMK, mata pelajaran praktik saja,” kata dia.

Hal senada diungkapkan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, Ia menilai pembelajaran tatap muka di luar Pulau Jawa-Bali tetap bisa terselenggara di daerah yang berada di zona hijau dengan protokol kesehatan yang ketat.

Sebab, dia menilai selama ini pembelajaran daring tidak berjalan secara efektif karena tidak didukung sumber daya yang kuat oleh pemerintah. “Akibatnya kualitas pendidikan kita sangat buruk. Pembelajaran juga tidak maksimal karena dilakukan dengan banyak keterbatasan,” kata Ubaid kepada reporter Tirto.

Oleh karena itu, kata dia, JPPI mendesak pemerintah harus memastikan sekolah siap tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan. Apabila perlu pendampingan, maka pemerintah harus sediakan. “Libatkan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi secara berkala. Lalu mengembangkan edukasi tentang COVID-19, tidak hanya soal penerapan prokes, tapi juga soal penguatan imun dan iman,” kata dia

Pemerintah Berpedoman pada SKB 4 Menteri

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengatakan pihaknya memberikan opsi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) kepada daerah luar Jawa-Bali.

Apabila ingin melakukan pembelajaran tatap muka, maka harus memenuhi daftar periksa yang dipersyaratkan. Orang tua/wali pada wilayah selain tujuh provinsi dalam PPKM Darurat juga memiliki kewenangan penuh dalam memberikan izin kepada anaknya untuk memilih antara mengikuti PTM terbatas atau PJJ.

Kebijakan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri: Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Sekolah wajib menyediakan opsi PTM terbatas dan PJJ, serta tidak melakukan diskriminasi kepada peserta didik yang memilih opsi PJJ,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja sama

Kemendikbud-Ristek, Hendarman kepada reporter Tirto, Rabu (7/7/2021).

Apabila ingin menggelar pembelajaran tatap muka terbatas, maka pihak sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. “Bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada seluruh jenjang pendidikan diimbau untuk segera melaksanakan vaksinasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata dia.

Sumber: Data detail lihat link ini. Baca selengkapnya di artikel “COVID-19 Meledak, Sekolah Tatap Muka di Luar Jawa-Bali Terus Jalan?”, https://tirto.id/ghyK#google_vignette

Pakar: Pendidikan Tak Dianggap Sektor Terdampak Pandemi



Reporter: Leony

Kamis, 26 Agustus 2021

Imunisasi Anak Sekolah di Masa Pandemi. ©2020 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid menilai, pemerintah belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat yakni pendidikan. Bahkan, untuk persiapan Pembelajaran Tatap Muka yang akan dimulai 30 Agustus 2021.

Dia berpendapat, Pemerintah harus bertanggung jawab atas layanan dasar masyarakat. Maka dari itu, pemerintah harus berperan supaya layanan dasar pendidikan ini bisa berkualitas baik.

“Dalam pandemi ini, challenge-nya banyak sekali. Menurut saya ini situasinya sudah emergency dan krisis tapi sayangnya, kenapa sampai saat ini pemerintah daerah tidak siap? Kalau menurut saya ini adalah kesengajaan dari pemerintah daerah khususnya dan juga pemerintah pusat yang tidak melakukan koordinasi dengan baik dan tidak menganggap sektor pendidikan bagian dari sektor yang terdampak dari pandemi,” ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (26/8).

Abdullah menambahkan, mengenai kemampuan guru dan pemerintah menyediakan layanan pemerintah yang berkualitas di masa pembelajaran jarak jauh sudah gagal. Faktanya, banyak kendala yang terjadi di lapangan.

“Karena banyak kendala di sana sini, kayak learning loss turun drastis, kemudian quality pembelajaran juga sangat turun, literasi juga sangat turun, ini menjadi perhatian publik, sehingga kenapa pendidikan bisa separah ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pemerintah tidak sigap baik di level pusat maupun daerah. Pusat responnya juga kurang cepat, dan di daerah ada jalur komunikasi dan koordinasi terputus. Itu menunjukkan bahwa problem di situasi seperti ini seharusnya ditangani oleh lintas kementerian, lintas sektoral, dan seterusnya. “Salah satunya di situ tidak hanya melulu sektor ekonomi dan kesehatan. Tapi sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang menurut saya strategis, layanan dasar warga tapi tidak menjadi perkara penting,” ujarnya.

Sistem Pembelajaran Tatap Muka

Menurutnya, sistem yang harus dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang ketat dan ini tidak hanya menjadi kewajiban masyarakat dan sekolah tapi juga pemerintah. Harus adanya melakukan pendampingan, monitoring, evaluasi terhadap kebijakan di lapangan oleh pemerintah serta mempersiapkan apa yang belum disiapkan.

“Pengetahuan tentang Covid-19 dan protokol kesehatan, kami melihat banyak sekolah yang belum siap. Yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana untuk protokol kesehatan juga masih sangat minim. Nanti yang tatap muka bukan anak-anak sekolah, anak-anak di madrasah juga akan PTM, anak-anak di Indonesia yang belajar di pesantren juga PTM, ketika PTM dibuka, sekolah dibuka, madrasah dibuka, pesantren dibuka jangan sampai kementerian pendidikan tidak koordinasi dengan kementerian agama dan seterusnya,” ujarnya.

Peraturan dan prasyarat pemberlakuan PTM harus jelas agar masyarakat tidak kebingungan dan PTM berjalan dengan maksimal serta terorganisir. “Kemarin sempat ramai syarat PTM yang berbeda-beda, ini menunjukkan bahwa ini situasi emergency semuanya harus koordinasi dengan baik, lintas sektor lintas kementerian. Tapi sampai hari ini sampai PTM mau dibuka pun kita melihat ego birokrasi itu yang kelihatan ya, bukan bagaimana kolaborasi antar kementerian, sinergi antar kementerian itu terjadi, sehingga korbannya adalah orangtua yang kebingungan dengan guideline-nya dari pemerintah,” ucapnya.

PTM Akan Segera Berlangsung

Abdul menegaskan, pemerintah harus sudah memastikan bahwa PTM ini sudah benar-benar layak untuk dibuka, sekolah maupun sektor pendidikan lain sudah didampingi, dan seterusnya. Nantinya, jika prasyarat itu sudah dilakukan oleh pemerintah dan ada pelanggaran, maka itu perlu ada pendampingan dan penerapan saksi dan seterusnya.

Dia menambahkan, pendidikan menjadi salah satu layanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah. Pemberlakuan PTM yang akan berlangsung 30 Agustus 2021 perlu persiapan matang dan pendampingan. “Saya belum melihat sekolah-sekolah yang ada di masyarakat didampingi oleh pemerintah untuk menyiapkan segala kebutuhan nanti saat PTM dibuka dan kita tahu bahwa sekolah itu banyak, ada yang sekolah negeri ada yang swasta, di sekolah negeri saja pemerintah tidak melakukan pendampingan dengan baik, apalagi sekolah swasta. Kami dari masyarakat tentu tidak membedakan apakah sekolah negeri atau sekolah swasta. Yang jelas dimana ada masyarakat Indonesia yang sekolah disitu, maka pemerintah harus menjamin salah satunya tentang jaminan kesehatan itu,” tandasnya.

Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/pakar-pendidikan-tak-dianggap-sektor-terdampak-pandemi.html>

HUT BPPI ke 17



· 17 August 2021

Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) adalah sebuah organisasi nirlaba berbentuk perkumpulan yang didirikan oleh Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI) yang terdiri dari berbagai organisasi pelestarian daerah, akademisi, dan individu praktisi serta pemerhati pelestarian pada 17 Agustus 2004 di Jakarta. Pembentukannya dihadiri dan didukung oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI. Visi BPPI adalah “Mengawal Kelestarian Pusaka Indonesia” yang dilaksanakan agar terwujud rekam jejak sejarah, budaya dan peradaban bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat. Untuk mewujudkan visi tersebut, BPPI memiliki 3 misi utama yaitu (i) Menyampaikan masukan untuk pengembangan kebijakan, strategi, program, panduan dan mekanisme pelestarian; (ii) Menyelenggarakan pelestarian dan membantu pengembangan kapasitas pelestarian pusaka serta membangun gerakan pelestarian bersama pemerintah, komunitas, dunia usaha dan berbagai lembaga lainnya; (iii) Mengembangkan sistem pendanaan pelestarian melalui kerjasama nasional dan internasional.

Sebagai sebuah organisasi, BPPI merupakan organisasi terbuka. Anggota BPPI terdiri dari perorangan yang mendalami, peduli atau bekerja dalam pelestarian dari berbagai daerah dan juga negara lain. Kegiatan BPPI mempunyai lingkup yang sangat luas dalam pelestarian alam dan budaya, karena itu anggota BPPI berasal dari berbagai disiplin seperti arsitektur, perencanaan kota/daerah, lingkungan hidup, arkeologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, hukum, sejarah, sastra, musik, teater dsb.

Selain itu, BPPI selalu konsisten menjalin kerja sama dengan Mitra Pelestari yakni berbagai organisasi yang mempunyai tujuan yang sama untuk memperkuat pelestarian pusaka. Organisasi mitra berdiri sejajar dalam kesetaraan dan bersifat otonom. Organisasi mitra diharapkan

mengembangkan program bersama untuk membangun sinergi yang optimal guna mencapai tujuan bersama.

Pada Selasa, 17 Agustus 2021, tak terasa, BPPI telah menginjak usia 17 tahun. Sebagai sebuah organisasi pelestarian pusaka di Indonesia, usia tersebut memberikan gambaran keseriusan BPPI dalam mengawal kelestarian pusaka Indonesia. Perayaan HUT ke-17 BPPI mendapat antusiasme yang besar dari masyarakat pecinta pusaka dengan tingginya jumlah partisipan pada kanal Zoom dan YouTube BPPI. Tepat pada HUT ke-17 tahun tersebut, BPPI meresmikan nama barunya menjadi Bumi Pestaarian Pusaka Indonesia. Menurut Dr. Catrini P Kubontubuh, Ketua Dewan Pimpinan BPPI, nama baru BPPI hanyalah sebuah proses administrasi yang perlu dilalui, namun keberadaan BPPI di masa yang lalu dan yang akan datang adalah sumbangsih besar yang kita akui bersama, dalam menjaga pusaka Indonesia.

Selama tiga dekade berkarya, BPPI telah berhasil membangun kemitraan dengan lembaga internasional, nasional, serta kelompok masyarakat penggerak. BPPI menyadari bahwa partisipasi aktif masyarakat memegang peranan penting sebagai salah satu stakeholder pelestarian. Oleh karenanya, perayaan HUT kali ini menjadi ajang penyambutan Sukarelawan Pusaka Indonesia angkatan I, atau disingkat SUKA Pusaka Indonesia. Anggota SUKA Pusaka Indonesia terdiri atas enam puluh orang dengan beragam profil bidang keilmuan, pekerjaan, dan usia. Dengan kehadirannya, diharapkan dapat memperkaya diskusi produktif untuk memperkenalkan kepada publik di media sosial, khususnya mengenai topik upaya pelestarian pusaka di Indonesia.

Rangkaian acara terakhir adalah talkshow Anya Belajar Pusaka, yang dipandu oleh Anya Prameswari seorang anak usia delapan tahun yang bercita-cita menjadi seorang dokter hewan dengan niatan yang mulia yaitu ingin menolong hewan terancam dari kepunahan. Pada sesi Anya Belajar Pusaka tersebut, Anya bertanya kepada tokoh-tokoh BPPI, pertanyaan pertama di ajukan kepada bapak Bapak Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Dewan Pembina BPPI. Anya mempertanyakan keterlibatan “Eyang Hashim” sapaan any, di BPPI padahal beliau sebagai businessman bukan arkeolog. Eyang Hashim menjelaskan jika pelestarian pusaka bukanlah hanya pekerjaan arkeologis, tapi juga tanggung jawab profesi lainnya. Selanjutnya, any pun menanyakan pekerjaan arkeolog kepada Guru Besar Arkeologi UGM Prof Dr Inajati Adrisijanti serta pertanyaan apa kesulitan melestarikan pusaka kepada Dr. Laretna Adishakti. Ibu Sita menjelaskan bahwa dengan memiliki semakin banyak teman maka upaya pelestarian yang berat akan menjadi lebih mudah.

Dengan pertanyaan cerdas sekaligus menggelitik, Anya mengajak masyarakat Indonesia untuk peduli kepada pusaka Indonesia mulai saat ini juga. Tanpa kepedulian kita, kekayaan budaya, alam, dan saujana akan dapat punah dan terlupakan. Mengutip pernyataan Bapak Eka Budianta, bahwa tak sulit cara untuk menyayangi pusaka Indonesia, yaitu diawali dengan mengenali, merawat, dan mempromosikan agar orang lain juga turut menjaga. Sebagai penutup, Anya akan mengajak kawan-kawanya untuk ikut sayang pusaka Indonesia dan mengajak sahabat pelestari untuk ikut serta aktif dalam pelestarian pusaka Indonesia.

Video tayangan selengkapnya dapat disaksikan di Youtube BPPI Heritage

Salam Lestari

Sumber : https://bppiindonesianheritagetrust.org/berita_view.php?berita=HUT+BPPI+ke+17



Barata Indonesia Jalin Kerja Sama Dengan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia JPPI

• Posted by:dimas
• 13 September 2021

PT Barata Indonesia (Persero) menandatangani Head Of Agreement dengan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) untuk produksi peralatan pelabuhan.

Barata Indonesia sepakat untuk membangun Rubber Tyred Gantry Crane bagi JPPI. Dalam kesepakatan tersebut, ruang lingkup kerja Barata Indonesia meliputi, Manufaktur RTG Crane (manufacture RTG Crane) serta Fabrikasi dan Instalasi (fabrication & installation).

Sebagai perusahaan manufaktur tanah air, Barata Indonesia akan terus berusaha berpartisipasi dalam program konektivitas, khususnya peralatan pelabuhan dengan nilai lokal konten yang tinggi.

Sumber: <https://www.barata.id/id/barata-indonesia-jalin-kerja-sama-dengan-pt-jasa-peralatan-pelabuhan-indonesia-jppi/>



Manajemen IPC Cabang Tanjung Priok Terus Berbenah Menata Pelabuhan Tanjung Priok

ON SEPTEMBER 2, 2021 BY MIMBARMARITIM.COMDALAM KORPORASI,
LOGISTIK, MARITIM, PELABUHAN
Mimbarmaritim.com – Tanjung Priok

Kondisi pandemi Covid-19 saat ini sudah memasuki tahun kedua namun kegiatan – kegiatan yang ada di IPC/PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok masih terus berjalan normal dan manajemen IPC Cabang Tanjung Priok tetap berkomitmen untuk memberikan kontribusi pada negara. Tentu bagaimana cara menjaga jalur logistik agar tetap stabil dan dapat berjalan dengan baik.

Sudah barang tentu kerjasama ini berjalan bukan hanya dari manajemen IPC Cabang Tanjung Priok saja, akan tetapi dukungan dari pihak yang berkepentingan di pelabuhan dan seluruh stakeholder yang ada di Tanjung Priok.

“Disamping itu, rekan – rekan pers juga memberikan masukan – masukan terkait progres dan informasi tentang pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok,” demikian disampaikan General Manager Guna Mulyana dalam acara konferensi pers dengan awak media, di Tanjung Priok, Kamis (2/9/2021).

Guna Mulyana menjelaskan kondisi pelabuhan Tanjung Priok secara umum manajemen IPC Cabang Tanjung Priok tetap melakukan kegiatan dan operasional walaupun saat ini masih masa pandemi dan selama pemerintah berlakukan PPKM.

“Pelabuhan Tanjung Priok sampai periode September tahun 2021, masih tetap konsisten dan komitmen untuk melakukan pelayanan dan tidak ada yang berubah, bahkan kita tetap berusaha dengan kondisi pandemi seperti sekarang tetap melakukan penataan dan perbaikan – perbaikan baik itu infrastruktur) maupun non infrastruktur,”katanya.

Lebih jauh, Guna Mulyana menyebutkan bahwa Pelabuhan Cabang Tanjung Priok merupakan bagian dari IPC, namun per 1 Oktober 2021 menjadi satu nama Pelabuhan dari Sabang sampai Merauke.

“IPC Cabang Tanjung Priok selama ini terus berupaya meningkatkan kinerja perusahaan dan berusaha terus menyelesaikan berbagai permasalahan diantaranya kemacetan, kebersihan dan pengadaan SDM pemanduan kapal,”ujarnya.

Menurutnya, saat ini yang menjadi perhatian dan merupakan PR dari IPC Cabang Tanjung Priok terkait penerapan single TID (*Truck Identity Document*) di wilayah pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini, salah satu upaya untuk menekan dan mengatasi tingkat kemacetan lalu lintas angkutan barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Seogianya TID akan direalisasikan pada bulan Mei 2021 lalu, karena masih dalam proses berjalan dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut baru keluar akhir bulan Agustus 2021. Maka direncanakan akan launching pada akhir bulan September 2021,” sebutnya.

Ia menuturkan terkait penataan di pelabuhan Tanjung Priok, pihaknya akan menata dan memaksimalkan areal pelabuhan seperti dermaga Kalijapat, dermaga Arsa dan dermaga Paliat. Seluruh kapal – kapal antar jemput crew kapal ditata dan rencananya akan dipindahkan ke dermaga Kalijapat.

Matraji, mengatakan pelanggaran prokes sering kali diabaikan oleh murid dan guru, mulai dari menurunkan masker hingga tidak menjaga jarak menjadi persoalan di setiap sekolah yang mulai aktif kembali. “Penggunaan masker yang tidak disiplin. Ini terjadi di mana-mana. Baik guru maupun peserta didik, banyak yang tidak disiplin dan salah dalam penggunaan masker,” kata Ubaid saat dihubungi, Sabtu (4/9).

Ubaid menyebutkan saat kegiatan belajar mengajar (KBM) berjalan banyak siswa yang membuka masker ketika berbicara dan menutup kembali ketika selesai. Padahal masker harus selalu terpasang ketika bicara atau tidak.

Oleh karena itu, setiap guru harus menjadi contoh agar peserta didik tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, adanya kesadaran dari siswa untuk mematuhi 5M agar PTM dapat dilakukan dengan tertib dan aman. “Edukasi dan pendampingan harus ditingkatkan. Pelibatan masyarakat juga penting dalam penerapan protokol dan juga pengawasan,” jelasnya. Selain itu banyak siswa dan guru juga sering menurunkan masker ke dagu.

Selain itu, banyak siswa juga mengeluh terkait padatnya tugas ketika PTM dan pembelajaran daring diberlakukan.

“Soal penerapan pembelajaran juga karena banyak aduan dari siswa, tugas masih sangat banyak dan pembelajaran daring masih merepotkan. Karena selepas PTM, siswa juga harus tetep belajar daring dengan mengerjakan banyak tugas,” ungkapnya.

Sumber: <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/430383/pelaksanaan-ptm-guru-dan-murid-sama-sama-banyak-abaiakan-prokes>

JPPI Kecam Kekerasan di Sekolah SPN Batam, Minta Pelaku Diusut



Penulis: Eliza Gusmeri

Jum'at, 19 November 2021 | 15:23 WIB

Siswa SPN Dirgantara dirantai dan diborgol. (Foto: ist/Batamnews)

SuaraBatam.id - Kasus kekerasan di SPN di Sekolah Penerbangan (SPN) Dirgantara di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mendapat perhatian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

JPPI mengecam kasus kekerasan tersebut. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan kasus ini sangat mengecewakan terlebih terjadi di sekolah kedinasan, dan langkah pemerintah dianggap lambat mengantisipasi hal ini.

“JPPI mengecam tindakan kekerasan di sekolah yang terus berulang, karena itu kami sangat kecewa dengan pemerintah baik pusat maupun dinas pendidikan daerah yang slow respon dan tidak melakukan langkah-langkah preventif. Akibatnya terus terulang kasus kekerasan di sekolah,” kata Ubaid saat dihubungi, Jumat (19/11/2021).

Ubaid mendesak kasus ini di investigasi mendalam sampai menemukan aktor intelektual yang terlibat dalam kasus kekerasan tersebut.

“Harus diinvestigasi. Jangan hanya memberikan sanksi bagi pelaku di lapangan, tapi siapapun yang terlibat baik langsung atau tidak. Diduga ini bukan pelaku tunggal, karena ini bukan kasus pertama, seringkali ada laporan di sekolah ini,” tegasnya.

Dia menyebut tindakan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan harus dilakukan dari segala sisi, baik internal baik eksternal dengan melibatkan orang tua, alumni, tokoh agama, tokoh

masyarakat, hingga masyarakat luas.

“Sanksinya ya harus dengan pendekatan pendidikan yang mengubah karakter siswa. Tapi, jika ada pelaku di luar siswa misalnya guru ya harus disanksi tegas bisa pidana atau dikeluarkan dari sekolah,” tutup Ubaid.

Sebelumnya, kasus kekerasan di SPN Dirgantara Batam diungkap Komisioner KPAI Retno Listyarti yang menyebut si pelajar telah mendapatkan hukuman fisik mulai dari menampar hingga mengurung.

“Seorang siswa bisa dikurung berminggu-minggu bahkan berbulan tergantung kesalahannya dan dianggap sebagai konseling. Selain dikurung, anak-anak juga mengalami hukuman fisik seperti pemukulan, bahkan ada korban yang rahangnya sampai bergeser,” kata Retno dikutip dari Batamnews.co.id--jaringan Suara.com, Kamis (18/11/2021).

Sumber: <https://batam.suara.com/read/2021/11/19/152305/jppi-kecam-kekerasan-di-sekolah-spn-batam-minta-pelaku-diusut>

JPPI Desak Kasus Kekerasan di Sekolah Penerbangan Dirgantara Batam Diinvestigasi



Dwi Bowo Raharjo | Stephanus Aranditio

Jum'at, 19 November 2021 | 14:04 WIB

Siswa SPN Dirgantara dirantai dan diborgol. (Foto: ist/Batamnews)

Suara.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengecam kasus kekerasan terhadap pelajar di Sekolah Penerbangan (SPN) Dirgantara di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan kasus ini sangat mengecewakan terlebih terjadi di sekolah kedinasan, dan langkah pemerintah dianggap lambat mengantisipasi hal ini.

“JPPI mengecam tindakan kekerasan di sekolah yang terus berulang, karena itu kami sangat kecewa dengan pemerintah baik pusat maupun dinas pendidikan daerah yang slow respon dan tidak melakukan langkah-langkah preventif. Akibatnya terus terulang kasus kekerasan di sekolah,” kata Ubaid saat dihubungi, Jumat (19/11/2021).

Ubaid mendesak kasus ini di investigasi mendalam sampai menemukan aktor intelektual yang terlibat dalam kasus kekerasan tersebut.

“Harus diinvestigasi. Jangan hanya memberikan sanksi bagi pelaku di lapangan, tapi siapapun yang terlibat baik langsung atau tidak. Diduga ini bukan pelaku tunggal, karena ini bukan kasus pertama, seringkali ada laporan di sekolah ini,” tegasnya.

Dia menyebut tindakan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan harus dilakukan dari segala sisi, baik internal baik eksternal dengan melibatkan orang tua, alumni, tokoh agama, tokoh

masyarakat, hingga masyarakat luas.

“Sanksinya ya harus dengan pendekatan pendidikan yang mengubah karakter siswa. Tapi, jika ada pelaku di luar siswa misalnya guru ya harus disanksi tegas bisa pidana atau dikeluarkan dari sekolah,” tutup Ubaid.

Kasus Kekerasan di SPN Dirgantara

Sebelumnya, kasus kekerasan di SPN Dirgantara Batam diungkap Komisioner KPAI Retno Listyarti yang menyebut si pelajar telah mendapatkan hukuman fisik mulai dari menampar hingga mengurung.

“Seorang siswa bisa dikurung berminggu-minggu bahkan berbulan tergantung kesalahannya dan dianggap sebagai konseling. Selain dikurung, anak-anak juga mengalami hukuman fisik seperti pemukulan, bahkan ada korban yang rahangnya sampai bergeser,” kata Retno dikutip dari Batamnews.co.id--jaringan Suara.com, Kamis (18/11/2021).

KPAI sebelumnya menerima video dan 15 foto yang diduga peserta didik di SPN Dirgantara Batam, tayangan video itu menunjukkan siswa yang mengalami pemenjaraan di sel tahanan sekolah, beberapa diikat, bahkan dirantai di leher dan tangan.

Retno memaparkan dari sepuluh foto menunjukkan gambar 4 anak dalam ruangan tahanan yang berukuran 3x2 meter dengan bertelanjang dada. Dalam rekaman video, anak-anak tersebut juga terlihat tertekan dan tidak banyak bicara.

“Dalam 2 foto tergambar anak yang tangannya diborgol sebelah sehingga keduanya harus berdekatan. Lebih mengesankan lagi, salah satu anak juga dirantai lehernya seperti binatang,” ujar Retno. Ia menerangkan, peristiwa itu bukan kali pertama terjadi pada sekolah yang sama. Retno menyebut kasus serupa pernah terjadi pada 2018 lalu.

Kemudian peristiwa kekerasan pada peserta didik itu kembali terulang pada Oktober 2021, saat orang tua peserta didik melapor ke Dinas Pendidikan Kepri dan membuat pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Batam.

Retno mengatakan KPAI menduga pihak Disdik Kepri telah mengetahui peristiwa kekerasan tersebut namun tak memberikan sanksi sehingga kejadian yang sama kembali terulang. “Hal ini mengindikasikan bahwa pihak Disdik Kepri telah mengetahui pemenjaraan dan kekerasan yang diterima oleh sejumlah peserta didik di SPN Dirgantara. Namun sama sekali tidak memberikan sanksi pada sekolah,” ucap Retno.

Dari hasil pengawasan KPAI di lokasi, ditemukan sel tahanan di lantai 4 Gedung SMK Swasta SPN Dirgantara. KPAI juga menemukan tenaga pendidik di sekolah tersebut tidak memenuhi standar nasional pendidik dan tenaga kependidikan.

Sumber: <https://www.suara.com/news/2021/11/19/140454/jppi-desak-kasus-kekerasan-di-sekolah-pener-bangan-dirgantara-batam-diinvestigasi>

Ternyata Peran Orang Tua Penting dalam Proses Pembelajaran



Penulis:Admin

09November2021

Kabarpendidikan.id Kini anak usia 6 hingga 11 tahun sudah mendapat izin untuk melakukan vaksinasi. Hal ini menjadi berita baik bagi pelaksanaannya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan bahwa dalam situasi pandemi ini seharusnya bisa meluaskan cara pandang seluruh komponen pendidikan mengenai pembelajaran di sekolah. Dikarenakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini mengakibatkan anak-anak mengalami learning loss.

Ubaid melanjutkan, “Orang tua selama ini tidak pernah dianggap bagian dari pendidikan, diperlukan jika ada hal-hal mengenai dana saja, namun dalam proses pendidikan, proses pendampingan anak, dan lainnya tidak pernah dilibatkan.”

Maka dari itu, situasi sekarang banyak mengubah cara pandang bahwa peran orang tua juga penting dalam proses pembelajaran anak. Lebih lagi dalam program vaksinasi, orang tua sangat berpengaruh dalam kelancaran program ini, sebab terkait perizinan anak tersebut nantinya.

“Oleh sebab itu, orang tua harus dijadikan bagian dari pendidikan oleh pemerintah, Disdik, dan pihak sekolah. Jadi tidak hanya anak, guru, sekolah, tenaga kependidikan saja orang tua dan masyarakat juga turut andil dalam ekosistem pendidikan,” tutur Ubaid.

Komponen-komponen tersebut merupakan sumber belajar yang bisa saling mengisi bagi anak, maka pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat harus menjadi wadah yang strategis nantinya.

Ubaid menambahkan, “Sampai kapan pun kita harus terus belajar, sebab pengetahuan akan terus berkembang sehingga menjadi kebutuhan publik, dan menjadikan tingkat literasi di Indonesia meningkat. Bersamaan juga dilakukannya literasi tentang vaksinasi menjadi bagian pembelajaran bersama,” tutupnya.

Sumber: <https://www.kabarpendidikan.id/2021/11/ternyata-peran-orang-tua-penting-dalam.html>

Ada Kekerasan di SPN Dirgantara Batam, JPPI Minta Kasusnya Diusut Tuntas



Editor: Nefri Inge

Jumat, 19 November 2021 - 15:54 WIB

Siswa SMK SPN Dirgantara Batam Kepri yang dirantai dan diborgol (IST)

BATAM, MELAYUPEDIA.COM – Kasus kekerasan di SMK Sekolah Penerbangan Nusantara (SPN) Dirgantara di Kota Batam Kepulauan Riau (Kepri) beberapa waktu lalu, kini sedang menjadi pembahasan masyarakat Kepri.

Bahkan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), mengecam kasus kekerasan tersebut.

Diungkapkan Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, kasus tersebut sangat mengecewakan terlebih terjadi di sekolah kedinasan, dan langkah pemerintah dianggap lambat mengantisipasi hal ini.

“JPPI mengecam tindakan kekerasan di sekolah yang terus berulang, karena itu kami sangat kecewa dengan pemerintah baik pusat maupun dinas pendidikan daerah yang slow respon dan tidak melakukan langkah-langkah preventif. Akibatnya terus terulang kasus kekerasan di sekolah,”ujarnya, Jumat (19/11/2021).

Dia mendesak kasus tersebut agar diusut dan adanya investigasi mendalam, sampai menemukan aktor intelektual yang terlibat dalam kasus kekerasan tersebut.

“Harus diinvestigasi. Jangan hanya memberikan sanksi bagi pelaku di lapangan, tapi siapapun

yang terlibat baik langsung atau tidak. Diduga ini bukan pelaku tunggal, karena ini bukan kasus pertama, seringkali ada laporan di sekolah ini,” ungkapnya.

Menurutnya, tindakan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan harus dilakukan dari segala sisi, baik internal baik eksternal dengan melibatkan orang tua, alumni, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga masyarakat luas.

“Sanksinya ya harus dengan pendekatan pendidikan yang mengubah karakter siswa. Tapi, jika ada pelaku di luar siswa misalnya guru ya harus disanksi tegas bisa pidana atau dikeluarkan dari sekolah,” ujarnya.

Sebelumnya, kasus kekerasan di SPN Dirgantara Batam diungkap Komisioner KPAI Retno Listyarti yang menyebut, salah seorangn pelajar telah mendapatkan hukuman fisik, mulai dari menampar hingga mengurung.

“Seorang siswa bisa dikurung berminggu-minggu bahkan berbulan tergantung kesalahannya dan dianggap sebagai konseling. Selain dikurung, anak-anak juga mengalami hukuman fisik seperti pemukulan, bahkan ada korban yang rahangnya sampai bergeser,” ungkapnya.

Sumber: <https://www.melayupedia.com/berita/1171/ada-kekerasan-di-spn-dirgantara-batam-jp-pi-minta-kasusnya-diusut-tuntas#>

JPPI: Laporan Kekerasan di SMK Penerbangan SPN Dirgantara Harus Diinvestigasi



Ilham Pratama Putra

19 November 2021 13:54

Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengusut tuntas tindakan kekerasan di SMK Penerbangan SPN Dirgantara Batam. Sanksi tegas mesti diberikan bukan hanya untuk pelaku.

“Harus diinvestigasi. Jangan hanya memberikan sanksi bagi pelaku di lapangan, tapi siapapun yang terlibat baik langsung atau tidak,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji kepada **Medcom.id**, Jumat, 19 November 2021.

Namun, sanksi yang diberikan menurutnya harus yang bisa mengubah karakter, apabila kekerasan tersebut dilakukan siswa. Namun jika yang melakukan adalah oknum guru, maka sanksi pidana bisa diberlakukan. “Jika ada pelaku di luar siswa misalnya guru ya harus disanksi tegas, bisa pidana atau dikeluarkan dari sekolah,” jelasnya.

Ubaid menduga jika kekerasan yang didera 10 siswa di sekolah tersebut bukan dilakukan satu orang. Sebab menurutnya di sekolah tersebut memang terjadi tindak kekerasan. “Diduga ini bukan pelaku tunggal, karena ini bukan kasus pertama. Seringkali ada laporan di sekolah ini,” tegas dia.

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima laporan dari orang tua siswa di

SMK Penerbangan SPN Dirgantara Batam yang anaknya mendapat tindakan kekerasan di sekolahnya. Berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 10 siswa dimasukkan ke dalam ruang yang mirip sel tahanan, diborgol hingga mendapat tamparan dan tendangan.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara tegas mengecam hal tersebut. Sebab hal tersebut masuk ke dalam tiga dosa besar di dunia pendidikan, yaitu kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/JKRWqppN-jppi-laporan-ke-kekerasan-di-smk-penerbangan-spn-dirgantara-harus-diinvestigasi>

Kekerasan di Sekolah Terus Berulang, JPPI: Penanganan dari Pemerintah Lamban



Jumat, 19 November 2021 12:15

Penulis: Ilham Pratama Putra

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Foto: Dpk. pribadi

Jakarta: Kasus kekerasan di sekolah kembali terjadi. Terbaru, berdasarkan laporan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebanyak 10 orang siswa di SMK Penerbangan SPN Dirgantara Batam, mendapat tindak kekerasan di sekolahnya.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyatakan rasa kecewanya atas terus terjadinya tindak kekerasan di sekolah. Sebab, hal itu terjadi akibat dari lambannya penanganan dari pemerintah.

“JPPI mengecam tindakan kekerasan di sekolah yang terus berulang. Kami sangat kecewa dengan pemerintah baik pusat maupun dinas pendidikan daerah yang *slow response* dan tidak melakukan langkah-langkah preventif,” tuturnya kepada **Medcom.id**, Jumat 19 November 2021.

Akibatnya kasus kekerasan terus berulang. Menurut dia, seharusnya pemerintah memiliki strategi pencegahan yang dilakukan dari segala arah, baik dari dalam maupun dari luar.

“Dari dalam bisa dengan mengintegrasikan konten-konten pencegahan kekerasan dalam kurikulum, pembenahan sistem tata kelola dan *early warning system* di sekolah,» sebutnya.

Dari luar misalnya, bisa melibatkan komunitas sekolah secara partisipatif. Dengan cara melakukan pencegahan dan pengawasan. “Komunitas sekolah itu ada orang tua, masyarakat, alumni, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain semua pihak mesti terkait dan terlibat untuk masalah ini,”

ujar dia.

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima laporan dari orang tua siswa di SMK Penerbangan SPN Dirgantara Batam yang anaknya mendapat tindakan kekerasan di sekolahnya. Berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 10 siswa dimasukkan ke dalam ruang yang mirip sel tahanan, diborgol hingga mendapat tamparan dan tendangan.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara tegas mengecam hal tersebut. Sebab hal tersebut masuk ke dalam tiga dosa besar di dunia pendidikan, yaitu kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan.

Sumber: <https://www.medcom.id/amp/VNnoYyEb-kekerasan-di-sekolah-terus-berulang-jppi-penanganan-dari-pemerintah-lamban>

MK Putuskan UU Cipta Kerja Cacat Formil dan Inkonstitusional



Penulis:ADMIN SPI

Kamis, 25 November 2021

Siaran Pers Bersama Komite Pembela Hak Konstitusional Rakyat (KEPAL):

Serikat Petani Indonesia (SPI) – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) – Serikat Nelayan Indonesia (SNI) – Yayasan Bina Desa – Sawit Watch (SW) – Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) – Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) – Indonesia for Global Justice (IGJ) – Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) – FIELD Indonesia – Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) – Aliansi Organisme Indonesia (AOI) – Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI) – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)

JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Lebih lanjut, MK menyatakan tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan atau kebijakan strategis dan berdampak luas, termasuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020.

Hal ini disampaikan hakim konstitusi dalam sidang pembacaan putusan atas perkara No.91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020 dan No. 4/PUU-XIX/2021, serta No.6/PUU-XIX/2021 atas Uji Formil dan Uji Materil Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hari ini (25/11).

Janses Sihaloho Koordinator Tim Advokasi Gugat Omnibus Law sekaligus kuasa hukum dari para pemohon yang tergabung dalam KEPAL (Komite Pembela Hak Konstitusional) menyatakan,

inkonstitusional bersyarat menjadikan DPR dan pemerintah dalam memperbaiki UU Cipta Kerja harus sesuai perintah hakim konstitusi.

“Perlu adanya landasan hukum omnibus law, adanya partisipasi publik yang bermakna, dan perubahan materi,” kata Janses.

Agus Ruli Ardiansyah, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan, indikator partisipasi bermakna harus memperbaiki dengan melibatkan partisipasi rakyat mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai pengesahan yang harus menjadi pedoman bagi DPR dan pemerintah dalam pembentukan undang-undang.

Agus Ruli Ardiansyah

“Jangan seperti UU Cipta Kerja yang tidak melibatkan gerakan petani. Selain itu, seharusnya Hakim MK juga tegas dalam putusannya, tidak menimbulkan dualisme. Karena Hakim MK menyatakan inkonstitusional bersyarat, sehingga, menimbulkan ambiguitas terhadap keberlakuan UU ini,” katanya.

Gunawan mewakili dari *Indonesia Human Right Committee for Social Justice* (IHCS) menyatakan, putusan MK ini menjadikan bangsa Indonesia memiliki pedoman tentang tata tertib pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan mandat konstitusi.

Rachmi Hertanti, Direktur Eksekutif *Indonesia for Global Justice* menilai, putusan MK telah menjadi dasar hukum yang kuat untuk menunjukkan UU Cipta Kerja telah bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun masih terdapat inkonsistensi dari putusan MK tersebut.

“Ini adalah kemenangan kecil rakyat atas inkonstitusional Omnibus Law UU Cipta Kerja, namun perjuangan masih tetap harus dilanjutkan mengingat Hakim MK masih menyatakan UU Cipta Kerja berlaku. Karena cacat formil dan bertentangan dengan konstitusi. UU Cipta Kerja haruslah dianggap tidak berlaku dan pelaksanaan terhadap undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya harus ditangguhkan. Inilah bentuk ketidak-konsistenan hakim MK atas putusannya,” tegas Rachmi.

Manseutus Darto, Sekjend SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit) mengapresiasi putusan MK ini, karena memunculkan adanya indikator partisipasi publik yang bermakna sebagai syarat kontitusionalitas pembentukan UU.

Hal senada disampaikan Lodji Nurhadi dari Yayasan Bina Desa. Ia mengatakan, putusan MK cenderung bersayap dan kental nuansa politik. Menurutnya, pengertian konstutusional dan inkonstitusional harusnya punya batas yang jelas, tidak remang-remang. Hal tersebut tentu tidak akan baik bagi masa depan law enforcement itu sendiri. Ini bisa jadi preseden.

“Namun demikian, meski Putusan MK ini tampak gamang dan tak bulat di antara hakim, kita perlu mengapresiasinya. Sebuah sejarah bagi MK untuk “mengabulkan” sebuah gugatan formil. Ini pelajaran yang mahal. Kita perlu tetap mengawasi dan memastikan partisipasi rakyat ada dalam setiap proses perumusan kebijakan, terutama dalam pembentukan hukum yang berdampak luas terhadap rakyat, khususnya yang menyangkut hajat hidup para petani dan nelayan kecil serta perempuan pedesaan,” papar Lodji.



Andi Inda Fatinaware, Direktur Sawit Watch, menambahkan, berdasarkan putusan MK ini, maka pemerintah tidak boleh mengeluarkan terlebih dahulu kebijakan strategis dan peraturan perundang-undangan turunan dari UU Cipta Kerja di lapangan pertanian, perkebunan, dan perikanan.

“UU Cipta Kerja bermasalah secara konstitusional sehingga tidak bisa menjadi rujukan bagi aturan di bawahnya,” katanya.

Sementara itu, sedari awal pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat yang jelas bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang. Sehingga, pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus klaster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan menjauhkan pencapaian kedaulatan petani dan pangan di Indonesia.

Said Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) memandang, dengan berlakunya UU ini akan berpotensi mengancam eksistensi, keberlanjutan hidup petani, eksistensi kelompok-kelompok tani, dan kebudayaannya serta kedaulatan petani atas pangan.

“Serta mengancam berkembangnya pertanian, melemahkan keterampilan petani, dan menghambat berkembangnya organisasi-organisasi petani lokal, terlebih lagi para petani gurem yang akan terus mengalami diskriminasi,” tutur Said.

Muhammad Reza Sahib, dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) menambahkan, pihaknya mengapresiasi putusan MK bahwa UU Cipta Kerja dalam proses pembentukannya syarat dengan kepentingan pemodal dan cacat formil.

“Sehingga memberi waktu untuk gerakan kewargaan mengonsolidasikan diri dalam memperkuat demokrasi,” tutupnya.

Sumber: <https://spi.or.id/mk-putusan-uu-cipta-kerja-cacat-formil-dan-inkonstitusional/>

TAHUN 2022

Mencegah Tawuran Pelajar Tak Bisa Dibebankan kepada Sekolah



Antara · 18 Januari 2022 12:23

Ilustrasi. Medcom.id

Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menegaskan mencegah tawuran pelajar tak bisa hanya dibebankan kepada sekolah. Peran serta banyak sangat diperlukan, termasuk orang tua atau wali murid.

“Tawuran pelajar tidak bisa dibebankan kepada sekolah, tapi semua pihak. Tapi karena tidak ada sistem, risiko yang ditimbulkan akibat dari kekerasan itu terus terjadi setiap tahun, hingga berujung tawuran,” kata Koordinator JPPI Ubaid Matraji dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Januari 2022.

Pernyataan ini merespons maraknya peristiwa tawuran di Jakarta Selatan dalam sepekan terakhir. Kondisi ini dinilai sangat mencoreng dunia pendidikan. Dia pun meminta Suku Dinas Pendidikan setempat yang memiliki wewenang memantau satuan pendidikan menghadirkan sistem pencegahan tawuran pelajar.

“Bagaimana dinas melakukan pendampingan terhadap sekolah?. Bagaimana dinas melibatkan partisipasi seluruh ‘stakeholder’ pendidikan dalam konteks pencegahan kekerasan itu kan tidak ada,” jelasnya.

Sebelumnya, dua kelompok pelajar SMK hendak tawuran di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Tepatnya, di depan kampus Bina Sarana Informatika (BSI), Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat, 15

Januari 2022. Kasus ini menyebabkan dua siswa mengalami luka-luka.

Pada waktu yang sama, tawuran dua kelompok pelajar juga terjadi di kawasan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kapolsek Jagakarsa Komisaris Polisi Wahid Key menuturkan bahwa pihaknya mengamankan sejumlah pelajar yang tawuran di Tanjung Barat tersebut.

“Mereka saling melukai. Jadi, korban adalah pelaku juga. Ada beberapa pelajar juga yang kita amankan,” ujar Wahid.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Gbma3Oxb-mencegah-tawuran-pelajar-tak-bisa-dibebankan-kepada-sekolah>

Marak Tawuran Pelajar di Jaksel, Sudin Pendidikan Dianggap Tidak Antisipatif



Kompas.com, 17 Januari 2022, 22:25 WIB

Tawuran remaja terjadi di Jalan Raya Lenteng Agung mengarah ke Depok tepatnya di dekat Flyover Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat (18/10/2021) sekitar pukul 04.00 WIB. (Dok. Warga)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus tawuran pelajar di kawasan Pondok Labu, Cilandak dan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (15/1/2021), kini menjadi perhatian publik.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, tawuran pelajar yang saling melukai hingga menyebabkan jatuh korban sangat mencoreng dunia pendidikan.

Menurut dia, Suku Dinas Pendidikan (Sudin) Pendidikan yang seharusnya memiliki program pencegahan saat ini justru belum terlihat antisipasinya.

Dengan demikian, aksi tawuran seolah menjadi pembiaran dan dianggap hal biasa hingga bakal terjadi setiap waktunya.

“Pencegahan kekerasan khususnya soal tawuran apa yang dilakukan oleh dinas? Kan tidak ada. Bagaimana dinas melakukan pendampingan terhadap sekolah? Bagaimana dinas melibatkan partisipasi seluruh stake holder pendidikan dalam konteks pencegaham kekerasan itu kan tidak ada,” kata Ubaid saat dihubungi, Senin (17/1/2022).

Ubaid menilai Sudin Pendidikan tak memiliki program karena penanganan dini tawuran pelajar bukan hanya dilakukan oleh sekolah.

Menurut dia, peran wali murid dan masyarakat sekitar sekolah juga dibutuhkan dalam upaya pencegahan tawuran pelajar.

Hal itulah harus adanya terbentuk aturan yang menyerupai sistem peringatan dini kepada para siswa.

“Tawuran pelajar tidak bisa membebankan kepada sekolah, tapi semua pihak. Padahal sangat mudah pencegahan tawuran itu. Tapi karena tidak ada sistem, risiko yang ditimbulkan akibat dari kekerasan itu terus terjadi setiap tahun, hingga berujung tawuran,” kata Ubaid.

Diketahui, dua kelompok pelajar SMK hendak tawuran di kawasan Pondok Labu, tepat depan kampus Bina Sarana Informatika (BSI), Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat sore.

Penulis : Muhammad Isa Bustomi
Editor : Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Sumber: <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/17/22251451/marak-tawuran-pelajar-di-jaksel-sudin-pendidikan-dianggap-tidak>

Ini penegasan JPPI terkait peran wali murid antisipasi tawuran pelajar



Selasa, 18 Januari 2022 11:58 WIB

Personel Satreskrim Polres Kota Serang memperlihatkan barang bukti senjata tajam hasil razia terhadap para pelaku tawuran antar pelajar di Serang, Banten, Senin (17/1/2022). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/wsj.

Bagaimana dinas melakukan pendampingan terhadap sekolah?

Jakarta (ANTARA) -Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menegaskan bahwa peran serta wali murid sangat penting untuk mencegah terjadinya tawuran antarpelajar.

“Tawuran pelajar tidak bisa dibebankan kepada sekolah, tapi semua pihak. Tapi karena tidak ada sistem, risiko yang ditimbulkan akibat dari kekerasan itu terus terjadi setiap tahun, hingga berujung tawuran,” kata Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa.

Penegasan itu menanggapi maraknya peristiwa tawuran di Jakarta Selatan dalam sepekan terakhir.

Sebelumnya tawuran pelajar di dua lokasi terjadi di kawasan Pondok Labu, Cilandak dan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (15/1) hingga menyebabkan dua siswa mengalami luka sobek. Menurut dia, peristiwa itu sangat mencoreng dunia pendidikan. Karena itu dia meminta Suku Dinas Pendidikan setempat yang memiliki wewenang memantau satuan pendidikan menghadirkan sistem pencegahan tawuran antarpelajar.

“Bagaimana dinas melakukan pendampingan terhadap sekolah?. Bagaimana dinas melibatkan partisipasi seluruh ‘*stakeholder*’ pendidikan dalam konteks pencegahan kekerasan itu kan tidak ada,” katanya.

Sebelumnya, dua kelompok pelajar SMK hendak tawuran di Pondok Labu di depan kampus Bina Sarana Informatika (BSI), Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat sore.

Pada waktu yang sama, tawuran dua kelompok pelajar juga terjadi di kawasan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Kapolsek Jagakarsa Komisaris Polisi Wahid Key menuturkan bahwa pihaknya mengamankan sejumlah pelajar yang tawuran di Tanjung Barat tersebut. “Mereka saling melukai. Jadi, korban adalah pelaku juga. Ada beberapa pelajar juga yang kita amankan,” ujar Wahid.

Pewarta: Sihol Mulatua Hasugian
Editor: Edy Sujatmiko

Sumber: <https://www.antaranews.com/berita/2649565/ini-penegasan-jppi-terkait-peran-wali-murid-anti-sipasi-tawuran-pelajar>

]

RUU Sisdiknas Dinilai sebagai Upaya Negara Dorong Privatisasi dan Komersialisasi Pendidikan



Kompas.com, 18 Maret 2022, 09:43 WIB

Ilustrasi pendidikan tinggi.(UNSPLASH/ELEMENT5 DIGITAL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebutkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) merupakan upaya negara melakukan privatisasi dan komersialisasi terhadap pendidikan di Tanah Air.

Ia mengatakan, upaya tersebut terlihat dari materi RUU Sisdiknas Pasal 12 yang mewajibkan orang tua untuk membiayai pendidikan dasar.

“Kami katakan (RUU Sisdiknas) bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 31 karena RUU ini tujuannya adalah soal privatisasi dan komersialisasi,” kata Ubaid dalam diskusi publik bertajuk “Rapor Merah Kinerja Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim” yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan, Kamis (17/3/2022).

Ubaid menjelaskan, dalam UUD 1945 Pasal 31 disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Sementara, dalam RUU Sisdiknas Pasal 12 disebutkan bahwa mewajibkan orang tua untuk membiayai pendidikan tersebut.

Menurut Ubaid, materi dalam pasal tersebut menjadikan orang tua siswa turut wajib ikut

membiayai.

Oleh sebab itu, ia menyebutkan bahwa materi RUU Sisdiknas sangat fatal karena bertentangan dengan UUD 1945. “Jadi tidak hanya pemerintah, orang tua juga wajib ikut membiayai,” tegas dia.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti materi RUU Sisdiknas Pasal 80 yang menyebutkan bahwa pemerintah hanya membiayai jenis pembiayaan dasar.

Ironisnya, ia mengungkapkan, dalam RUU Sisdiknas sendiri tidak menjelaskan mengenai komponen pembiayaan dasar mana yang dimaksud. “Tetapi kenapa di RUU Sisdiknas ini kok malah muncul orang tua wajib membiayai, kemudian pemerintah pembiayaan dasar, lalu komponennya apa saja juga tidak jelas,” terang dia.

“Menurut kami ini sebuah kemunduran karena mestinya ini menjadi tanggung jawab pemerintah,” imbuh dia.

Penulis : Achmad Nasrudin Yahya
Editor : Bagus Santosa

Sumber: [https://nasional.kompas.com/read/2022/03/18/09434601/ruu-sisdiknas-dinilai-sebagai-upa-ya-negara-dorong-privatisasi-dan](https://nasional.kompas.com/read/2022/03/18/09434601/ruu-sisdiknas-dinilai-sebagai-upaya-negara-dorong-privatisasi-dan)

Pengamat: Sekolah Ramah Anak Masih Sebatas Retorika Kebijakan Saja



Kompas.com - 14/06/2022, 15:11 WIB

Ilustrasi(Shutterstock)

KOMPAS.com - Sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di sekolah masih terjadi. Belum lama ini, seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Binjai, Sumatera Utara, berinisial MIA (11), tewas diduga dikeroyok enam teman sekolahnya, Selasa (24/5/2022) lalu.

Kemudian, baru-baru ini, kejadian serupa juga terjadi di Kotamobagu, Sulawesi Utara, seorang siswa MTs berinisial BT (13) tewas setelah dianiaya oleh temannya, Minggu (12/6/2022).

Dengan kejadian itu, tentunya ini menjadi perhatian bagi semua pihak.

Pengamat: Jangan Dianggap Kasus Sepele dan Kecil Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, hasil riset JPPI pada 2021-2022 tentang Right to Education Index, yang paling buruk adalah soal safety learning environment.

“Sekolah ramah anak masih sebatas retorika kebijakan saja dan belum well implemented di lapangan. Pengawasan yang buruk dan tidak adanya early warning system ini juga turut andil dalam soal ini,” kata Ubaid, kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (14/6/2022) Ubaid mengatakan, untuk menciptakan safety learning environment di sekolah, harus didorong oleh kebijakan pemerintah bagaimana menerapkan di semua sekolah soal sekolah ramah anak ini, jangan hanya di sekolah-sekolah tertentu yang jadi percontohan yang tidak pernah dievaluasi. Ia menyebut, hal itu bisa dilakukan dengan dengan membangun cara pandang,

sikap, dan praktik toleransi aktif, anti kekerasan, peduli lingkungan, empati, dan setia kawan. Semua pihak bertanggung jawab Dalam kasus kekerasan ini, kata Ubaid, bukan hanya pihak sekolah saja yang harus bertanggung jawab, tetapi juga pemerintah. Menurut Ubaid, banyaknya kasus kekerasan di sekolah karena pemerintah tidak pernah menganggap serius persoalan ini. Padahal, sambungnya, kasus semacam ini merata di mana-mana. “Semua pihak yang terlibat mesti bertanggung jawab, pemerintah juga, jangan dianggap sebagai kasus sepele dan kecil,” jelasnya.

Kata Ubaid, agar kejadian kejadian serupa tidak terjadi lagi, sumber daya manusia guru juga harus dibenahi. Selain itu, sambungnya, pendekatan dalam pembelajaran juga harus ramah anak dan dihilangkan model-model kekerasan.

“Pendekatan kekerasan dalam pendidikan akan menginspirasi anak-anak untuk melanggengkan kekerasan dalam sehari-hari,” ujarnya. Di luar sekolah, kata Ubaid, peran keluarga dan lingkungan masyarakat juga perlu agar kekerasan tidak terjadi. “Lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat adalah tiga area dalam ekosistem pembelajaran yang harus terintegrasi. Di luar sekolah, peran keluarga dan lingkungan masyarakat juga harus mendukung pencegahan kekerasan,” pungkasnya.

Penulis : Candra Setia Budi
Editor : Candra Setia Budi

Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2022/06/14/151134078/pengamat-sekolah-ramah-anak-masih-sebatas-retorika-kebijakan-saja?page=2>

JPPI dorong PPDB harus lindungi hak anak



Rabu, 15 Juni 2022 17:43 WIB

Panitia memverifikasi data-data dan nilai calon peserta didik baru saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Serang, Banten, Rabu (15/6/2022). . ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/aww.

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mendorong pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang harus melindungi hak anak.

“Pelaksanaan PPDB, terutama di DKI Jakarta, harus dapat melindungi hak anak, terutama adanya jaminan semua anak mendapatkan sekolah,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu. Ia menyebut skema pembiayaan yang diberikan untuk anak harus skema penuh dan bukan sekadar bantuan.

Selain itu, adanya pelibatan publik dalam pembahasan rancangan perda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pendidikan di DKI Jakarta dan memastikan adanya jaminan pembiayaan pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun di sekolah negeri dan swasta.

“Pemerintah harus mewujudkan pemerataan kualitas sekolah di DKI Jakarta untuk mendukung sistem zonasi yang berkeadilan tanpa diskriminasi,” imbuh dia.

Dia menjelaskan di wilayah DKI Jakarta, setiap tahun ajaran baru sekitar 140.000 lulusan SD mendaftarkan diri masuk SMP dan sekitar 150.000 anak lulusan SMP masuk SMA/SMK. Dari jumlah itu hanya 52 persen yang bisa ditampung di SMP negeri dan hanya 33 persen yang bisa diterima di SMA/SMK negeri.

“Lalu ke mana 67.000 (48 persen) anak lulusan SD lainnya bersekolah? Juga bagaimana nasib 103.000 (67 persen) anak lulusan SMP? Sebanyak 170.000 anak (58 persen dari total lulusan SD dan SMP) adalah anak-anak yang diabaikan dalam sistem PPDB. Pemerintah Provinsi DKI telah melakukan tindakan diskriminatif dan melanggar undang-undang dasar berikut seluruh peraturan turunannya,” kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, perlu adanya jaminan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan wajib dibiayai oleh pemerintah.

“Inilah yang diabaikan oleh Pemprov DKI Jakarta. UUD 1945 pasal 31 ayat 2 menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,” imbuh dia.

Pewartu: Indriani
Editor: M. Hari Atmoko

Sumber: <https://www.antaranews.com/berita/2941117/jppi-dorong-ppdb-harus-lindungi-hak-anak>

JPPI Dorong Pemprov DKI Tanggung Biaya Pendidikan Siswa yang Tak Bisa Masuk Sekolah Negeri



Ilham Pratama Putra · 14 Juni 2022 16:52

Ilustrasi sekolah. MI/Widiyanto

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengkritisi ketersediaan sekolah negeri dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta. Pasalnya, siswa tak mendapat kursi di sekolah negeri mesti terlempar ke sekolah swasta.

Ubaid menyebut banyak orang tua siswa tak sanggup membiayai anaknya saat siswa terlempar ke sekolah swasta. Bahkan, akhirnya anak tersebut putus sekolah.

Dia menyebut sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sanggup membiayai siswa yang terlempar ke sekolah swasta tersebut. Ubaid berharap ada kebijakan Pemprov DKI untuk menanggung biaya pendidikan anak-anak di DKI Jakarta. “Padahal, bila ada political will, Pemprov DKI Jakarta sangat mampu menanggung biaya dan menjamin hak anak untuk mendapatkan layanan dasar pendidikan untuk semua anak DKI Jakarta, no one left behind,” kata Ubaid dalam webinar Sahabat ICW, Selasa, 14 Juni 2022.

Dia menuturkan 170 ribu siswa akan masuk ke sekolah swasta setiap tahun. Ubaid menuturkan bila diikalikan 3 angkatan, yakni SMP kelas 7, 8, 9 dan SMA/SMK kelas 10, 11, 12, maka ada 510 ribu anak yang perlu dibiayai.

“Biaya yang dibutuhkan tiap anak, dari pengamatan sederhana, untuk sekolah swasta yang cukup baik adalah Rp8 juta per tahun. Sehingga, dibutuhkan anggaran sekitar Rp4 triliun,” ungkap dia.

Ubaid yakin Pemprov DKI mampu mengeluarkan anggaran sebesar itu. Terlebih, pemberian hak pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah.

“Untuk membuat seluruh anak DKI tingkat SMP dan SMA SMK terpenuhi haknya, ini kan pemerintah menunaikan tugasnya menyelenggarakan wajib belajar,” tutur dia.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memberikan kuota khusus kepada Calon Peserta Didik Baru (CPDB) melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama. Kuota khusus ini adalah bentuk afirmasi dalam program PPDB Bersama.

“Ada 260 sekolah SMA dan SMK swasta yang ada di PPDB bersama ini,” kata Ketua PPDB DKI Jakarta Purwosusilo dalam siaran YouTube Jurnal Retno Listyarti dikutip Kamis, 26 Mei 2022.

Penambahan kuota di sekolah swasta ini untuk memperluas daya tampung siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Dia memastikan sekolah swasta yang dipilih memiliki kualitas setara dengan sekolah negeri.

CPBD yang diterima di sekolah swasta lewat Jalur PPDB Bersama mendapat pembiayaan uang pangkal dan SPP selama tiga tahun. Peserta didik dari Jalur PPDB Bersama tidak boleh dipungut biaya apa pun selama tiga tahun sekolah.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/IKYqg0jK-jppi-dorong-pem-prov-dki-tanggung-biaya-pendidikan-siswa-yang-tak-bisa-masuk-sekolah-negeri>

170 Ribu Siswa Berpotensi Tak Dapat Sekolah dalam PPDB DKI Jakarta Setiap Tahun



Ilham Pratama Putra · 14 Juni 2022 16:21

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. DOK Pribadi

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan ratusan ribu siswa berpotensi terabaikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jakarta. Hal itu lantaran tak tertampung di sekolah negeri.

Dia menyebut setiap tahun terdapat 140 ribu lulusan SD yang akan masuk SMP di DKI. Kemudian, terdapat 150 ribu lulusan SMP yang akan masuk SMA maupun SMK.

“Dari jumlah ini, hanya 52 persen yang bisa ditampung di SMP Negeri dan hanya 33 persen yang bisa diterima di SMA atau SMK Negeri,” kata Ubaid dalam webinar Sahabat ICW, Selasa, 14 Juni 2022. Dia mempertanyakan 48 persen atau sekitar 67 ribu lulusan SD yang tidak bisa masuk SMP negeri. Serta nasib 103 ribu atau 67 persen lulusan SMP tidak bisa masuk SMA atau SMK negeri.

“Sebanyak 170 ribu anak inilah yang terabaikan dalam sistem PPDB hampir setiap tahunnya,” beber Ubaid. Dia menegaskan hal ini merupakan bentuk pelanggaran. Ubaid menilai pemerintah DKI Jakarta gagal memenuhi hak anak untuk sekolah.

“Kami menilai Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pelanggaran hak anak dalam pelayanan hak dasar mendapatkan pendidikan yang layak di Ibu Kota,” tegas dia.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ybDXxQAb-170-ribu-siswa-berpotensi-tak-dapat-sekolah-dalam-ppdb-dki-jakarta-setiap-tahun>

5 Fakta Siswa MTs di Kotamobagu Tewas Setelah Di-bully Temannya



Kompas.com - 14/06/2022, 16:00 WIB
Ilustrasi(Thinkstockphotos.com)

KOMPAS.com - Seorang siswa MTs di Kotamobagu, Sulawesi Utara meninggal dunia akibat di-bully atau perundungan yang dialaminya pada 8 Juni 2022. Korban siswa berinisial BT (13) ini sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan setelah mengeluh sakit di bagian perut. Namun sayangnya, nyawa BT tidak terselamatkan. Baca juga: Viral, Siswa MTs di Kotamobagu Diduga Di-bully Teman-temannya, Korban Meninggal Dunia Bagaimana peristiwa penganiayaan tersebut terjadi, berikut sejumlah faktanya.

1. Korban di-bully pada 8 Juni 2022 Dikutip dari Kompas.com, Senin (13/6/2022), BT mengalami perundungan atau bullying pada Rabu, 8 Juni 2022.
2. Ia dianiaya oleh beberapa orang hingga mengalami sakit perut. Akibat rasa sakit yang tak tertahankan, BT dilarikan ke rumah sakit pada Sabtu, (11/6/2022). Keesokan harinya atau Minggu (12/6/2022), BT dinyatakan meninggal dunia. Selepas kepergian BT, salah satu keluarga korban melaporkan bahwa BT menjadi korban perundungan di sekolah.
3. Korban bully lebih dari 1 orang Berdasarkan keterangan yang dihimpun, BT bukan satu-satunya korban perundungan di sekolah tersebut. Ternyata, pelaku juga mengincar 4 anak lainnya, termasuk APB (13). APB merupakan anak dari Kasat Pol PP Bolaang Mongondow, Zulfadly Binol. Sama seperti BT, APB pun juga dirundung oleh pelaku yang sama. Binol menegaskan bahwa ada 4 korban perundungan di salah satu sekolah MTs di Kotamobagu. "Beruntung APB sempat melarikan, meski begitu sempat dipukul di bagian kepala, hingga mengeluarkan darah di bagian hidung," ujar Binol. "Saya akan membawa anak saya, APB, ke Manado untuk melakukan pemeriksaan, dan

kami sudah menghubungi kepala sekolah (terkait) apa yang sudah dialami anak saya,” lanjut dia. Ia berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

4. . Pelaku diduga sesama pelajar Dikutip dari Kompas.com, Selasa (14/6/2022), polisi telah memeriksa sembilan siswa, beberapa di antaranya diduga sebagai pelaku. Kapolres Kotamobagu AKBP Irham Halid melalui Kasi Humas Iptu I Dewa Dwi Adyana mengatakan, informasi awal diperoleh bahwa perundungan (bullying) tersebut terjadi di area sekolah. Saat itu, aksi perundungan tidak diketahui oleh pihak sekolah, hingga keesokan harinya korban mengalami sakit dan sempat dirawat di Rumah Sakit Pobundayan Kotamobagu. “Kemudian dirujuk di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Kandou Manado, hingga korban meninggal dunia pada Minggu (12/6/2022),” kata Dewa.
5. . Terduga pelaku sudah ditangani polisi Penyidik Sat Reskrim Polres Kotamobagu langsung menindak lanjuti kasus ini berdasarkan laporan polisi nomor: LP:/B/377/VI/2022/SPKT/Polres Kotamobagu/Polda Sulut pada 12 Juni 2022. “Penyidik melakukan pemeriksaan awal terhadap sembilan orang pelajar yang diduga mengetahui tentang kejadian penganiayaan tersebut,” ujarnya. Saat diperiksa, sembilan pelajar ini didampingi oleh unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Dinas Perlindungan Anak, dan para orangtua. “Dari hasil pemeriksaan, penyidik menduga ada beberapa pelajar sebagai pelakunya. Namun karena masih di bawah umur, sehingga para pelaku masih dalam pengawasan orangtua sambil menunggu proses penyidikan selesai,” jelas Dewa.
6. . Pelaku diduga sesama pelajar Dikutip dari Kompas.com, Selasa (14/6/2022), polisi telah memeriksa sembilan siswa, beberapa di antaranya diduga sebagai pelaku. Kapolres Kotamobagu AKBP Irham Halid melalui Kasi Humas Iptu I Dewa Dwi Adyana mengatakan, informasi awal diperoleh bahwa perundungan (bullying) tersebut terjadi di area sekolah. Saat itu, aksi perundungan tidak diketahui oleh pihak sekolah, hingga keesokan harinya korban mengalami sakit dan sempat dirawat di Rumah Sakit Pobundayan Kotamobagu. “Kemudian dirujuk di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Kandou Manado, hingga korban meninggal dunia pada Minggu (12/6/2022),” kata Dewa.
7. Terduga pelaku sudah ditangani polisi Penyidik Sat Reskrim Polres Kotamobagu langsung menindak lanjuti kasus ini berdasarkan laporan polisi nomor: LP:/B/377/VI/2022/SPKT/Polres Kotamobagu/Polda Sulut pada 12 Juni 2022. “Penyidik melakukan pemeriksaan awal terhadap sembilan orang pelajar yang diduga mengetahui tentang kejadian penganiayaan tersebut,” ujarnya. Saat diperiksa, sembilan pelajar ini didampingi oleh unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Dinas Perlindungan Anak, dan para orangtua. “Dari hasil pemeriksaan, penyidik menduga ada beberapa pelajar sebagai pelakunya. Namun karena masih di bawah umur, sehingga para pelaku masih dalam pengawasan orangtua sambil menunggu proses penyidikan selesai,” jelas Dewa.

Penulis : Retia Kartika Dewi
Editor : Rizal Setyo Nugroho

Sumber: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/14/160000565/5-fakta-siswa-mts>

Kemendikbudristek: PPDB zonasi tingkatkan akses layanan berkeadilan



Sabtu, 18 Juni 2022 12:39 WIB

Pelajar SMP Negeri 11 Kota Tanjungpinang, Kepri, melaksanakan baris berbaris sebelum masuk kelas.
ANTARA/Ogen/am.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menilai kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi tingkatkan akses layanan pendidikan yang berkeadilan.

“Secara nasional akses kita sudah baik. Nah, perjuangan berikutnya adalah bagaimana mengangkat mutu pendidikan yang relevan sehingga bisa lebih baik lagi,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.

Jumeri menambahkan pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan PPDB tahun 2022 masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.1/2021 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Pedoman yang kita gunakan masih seperti tahun lalu, yaitu Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yang di dalamnya telah dijelaskan bahwa PPDB dilakukan melalui empat jalur yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan jalur prestasi,” kata Jumeri.

Dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 disebutkan bahwa ada besaran kuota pada setiap

jalur PPDB di masing-masing jenjang satuan pendidikan. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), kuota sebanyak 70 persen dari daya tampung sekolah digunakan untuk zonasi, 15 persen untuk afirmasi, dan 5 persen pada jalur perpindahan orang tua.

Sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), jalur zonasi diberikan kuota sebesar 50 persen dari daya tampung sekolah, afirmasi 15 persen, serta jalur perpindahan orang tua maksimal 5 persen dan selebihnya dapat digunakan sebagai jalur prestasi.

“Pada jalur zonasi jenjang SD kuotanya lebih banyak karena di jenjang tersebut belum ada jalur prestasi,” kata Jumeri.

Dia menyampaikan banyak contoh yang telah dilakukan Pemda, salah satunya dengan kolaborasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan keabsahan data.

“Pengalaman di daerah, banyak data siswa yang tidak valid, selain itu juga mengalami kendala jaringan internet sehingga membuka pendaftaran secara luring. Dengan kerja sama melalui Disdukcapil dan Dinas Kominformasi maka hal-hal tersebut dapat diminimalisir,” kata Jumeri.*

Pewarta: Indriani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS

Sumber: <https://www.antaranews.com/berita/2946873/kemendikbudristek-ppdb-zonasi-tingkatkan-akses-layanan-berkeadilan>

Jangan Terlewat, Lapor Diri PPDB DKI Mulai Hari Ini



Renatha Swasty · 16 Juni 2022 12:10

Ilustrasi PPDB. MI Andri Wijayanto

Jakarta: Proses lapor diri Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta dimulai hari ini Kamis, 16 Juni 2022 hingga Jumat, 17 Juni 2022. Calon Peserta Didik Baru (CPDB) bisa lapor diri melalui daring.

“Pastikan kalian sudah lapor diri dengan melakukan login di situs ppdb.jakarta.go.id dan mengklik tombol Lapor Diri. Cetak dan simpan bukti lapor diri ya! CPDB yang tidak lapor diri dianggap mengundurkan diri,” dikutip dari pengumuman di Instagram @officialppdbdki, Kamis, 16 Juni 2022.

Adapun lapor diri bagi CPDB untuk hari ini bagi jalur:

SD

1. Zonasi
2. Afirmasi (inklusi dan anak asuh panti)

SMP

1. Prestasi akademik dan non akademik
2. Afirmasi (inklusi dan anak asuh panti)

SMA/SMK

1. Prestasi akademik dan non akademik
2. Afirmasi (inklusi dan anak asuh panti)
3. PPDB bersama Tahap I

Lapor diri dibuka pada 16 Juni 2022 pukul 08.00-24.00 WIB dan 17 Juni pukul 00.01-14.00 WIB.

Adapun hasil seleksi PPDB DKI Jakarta 2022 diumumkan pukul 17.00 WIB. Orang tua atau wali CPBD bisa mengecek hasil PPDB secara online.

Pengumuman untuk jalur prestasi akademik, prestasi non akademik, disabilitas, anak panti, dan anak tenaga kesehatan yang meninggal dalam penanganan covid-19. Pengumuman untuk semua jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK.

Bagi yang dinyatakan diterima tahap selanjutnya adalah lapor diri. Sementara itu, bagi yang belum diterima bisa mengikuti jalur zonasi yang dibuka mulai 27 Juni 2022.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/MkMDaDmb-jangan-terlewat-lapor-diri-ppdb-dki-mulai-hari-ini>

Perlunya Belajar Saat Libur Sekolah



Kegiatan ekstrakurikuler di saat libur bisa mengasah minat dan bakat anak. Kian minim sekolah yang mengagendakannya

Penulis: Gisesya Ranggawari, Oktarina Paramitha Sandy

Editor: Leo Wisnu Susapto

Ilustrasi orang tua dan anak yang melakukan kegiatan di luar rumah. Dok Envato

JAKARTA – Hari yang dinanti Azka (10) pun tiba. Bukan hari ulang tahun yang ditunggunya. Libur kenaikan kelas lah yang dinantikan anak laki-laki berusia 10 tahun itu. Dia mengaku gembira karena mulai Sabtu kemarin (25/6) hingga 9 Juli mendatang, tak harus bersekolah.

“Aku merdeka main *handphone*,” ucap bocah itu spontan menjawab pertanyaan *Validnews* yang menanyakan alasan kegembiraannya pada Sabtu (25/6).

Sinta (37), ibu Azka tersenyum mendengar ucapan bahagia anak sulungnya. “Itu waktu panjang buat Azka untuk bebas main *handphone* karena tak belajar dan bebas dari tugas sekolah,” urai Sinta.

Masygul sebenarnya hati Sinta melihat kegembiraan Azka. Terselip rasa khawatir akan sejumlah efek buruk akibat anak menghabiskan waktu dengan telepon genggam.

Bujuk rayu Sinta dan ayah Azka agar anak sulungnya itu berganti aktivitas pada hari libur, hanya menuai penolakan. Semakin dipaksa, Azka makin enggan berpisah dengan alat komunikasi canggih itu.

Sinta bercerita, sebelum pandemi covid-19, Azka suka beraktivitas di luar rumah. Saat libur

sekolah, ajakan untuk berlibur dari orang tua selalu disambutnya dengan gembira.

Namun, keadaan itu berubah saat pandemi. Azka berbalik. Gawai canggih yang jadi sarananya belajar secara daring, menjadi teman yang sangat dekat dan lekat. Azka hampir tak pernah melepaskannya.

Selepas belajar secara daring, anak kecil ini rutin main gim di ponsel. Kadang dia sendiri. Lain waktu dia bermain gim berkelompok. Padahal, orang tuanya membatasi waktu bergawai hanya tiga jam saja saban harinya.

Kini, saat libur sekolah Azka malah ingin bebas main gim tanpa waktu. Tidak adanya kewajiban bangun pagi untuk pergi ke sekolah membuatnya senang. Aktivitas di luar rumah tak lagi menarik buatnya.

Dari mulai PUBG sampai Mobile Legend dimainkan bocah berkacamata itu. Cita-cita menjadi pilot juga sepertinya sudah dikubur Azka. Dia kini bercita-cita ingin menjadi atlet e-sports.

Sinta memilih untuk mendukung keinginan Azka selama masih dalam batas wajar. Dia menyadari, pergeseran kebiasaan ini merupakan fenomena yang memang sedang dialami anak-anak generasi Z atau generasi Alpha yang lahir tahun 1995-2025.

“Sepertinya anak sekarang lebih tertarik segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, teman-teman Azka juga seperti itu. Kalau dulu kan saya selalu senang kalau liburan berwisata ke alam misalnya,” papar Sinta.

Sebagai orang tua, lanjut Sinta, dia mengalami dilema. Ada kengerian tersendiri membiarkan anak bermain gawai. Di sisi lain, dia juga takut sang anak malah dicap *kuper* atau ketinggalan zaman. Belakangan, adalah lumrah jika anak kian akrab dengan gawai masing-masing.

Ya, banyak orang tua seperti Sinta kini mengalami hal sama. Sang anak lebih lekat dengan gawai dan enggan beraktivitas lain. Padahal, sejatinya, ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh siswa untuk belajar saat liburan.

Praktik semacam itu banyak dilakukan oleh siswa atas persetujuan orang tua. Seperti pesantren kilat. Kegiatan perkemahan di alam. Lalu, olahraga ataupun latihan tari, teater, maupun melukis atau olah vokal. Bahkan desain grafis komputer, belajar *coding* bisa menjadi aktivitas anak yang menambah kreativitasnya.

Sayangnya, kegiatan itu tak pernah diadakan sekolah saat libur pembelajaran formal.

Belajar

Saat

Libur

Bermain gawai tidak melulu menjadi hal negatif. Namun, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyerukan ada baiknya masa liburan diisi dengan kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan karakter dan mengasah bakat anak.

Dia menilai perlu ada sinergitas antara sekolah dan orang tua dalam memantau anak selama libur sekolah. Libur sekolah harusnya juga menjadi momentum buat mengembangkan potensi dan karakter si anak.

Ubaid menyarankan sekolah lebih aktif lagi untuk menginformasikan bakat terpendam anak.

Tujuannya, agar saat masa libur, giliran orang tua yang memantik bakat dan karakter anaknya lewat berbagai metode.

“Tidak perlu yang berat-berat seperti belajar di sekolah, kan bisa kursus musik. Jadi tidak selalu sesuatu yang serius atau berkaitan dengan akademis, membangun karakter anak juga penting,” ucap Ubaid saat berbincang dengan *Validnews*, Minggu (26/6).

Masa liburan juga selayaknya menjadi momen bagi orang tua mengambil alih peranan penting dalam tumbuh kembang anak. Ini bisa dilakukan dengan orang tua yang juga mengambil cuti dari pekerjaannya. Harus diingat, proses pendidikan karakter dan pendewasaan anak perlu dikuatkan oleh keluarga, khususnya orang tua.

“Momen libur penting untuk berkegiatan bersama, membuka ruang dialog, mengajarkan anak memiliki karakter yang berintegritas misalnya,” imbuhnya.

Idealnya, sekolah perlu memberikan masukan atau catatan evaluasi yang lebih rinci kepada orang tua saat sebelum masa libur. Ini menjadi rujukan agar orang tua bisa mengevaluasi dan meningkatkan kekurangan anak di sekolah dengan berbagai metode pendekatan saat liburan.

Sayangnya, di seluruh Indonesia tidak sampai lima persen sekolah yang menerapkan pola komunikasi seperti ini. Mayoritas, pola komunikasi antara sekolah dan orang tua siswa hanya sebatas pembagian rapor.

Psikolog klinis anak, Firesta Farizal mengamini. Libur sekolah memang bisa menjadi solusi untuk pendidikan karakter dan memantik minat bakat anak. Dia sepakat, liburan selayaknya diisi dengan kegiatan bisa merangsang otak anak bekerja lebih. Belajar tidak melulu soal akademik.

“Menurut saya liburan sangat efektif dimanfaatkan untuk merangsang otak anak. Bagaimana caranya? Kita bisa memanfaatkan minat anak, supaya belajar bisa menjadi hal yang menyenangkan dan merangsang otak anak,” beber Firesta di kesempatan berbeda.

Firesta menjabarkan, ada banyak kegiatan yang bisa menjadi opsi dilakukan saat liburan. Misalnya, olahraga, musik, kesenian atau seni lukis. Bisa juga kegiatan yang berkaitan dengan alam, seperti *camping*, *outbound* mendaki gunung atau melakukan hal-hal yang baru lainnya.

Firesta maklum jika sekolah belakangan ini jarang yang melakukan kegiatan ekstrakurikuler mengisi liburan. Kekosongan ini harus diambil orang tua untuk mendidik karakter anak.

Dia menyarankan agar orang tua memberikan kesempatan pada anak untuk mencoba melakukan sesuatu yang diminati. Kegiatan yang disukai anak namun tak digeluti karena jadwal sekolah yang padat, sangat pas dipilih menjadi prioritas.

“Sebenarnya anak butuh juga, dan orang tua harus bisa melihat bakat dan minat apa sih yang disukai oleh anak,” urainya.

Asah Bakat dan Minat

Soal peran sekolah, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih mengakui, kegiatan pendidikan selama liburan memungkinkan untuk diterapkan. Guru bisa menyesuaikan dengan tren masa kini, seperti memberikan *challenge* kepada siswa untuk mendesain proyek

sederhana dan menarik yang relevan dengan pengalaman liburan siswa.

Sri mengakui, memang selama ini kegiatan yang berhubungan dengan membangun karakter dan bakat, lebih dilakukan secara individu. Seperti, les musik tambahan atau latihan olahraga. Sekolah belum pernah menerapkan kegiatan-kegiatan tambahan ini.

“Adapun, beberapa sekolah pernah menawarkan program pesantren kilat untuk mengisi waktu liburan siswa. Tapi, intinya sangat memungkinkan sekali diadakan kegiatan selama liburan asalkan ada kesepakatan dari sekolah dengan siswa dan orang tua siswa,” papar Sri kepada *Validnews*, Senin (27/6).

Melaksanakan pembelajaran berbasis proyek juga bisa jadi solusi lain untuk menekankan nilai-nilai karakter. Lalu, profil pelajar pancasila dengan melibatkan mitra atau organisasi masyarakat agar peserta didik dapat belajar dengan lingkungan di sekitarnya.

Sekolah disarankan melakukan pendekatan yang persuasif kepada peserta didik. Hal ini penting dilakukan agar menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Panduan

Sayangnya, selama ini belum ada panduan resmi dari Kemendikbudristek soal kegiatan apa saja yang bisa dilakukan para siswa atau orang tua selama liburan dalam rangka pembentukan karakter siswa.

Namun dalam pencegahan *learning loss* selama pandemi covid-19, Kemendikbudristek telah mengeluarkan regulasi yang mengatur panduan pembelajaran di masa pandemi dengan strategi, kurikulum, dan target pencapaian hasil pembelajaran yang telah disesuaikan.

Materi/bahan ajar bagi guru dan peserta didik baik berupa buku teks, modul ajar, audio, dan video pembelajaran juga bisa diakses melalui berbagai platform. Misalnya, lewat platform Merdeka Mengajar, Rumah Belajar, dan TV Edukasi.

“Sekolah dapat memberikan proyek, misalnya siswa membuat laporan tentang kegiatan selama libur, karena ini terkait dengan kompetensi bahasa Indonesia. Ini untuk menyiasati belum adanya panduan itu,” papar Sri.

Kendala juga ada dari pihak sekolah. Biasanya, sekolah mengaku keberatan jika dilibatkan dalam kegiatan pada hari libur. Banyak guru juga berpersepsi, kegiatan atau program tambahan dalam rangka membentuk pendidikan karakter di hari libur sepenuhnya tanggung jawab individu ataupun orang tua.

Ketua DPP Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI), Asep Tapip Yani menyampaikan jika sekolah harus menyelenggarakan program tambahan pendidikan karakter pada masa libur, akan membebankan sekolah dan guru. Di saat siswa libur, biasanya mayoritas guru tidak ikut libur.

Pada masa inilah pihak sekolah melakukan evaluasi dan mempersiapkan kurikulum atau peta pendidikan untuk tahun ajaran baru.

Contohnya, pada saat libur tengah semester tahun 2022 sekarang ini, guru-guru diberikan pengetahuan tambahan dengan mengikuti *workshop* selama 8 hari.

“Menurut saya sih enggak perlu sekolah menyiapkan program lagi pada saat libur, menambah beban sekolah,” kata Asep kepada *Validnews*, Senin (27/6).

Yang diyakini, sekolah pasti mendukung jika orang tua siswa berinisiatif mengikutsertakan anaknya berkegiatan yang berkaitan dengan pendidikan karakter pada masa libur.

“Kalau mau ikut pendidikan karakter bagus sekali, kami dukung. Tapi *mangga*, secara individu saja. *Camping* atau kemah remaja yang mengusung pendidikan karakter, itu bisa,” tutur Asep.

Sumber: <https://validnews.id/nasional/perlunya-belajar-saat-libur-sekolah>

1 dari 3 Anak Disebut Jadi Korban Kekerasan di Sekolah



Medcom Jul 22, 2022 | 10:01

Kekerasan terhadap anak. Ilustrasi

Jakarta (Lampost.co) -- Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai sekolah menjadi tempat terbanyak terjadinya kekerasan pada anak. Ia mencatat 1 dari 3 anak pernah mengalami kekerasan di sekolah.

“Sekolah bukan lagi jadi tempat yang aman, tapi angker,” ujar Ubad, dikutip dari Medcom.id, Jumat, 20 Juli 2022.

Menurut Ubad, kekerasan di sekolah sangat masif akibat kegagalan penanggulangan masalah ini secara sistemik. Ia mengatakan belum ada program serius yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut.

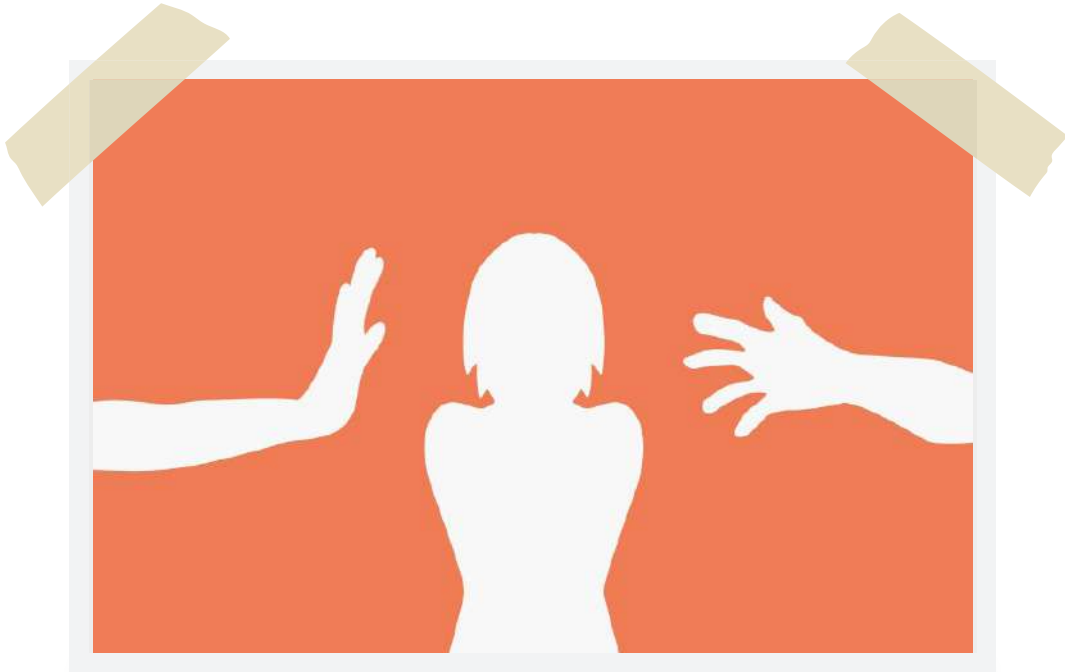
“Kasus berulang, setiap bulan ada, tapi gak pernah ditangani serius oleh pemerintah” kata Ubad.

Diketahui, kasus kekerasan pada anak mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Meski di masa pandemi, kasus perundungan terhadap anak tetap terjadi.

Asisten Departemen Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Ciput Eka Purwianti, mengatakan kekerasan di sekolah sangat mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari data dari kepolisian.

EDITOR : Effran Kurniawan

Kasus Pemerkosaan pada Murid, Psikolog Nilai Pelaku Tak Mampu Kelola Perilaku Seksual



Ilham Pratama Putra · 11 Juli 2022 14:13

Ilustrasi kekerasan seksual. Medcom

Jakarta: Psikolog Anak dan Pendidikan, Nabila Dian Nirmala, menuturkan perilaku seksual didorong naluri. Nabila menyebut dalam bermasyarakat, ekspresi dan perwujudan dari dorongan seksualitas perlu dikendalikan.

Dia menilai kasus pemerkosaan anak oleh motivator Julianto Eka Putra muncul akibat hilang kendali pada perilaku seksual. Pendiri sekolah gratis untuk anak yatim piatu dan duafa, Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) itu memperkosa muridnya sendiri.

“Kontrol diri pertama-tama dibangun lewat aturan dan norma dari lingkungan dan perlahan berkembang dari sisi pengendalian diri secara internal. Dari segi pelaku, salah satu asumsinya adalah ketidakmampuan atau kekeliruan dalam mengendalikan dorongan dalam dirinya,” ujar Nabila kepada Medcom.id, Senin, 11 Juli 2022.

Nabila menyebut wujud pelarian dari kebutuhan tersebut ialah melampiaskan pada individu yang dipersepsikan lebih lemah dari dirinya. Dalam kasus Julianto, korban merupakan siswa SPI.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menegaskan perilaku Julianto ialah pelanggaran. Julianto dinilai telah mencabut hak anak dalam pendidikan.

“Ini adalah gunung es pelanggaran hak anak di institusi pendidikan,” ujar Ubaid.

Dia menyebut pemerintah harus memberikan fokus lebih besar pada kasus kekerasan seksual. Ubaid menilai sejauh ini pemerintah lebih memberi perhatian pada kasus kecil.

“Kasus kecil-kecil yang banyak disorot sementara problem strukturalnya tidak pernah diurai,” tutur dia.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Rb1p4xAN-kasus-pemeriksaan-pada-murid-psikolog-nilai-pelaku-tak-mampu-kelola-perilaku-seksual>

33 Ribu Jemaah Haji Telah Pulang ke Tanah Air, 21 Ribu Bertolak ke Madinah



Rabu, 27 Juli 2022 | 18:42 WIB

Stafsus Menteri Agama, Wibowo Prasetyo, saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Rabu (27/7/2022).

Jakarta, NU Online Fase pemulangan jemaah haji gelombang pertama (mendarat di Madinah) sudah hampir selesai. Berlangsung sejak 15 Juli 2022, sampai saat ini sudah lebih 33 ribu jemaah yang telah kembali ke Tanah Air

“Alhamdulillah, proses pemulangan jemaah haji berjalan lancar. Dari 15 Juli sampai hari ini, sudah 33.212 jemaah yang kembali ke Tanah Air. Mereka tergabung dalam 83 kloter jemaah haji yang diberangkatkan pada gelombang pertama,” kata Stafsus Menteri Agama, Wibowo Prasetyo, setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Rabu (27/7/2022).

Dia menjelaskan, total ada 45.096 jemaah dalam 114 kloter yang berangkat pada gelombang pertama. Mereka dipulangkan secara bertahap melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Baca Juga: 14 Kloter Jamaah Haji Pulang ke Tanah Air

“Proses pemulangan jemaah gelombang pertama ini akan berlangsung hingga 30 Juli 2022. Setibanya di tanah air. Mereka yang pulang juga sudah terkonfirmasi telah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji,” terang Wibowo.

Sementara untuk jemaah yang berangkat pada gelombang kedua (mendarat di Jeddah), sejak 21 Juli 2022, secara bertahap diberangkatkan ke Madinah. Mereka menjalani ibadah Arbain (shalat wajib berjamaah selama 40 waktu) dan tinggal di Madinah selama delapan atau sembilan hari

“Sampai hari ini, sebanyak 21.309 jemaah haji gelombang kedua (54 kloter) telah diberangkatkan dari Makkah menuju Madinah,” tuturnya

“Keberangkatan jemaah ke Madinah, akan berlangsung hingga 4 Agustus 2022,” sambungnya.

Wamenag Sampaikan 3 Pesan Jemaah haji gelombang kedua, kata Wibowo, akan mulai dipulangkan dari Madinah pada 30 Juli 2022. Proses pemulangan ini akan berlangsung hingga 13 Agustus 2022. Kepada jemaah, Wibowo mengingatkan bahwa cuaca di Madinah lebih panas dibanding di Makkah. Jemaah diimbau untuk menjaga kesehatan, menyesuaikan aktivitas dengan kemampuan diri, dan jangan menunggu haus untuk minum. Jemaah juga harus memperhatikan sejumlah aturan selama di Madinah, termasuk larangan merokok di sekitar Masjid Nabawi dan hotel.

Menurut dia, sampai hari ini, tercatat ada 74 jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci. Sebanyak 27 jemaah wafat sebelum Armuzna, 16 jemaah wafat pada fase puncak haji Armuzna, dan 31 jemaah wafat pascaarmuzna. “Penting bagi jemaah, untuk terus menjaga kesehatannya, terlebih jelang kepulangan ke Tanah Air,” tandasnya.

Editor: Zunus Muhammad

Sumber: <https://www.nu.or.id/nasional/33-ribu-jemaah-haji-telah-pulang-ke-tanah-air-21-ribu-bertolak-ke-madinah-vUvCV>

JPPI: Jalur Mandiri Kerap Jadi Pintu Masuk Praktik Jual Beli Kursi di PTN



Citra Larasati - 21 Agustus 2022 12:07

Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani (KRM). (Medcom.id/Fachri)

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyebut, jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru (PMB) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berpotensi disalahgunakan oknum internal kampus. Bahkan Ubaid menyebut jalur mandiri yang digelar lebih tertutup dibandingkan jenis seleksi bersama SNMPTN dan SBMPTN ini kerap menjadi pintu masuk praktik jual beli kursi di perguruan tinggi.

Pernyataan ini disampaikan Ubaid menanggapi ditetapkannya Rektor Universitas Lampung, Karomani sebagai tersangka kasus suap penerimaan mahasiswa baru di jalur mandiri kampus tersebut. “Jalur mandiri di PMB ini bagian dari pintu masuk modus jual beli kursi di kampus. Ini sudah jamak terjadi, tapi ditutup-tutupi karena ada relasi simbiosis mutualisme antarpihak yang terlibat,” kata Ubaid saat dihubungi Medcom.id, Minggu, 21 Agustus 2022.

Ubaid mengatakan, tertangkapnya Rektor Unila dalam OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena diduga terkait kasus suap mahasiswa baru ini sangat mencoreng dunia pendidikan. «Ini sangat memalukan dan mencoreng moralitas Bangsa, karena ini terjadi di sebuah institusi yang digadang-gadang sebagai benteng pertahanan moral dan intelektual,» tegasnya.

Terlebih lagi kasus ini menyeret langsung pucuk pimpinan PTN yang bersangkutan, yakni rektor. “Tentu ini tamparan keras bagi para pengelola pendidikan di Indonesia,” tandas Ubaid.

Ubaid menduga, modus serupa juga berpotensi terjadi di perguruan tinggi negeri lainnya. “Sama

kok, ini diduga kuat dan potensial sudah menjadi pola dan tren yang merata terjadi di mayoritas kampus,” ujarnya.

Ubaid mengatakan, mestinya jalur-jalur mandiri yang digelar secara tertutup ini harus ditiadakan. “Mestinya jalur-jalur mandiri yang bersifat tertutup ini sudah ditiadakan karena rawan digunakan jual beli kursi. Yang jalur seleksi bersama dengan cara *online* saja bisa disusupi modus jual beli kursi, apalagi jalur mandiri yang lebih tertutup,” tegas Ubaid.

Penguatan Pencegahan Korupsi

Ubaid mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk bekerja lebih keras dalam penguatan pencegahan korupsi di dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi. “Ini sudah banyak diungkap berbagai pihak, tapi belum ada langkah yang strategis dan sistematis untuk penguatan pencegahan korupsi di sektor pendidikan,” ujar Ubaid.

Sebelumnya, Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani (KRM) meminta maaf kepada publik. Permohonan maaf itu disampaikan usai ia ditetapkan sebagai tersangka suap penerimaan calon mahasiswa baru pada Universitas Lampung Tahun 2022.

“Ya saya mohon maaf lah pada masyarakat pendidikan Indonesia,” kata Karomani di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu, 21 Agustus 2022.

Karomani enggan bicara banyak saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Ia meminta menunggu proses hukum berjalan dan dibuktikan di persidangan.

“Selanjutnya kita lihat di persidangan,” ujar Karomani. Karomani ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya. Yakni Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila, Heryandi (HY); Ketua Senat Unila, Muhammad Basri (MB); dan pihak swasta, Andi Desfiandi (AD).

Karomani diduga menerima uang total Rp603 juta yang berasal dari orang tua calon mahasiswa baru. KPK juga menemukan uang tunai yang diduga berasal dari penerimaan suap senilai Rp4,4 miliar.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/JKRPld7b-jppi-jalur-mandiri-kerap-jadi-pintu-masuk-praktik-jual-beli-kursi-di-ptn>

Oknum Guru Cukur Rambut Anak Kelas 1 SD Acakan, Membuat Geram Sang Ibu



Irman Garmana

Selasa, 9 Agustus 2022 | 08:53 WIB

Video viral anak kelas 1 SD dipotong rambut oleh gurunya.* (Tiktok @reva.juliany)

INSIDEN24.COM - Beredar video orangtua murid merasa tidak terima dengan oknum Guru yang cukur rambut anaknya tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

Dikutip dari video unggahan akun Tiktok @reva.juliany, Senin 8 Agustus 2022. Memperlihatkan seorang ibu murka dengan mendatangi oknum guru di sekolahnya tersebut. Terlihat dalam video, seorang guru perwakilan pihak sekolah berusaha berkelit atas aksi guru yang telah memotong rambut anaknya itu, sehingga membuat marah sang ibu anak itu.

“Itu anak kecil ibu, anak umur 7 tahun, baru kelas satu, Kepala sekolahnya mana,” ujar ibu yang marah-marah kepada perwakilan pihak sekolah. Banyak yang menyayangkan aksi tersebut karena guru yang melakukan pangkas rambut begitu asal-asal cara memotong rambutnya. Padahal, diketahui dari beberapa foto yang diunggah sebelum dipotong, rambut anak tersebut sangat rapi walaupun terkesan panjang.

Guru yang mewakili pihak sekolah terlihat agak kesulitan menyampaikan alasan, dikatakan bahwa pemberitahuan sudah disampaikan 10 hari sebelumnya. Dan pencukuran rambut dilakukan atas dasar keluhan yang disampaikan oleh teman-teman sekelas si anak.

Namun ibu tersebut tidak menerima pemberitahuan yang dikatakan, padahal pihak sekolah memiliki nomor teleponnya.

“Kenapa digituin karena teman-temannya sudah pada komplain mama” jawab oknum Guru.

“Kenapa teman-temannya yang komplain, ada nomer saya ibu” Kata Ibu anak itu sambil berteriak marah.

“Tadi pagi udah saya merapikan poninya sedikit tapi saya terima ok, tapi dirapihin bu bukan diginin,” lanjut ibu anak itu.

Ibu dari anak tersebut tampak tidak terima dengan penjelasan guru yang menjadi alasan rambut anaknya dipangkas tak beraturan.

Sontak netizen pun geram dengan oknum guru yang memotong rambut anaknya tanpa izin.

“Sakit banget liatnya, bunda sabra semoga AQ nya ga trauma ya Bun,” ucap netizen.

“Bener sih kata mamanya kan ada nomer saya harus konfirmasi dulu,” saran netizen.

“Guru yg baik tolong nggak cuma ilmu aja yg di share di sekolah, tp ajarkan adab dan rasa kemanusiaan juga,” sindir netizen.

Dilihat dari video unggahan berikutnya, menampilkan sang anak yang tampak kurang sehat dengan rambut yang tidak beraturan setelah kejadian tersebut.

Menurut keterangan pada video, biasanya pulang sekolah pukul 15.00 WIB, namun karena kejadian tersebut maka sang anak sudah pulang lebih awal. Sang ibu pun merasa sakit hati.

Pihak sekolah sudah meminta maaf atas kejadian tersebut dan sang ibu sudah menerima maaf. Namun yang sangat disayangkan mungkin akan ada trauma yang cukup dalam dalam diri sang anak akibat kejadian yang menyimpannya.

Saat ini ibu dari orang tua sang anak sedang memproses kepindahan sekolah anaknya dan berfokus kepada pemulihan mental sang anak agar mau bersekolah kembali.

Belum diketahui secara pasti kejadian itu terjadi dimana, namun banyak yang beranggapan kejadian itu di Kawasan Bandung, Jawa Barat.***

Editor: Purpur Purnama

Sumber: <https://www.insiden24.com/insiden/pr-3964093604/oknum-guru-cukur-rambut-anak-kelas-1-sd-acak-acakan-membuat-geram-sang-ibu?page=2>

Pemaksaan Jilbab di Sekolah Negeri, JPPI: Kelalaian Monitoring



Syifa Arrahmah Kamis, 4 Agustus 2022 | 17:30 WIB

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. (Foto: Istimewa)

Jakarta, NU Online Kasus pemaksaan jilbab kepada siswi di sekolah negeri kembali terulang. Terbaru, seorang siswi di SMA Negeri Banguntapan 1, Bantul, Yogyakarta dipaksa mengenakan jilbab oleh gurunya hingga siswi tersebut mengalami depresi dan memutuskan pindah sekolah. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyayangkan kasus semacam itu kembali terjadi di sekolah negeri. Menurutnya hal itu terjadi lantaran kurangnya monitoring dari pemerintah.

“Pemerintah tidak bisa sekadar menerbitkan peraturan tapi juga harus diimbangi dengan monitoring apakah peraturan yang dikeluarkan sudah diterapkan sekolah atau tidak,” kata Ubaid saat dihubungi NU Online via telepon, Kamis (4/8/22). Monitoring, menurutnya, menjadi salah satu upaya pengimplemetasian peraturan yang telah dibuat. Jika pemerintah tidak melakukannya, maka peraturan yang ada hanya seolah-olah saja. Baca Juga: Isu Jilbab di Indonesia, Turki, dan Mesir

“Sehingga tidak kemudian setelah kejadian meledak lalu seakan-akan kita (pemerintah) sudah ini-itu, padahal faktanya belum melakukan apa-apa,” tegas dia. Ubaid berpendapat kasus pemaksaan jilbab terjadi lantaran peraturan pemerintah yang telah ada tidak dipahami betul oleh ekosistem sekolah. Sebab, ketika peraturan dibuat, maka aspek tenaga pendidik dan kependidikan juga harus dibangun atau dikembangkan.

“Karena ini kasus yang bukan kali pertama, maka soal capacity building (pengembangan kapasitas)

itu tidak bisa ditawar baik untuk pemerintah daerah, guru, tenaga pendidik, harus memahami soal pemahaman sekolah yang inklusif itu seperti apa,” jelas Ubaid. Sementara itu, kasus dugaan pemaksaan penggunaan jilbab di SMA Negeri 1 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta kini tengah diselidiki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta.

Secara aturan, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah tentunya harus mencerminkan replika kebhinekaan. Karenanya, pemaksaan pemakaian busana atau seragam atas kekhususan agama kepada siswi itu tidak diperbolehkan.

Hal itu sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam aturan itu, pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua/wali siswa.

Pewarta: Syifa Arrahmah

Editor: Muhammad Faizin

TAGS: jilbab Yogyakarta Sekolah

Sumber: <https://www.nu.or.id/nasional/pemaksaan-jilbab-di-sekolah-negeri-jppi-kelalaian-monitoring-A5TsL>

Jalur Mandiri Jangan Dipukul Rata sebagai Ladang Korupsi



MetroTV • 22 Agustus 2022 12:45

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rektor Universitas Negeri Lampung (Unila), Karomani, sebagai tersangka. Karomani terjerat kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Unila Tahun Akademik 2022.

Karomani ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Tak hanya Karomani, 7 orang lainnya yang diduga terlibat ikut ditangkap KPK.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan (JPPI) Ubaid Matraji menilai jalur ujian mandiri yang digelar tertutup rawan menjadi pintu masuk bagi praktik jual beli kursi di perguruan tinggi. Ubaid menyarankan jalur-jalur mandiri yang tertutup sebaiknya dihapus.

Ketua Forum Rektor Indonesia, Punut Mulyono, berpendapat kejadian di Unila sebaiknya tidak dipukul rata. Menurutnya, jangan menilai seluruh jalur masuk mandiri di perguruan tinggi menjadi ladang korupsi.

“(Kebijakan sumbangan) diumumkan sebelumnya. Bahwa kalau diterima, Anda menyumbang prodi ini sekian rupiah, semacam itu,” kata Punut dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia, *Metro TV*, Senin, 22 Agustus 2022.

Sebab, tujuan dari pemberian uang sumbangan dalam jalur masuk mandiri sudah diatur untuk pengembangan institusi, bukan kepentingan pribadi. Jalur ini memiliki aturan tertulis dan disepakati secara legal oleh fakultas dan universitas.

“Iya kalau penyimpangan itu ada, itu sekali lagi ada pada pelaksana ya. Pada pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan itu,” kata dia.

Punut pun setuju dengan dilakukannya audit terhadap pelaksanaan jalur masuk mandiri perguruan tinggi. Audit tersebut dinilai dapat mengurangi terjadinya praktik-praktik penyelewengan.

“Saya sepakat sekali ketika sistem ini akan diaudit. Akan diperiksa kemudian didata bagaimana agar tidak ada peluang-peluang atau praktik-praktik yang memungkinkan pimpinan perguruan tinggi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan,” ucap Punut. **(Annisa Ambarwaty)**

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/4bax78ZN-jalur-mandiri-jangan-dipukul-rata-sebagai-ladang-korupsi>

Lagi, Pemaksaan Jilbab di Sekolah Negeri, JPPI: Harus Diimbangi dengan Monitoring



Administrator

Kamis, 4 Agustus 2022 | 20:45 WIB

foto/net

MoeslimChoice. Kembali kasus pemaksaan jilbab kepada siswi di sekolah negeri terulang. Kali ini, terjadi di SMA Negeri Banguntapan 1, Bantul, Yogyakarta, dimana seorang siswi dipaksa mengenakan jilbab oleh gurunya hingga siswi tersebut mengalami depresi dan memutuskan pindah sekolah.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyayangkan kasus semacam itu kembali terjadi di sekolah negeri. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran kurangnya monitoring dari pemerintah.

“Pemerintah tidak bisa sekadar menerbitkan peraturan, tapi juga harus diimbangi dengan monitoring, apakah peraturan yang dikeluarkan sudah diterapkan sekolah atau tidak,” kata Ubaid Matraji, seperti dilansir dari NU Online, Kamis (4/8/22).

Menurutnya, monitoring menjadi salah satu upaya pengimplemetasian peraturan yang telah dibuat. Jika pemerintah tidak melakukannya, maka peraturan yang ada hanya seolah-olah saja.

“Sehingga tidak kemudian setelah kejadian meledak lalu seakan-akan kita (pemerintah) sudah ini-itu, padahal faktanya belum melakukan apa-apa,” tegas dia.

Ubaid berpendapat, kasus pemaksaan jilbab terjadi lantaran peraturan pemerintah yang telah

ada tidak dipahami betul oleh ekosistem sekolah. Sebab, ketika peraturan dibuat, maka aspek tenaga pendidik dan kependidikan juga harus dibangun atau dikembangkan.

“Karena ini kasus yang bukan kali pertama, maka soal capacity building (pengembangan kapasitas) itu tidak bisa ditawarkan, baik untuk pemerintah daerah, guru, tenaga pendidik, harus memahami soal pemahaman sekolah yang inklusif itu seperti apa,” jelas Ubaid.

Sementara itu, kasus dugaan pemaksaan penggunaan jilbab di SMA Negeri 1 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, kini tengah diselidiki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta.

Secara aturan, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah tentunya harus mencerminkan replika kebhinekaan. Karenanya, pemaksaan pemakaian busana atau seragam atas kekhususan agama kepada siswi itu tidak diperbolehkan.

Bahkan, sekolah juga tidak diperkenankan menjual seragam kepada siswanya. Hal itu sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam aturan itu, pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua/wali siswa. **[mt]**

Editor: Melati

Sumber: <https://www.moeslimchoice.com/pendidikan/pr-9677316355/Lagi-Pemaksaan-Jilbab-di-Sekolah-Negeri-JPPI-Harus-Diimbangi-dengan-Monitoring>

Nadiem Miliki Tim Bayangan, JPPI: Bahaya Pengelolaan Kementerian Secara Sembunyi-sembunyi



Selasa, 27 September 2022 13:38 WIB

Penulis: Fahdi Fahlevi

Editor: Johnson Simanjuntak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan dirinya memiliki tim yang membantu merumuskan produk kebijakan Kemendikbudristek.

Tim tersebut, kata Nadiem, berjumlah 400 orang yang bekerja sebagai product manager, software engineer, dan data scientist.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai pengelolaan kebijakan kementerian dengan model tersebut dapat membahayakan.

“Bahaya ini, pengelolaan kementerian ko dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan pakai tim bayangan pula,” ujar Ubaid kepada Tribunnews.com, Selasa (27/9/2022).

Menurut Ubaid, tim bayangan ini dapat menimbulkan pertanyaan dari publik. Mengingat saat ini Kemendikbudristek memiliki sumber daya manusia (SDM) yang melimpah. Dirinya menilai SDM Kemendikbudristek sudah sangat berkualitas.

“Publik bertanya-tanya, ada apa ini dengan SDM di Kemendikbud? Bukannya sudah banyak dan melimpah. Bahkan tidak sedikit pula yang sudah profesor dan doktor. Apa mereka enggak bisa kerja, lalu harus pake tim bayangan?” ucap Ubaid.

Ubaid menilai pembentukan tim bayangan ini menunjukkan bahwa Nadiem tidak mempercayai ASN di Kemendikbudristek. Pengelolaan Kemendikbudristek, menurut Ubaid, harus dilakukan secara transparan oleh Nadiem.

“Punya tim komplet malah membentuk bayangan. Mengelola kekuasaan tidak boleh arogan begitu. Semua harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tutur Ubaid.

“Bikin program apa, sumber dananya dari mana melibatkan siapa, dampaknya bagaimana. Itu semua harus partisipatif dan inklusif, jangan dilakukan dengan suka-suka tanpa dasar dan pertanggung jawaban,” tambah Ubaid.

Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan dirinya memiliki tim yang membantu merumuskan produk kebijakan Kemendikbudristek.

Tim tersebut, kata Nadiem, berjumlah 400 orang yang bekerja sebagai product manager, software engineer, dan data scientist.

“Kami sekarang memiliki 400 orang product manager, software engineer, dan data scientist yang bekerja sebagai tim yang melekat untuk kementerian,” ujar Nadiem dalam video di akun instagram resminya, @nadiemmakarim yang dikutip pada Rabu (21/9/2022).

Nadiem mengatakan tim tersebut bukan vendor untuk kementerian.

Meski begitu, Nadiem mengatakan setiap ketua tim memiliki posisi yang sama dengan Direktur Jenderal pada direktorat yang ada di Kemendikbudristek.

“Setiap product manager dan ketua tim posisinya hampir setara dengan direktur jenderal yang beberapa di antaranya hadir di sini,” ungkap Nadiem.

im ini, kata Nadiem, berperan sebagai rekan bertukar pikiran dalam mendesain pendidikan di Indonesia.

“Jadi kementerian akan menyampaikan arahan kepada mereka dan tim produk akan mengatakan, ‘Sebentar, kami akan cek dulu ke para guru dan melakukan survei untuk memvalidasi yang kami kerjakan’,” jelas Nadiem.

Menurut Nadiem, Kemendikbudristek merancang paradigma baru terkait desain yang berpusat pada pengguna seperti yang dipelajarinya di sektor teknologi.

Sumber: <https://m.tribunnews.com/nasional/2022/09/27/nadiem-miliki-tim-bayangan-jppi-bahaya-pengelolaan-kementerian-secara-semunyi-semunyi?page=2>

JPPI: Tim Bayangan Nadiem Turunkan Kapabilitas SDM Kemendikbud Syifa Arrahmah



Jumat, 30 September 2022 | 15:30 WIB

Jakarta, NU Online Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mempertanyakan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) di Kemendikbud-ristek pasca dibentuknya tim bayangan oleh Mendikbud Nadiem Makarim. “Kemendikbud kan sudah punya SDM yang sangat melimpah artinya apakah mereka tidak qualified (memenuhi syarat) semuanya,” ujarnya kepada NU Online, Jumat (30/9/2022). Baca Juga: Kritik Tim Bayangan Nadiem, JPPI: Buat Program Jangan Semena-mena Ubaid menyebut langkah Nadiem menciptakan tim tersebut sama seperti menurunkan kualitas SDM di Kemendikbud-ristek. “Jangan salah lho, SDM kemendikbud itu diisi oleh profesior, doktor, dan para ahli, kalau mendikbud saja tidak percaya sama tim nya sendiri bagaimana masyarakat bisa percaya,” kritiknya.

Ia berpendapat, jika pembentukan tim bayangan dalam konteks akselerasi transformasi teknologi (govtTech) di dunia pendidikan, Lantas apa sebenarnya fungsi Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan yang lebih dikenal dengan Pustekkom Kemendikbud.

“Jika itu terkait AI atau teknologi kita juga punya markas Pustekkom, segala macam informasi seharusnya sudah terpenuhi, ada rumah belajar, dan lainnya. Itu kan dibawah kewenangan tim internal kemendikbud,” terang dia.

Selain itu, Ubaid menilai alasan Nadiem Makarim membentuk tim bayangan sangat kontraproduktif dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya, seperti kualifikasi tenaga pendidik. Pembentukan itu juga seolah tidak percaya dengan kemampuan aparatur sipil negara (ASN) yang sudah memiliki pengalaman jauh lebih banyak. “Kontraproduktif, dia bilang gelar tidak menjamin tapi di sisi lain Kemendikbud mendorong orang melakukan kualifikasi guru dan sebagainya.

Bahkan lebih memercayakan kepada 400 orang di tim bayangan tersebut,” terangya kecewa. Lebih lanjut, ia juga berpendapat pengelolaan kebijakan kementerian dengan model tersebut dapat membahayakan negara. Mengingat banyaknya data peserta didik seluruh Indonesia terhimpun di Kemendikbud-ristek.

“Kita juga harus memikirkan soal data di kemendikbud, itu kan kebanyakan data rahasia semua peserta didik (Dapodik), kalau itu diserahkan kepada tim bayangan itu potensial diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah tentu membahayakan negara,” tegasnya.

“Jadi, harus jelas dampaknya seperti apa, tujuannya apa, hasilnya bagaimana. Itu semua perlu dipikirkan,” tandas Ubaid. Salah memilih padanan kata Sementara menurut Mendikbudristek Nadiem Makarim tim bayangan yang ia sebut ‘shadow organization’ itu terlibat dalam mendesain produk kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbudristek. Ia menyebut organisasi itu bekerja sama dengan setiap Dirjen di Kemendikbud Ristek untuk mengimplementasikan kebijakan melalui platform teknologi. Ia mengakui dirinya salah memilih padanan kata dengan menyebutnya tim bayangan untuk pihak yang ia maksud sebagai vendor.

Ia menyebutnya dengan istilah ‘shadow organization’ saat hadir dalam United Nations Transforming Education Summit di Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). “Dalam Kemendikbudristek kami, tidak memperlakukan mereka sebagai vendor, walaupun secara kontraktual sudah jelas mereka vendor. Seluruh tim kita adalah tim permanen yang merupakan suatu vendor yang dirumahkan di bawah anak perusahaan Telkom,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI pada Senin (26/9/2022).

Pewarta: Syifa Arrahmah Editor: Muhammad Faizin TAGS: kemendikbud SDM Nadiem

Sumber: <https://www.nu.or.id/nasional/jppi-tim-bayangan-nadiem-turunkan-kapabilitas-sdm-kemendikbud-oHTZF>

Ketua JPPI: PTN Badan Hukum Menentang Amanah UUD 45



Syifa Arrahmah

Senin, 12 September 2022 | 18:30 WIB

PTN Badan Hukum Menentang Amanah UUD 45 Jakarta, NU Online Jenjang Pendidikan Tinggi tidak luput dari Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Dalam RUU Sisdiknas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong kampus negeri bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).

Hal ini sesuai kebijakan Kampus Merdeka yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.

Namun, menurut Ketua Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji, dorongan tersebut sangat bertentangan dengan amanah Undang Undang Dasar 1945. Hal ini lantaran dinilai cenderung melahirkan komersialisasi pendidikan dan mengecilkan peran atau kewajiban negara atas pendidikan.

“Status PTN BH inilah yang menjadi inti permasalahan. Sebab di beberapa kampus yang sudah berstatus menjadi badan hukum biayanya cenderung mahal, rata-rata dijangkau oleh kalangan mampu. Itu jelas bertentangan dengan amanah UUD 45,” katanya, kepada NU Online, Senin (12/9/2022).

Menurutnya, PTN BH dan PT negeri secara umum tidak memberikan ruang bagi mahasiswa miskin dan kurang cerdas. Kuota 20 persen bagi siswa miskin pada praktiknya bagi mereka yang cerdas alias pintar.

Padahal, lanjut dia, pendidikan adalah alat yang akan mengubah nasib individu untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Dengan demikian, ia tidak mewarisi kemiskinan kultural. “Di sini jelas, ya. Kalo PT itu hanya bisa diakses oleh kalangan atas, berarti kan tidak berkeadilan,” ujar Ubaid. Seperti diketahui, RUU Sisdiknas mengusulkan semua PTN akan berbentuk PTN BH untuk mengakselerasi transformasi layanan dan kualitas pembelajaran.

RUU tersebut juga mengharuskan Perguruan Tinggi Negeri memfasilitasi mahasiswa kurang mampu, dalam pasal 42 ayat 2. Disebutkan, “Perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencari, menjaring, dan memfasilitasi calon mahasiswa baru yang kurang mampu secara ekonomi untuk mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru,” Lalu pada Pasal 42 Ayat 3 disebutkan, “Perguruan tinggi negeri wajib menerima Mahasiswa baru yang kurang mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 20 persen (dua puluh persen) dari Mahasiswa yang diterima”. Selanjutnya pada Pasal 42 Ayat 4 ditulis, “Mahasiswa baru yang kurang mampu secara ekonomi dan sudah diterima oleh perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat,”.

Selain penerimaan kelompok calon mahasiswa baru yang kurang mampu secara ekonomi perguruan tinggi negeri harus menerima mahasiswa baru tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon Mahasiswa.

Namun, faktanya PTN BH kerap kali berlabel kampus elite yang mahal dan tidak terjangkau masyarakat luas. Sebab, terang Ubaid, tidak sedikit mahasiswa yang sudah lulus perguruan tinggi negeri mengundurkan diri atau harus membayar mahal. “Kebijakan biaya kuliah yang tinggi membuat PTN BH cenderung kurang bersahabat untuk mahasiswa dari keluarga ekonomi bawah,” terangnya.

Pewarta: Syifa Arrahmah Editor: Muhammad Faizin

Sumber: <https://www.nu.or.id/nasional/ketua-jppi-ptn-badan-hukum-menentang-amanah-uud-45-A10e8>

SMAN 2 Depok Diskriminasi Siswa Kristen, Pengamat: Kemendikbudristek Tahu Dosa Tapi Belum Tobat



Ilham Pratama Putra · 07 Oktober 2022 16:08

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji.

Jakarta: Siswa beragama Kristen di SMAN 2 Depok mendapat diskriminasi dengan tidak mendapat ruang kelas untuk menggelar bimbingan rohani. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyebut hal itu merupakan bentuk intoleransi.

Ubaid mengatakan hal itu merupakan salah satu dari tiga dosa pendidikan, yakni intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Dia heran Kemendikbudristek sering menggaungkan tiga dosa di dunia pendidikan tapi belum ada langkah konkret untuk mengakhirinya.

“Meski sudah tahu melakukan dosa, tapi belum juga bertobat,” kata Ubaid kepada Medcom.id, Jumat, 7 Oktober 2022. Ubaid meminta pemerintah lebih serius menanggapi kasus diskriminasi tersebut. Dia menyebut bila dibiarkan kejadian serupa akan terus terulang.

“Pemerintah pusatnya enggak serius, pemerintah daerahnya abai, ya klop deh. Akibatnya kejadian diskriminasi masih terus terulang,” kata Ubaid. Dia menyebut pemerintah pusat dan daerah harus lebih intens berkolaborasi. Utamanya, bagi pemerintah pusat, tidak hanya membuat regulasi terkait pencegahan tindakan diskriminasi di sekolah. “Ya duduk, ya bekolaborasi saling menguatkan. Pemerintah pusat jangan hanya bikin kebijakan lalu lepas tangan,” tegas dia.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/xkEjo07K-sman-2-depok-diskriminasi-siswa-kristen-pengamat-kemendikbudristek-tahu-dosa-tapi-belum-tobat>

Koalisi Pendidikan Nasional: “Menolak RUU Sisdiknas Yang Tidak Partisipatif”



KOALISI PENDIDIKAN NASIONAL

Koalisi Pendidikan Nasional (KPN) yang terdiri dari unsur mahasiswa, guru, pelajar, akademisi, pemerhati pendidikan, pegiat pendidikan masyarakat adat, pegiat pendidikan alternatif serta organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap pendidikan di Indonesia menolak RUU Sisdiknas yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (“Kemendikbud Ristek”) sejak Januari 2022 lalu. Pembahasan RUU yang dimaksudkan menggabungkan 3 UU yang mencakup UU 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tersebut tidak membuka ruang partisipasi yang bermakna bagi publik dan semangatnya bertentangan dengan pemenuhan standar-standar hak atas pendidikan.

PERMASALAHAN RUU SISDIKNAS

Koalisi Pendidikan Nasional mencatat beberapa permasalahan yang dihadirkan dari RUU Sisdiknas ini sebagai berikut:

Pertama, sejak awal sikap pemerintah yang menolak membuka draf RUU Sisdiknas telah melanggar asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU P3, di mana Pasal 88 UU P3 dan Pasal 171 Perpres 87/2014 mewajibkan pemerintah mempublikasikan draf RUU sejak tahap perencanaan dan penyusunan. Kemudian, hal tersebut berdampak pada proses perencanaan dan penyusunan RUU Sisdiknas menjadi tidak partisipatif dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 96 UU P3. Fakta bahwa beberapa pemangku kepentingan mengeluhkan terbatasnya ruang yang diberikan pemerintah dalam beberapa uji

publik yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaannya berpotensi manipulatif alih-alih kolaboratif jika merujuk pada teori partisipasi Arnstein. Hal ini juga menjadi catatan buruk dan pola keberulangan bagi Pemerintah dan DPR dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Nasib serupa dapat dilihat pada pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja, UU Ibu Kota Negara hingga RKUHP.

Kedua, KPN menilai bahwa draf RUU Sisdiknas yang diusung pemerintah saat ini tidak sejalan dengan prinsip pemenuhan hak atas pendidikan mencakup Ketersediaan, Keterjangkauan, Kelayakan, dan Keberterimaan (Tomasevski, dalam UNESCO, 2019). Seharusnya pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara dapat mengakses pendidikan berkualitas. Pendidikan adalah hak konstitusional warga negara dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Bergesernya semangat perubahan yang diusung melalui RUU Sisdiknas mungkin terjadi mengingat proses perencanaan dan penyusunannya tidak transparan dan membuka ruang partisipasi bermakna bagi publik. Jika dipertahankan, bukan hanya tidak menyelesaikan permasalahan pendidikan nasional di Indonesia, tetapi justru berpotensi memperparahnya. Sehingga Draft RUU Sisdiknas yang ada saat ini belum mencerminkan hal-hal tersebut, sebab masih banyak masalah-masalah di dalam RUU tersebut yang perlu dicermati.

DESAKAN KOALISI PENDIDIKAN NASIONAL

Melihat beberapa permasalahan yang dihadirkan oleh RUU Sisdiknas tersebut, dengan ini Koalisi Pendidikan Nasional menyatakan menolak RUU Sisdiknas yang diusung pemerintah sejak Januari 2022 lalu dan mendesak Presiden RI dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk membuka partisipasi bermakna pada masyarakat dalam tahap awal perencanaan RUU untuk merumuskan ulang urgensi pengaturan dan arah perbaikan pendidikan nasional yang sejalan dengan konsepsi hak atas pendidikan.

Hormat Kami,

Koalisi Pendidikan Nasional (KPN)

Narahubung:

- Jihan Fauziah Hamdi (0812 8467 6829)
- Ari Hardianto (0856 9357 7059)
- M. Charlie Meidino Albajili (0812 2402 4901)
- Dhitta Puti Sarasvati (0812 8411 1811)

Koalisi Pendidikan Nasional (KPN):

1. Aliansi Peduli Pendidikan;
2. AMAR Law Firm;

3. BEM Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang;
4. BEM Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singaperbangsa Karawang;
5. BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. BEM Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. BEM Universitas Negeri Jakarta;
8. BEM Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
9. BEM Universitas Pendidikan Indonesia;
10. BEM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
11. Federasi Guru Independen Indonesia (FGII);
12. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI);
13. Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI);
14. KOPEL Perwakilan Jabodetabek;
15. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta;
16. Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID);
17. Perhimpunan Pendidikan Guru (P2G);
18. Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO);
19. Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI);
20. Sokola Institute;
21. Vox Populi Institute Indonesia;
22. Anggi Afriansyah (Peneliti Pendidikan BRIN);
23. Dhitta Puti Sarasvati (Pegiat Pendidikan)
24. Doni Koesoema A (Pemerhati Pendidikan);
25. Dudung Abdul Qodir (PGRI);
26. Dr. Mampuono, S.Pd., M.Kom. (Perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas);
27. Fauzi Abdullah (Dosen UNJ);
28. Henny Supolo Sitepu (Yayasan Cahaya Guru);
29. Indra Charismiadji (HIPPER Indonesia);
30. Jimmy Paat (Pemerhati Pendidikan);
31. Karina Adistiana (Psikolog Pendidikan);

32. Ki Darmaningtyas (Pengamat Pendidikan);
33. M. Abdullah Darraz (Pemerhati Sosial);
34. Mu'min Boli (Mahardika Institute)
35. Pangeran Gusti Surian (Ketua Umum PTIC);
36. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.H., M.H., MSI. (Guru Besar UPI);
37. Prof. Dr. H. Said Hamid Hasan, M. A. (Guru Besar UPI);
38. Rakhmat Hidayat (Dosen Sosiologi UNJ);
39. Rizky Arifianto (Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Banten)
40. Sari Wijaya (YAPPIKA);
41. Setiawan Agung Wibowo (Pegiat Pendidikan).

Sumber: <https://bantuanhukum.or.id/koalisi-pendidikan-nasional-menolak-ruu-sisdiknas-yang-tidak-partisipatif/>

JPPI Apresiasi Program Pendidikan MIND ID



Jumat, 25 November 2022 | 16:39 WIB

Dimas Ryandi

JawaPos.com - Pemerintah dan industri harus bergandengan tangan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Peran industri akan sangat membantu pemerataan pendidikan di daerah.

Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, pendidikan harus jadi sektor prioritas dan strategis di daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan juga daerah harus menjadikan pendidikan sebagai prioritas.

“Harus dikembangkan skema yang lebih strategis termasuk melibatkan industri. Pembiayaan pendidikan penting untuk mendapatkan dukungan dari industri melalui public private partnership,” jelas Ubaid dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Jumat (25/11).

Oleh karena itu, Ubaid mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Grup MIND ID dengan mendirikan Akademi Komunitas Industri Pertambangan Bukit Asam (AKIPBA). “Dalam rangka peningkatan akses dan kualitas pendidikan ini sangat baik,” jelas Ubaid.

Namun menurut Ubaid masih ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan pendidikan di daerah. Ubaid berharap, dunia usaha bisa mendukung akses terutama bagi kelompok yang selama ini masih tertinggal, pengembangan kualitas, dan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan.

Menurutnya, penting juga peran industri dalam mengembangkan life long learning di luar pendidikan formal di sekolah. Misalnya literasi digital, mengembangkan pendidikan berbasis komunitas, pemberdayaan perempuan, dan pendampingan anak-anak korban kekerasan.

MIND ID melalui anggotanya, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), mendirikan AKIPBA yang merupakan perguruan tinggi sebagai bentuk sinergitas dan komitmen Grup MIND ID untuk menyelenggarakan institusi pendidikan pertambangan yang unggul dan berkontribusi secara aktif dalam industri pertambangan nasional.

Selain itu, memperluas akses dan pemerataan pendidikan tinggi berbasis industri pertambangan bagi masyarakat Indonesia, serta menyiapkan sumber daya manusia berakhlak mulia, terampil di bidang industri pertambangan dan memiliki daya saing di pasar global.

Terdapat 3 program studi (Diploma 1) di AKIPBA, yaitu Teknik Pengoperasian Alat Tambang (T-POT), Teknik Perawatan Alat Tambang (T-PAT), dan Teknik Pengolahan Hasil Tambang Mineral dan Batu Bara (T-PHT). Program studi Teknik Pengoperasian Alat Tambang menyiapkan lulusannya sebagai Operator Pengoperasian Mesin dan Peralatan Pertambangan.

Sedangkan program studi Teknik Perawatan Alat Tambang menyiapkan lulusannya sebagai Operator Pemeliharaan Alat Tambang yang memiliki kompetensi dalam bidang pemeliharaan alat tambang. Adapun program studi Teknik Pengolahan Hasil Tambang Mineral dan Batu Bara menyiapkan lulusannya sebagai Operator Mesin Pengolahan Hasil Tambang.

Di bawah naungan Yayasan Keluarga Besar Bukit Asam (Yakasaba), seluruh peserta didik di AKIPBA mendapat beasiswa penuh hingga lulus. Hingga saat ini, Mahasiswa di AKIPBA sudah sebanyak 291 orang (dari tahun 2019-2022) yang seluruhnya berasal dari Grup MIND ID. Dari 291 orang tersebut, total peserta didik yang telah lulus sebanyak 245 orang dan yang sedang aktif menjalani perkuliahan sebanyak 46 orang.

Di sisi lain, Kepala Divisi Institutional Relations MIND ID, Niko Chandra, mengatakan langkah konkret ini diambil sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam pemenuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk memenuhi kebutuhan industri pertambangan. Harapannya setiap lulusan mampu memberikan kontribusi positifnya di dunia pertambangan, sesuai dengan prinsip good mining practice.

“Grup MIND ID mendukung hadirnya pendidikan yang berkualitas di tengah masyarakat, harapannya lulusan terbaik dapat memberi kontribusi positif pada industri pertambangan ke depannya. Tidak hanya menghadirkan AKIPBA, namun Grup MIND ID juga menyediakan beasiswa penuh bagi mereka yang lulus seleksi,» tutur Niko.

Lulusan setiap program studi, lanjut Niko, telah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja di bidang pertambangan. Program studi Teknik Pengoperasian Alat Tambang menyiapkan lulusannya sebagai operator pengoperasian mesin dan peralatan pertambangan.

Program studi Teknik Perawatan Alat Tambang menyiapkan lulusannya sebagai operator pemeliharaan alat tambang yang memiliki kompetensi dalam bidang pemeliharaan alat tambang. Adapun program studi Teknik Pengolahan Hasil Tambang Mineral dan Batu Bara menyiapkan lulusannya sebagai operator mesin pengolahan hasil tambang.

“MIND ID mendorong semangat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan Budaya BUMN AKHLAK, terutama pada poin Kompeten, Terus Belajar dan mengembangkan Kapabilitas. MIND ID berharap banyak masyarakat yang memanfaatkan Beasiswa ini terutama untuk mereka yang membutuhkan,» pungkas Niko.

Editor: Dimas Ryandi

Sumber: <https://www.jawapos.com/pendidikan/01421096/jppi-apresiasi-program-pendidikan-mind-id>

Seribuan Anak Solo Disebut Putus Sekolah, Disdik: Kami Verifikasi Dulu Datanya



Kamis, 24 November 2022 - 16:07 WIB
Penulis: Gigih Windar Pratama | Editor: Suharsih

SOLOPOS.COM - Ilustrasi sekolah. (Freepik)

Solopos.com, SOLO — Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Solo Dian Rineta mengatakan sedang memverifikasi data jumlah anak yang putus atau tidak pernah sekolah yang disebut mencapai lebih dari 1.000 anak.

Menurut Dian, perlu ada pembaruan data dan pengecekan di lapangan terkait data-data yang ada. Hal itu dikatakan Dian saat ditemui Solopos.com di kantornya, Kamis (24/11/2022).

PromosiCucok Bun! Belanja Makeup di Tokopedia Sekarang Bisa Dicoba Meski Lewat Online

Ia menyebut saat ini Disdik Solo sedang memperbarui data terkait jumlah anak putus sekolah ataupun yang tidak pernah sekolah. Data terakhir yang saat ini tersedia adalah data 2019 yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Solo.

“Kami sedang melakukan pembaruan data dari jumlah siswa yang tidak sekolah ataupun yang putus sekolah, karena data yang kami punya itu data dari 2019. Caranya dengan berkoordinasi dengan Kelurahan di seluruh Kota Solo, kita berikan datanya lalu nanti diverifikasi,” ujar Dian.

Verifikasi juga diperlukan Disdik Kota Solo karena data yang dikeluarkan saat ini merupakan data dari BPS dan bukan dari Disdik Kota Solo ataupun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Sehingga, menurut Dian, perlu adanya pengecekan ulang di lapangan.

Baca Juga: Miris! Disdik Ungkap Ada 400-an Warga Kota Solo yang Tidak Pernah Sekolah

“Karena datanya yang mengeluarkan bukan dari Disdik Kota Solo ataupun Kementerian jadi perlu dilihat juga di lapangan seperti apa. Bisa jadi ada perbedaan data, karena faktor-faktor seperti siswa yang pindah ternyata belum di-update di data Disdukcapil atau BPS,” lanjut Dian.

Data Disdik Tak Terhubung ke Disdukcapil dan BPS Mengenai jumlah anak putus sekolah di Solo yang disebut mencapai 1.519 anak plus 400-an anak yang tidak pernah sekolah, Dian juga menyebut belum bisa memastikan apakah jumlah tersebut merupakan angka yang benar atau tidak.

“Sekali lagi jumlahnya kami belum bisa benar-benar memastikan karena data dari Disdik Kota Solo memang tidak terhubung dengan Disdukcapil atau BPS. Jadi kami perlu memastikan dulu, malah ada juga yang menyebut jumlahnya lebih dari 2.000, maka dari itu kami sedang lakukan verifikasi,” terangnya.

Baca Juga: Diperingati Setiap 25 November, Begini Sejarah Hari Guru Nasional Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Disdik Kota Solo, Abdul Haris Alamsyah, menyebut adanya 1.519 anak yang putus sekolah dan 400 anak yang tidak pernah sekolah. Meskipun menurut pendataan terbaru angka tersebut berkurang menjadi 1.000 anak yang putus sekolah.

Hal itu disampaikan Haris saat menjadi pemantik Forum Group Discussion (FGD) mengenai kesiapan Solo dalam mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun yang digelar Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) di Hotel Sarila, Solo, Rabu (23/11/2022).

Berbagai faktor menurut Abdul Haris menjadi penyebab adanya anak putus sekolah dan tidak sekolah, yakni faktor kemiskinan, akses ke sekolah yang sulit, kurangnya motivasi orang tua, dan kurangnya perhatian pemerintah.

Penulis: Gigih Windar PratamaSuharsih

Sumber: <https://soloraya.solopos.com/seribuan-anak-solo-disebut-putus-sekolah-disdik-kami-verifikasi-dulu-datanya-1481610>

Kacau, JPPI: Kasus Korupsi di Sekolah Meningkat 100% pada 2022



Ilham Pratama Putra • 30 Desember 2022 17:24

Siswa sedang membaca buku di kelas. Foto: BKHM

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan, tren kasus korupsi di sekolah terus meningkat. Hal ini disebabkan karakter guru hingga kepala sekolah yang bermasalah.

“Jadi dalam hal ini bukan karakter peserta didik yang dibenahi, tapi pelakunya kan gurunya, kepala sekolah,” ujar Ubaid di Jakarta, Jumat 29 Desember 2022. Seharusnya, kata dia, guru dan kepala sekolah mesti menjadi teladan para murid. Guru dan kepala sekolah adalah panutan

“Tapi malah mereka menumbuhkan iklim atau contoh yang tidak baik menjadi pribadi yang tidak berintegritas,” terang dia. Ia mengatakan, jika pada 2019, ditemukan 23 kasus korupsi di sekolah. Angkanya terus naik, sehingga didapatkan 29 kasus pada 2020, dan 44 kasus di 2021.

“Dan di 2022 naik 100 persen jadi 93 kasus,” terang Ubaid. Ia mengatakan kenaikan jumlah kasus korupsi di sekolah ini bisa saja kembali meningkat 100 persen di tahun 2023. Apabila integritas sekolah tidak dibenahi.

“Kalau 2023 juga naik 100 persen ini bisa saja akan naik menjadi 200 kasus,” tutupnya.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/8KyzElON-kacau-jppi-kasus-korupsi-di-sekolah-meningkat-100-pada-2022>

Guru Jadi Mayoritas Pelaku Kekerasan di Sekolah Sepanjang 2022



Reporter: Antara

Editor: Devy Ernis

Sabtu, 31 Desember 2022 21:20 WIB

Ilustrasi kekerasan seksual. Freepik.com

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan guru menjadi mayoritas pelaku **kekerasan** di sekolah. Dari data JPPI, sepanjang 2022, ada 117 kasus kekerasan di sekolah yang pelakunya adalah guru.

“Kalau dilihat dari pelaku dan korban kekerasan, peserta didik menjadi pelaku sedikit cuma 77 kasus sementara korban peserta didik 185 kasus, sementara guru mayoritas menjadi pelaku sebanyak 117 kasus,” ucapnya pada Jumat, 30 Desember 2022.

Artinya, yang menjadi korban kebanyakan adalah peserta didik dan yang menjadi pelaku adalah guru. Ia menambahkan kekerasan yang terjadi di sekolah tercatat sebanyak 105 kasus adalah kekerasan seksual. Sementara kekerasan fisik sebanyak 65 kasus dan non-fisik 24 kasus. Jumlah tersebut didapat JPPI berdasarkan laporan dari masyarakat dan media massa.

Ubaid juga mengatakan penerapan Undang-Undang pencegahan kekerasan seksual menjadi tugas yang masih harus di pantau bersama. Sebab, kata dia, kekerasan seksual banyak terjadi tidak hanya di sekolah namun juga di pesantren.

“Ada undang-undang pencegahan kekerasan seksual dan yang dibuat Kementerian Agama juga ada, itu masih menjadi PR besar dan juga pada kepala sekolah, madrasah dan banyak juga kasus-kasus seksual di pesantren,” ucapnya.

Selain tentang isu kekerasan di sekolah, Ubaid juga menyoroti penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang banyak dilakukan guru maupun kepala sekolah yang seharusnya menjadi teladan bagi lingkungan di sekolahnya.

“Karena yang melakukan ini adalah guru, bendahara, kepala sekolah. Mereka adalah yang harusnya menjadi teladan di lingkungan sekolah tapi nyatanya mereka menumbuhkan iklim atau suasana yg tidak baik,” ucap Ubaid.

Ia menilai dana bantuan tersebut banyak disalahgunakan terkait pengadaan infrastruktur, barang dan jasa non infrastruktur atau semacam konsultan dan pungutan liar atau pungli yang juga masih marak terjadi di lingkungan sekolah.

Ubaid mengatakan hal itu terjadi karena pihak komite sekolah tidak pernah dilibatkan secara langsung untuk publikasi dana bantuan yang seharusnya sudah diwajibkan dari Kemendikbudristek. “Padahal di Kemendikbud wajib tapi masyarakat sipil minta laporan dana BOS susah apalagi dipublikasikan,” ucap Ubaid.

Untuk itu, ia berharap pada 2023 mendatang ada perubahan tata kelola dana BOS dan pihak komite sekolah dilibatkan dalam transparansi aliran dana untuk kebutuhan sekolah.

Sumber: <https://tekno.tempo.co/read/1674413/guru-jadi-mayoritas-pelaku-kekerasan-di-sekolah-sepanjang-2022>

JPPI: 194 Kasus Kekerasan di Sekolah pada 2022 Didominasi Kekerasan Seksual



Ilham Pratama Putra · 30 Desember 2022 18:14

Ilustrasi kekerasan anak. Medcom

Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merekam tren kasus kekerasan di sekolah sepanjang 2022. Sebanyak 194 kasus kekerasan terjadi di sekolah tahun ini.

“Dan yang terbesar itu kekerasan seksual, jumlahnya 105 kasus,” ujar beber Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam Refleksi Akhir Tahun dan Outlook Pendidikan Indonesia 2023 di Jakarta, Jumat, 29 Desember 2022. JPPI juga mencatat kekerasan fisik dan non fisik yang terjadi di sekolah. Kekerasan fisik ditemukn 65 kasus.

“Untuk kekerasan non fisik ada 24 kasus,” beber Ubaid. Ubaid menyebut pihaknya memberikan perhatian khusus pada kasus kekerasan seksual. Terlebih, saat ini sudah ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Permendikbudristek soal kekerasan seksual.

“Tapi ini masih menjadi bunyi-bunyian saja di atas, belum mendarat di sekolah, di madrasah, pesantren, ini bisa dibayangkan 105 kasus artinya setiap bulan bisa dibayangkan jumlahnya berapa,” tutur dia.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ybDDdVpb-jppi-194-kasus-kekerasan-di-sekolah-pada-2022-didominasi-kekerasan-seksual>

Korupsi di Sekolah Sepanjang 2022, JPPI: 'Rekornya' Dipegang Dana BOS



Ilham Pratama Putra · 30 Desember 2022 17:35

Ilustrasi/Medcom.id

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengungkapkan, kasus korupsi masih terjadi di sekolah. Setidaknya, pada 2022 ditemukan 93 kasus korupsi di sekolah.

Ia menerangkan, celah besar kasus korupsi di sekolah ada pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kasus korupsi di sekolah didominasi oleh penyelewengan dana BOS.

“Selama 2022 rekornya itu dipegang dana BOS, ada 51 kasus,” kata Ubaid di Jakarta, Jumat 29 Desember 2022. Selanjutnya korupsi di sekolah ada pada penyelewengan dana infrastruktur sebanyak 17 kasus. Sedangkan non-infrastruktur ada delapan kasus.

“Pungli tujuh kasus, suap PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tiga kasus, dana Program Indonesia Pintar (PIP) dua kasus, dan sisanya kasus lain,» sebutnya.

Ia mengatakan kenaikan jumlah kasus korupsi di sekolah ini bisa saja kembali meningkat 100 persen di tahun 2023. Apabila integritas sekolah tidak dibenahi. “Kalau 2023 juga naik 100 persen ini bisa saja akan naik menjadi 200 kasus,” tutupnya.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/yKXPYD9K-korupsi-di-sekolah-sepanjang-2022-jppi-rekornya-dipegang-dana-bos>

Pemerintah Mesti Tambah Kuota Siswa untuk PPDB 2023



Ilham Pratama Putra · 30 Desember 2022 16:36

Foto (kiri ke kanan) Aktivis Suara Orangtua Peduli (SOP) Rahmi Yunita, Kornas JPPI Ubaid Matraji, Penggerak Pendidikan Perempuan Fitria Villa Sahara. Medcom.id/Ilham Pratama Putra

Jakarta: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 harus mampu menampung lebih banyak siswa di sekolah negeri. Saat ini, PPDB masih berfokus pada perluasan akses.

“Sistem zonasi ini penerapannya meluas ke lebih banyak daerah, akses sekolah negeri bergeser kepada anak-anak yang utamanya berdomisili lebih dekat dengan sekolah, tapi belum memperbanyak atau menambah kuota penerimaan siswa,» ujar aktivis Suara Orang Tua Peduli (SOP), Rahmi Yunita, dalam Refleksi Akhir Tahun dan Outlook Pendidikan Indonesia 2023 di Jakarta, Jumat, 29 Desember 2022.

Dia menganalogikan PPDB seperti bus yang bisa menampung seluruh siswa ke sekolah. Rahmi menyebut ke depan tak boleh ada lagi siswa tertinggal dan tidak mendapatkan bus.

“Kalau sekarang, busnya masih belum cukup bisa mengantar mereka untuk masuk ke sekolah negeri,” tutur dia. Rahmi berharap PPDB 2023 fokus pada pemenuhan hak atas pendidikan bagi semua. Dia mengingatkan PPDB 2023 tak boleh sekadar menyelesaikan masalah teknis seleksi.

“PPDB harus lebih berfokus pada upaya pemenuhan hak atas pendidikan bagi semua, ketimbang mengutak-atik teknis seleksi,” tegas dia.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/JKRPmG3b-pemerintah-mesti-tambah-kuota-siswa-untuk-ppdb-2023>

Terbanyak di Tahun 2022, Guru Jadi Pelaku Kekerasan di Sekolah



Dicky Aditya

Jumat, 30 Desember 2022 | 19:40 WIB

Ilustrasi kekerasan di sekolah. (Pixabay)

KORAN GALA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan guru menjadi mayoritas pelaku kekerasan di sekolah dengan jumlah 117 kasus selama 2022.

“Kalau dilihat dari pelaku dan korban kekerasan, peserta didik menjadi pelaku sedikit cuma 77 kasus sementara korban peserta didik 185 kasus, sementara guru mayoritas menjadi pelaku sebanyak 117 kasus,» ucapnya dalam konferensi pers Refleksi Akhir Tahun dan Outlook Pendidikan 2023 di Jakarta, Jumat 30 Desember 2022.

Artinya, yang menjadi korban kebanyakan adalah peserta didik dan yang menjadi pelaku adalah guru.

Ia menambahkan kekerasan yang terjadi di sekolah tercatat sebanyak 105 kasus adalah kekerasan seksual. Sementara kekerasan fisik sebanyak 65 kasus dan non fisik 24 kasus

Ubaid juga mengatakan penerapan Undang-Undang pencegahan kekerasan seksual menjadi tugas yang masih harus di pantau karena kekerasan seksual banyak terjadi tidak hanya di sekolah namun banyak juga terjadi di pesantren.

“Ada undang-undang pencegahan kekerasan seksual dan yang dibuat Kementerian Agama juga ada, itu masih menjadi PR besar dan juga pada kepala sekolah, madrasah dan banyak juga kasus-

kasus seksual di pesantren,” ucapnya.

Selain tentang isu kekerasan di sekolah, Ubaid juga menyoroti penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang banyak dilakukan guru maupun kepala sekolah yang seharusnya menjadi teladan bagi lingkungan di sekolahnya.

“Karena yang melakukan ini adalah guru, bendahara, kepala sekolah. Mereka adalah yang harusnya menjadi teladan di lingkungan sekolah tapi nyatanya mereka menumbuhkan iklim atau suasana yg tidak baik,» ucap Ubaid.

Ia menilai dana bantuan tersebut banyak disalahgunakan terkait pengadaan infrastruktur, barang dan jasa non infrastruktur atau semacam konsultan dan pungutan liar atau pungli yang juga masih marak terjadi di lingkungan sekolah.

Ubaid mengatakan hal itu terjadi karena pihak komite sekolah tidak pernah dilibatkan secara langsung untuk publikasi dana bantuan yang seharusnya sudah diwajibkan dari Kemendikbudristek.

“Padahal di Kemendikbud wajib tapi masyarakat sipil minta laporan dana BOS susah apalagi dipublikasikan,” ucap Ubaid.***

Editor: Dicky Aditya

Sumber: <https://www.koran-gala.id/gala-edu/pr-5876359679/terbanyak-di-tahun-2022-guru-jadi-pelaku-kekerasan-di-sekolah>

TAHUN 2023

Implementasi Kurikulum Merdeka Dikhawatirkan Terganggu



Ilham Pratama Putra · 02 Januari 2023 20:39

Ilustrasi sekolah. Medcom.id

Jakarta: Arah kebijakan pendidikan Indonesia diprediksi akan mengalami gangguan memasuki tahun politik. Salah satu kebijakan yang diprediksi terganggu ialah implementasi Kurikulum Merdeka.

“2023 itu tahun politik, tidak ada tanda-tanda Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar itu berjalan baik di sekolah,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji dikutip dari siaran Instagram @sahabatjpji, Senin, 2 Januari 2023.

Dia menilai pemerintah tak memiliki data konkret mengenai implementasi Kurikulum Merdeka. Pemerintah cuma memiliki data soal sudah jumlah sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka.

“Hanya ada data berapa sekolah yang menerapkan kurikulum itu, berapa gurunya yang sudah dilatih, sudah berapa guru penggerak. Tapi apakah efektif, ada perubahan, itu belum ada,” tutur Ubaid.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menawarkan sekolah sukarela menerapkan Kurikulum Merdeka. Sekolah bisa mendaftar untuk mendapat pendampingan dalam menerapkan kurikulum tersebut.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Anindito Aditomo (Nino) mengatakan saat ini semakin banyak sekolah yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka. Pada 2022, lebih dari 140 ribu sekolah mendaftarkan diri menerapkan Kurikulum Merdeka.

“Sudah ada lebih dari 140 ribu satuan pendidikan yang secara sukarela mulai berproses menerapkan Kurikulum Merdeka pada Tahun 2022/2023 ini. Ini menunjukkan antusiasme besar dari ekosistem pendidikan untuk melakukan perbaikan pembelajaran,” kata Nino kepada Medcom.id, Kamis, 29 Desember 2022.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/PNgwMQLN-implementasi-kurikulum-merdeka-dikhawatirkan-terganggu>

Sepanjang 2022, Pelaku Kekerasan Seksual di Sekolah Didominasi oleh Guru



Syifa Arrahmah Selasa, 3 Januari 2023 | 18:00 WIB

Ilustrasi kekerasan seksual.

Jakarta, NU Online Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, sepanjang tahun 2022, guru menjadi mayoritas pelaku kekerasan di sekolah dengan jumlah 117 kasus. Jika dilihat dari pelaku dan korban kekerasan, hanya 77 kasus kekerasan seksual yang pelakunya adalah peserta didik.

“Korban peserta didik 185 kasus, sementara guru mayoritas menjadi pelaku sebanyak 117 kasus. Artinya, yang menjadi korban kebanyakan adalah peserta didik dan yang menjadi pelaku adalah guru,” terang Ubaid, dalam keterangan yang diterima NU Online, Selasa (3/1/2022).

Ia membeberkan bahwa sebanyak 105 kasus kekerasan yang terjadi di sekolah adalah kekerasan seksual. Sementara kekerasan fisik sebanyak 65 kasus dan non fisik 24 kasus. Jumlah tersebut didapat JPPI berdasarkan laporan dari masyarakat dan media massa.

Lebih lanjut ia juga mengatakan penerapan Undang-Undang pencegahan kekerasan seksual menjadi tugas yang masih harus di pantau karena kekerasan seksual banyak terjadi tidak hanya di sekolah namun banyak juga terjadi di lembaga pendidikan Islam, pesantren.

“Ada undang-undang pencegahan kekerasan seksual dan yang dibuat Kementerian Agama (Kemenag) RI juga ada, itu masih menjadi PR besar dan juga pada kepala sekolah, madrasah dan banyak juga kasus-kasus seksual di pesantren,” katanya. Seperti diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) RI mengeluarkan peraturan khusus sebagai langkah tegas untuk menangani

dan mencegah kasus kekerasan seksual di lingkup sekolah. Tujuan dibuatnya peraturan ini untuk menangani kasus kekerasan seksual yang terus terjadi hingga saat ini.

Peraturan Menteri Agama (PMA) ini disahkan oleh Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas pada 5 Oktober 2022 dan mulai diundangkan sehari setelahnya. Dengan adanya PMA Nomor 73 tahun 2022 diharapkan kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan dapat menurun drastis atau bahkan tak ada sama sekali.

Secara umum, berdasarkan laporan Komnas Perempuan pada Januari-November 2022 tercatat 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal.

Pewarta: Syifa Arrahmah Editor: Aiz Luthfi

Sumber: <https://www.nu.or.id/nasional/sepanjang-2022-pelaku-kekerasan-seksual-di-sekolah-didominasi-oleh-guru-wOKWU>

Polisi Cirebon tangkap enam pelaku tawuran manfaatkan medsos



Selasa, 25 Januari 2022 18:38 WIB

Tersangka tawuran saat ditunjukkan kepada awak media di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). AN-TARA/Khaerul Izzan

Cirebon (ANTARA) - Kepolisian Resor Cirebon Kota menangkap enam pelaku tawuran yang mengakibatkan korbannya luka-luka setelah mendapat beberapa sabetan senjata tajam, dan mereka melakukan aksinya dengan memanfaatkan media sosial untuk saling menantang

“Tersangka tawuran yang kita tangkap ada enam orang, ini baru satu kelompok, karena melakukan penganiayaan,” kata Kepala Polres Cirebon Kota, AKBP Fahri Siregar, di Cirebon, Selasa.

Ia mengatakan keenam tersangka yang ditangkap yaitu Marfin, Hafid, Umam, Slamet, Azis, dan Haryanto, yang mengeroyok korbannya. Tawuran terjadi setelah korban yang bernama Su’ambar menantang kelompok para tersangka melalui media sosial.

Setelah beberapa kali melayangkan tantangannya para tersangka ini baru merespons, dengan mengajak tawuran di salah satu tempat di Cirebon. “Kejadian itu terjadi pada Minggu (23/1) sekitar jam 02.00 WIB dinihari,” katanya.

Ia melanjutkan setelah bertemu di tempat yang telah disepakati, kemudian kelompok korban melarikan diri, selanjutnya para tersangka mengejar.

Setelah itu, kata dia, dari keterangan tersangka korban turun dari motor sambil mengayunkan celurit ke arah tersangka, namun berhasil ditangkis dan terjadilah perkelahian. “Korban kalah, sehingga langsung dikeroyok para pelaku,” katanya.

Akibat pengeroyokan itu korban mengalami luka bacok di beberapa anggota tubuh, bahkan korban mendapatkan jahitan sebanyak 100 lebih. “Korban mendapatkan jahitan sebanyak 100 lebih, karena luka cukup parah,” ujarnya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ade P Marboen

Sumber: <https://www.antaraneews.com/berita/2664465/polisi-cirebon-tangkap-enam-pelaku-tawuran-manfaatkan-medsos>

JPPI: Rapor Pendidikan Indonesia 2022 Mendapat Skor 1,6



Ilham Pratama Putra · 04 Januari 2023 16:42

Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memberikan skor 1,6 untuk Rapor Pendidikan Indonesia pada 2022. Adapun pemberian skor dari JPPI berskala 1-5.

“Skor 1,6 ini bukan skor halusinasi kita kumpulkan dari focus grup discussion di beberapa daerah Jabodetabek hingga Jawa Tengah,» kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matriaji dalam siaran Instagram @sahabatjppi dikutip Rabu, 4 Januari 2023.

Ubaid menjelaskan JPPI membuat lima dimensi penilaian, yakni governance, availability, accessibility, acceptability, dan adaptability. Adapun, setiap dimensi ditentukan sejumlah indikator penilaian. Dia menuturkan pada dimensi governance, indikator transparansi mendapat nilai 1 dan indikator partisipasi diberikan nilai 1. Ubaid menyebut nilai 1 diberikan karena masih banyak kasus korupsi dan banyak komite sekolah tidak berfungsi.

Dimensi kedua, availability. Ubaid menyebut indikator penilaian ialah ketersediaan sekolah dan guru berkualitas. Masing-masing indikator mendapat skor 2. “Skor itu diberikan karena masih minimnya sekolah negeri dan hasil uji kompetensi guru yang masih buruk,” ujar dia.

Selanjutnya, pada dimensi accessibility, terdapat indikator biaya sekolah dengan skor 2 dan angka partisipasi kasar mendapat skor 3. Kemudian, pada dimensi acceptability, terdapat indikator output pembelajaran dan lingkungan dengan skor masing-masing 1.

Terakhir, dimensi adaptability dengan indikator difabel mendapat skor 2 dan indikator pekerja anak dengan skor 1. Skor diberikan karena masih minimnya akses sekolah ramah difabel dan meningkatnya anak putus sekolah dan menjadi pekerja.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/dN6a1dQK-jppi-rapor-pendidikan>

Gaet ASPBAE, JPPI Adakan Capacity Building and Learning Collaborative Bersama Jaringan



NURI FARIKHATIN

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) gelar kegiatan Workshop bertajuk Capacity Building and Learning Collaborative di Kantor JPPI Cililitan, Jakarta Timur, 16-18 Januari 2023.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti oleh anggota jaringan yang dipandu langsung oleh Koordinator Kebijakan Advokasi Regional ASPBAE, Cecilia (thea) V. Soriani.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat institusi serta keberlanjutan lembaga.

Koordinator Nasional JPPI, Abdullah Ubaid Matraji menyampaikan harapannya bahwa program capacity building ini agar tidak hanya dirasakan oleh Sekretariat Nasional Koalisi tetapi juga bagi seluruh anggota JPPI.

“Sustainability kelembagaan menjadi sangat penting, untuk itu diperlukan fundraising dan juga resource mobilization, maka di kegiatan ini kita saling sharing pengalaman bagaimana masing-masing lembaga mengelola pendanaan dan kegiatan,” kata Ubaid.

Adapun materi-materi yang dibahas dalam kegiatan tersebut adalah terkait pemetaan donor internasional yang meliputi inti permasalahan pendidikan saat ini dan ke depan, mengidentifikasi donor internasional, bagaimana cara untuk melibatkan diri serta peluang Indonesia untuk mengaksesnya.

Selain itu dalam workshop juga dibekali materi terkait keterampilan menulis proposal seperti bagaimana menganalisis masalah dalam konteks negara, desain ToC/ Logframe, cara merumuskan tujuan dan hasil, serta bagaimana strategi dan pendekatannya.

Sumber: <https://new-indonesia.org/gaet-aspsbae-jppi-adakan-capacity-building-and-learning-collaborative-bersama-jaringan/>

JPPI : Selama Tahun 2022, Guru Menjadi Pelaku Kekerasan Terbanyak di Sekolah



Antara

Minggu, 01 Januari 2023 | 16:00 WIB

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji/Antara

JAKARTA, iNewsKarawang.id - Dalam konferensi pers Refleksi Akhir Tahun dan Outlook Pendidikan 2023 dikutip dari Antara, Minggu (1/1/2023), Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, selama tahun 2022, guru menjadi mayoritas pelaku kekerasan di sekolah dengan jumlah 117 kasus.

Menurut Ubaid Matraji, kalau dilihat dari pelaku dan korban kekerasan, peserta didik menjadi pelaku sedikit cuma 77 kasus. “Korban peserta didik 185 kasus, sementara guru mayoritas menjadi pelaku sebanyak 117 kasus. Artinya, yang menjadi korban kebanyakan adalah peserta didik dan yang menjadi pelaku adalah guru,” tuturnya.

Ia menambahkan kekerasan yang terjadi di sekolah tercatat sebanyak 105 kasus adalah kekerasan seksual.

Sementara kekerasan fisik sebanyak 65 kasus dan non fisik 24 kasus. Jumlah tersebut didapat JPPI berdasarkan laporan dari masyarakat dan media massa.

Ubaid juga mengatakan penerapan Undang-Undang pencegahan kekerasan seksual menjadi tugas yang masih harus di pantau karena kekerasan seksual banyak terjadi tidak hanya di sekolah namun banyak juga terjadi di pesantren.

“Ada undang-undang pencegahan kekerasan seksual dan yang dibuat Kementerian Agama juga

ada, itu masih menjadi PR besar dan juga pada kepala sekolah, madrasah dan banyak juga kasus-kasus seksual di pesantren,” ucapnya.

Selain tentang isu kekerasan di sekolah, Ubaid juga menyoroti penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang banyak dilakukan guru maupun kepala sekolah yang seharusnya menjadi teladan bagi lingkungan di sekolahnya.

“Karena yang melakukan ini adalah guru, bendahara, kepala sekolah. Mereka adalah yang harusnya menjadi teladan di lingkungan sekolah tapi nyatanya mereka menumbuhkan iklim atau suasana yg tidak baik,” ucap Ubaid.

Ia menilai dana bantuan tersebut banyak disalahgunakan terkait pengadaan infrastruktur, barang dan jasa non infrastruktur atau semacam konsultan dan pungutan liar atau pungli yang juga masih marak terjadi di lingkungan sekolah

Ubaid mengatakan hal itu terjadi karena pihak komite sekolah tidak pernah dilibatkan secara langsung untuk publikasi dana bantuan yang seharusnya sudah diwajibkan dari Kemendikbudristek.

“Padahal di Kemendikbud wajib tapi masyarakat sipil minta laporan dana BOS susah apalagi dipublikasikan,” ucap Ubaid.

Untuk itu ia berharap tahun 2023 mendatang ada perubahan tata kelola dana BOS dan pihak komite sekolah dilibatkan dalam transparansi aliran dana untuk kebutuhan sekolah.

Editor : Bobby

Sumber: <https://karawang.inews.id/read/233263/jppi-selama-tahun-2022-guru-menjadi-pelaku-ke-kerasan-terbanyak-di-sekolah>

Perppu Cipta Kerja Kembali Digugat di Mahkamah Konstitusi



Jumat, 27 Januari 2023 / 14:11 WIB

Perwakilan Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) mendaftarkan gugatan Perppu Cipta Kerja di MK.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Polemik terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) Cipta Kerja masih berlanjut.

Bahkan, Perppu ini kembali digugat oleh organisasi masyarakat yaitu Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut, Kuasa Hukum KEPAL, Putra Rezeki Simatupang, penerbitan Perppu No. 2 tahun 2022 ini merupakan pelanggaran fatal dalam perkara pengujian formil UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK pada tahun 2021 lalu.

Dalam putusan MK jelas menyatakan bahwa UU Cipta kerja harus diperbaiki selama 2 tahun, namun pemerintah Indonesia justru mencari jalan pintas melalui penerbitan Perppu.

“Penerbitan perppu itu jika ada keadaan yang memaksa. Namun ini tidak ada keadaan yang memaksa artinya sebetulnya pemerintah wajib untuk diperbaiki bukan malah membuat perppu,” kata Putra saat dijumpai di Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Jumat (27/1).

Dengan demikian, menurutnya penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak memenuhi syarat ihwal “kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945, dan tidak didasarkan pada asas kejelasan rumusan dan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada

Pasal 5 huruf f dan Pasal 6 Ayat (1) huruf I UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh karenanya, KEPAL meminta kepada MK untuk membatalkan Perppu Cipta Kerja ini. “MK harus membuat dobrakan. Dengan adanya Perppu ini saja sama artinya MK mengintervensi keputusan ya sendiri, dan ini sangat bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia,” terangnya.

Selanjutnya, Perwakilan KEPAL, Gunawan menyebutkan adanya Perppu Cipta Kerja akan memantik hilangnya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

Gunawan mengatakan adanya Perppu ini akan berdampak langsung kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti permasalahan upah dan PHK massal buruh, penyelesaian kawasan kebun dan tambang di kawasan hutan, impor pangan, penanaman modal asing di pertanian holtikultura, akses nelayan ke wilayah pengelolaan perikanan, *food estate*, Bank Tanah, dan hambatan bagi reforma agraria.

“Kita meminta MK bersikap kepada Perpu Cipta Kerja karena menurut kami Perppu ini tidak sesuai dengan standar atau Indikator berdasarkan putusan MK,” terang Gunawan.

“KEPAL ingin mengingatkan kembali kepada MK untuk membuka kembali persidangan, dan memberikan jawaban resmi terkait Pengaduan Konstitusional,” tambah Gunawan.

Adapun para pengadu yang tergabung dalam KEPAL diantaranya adalah Aliansi Organisasi Indonesia (AOI), Aliansi Petani Indonesia (API), Bina Desa, FIAN Indonesia, FIELD Indonesia (Yayasan Daun Bendera Nusantara).

Selanjutnya, IHCS Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Indonesia for Global Justice (IGJ), Institute for Ecosoc Rights, Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRUHA).

Kemudian, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Sawit Watch (SW), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).

Reporter: **Lailatul Anisah** | Editor: **Anna Suci Perwitasari**

Sumber: <https://nasional.kontan.co.id/news/perppu-cipta-kerja-kembali-digugat-di-mahkamah-konstitusi>

Mantan Pengurus JPPI Nailul Faroq Masuk Politik Praktis



Laporan: Hendrik Sugara

Selasa, 28 Februari, 2023 / 09:47 WIB

Mantan kordinator advokasi dan investigasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ahmad Nailul Faroq

MONITOR, Gresik – Mantan kordinator advokasi dan investigasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ahmad Nailul Faroq memilih terjun ke dunia politik praktis dan berencana maju sebagai calon anggota DPRD Gresik pada Pileg Tahun 2024. Menurutnya, dengan masuk ke parlemen dirinya berharap bisa berperan lebih dalam melakukan pembenahan pendidikan.

“Agar apa yang saya inginkan bisa terealisasi, maka harus terjun langsung kedalam politik praktis. Salah satunya dengan menjadi anggota legislatif, sebab di gedung parlemen itulah saya bisa tuangkan ide atau gagasan yang selama ini hanya sebagai wacana saja,” Kata Nailul melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (28/2).

“Jika nantinya saya berkesempatan menjadi anggota DPRD Gresik, pertama saya ingin melakukan penataan disektor pendidikan. Karena jika pendidikan disuatu daerah itu bagus secara kualitas, tentu akan berimbas positif pada sektor lainnya,” Tambahnya.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan lanjut Nailul, ada beberapa variabel yang harus dilakukan pemerintah daerah. Yakni, sumber daya manusia (SDM) para pendidik (guru) harus yang mumpuni, sarana prasarana pendidikan yang mendukung dan memadai sesuai dengan

kebutuhan.

“Kalau saya mengkaji dari sisi anggaran pendidikan, di rata-rata daerah ada sekitar 70 hingga 80 persen habis untuk pegawai saja. Sedangkan, anggaran untuk kapasitas building atau peningkatan kualitas justru sangat kecil. Tentu model kebijakan seperti itu harus diubah, dengan lebih menekankan pola perbaikan lewat program-program peningkatan mutu pendidikan yang tepat,” tegasnya.

Gagasan yang disampaikan Nailul, bukan tanpa alasan. Sebab di tahun 2017, dirinya pernah terlibat di JPPI dengan menjadi koordinator tim advokasi akselerasi akses pendidikan berkualitas di 4 kabupaten/kota (Malang, Tangsel, Bintan dan Maros). Selain itu, tahun 2018 pernah berpartisipasi dalam riset bersama 13 negara dalam forum RTEI (Right to Education Indeks) soal indeks kualitas pendidikan di 13 negara.

“Dari pengalaman-pengalaman tersebut, yang ingin saya implementasikan ketika mendapat kesempatan sebagai wakil rakyat nantinya sebagai bentuk ikhtiar untuk turut serta meningkatkan kualitas pendidikan di Gresik” pungkasnya.

Pria yang biasa disapa Cak Nailul ini, merupakan seorang intelektual yang aktif di sejumlah organisasi ternama di Indonesia. Namun, ia lebih konsen dalam membuat gagasan atau ide khususnya terkait dunia pendidikan.

Untuk mewujudkan niatannya itu, ia memantapkan diri terjun ke dunia politik praktis dengan mendaftar sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) pada Pemilu 2024 melalui PKB Kabupaten Gresik, Jawa Timur, di Dapil 1 Gresik – Kebomas.

Sumber: <https://monitor.co.id/2023/02/28/mantan-pengurus-jppi-nailul-faroq-masuk-politik-praktis/>

Gen Z Tak Terkendali, Kekerasan Semakin Sadis



Ilham Pratama Putra · 28 Februari 2023 09:38

Ilustrasi kekerasan anak. Medcom

Jakarta: Kekerasan antar pelajar kian marak. Terakhir, kasus penganiayaan oleh Mario Dandy Satriyo terhadap Cristalino David Ozora.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebut fenomena Dandy-David cermin kasus kekerasan pada generasi Z. Dia menyebut kekerasan pada gen Z semakin sadis.

“Saya melihatnya sekarang ini semakin ekstrem, sadis. Selain itu banyak juga yang terpapar paham-paham ekstremisme-radikalisme,” kata Ubaid kepada Medcom.id, Selasa, 28 Februari 2023. Ubaid menuturkan gen Z berbeda dengan generasi sebelumnya. Gen Z lebih sulit dikontrol. “Kalau dulu perilaku anak masih bisa dipantau dan terkontrol, tapi kini anak-anak generasi Z ini enggak ada yang bisa kendalikan mereka. Karena dunia mereka ada di genggaman,” ujar Ubaid.

Dia mengatakan arus informasi dan teknologi saat ini menjadi sentral. Bahkan, mendistraksi perilaku gen Z. “Jadi, lebih banyak distraksi yang bisa memperparah perilaku,” tutur dia.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/JKRv7OwK-gen-z-tak-terkendali-ke-kerasan-semakin-sadis>

Pelindo Regional 2 Jambi Beri Himbauan tumbuhkan Kesadaran akan Pentingnya K3\



Editor: Setya Novanto|

Kamis 09-02-2023,05:42 WIB

Pelindo Regional 2 Jambi mengadakan upacara peringatan Bulan K3 Nasional yang dihadiri oleh segenap karyawan Pelindo Group (Cabang, dan anak Perusahaan) serta petugas pengamanan, bertempat di halaman Kantor Pelindo Regional 2 Jambi.--

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tahun 2023 yang berlangsung dari tanggal 12 Januari hingga 12 Februari 2023,

Pelindo Regional 2 Jambi menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan tema “Peran Pelindo Regional 2 Jambi demi terwujudnya Pekerjaan Layak yang Berbudaya K3 Guna Mendukung Keberlangsungan Usaha di Tempat Kerja”.

Pelindo Regional 2 Jambi mengadakan upacara peringatan Bulan K3 Nasional yang dihadiri oleh segenap karyawan Pelindo Group (Cabang, dan anak Perusahaan) serta petugas pengamanan, bertempat di halaman Kantor Pelindo Regional 2 Jambi.

General Manager Pelindo Regional 2 Jambi, Ahmad Fahmi mengungkapkan sesuai arahan Regional Head 2 agar terus menghimbau kepada seluruh Pelindo Group baik Cabang, dan Anak Perusahaan (IPC TPK PTP, MTI, JPPI) di Lingkungan PT Pelindo Regional 2 Jambi untuk berperan aktif untuk menciptakan lingkungan Kerja yang berstandar K3 yang baik.

“K3 bukan tanggung jawab dari bagian HSSE di Cabang maupun Anak Perusahaan tapi merupakan tanggung jawab setiap individu, maka diharapkan kesadaran dari masing-masing individu untuk berperan aktif menjaga K3 di lingkungan kerjanya masing-masing, perlu dipahami Bersama penyebab kecelakaan kerja ada 2 faktor penyebab yaitu, Unsafe Action (aksi atau kegiatan tidak

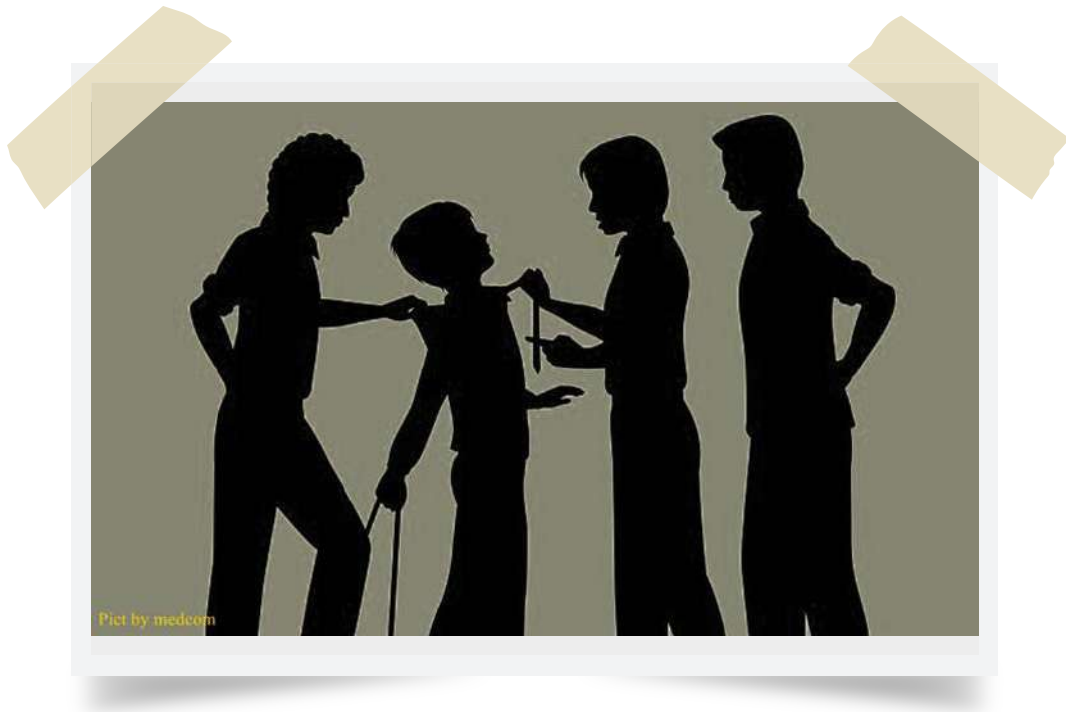
aman) dan Unsafe Condition (kondisi tidak aman, red),” tegas Fahmi Rabu (8/2).

Manajemen PT Pelindo (Persero) telah melakukan beberapa program kerja terkait K3 dalam meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja seperti Management Walkthrough (MWT), HSSE Talk, Peningkatan Awerenes K3.

“Setelah Apel Peringatan Bulan K3 Nasional, para Manajemen Pelindo Regional Jambi melakukan kegiatan meninjau tempat kerja Anak Perusahaan yang berada di Lingkungan Pelindo Regional 2 Jambi,” tandasnya. (*)

Sumber: <https://jambiekspres.disway.id/read/657273/pelindo-regional-2-jambi-beri-himbauan-tumbuhkan-kesadaran-akan-pentingnya-k3>

Kekerasan di Sekolah, JPPI Sebut Rendahnya Keteladanan Guru Ikut Memperparah



Redaksi-Berita Nasional-

1 Maret 2023

Ilustrasi kekerasan di sekolah. Dok Medcom

Jakarta – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebut maraknya kekerasan antar pelajar akhir-akhir ini disebabkan tak berjalannya pendidikan karakter.

Bahkan, Ubaid menilai terjadi gagal paham pendidikan karakter di sekolah. Dia mengatakan hal itu tak terlepas dari sikap guru. Ubaid menilai guru turut menjadi aktor dari maraknya kekerasan antar pelajar.

“Ya gurunya, ya peserta didiknya, sama-sama punya cermin buruk. Kasus kekerasan di sekolah ini dipraktikkan oleh guru dan murid, termasuk kekerasan seksual guru juga jadi aktor,” kata Ubaid dilansir Medcom.id, Selasa (28/2).

Ubaid menyebut pendekatan kekerasan dalam dunia pendidikan masih dipraktikkan di mana-mana. Hal ini diperparah rendahnya keteladanan guru menjadi faktor gagalnya pendidikan karakter di sekolah.

“Meski pendidikan karakter ini menjadi jargon Presiden Jokowi, tapi Kemdikbud dan dinas

pendidikan tidak menjadikan sebagai prioritas,” tuturnya.

Ubaid menuturkan survei JPPI menunjukkan guru menjadi pelaku kekerasan paling banyak di sekolah. Jumlahnya mencapai 117 kasus selama 2022.

“Kalau dilihat dari pelaku dan korban kekerasan, peserta didik menjadi pelaku sedikit cuma 77 kasus sementara korban peserta didik 185 kasus, sementara guru mayoritas menjadi pelaku sebanyak 117 kasus,” ucap dia.

Sumber: <https://warta-pendidikan.com/2023/03/01/kekerasan-di-sekolah-jppi-sebut-rendahnya-keteladanan-guru-ikut-memperparah/>

Masuk Sekolah Jam 5 Pagi Seperti Kebijakan Wangsit dari Langit



Ilham Pratama Putra · 02 Maret 2023 11:35

Ribuan siswa datang telat imbas kebijakan masuk sekolah pukul 05.00 di Kota Kupang, NTT yang dimulai hari ini, Selasa (28/2/2023). (MI/Palce Amalo)

Jakarta: Kebijakan masuk sekolah pukul 05.00 WITA di Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai polemik di masyarakat. Kebijakan itu dinilai hadir atas wangsit dari langit.

“Pemerintah bikin kebijakan seperti mendapatkan wangsit dari langit,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji kepada *Medcom.id*, Kamis, 2 Maret 2023.

Ubaid mengatakan suatu kebijakan mestinya hadir melalui kajian mendalam. Dia menilai kebijakan yang dibuat Pemerintah Provinsi NTT justru menjadi cermin buruk pendidikan. “Parah ini. Ini cermin buruk pengelolaan pendidikan di daerah,” ujar dia.

Ubaid mengatakan kebijakan masuk sekolah jam 05.00 pagi tidak akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Malah, bakal terjadi penurunan kualitas SDM. “Jelas enggak akan efektif dan yang terjadi justru penurunan kualitas SDM,” tutur dia.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/8N0xgEMN-masuk-sekolah-jam-5-pagi-seperti-kebijakan-wangsit-dari-langit>

JPPI Dorong Kejaksaan Usut Tuntas Korupsi di Unud



Dimas Ryandi

- Jumat, 31 Maret 2023 | 19:18 WIB

Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali menyita ratusan dokumen terkait pengelolaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dari Gedung Rektorat Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, Badung, Bali, beberapa waktu lalu. Rolandus Nampu/Antara

JawaPos.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendukung langkah Kejaksaan dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru Universitas Udayana (SPI maba Unud) jalur mandiri 2018-2022. Bahkan, mendorong kasus ini menjadi prioritas Korps Adhyaksa.

“(Penanganan kasus korupsi dana SPI Unud) harus prioritas dan akar masalahnya diurai, lalu harus ada perubahan kebijakan supaya tidak kembali terulang,” kata Koordinator Nasional (Koornas) JPPI, Ubaid Matraji, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (31/3).

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali telah menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi dana SPI Unud. Mereka adalah Rektor I Nyoman Gde Antara dan tiga staf rektorat, yakni I Ketut Budiartawan, I Made Yusnantara, dan Nyoman Putra Sastra.

Dalam kasus ini, I Nyoman Gde Antara disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dia terancam hukuman 20 tahun penjara.

Kendati belum ditahan, I Nyoman Gde Antara telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan per 28 Maret 2023. Pencekalan juga dikenakan kepada bekas Rektor Unud, AA Raka Sudewi, yang sementara baru berstatus saksi.

Akibat perbuatan para tersangka, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp 109,33 miliar. Pun merugikan perekonomian negara Rp 334,75 miliar.

Di sisi lain, Kejati Bali kini tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam mengusut kasus tersebut. Kejaksaan pun menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengusut TPPU.

JPPI pun mendukung langkah kejaksaan tersebut. “Ya, harus, itu sesuai prosedur hukum, harus ditegakkan,” kata Ubaid.

Editor: Dimas Ryandi

Sumber: <https://www.jawapos.com/kasuistika/01445444/jppi-dorong-kejaksaan-usut-tuntas-korupsi-di-unud>

Dugaan korupsi Rektor Unud: Sistem seleksi jalur mandiri ‘belum cukup dibenahi’, uang pangkal ‘rawan dikorupsi’



16 Maret 2023

SUMBER GAMBAR, ANTARA FOTO

Pemerintah kembali didesak mengevaluasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri, setelah Rektor Universitas Udayana I Nyoman Gde Antara ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI), yang juga dikenal dengan istilah “uang pangkal”.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan kasus ini lagi-lagi membuktikan sistem seleksi jalur mandiri yang “bermasalah, belum cukup dibenahi dan masih rawan korupsi”.

Kejaksaan Tinggi Bali menyatakan bahwa Antara telah memungut SPI “tanpa dasar” dan menggunakan dana SPI “tidak sesuai dengan ketentuan” sehingga merugikan negara sebesar Rp443,9 miliar.

Padahal menurut JPPI, desakan masyarakat untuk mengevaluasi bahkan menghapus seleksi jalur mandiri sudah disuarakan sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Rektor Universitas Negeri Lampung (Unila) Karomani karena menerima suap sebesar Rp5 miliar.

“Enggak ada evaluasi signifikan meski kami sudah minta [jalur mandiri] dihapus. Tanggapan [pemerintah] waktu itu akan memperkuat audit dan pengawasan, tapi yang namanya pengawasan

internal ya pasti tidak mengawasi, pasti ada konflik kepentingannya,” kata Ubaid kepada BBC News Indonesia, Rabu (15/3).

ang menjadi landasan regulasi saat ini pun “masih memberi peluang terjadinya korupsi”. Padahal aturan itu dibentuk sebagai evaluasi pasca-kasus yang terungkap di Unila.

Sedangkan kasus yang terjadi di Unud, kata dia, menggambarkan bagaimana seorang rektor “diberi kekuasaan terlalu besar” dalam proses seleksi jalur mandiri, mulai dari membentuk tim seleksi hingga menentukan nilai uang pangkal tanpa dasar perhitungan yang jelas.

“Jadi nilai SPI misalnya, suka-suka rektornya saja. Di Permendikbud, itu [perhitungannya] diserahkan ke internal perguruan tinggi,” kata Doni ketika dihubungi, Rabu (15/3).

“Aturannya itu yang ternyata memberi peluang begitu besar untuk dikorupsi dan tidak ada mekanisme kontrolnya,” sambung dia.

Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1vq5w732ndo>

Sekolah Jam 5 Pagi Disebut Bikin SDM Unggul, Pengamat: Malah Penurunan



Ilham Pratama Putra · 02 Maret 2023 10:00

Pelajar sekolah menengah atas mengikuti apel pagi pada awal pelaksanaan kegiatan sekolah mulai pukul 05.30 WITA di SMA Negeri I Kupang di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 1 Maret 2023. ANT/Kornelis Kaha

Jakarta: Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat menyebut kebijakan masuk sekolah jam 05.00 pagi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai sebaliknya. “Jelas enggak akan efektif dan yang terjadi justru penurunan kualitas SDM,” tutur Ubaid kepada *Medcom.id*, Kamis, 2 Maret 2023.

Ubaid menilai kebijakan masuk sekolah jam 05.00 pagi tak masuk akal. Bahkan, menjadi cermin buruk pengelolaan pendidikan.

“Parah ini. Ini cermin buruk pengelolaan pendidikan di daerah,» tutur dia.

Dia menyebut pemda tak memikirkan dampak terhadap siswa. Mulai dari waktu sarapan hingga waktu keberangkatan sekolah.

“Kalau jam 05.00 masuk sekolah, sarapannya jam berapa? Masaknya jam berapa? Jadi, pemenuhan gizinya pasti buruk,” tutur Ubaid.

Sumber: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/aNr064ak-sekolah-jam-5-pagi-disebut-bikin-sdm-unggul-pengamat-malah-penurunan>

JPPI Berikan Komentar Tajam Terkait Kebijakan Sekolah Pukul 5 Pagi di NTT



Riana Rizkia, MNC Portal · Rabu 01 Maret 2023 17:32 WIB

Ilustrasi/Freepik

JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memberikan komentar tajam terkait kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat tentang jadwal masuk siswa SMA/SMK pada pukul 05.00 WITA.

Ubaid Matraji selaku Koordinator Nasional JPPI mengatakan bahwa “Pasti tidak akan efektif. Sebaiknya distop jangan dijalankan, karena kasian peserta didik, mereka akan jadi korban kebijakan pendidikan yang berdampak pada kebodohan masal,” kata Ubaid Matraji kepada MNC Portal, Rabu (1/3/2023).

Ubaid juga mempertanyakan antara pendidikan karakter dengan jam masuk sekolah. Menurutnya, tidak ada kolerasi antara tujuan dengan kebijakan. “Apa hubungannya masuk jam 5 dengan pendidikan karakter? Kalo disiplin kan soal manajemen waktu, bukan soal jam,” katanya.

“Jauh api dari panggang, apa yg menjadi kebutuhan dengan strategi kebijakan ga nyambung,” sambungnya.

Ubaid juga menyoroti asupan gizi peserta didik. Ia pun membayangkan dengan kebijakan sekolah masuk pukul 5 pagi, maka siswa harus bangun pukul berapa untuk sarapan. “Kalau berangkat jam 5 misalnya, sarapannya jam berapa? Asupan gizi ini penting tapi diabaikan,” katanya.

“Itu kebijakan ngawur dan menyesatkan ya,” sambungnya

Sumber: <https://edukasi.okezone.com/read/2023/03/01/624/2773578/jppi-berikan-komentar-tajam-terkait-kebijakan-sekolah-pukul-5-pagi-di-ntt?page=2>

Ubaid Matraji: Masuk Sekolah Jam 5 Pagi Seperti Kebijakan Wangsit dari Langit



NURI FARIKHATIN

Jakarta: Kebijakan masuk sekolah pukul 05.00 WITA di Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai polemik di masyarakat. Kebijakan itu dinilai hadir atas wangsit dari langit.

“Pemerintah bikin kebijakan seperti mendapatkan wangsit dari langit,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji kepada media, Kamis, 2 Maret 2023.

Ubaid mengatakan suatu kebijakan mestinya hadir melalui kajian mendalam. Dia menilai kebijakan yang dibuat Pemerintah Provinsi NTT justru menjadi cermin buruk pendidikan. “Parah ini. Ini cermin buruk pengelolaan pendidikan di daerah,” ujar dia.

Ubaid mengatakan kebijakan masuk sekolah jam 05.00 pagi tidak akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Malah, bakal terjadi penurunan kualitas SDM.

“Jelas enggak akan efektif dan yang terjadi justru penurunan kualitas SDM,” tutur dia

Sumber : <https://new-indonesia.org/ubaid-matraji-masuk-sekolah-jam-5-pagi-seperti-kebijakan-wangsit-dari-langit/>

JPPI Dukung Usut Tuntas Kasus SPI Unud



Sabtu, 1 April 2023 | 16:03 WIB

Hari Puspita

BARANG BUKTI: Tim Jaksa Kejati Bali saat melakukan penyitaan sejumlah dokumen di Kampus Unud, Jimbaran, terkait dugaan korupsi Sumbangan Pengembangan Istitusi (SPI) beberapa waktu lalu. (foto :istimewa).

RadarBali.id- Dukungan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru Universitas Udayana (SPI maba Unud) jalur mandiri 2018-2022 bermunculan. Kali ini dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

JPPI mendukung langkah Kejaksaan dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana Sumbangan Pengembangan Institusi mahasiswa baru Universitas Udayana (SPI maba Unud) jalur mandiri 2018-2022. Bahkan, mendorong kasus ini menjadi prioritas Korps Adhyaksa.

“(Penanganan kasus korupsi dana SPI Unud) harus prioritas dan akar masalahnya diurai, lalu harus ada perubahan kebijakan supaya tidak kembali terulang,” kata Koordinator Nasional (Koornas) JPPI, Ubaid Matraji, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (31/3/2023).

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali telah menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi dana SPI Unud. Mereka adalah Rektor, Prof.DR. I Nyoman Gde Antara dan tiga staf rektorat, yakni I Ketut Budiartawan, I Made Yusnantara, dan Nyoman Putra Sastra.

Dalam kasus ini, I Nyoman Gde Antara disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dia terancam hukuman 20 tahun penjara.

Kendati belum ditahan, I Nyoman Gde Antara telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri selama

6 bulan per 28 Maret 2023. Pencekalan juga dikenakan kepada bekas Rektor Unud, AA Raka Sudewi, yang sementara baru berstatus saksi.

Akibat perbuatan para tersangka, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp 109,33 miliar. Pun merugikan perekonomian negara Rp 334,75 miliar.

Di sisi lain, Kejati Bali kini tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam mengusut kasus tersebut. Kejaksaan pun menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengusut TPPU.

JPPI pun mendukung langkah kejaksaan tersebut. “Ya, harus, itu sesuai prosedur hukum, harus ditegakkan,” kata Ubaid.

Editor: Hari Puspita

Sumber: <https://radarbali.jawapos.com/nasional/70868110/jppi-dukung-usut-tuntas-kasus-spi-unud>

JPPI: *Study Tour* Sekolah Pemborosan dan Beratkan Orang Tua Siswa



JPPI sebut *study tour* sekolah jadi pemborosan dan memberatkan orang tua siswa.

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Bilal Ramadhan

Foto: Dok Republika

Polsek Buahbatu dan Polrestabes Bandung mengamankan *tour leader* berinisial ICL yang diduga membawa kabur uang sebesar Rp 368 juta dana *study tour* siswa SMAN 21 Bandung. Akibatnya, ratusan siswa tersebut gagal berangkat *study tour* ke Yogyakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengatakan, kegiatan *study tour* semestinya tidak perlu diwajibkan kepada siswa. Sebab, menurut dia, selain pemborosan dan memberatkan orang tua, sumber belajar juga tersedia banyak di sekitar sekolah.

“Sumber belajar itu banyak di sekitar sekolah. Pemborosan dan memberatkan orang tua itu agenda jalan-jalan,” ujar Ubaid kepada Republika, Kamis (25/5/2023).

Dia mengatakan, jika *study tour* tetap dipilih sekolah untuk dilakukan, maka semestinya tidak diwajibkan kepada para siswa untuk mengikutinya. Selain berpotensi sangat memberatkan, dia juga tak melihat manfaat yang jelas dari pelaksanaan *study tour*.

“Tidak perlu wajib karena itu sangat memberatkan dan manfaatnya juga tidak jelas buat apa,” kata dia.

Terkait kasus penipuan uang *study tour* SMAN 21 Bandung, Jawa Barat, menurut dia hal itu jelas merugikan dan semestinya harus direncanakan secara matang serta tak memberatkan semua

pihak. Jika memang ternyata study tour di sekolah tersebut diwajibkan, maka dapat diduga hal tersebut merupakan tindakan pungutan liar atau pungli.

“Mesti direncanakan secara matang dan tdk memberatkan semua pihak. Jika bersiwa wajib, ini jelas pungli,” jelas Ubaid.

Gagalnya study tour **SMAN 21 Bandung** karena uang dibawa lari tour leader ICL menjadi viral di media sosial. Kepala SMAN 21 Bandung, Dani Wardani, mengatakan, kegiatan study tour ke Yogyakarta merupakan kegiatan belajar di luar kelas. Hasil dari kegiatan study tour akan menjadi bahan untuk membuat karya tulis. Dani membantah jika study tour bersifat wajib. Sebab yang wajib adalah belajar di luar kelas.

“SMAN 21 ada satu program belajar di luar kelas dan nantinya hasil dari belajar di luar kelas jadi karya tulis. Belajar di luar kelas tidak harus di tempat jauh, kemudian ada yang mis study tour wajib, yang wajib belajar di luar kelas. Tahun ini jatuh ke Yogyakarta dan ke Kampung Naga,” kata Dani, Kamis (25/5/2023).

Sebelumnya, Jajaran Polsek Buahbatu dan Polrestabes Bandung mengamankan seorang tour leader berinisial ICL (33 tahun) yang diduga membawa kabur dana siswa SMAN 21 Bandung sebesar Rp 368 juta, yang sebelumnya disebutkan Rp 400 juta, untuk kegiatan study tour pada Rabu (24/5/2023) malam.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan penyidik berhasil mengamankan ICL di kediaman orang tuanya di Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Rabu (24/5/2023). Pelaku diduga membawa kabur uang study tour siswa SMAN 21 Bandung.

“Tadi kami baru mendapatkan laporan dari Kapolsek Buahbatu, Rabu kemarin pukul 23.00 WIB malam telah diamankan tersangka berinisial ICL, dugaan tersangka kasus penipuan uang travel yang direncanakan untuk kegiatan travel anak SMAN 21 ke Yogyakarta,” ujar Budi, Kamis (25/5/2023).

Ia mengatakan penyidik masih melakukan pemeriksaan lebih mendalam serta menelusuri aliran uang digunakan untuk apa. Selain itu akan didalami motif pelaku membawa kabur uang tersebut.

“Hari ini kita lakukan pemeriksaan mendalam dulu, nanti kita telusuri uangnya ke mana saja, motifnya apa sehingga yang bersangkutan menggelapkan uang tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan hasil pemeriksaan sementara yang bersangkutan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Pelaku merupakan seorang freelance di perusahaan travel Grand Traveling Indonesia. “Pelaku ditangkap di Cilengkrang,” ujar dia.

Ia mengatakan pelaku dijerat pasal 372 dan 378 KUHPidana. Beberapa orang saksi seperti kepala sekolah, travel sudah diperiksa.

Sumber: <https://news.republika.co.id/berita/rv7sh1330/jppi-study-tour-sekolah-pemborosan-dan-beratkan-orang-tua-siswa>

Hardiknas 2023, JPPI: Jadi Momentum Refleksi Arah Pendidikan di Indonesia



Melati Tagore
Selasa, 2 Mei 2023 | 20:20 WIB

JPPI: Hardiknas Jadi Momentum Refleksi Arah Pendidikan di Indonesia

MoeslimChoice.com. Hari ini, Selasa, 2 Mei 2023 diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Sejarah Hardiknas tidak bisa dilepaskan dari sosok pahlawan Nasional RM Suwardi Suryaningrat atau yang dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara, sebagai pelopor pendidikan di Tanah Air.

Penetapan Hardiknas sebagai hari Nasional tertuang dalam keputusan Presiden (Kepres) Nomor 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959. Kendati peringatan tahunan telah berlangsung selama puluhan tahun, namun hingga saat ini, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan pemerintah, agar mutu pendidikan Indonesia semakin baik.

“Momentum Hari Pendidikan Nasional ini, mestinya kita merefleksikan arah pendidikan di Indonesia. Kami merefleksikan di Hardiknas ini kok, tampaknya arah pendidikan kita bertolak belakang dengan apa yang termaktub dalam UUD 1945,» kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, seperti dilansir dari NU Online, Selasa (2/5/2023).

“Di mana pendidikan menjadi hak seluruh warga negara Indonesia. Kalau arah pendidikan kita ini ke arah privatisasi dan komersialisasi, maka itu jauh dari maksud UUD 1945,” tambahnya. Ubaid menilai bahwa penting untuk dipahami, jika Hardiknas seharusnya dijadikan sebagai momentum untuk menghidupkan spirit mengembalikan arah pendidikan. Di mana pendidikan

adalah hak seluruh warga Indonesia.

“Supaya bisa terpenuhi, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana juga soal pembiayaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Ahmad Zuhri menilai, bahwa Hardiknas merupakan momentum bagi insan pendidikan untuk merefleksikan kembali cita-cita pendidikan Nasional, yaitu terwujudnya bangsa Indonesia yang cerdas, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur.

“Momentum ini sejatinya menjadikan pendidikan sebagai upaya liberasi atau membebaskan manusia dari belenggu kebodohan, sehingga kita terbebas dari yang namanya kebodohan dan kemiskinan. Untuk melepaskan kerangkeng kebodohan dan kemiskinan adalah pendidikan. Spirit liberasi ini menjadikan kita optimis,” imbuh Ahmad Zuhri.

“Kita juga harus memaknai hakekat pendidikan adalah untuk mengantarkan kita semua menjadi manusia yang lebih bertakwa, beriman, dan berakhlak,” tambahnya.

Indikator kemajuan mutu pendidikan, menurut Ahmad Zuhri, bahwa pendidikan sangat berpengaruh terhadap mutu sumber daya manusia sebuah negara. Mutu pendidikan ini, lanjutnya, tidak terlepas dari kualitas tenaga pengajar. Zuhri menilai, terdapat sedikitnya tiga indikator kemajuan mutu pendidikan.

“Pertama bagaimana adanya dorongan dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas yaitu kualifikasi akademik tenaga pengajar. Ketika kapasitas guru meningkat, otomatis peserta didik juga akan semakin baik kualitasnya,” ungkapnya.

Kedua, adanya ruang yang terbuka bagi insan cendekia untuk melakukan inovasi. Artinya, kata dia, tenaga pendidik tidak dibelenggu aturan yang sifatnya mengikat kebebasan.

“Tidak dibebani dengan beban administratif,” katanya.

Sumber: <https://www.moeslimchoice.com/berita/9678646680/hardiknas-2023-jppi-jadi-momentum-refleksi-arrah-pendidikan-di-indonesia>

JPPI: Marketplace Guru Justru Bakal Memicu Masalah Baru



Aktivis JPPI menilai ide marketplace untuk guru justru akan memicu masalah baru.

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Bilal Ramadhan

Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto

Guru mengajar (ilustrasi). Aktivis JPPI menilai ide marketplace untuk guru justru akan memicu masalah baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah berencana mengembangkan platform *marketplace* atau lokapasar sebaga *talent pool* perekrutan guru aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) pada 2024 mendatang. Menyikapi hal itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai upaya tersebut justru berpotensi memicu masalah baru.

“Pasti memicu masalah baru karena bukan jaminan kepastian, tapi malah diserahkan pada mekanisme pasar,” ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji kepada *Republika*, Jumat (26/5/2023).

Ubaid menilai langkah yang tengah diupayakan pemerintah tersebut bukan sebagai langkah menyelesaikan masalah, melainkan strategi untuk lari dari tanggung jawab. Persoalan guru honorer dan seleksi guru PPPK dalam beberapa tahun terakhir memang menyisakan berbagai masalah yang belum terselesaikan.

Dia mengatakan, strategi pembuatan lokapasar itu terkesan menyerahkan nasib guru kepada mekanisme pasar. Menurut dia, pemerintah semestinya memberikan jaminan pengangkatan

yang pasti terlebih dahulu atas nasib guru-guru yang honorer yang hingga kini masih belum jelas.

“Jaminan pengangkatan yang pasti atas nasib guru-guru honorer yang hingga kini masih terluntalunta. Ini pemerintah bukan kasih kepastian, tapi diserahkan pada pasar, alias guru disuruh ‘dijual diri’ di *marketplace*,” ujar dia.

Pemerintah pusat berencana membuat lokapasar yang dipergunakan sebagai *talent pool* tenaga guru. Pembentukan lokapasar tersebut dilakukan sebagai upaya mengatasi persoalan munculnya guru honorer yang terus terjadi selama bertahun-tahun selama ini dan rencananya akan diberlakukan pada 2024 mendatang.

“*Marketplace* untuk guru adalah suatu *database* yang nanti akan didukung secara teknologi. Di mana semua sekolah dapat mengakses siapa saja sih yang bisa menjadi guru dan siapa yang saya mau undang untuk menjadi guru di sekolah saya,” ujar Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam rapat dengan Komisi X DPR RI yang disiarkan secara daring, dikutip Kamis (25/5/2023).

Sosok pendiri Gojek tersebut menjelaskan, ada dua kriteria guru yang dapat masuk ke dalam lokapasar tersebut. Pertama, guru-guru honorer yang sudah lulus nilai ambang batas untuk menjadi calon guru ASN. Kedua, guru-guru lulusan pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan, yakni guru-guru baru yang sudah lulus program PPG.

“Karena kriterianya sudah ketat, semua guru atau calon guru yang masuk ke dalam *marketplace* ini sudah berhak untuk mengajar di sekolah-sekolah kita. Jadi, calon guru ini lebih fleksibel untuk mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu lagi proses perekrutan secara terpusat,” ujar dia.

Sumber: <https://news.republika.co.id/berita/rv9878330/jppi-marketplace-guru-justru-bakal-memicu-masalah-baru>